PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KABUPATEN MAJENE

TAHUN

2025-2029

SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025– 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai Tahun 2029.
7. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah Sesuatu kondisi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di laksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), Hasil (Outcome), dampak (impact).
16. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
   a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;
   b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
   c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

(3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

(5) Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika dokumen RPJMD, meliputi:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi daerah;
   c. gambaran keuangan daerah;
   d. permasalahan dan isu strategis daerah;
   e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
   f. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
   g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
   h. kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
   i. penutup.

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah, Indikator kinerja dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 11-19/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19771015 200502 2 007

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yangmelibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa bahwa proses perencanaa mencakup lima pendekatan yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, pendekan perencanaan pembangunan juga dilaksanakan dengan pengarusutamaan pendekatan substantif yakni: pendekatan holistik- tematik, integratif, dan spasial. Pengarusutamaan ini merupakan penjabaran tema pembangunan daerah kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf u
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf *f*

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 63.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**

1.1 Latar Belakang ..... I - 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 3

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... I - 10

1. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJM Nasional..... I - 12
2. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat..... I - 14
3. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJPD Kabupaten Majene I - 14
4. RPJMD Kabupaten Majene dengan Renstra PD ..... I - 14
5. RPJMD Kabupaten Majene dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ..... I - 16
6. RPJMD Kab. Majene dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW-N, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) ..... I - 16
7. RPJMD Kab. Majene dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Majene..... I - 17
8. RPJMD Kab. Majene dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... I - 17

1.4 Maksud dan Tujuan. ..... I - 18

1.5 Sistematika penulisan ..... I - 18

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH..... II - 1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II - 74

2.3 Aspek Daya Saing Daerah..... II - 117

2.4 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 140

2.5 Gambaran Keuangan Daerah ..... II - 262

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis ..... II - 299

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... III - 1

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..... III - 1
A. Visi dan Misi ..... III - 1
B. Tujuan dan Sasaran..... III - 12
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... III - 17
A. Strategi ..... III - 17
B. Arah Kebijakan ..... III - 29
C. Prioritas Pembangunan Daerah..... III - 31

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH..... IV - 1

4.1. Program Perangkat Daerah..... IV - 1
A. Daftar Program Perangkat Daerah..... IV - 1
B. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah..... IV - 7
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah... IV - 41
A. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... IV - 41
B. Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Daerah..... IV - 43

BAB V PENUTUP ..... V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 2

Tabel 2.2. Nama-Nama Sungai Di Wilayah Kabupaten Majene Di Rinci Berdasarkan Per Kecamatan Tahun 2024 ..... II - 10

Tabel 2.3. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 12

Tabel 2.4. Kelembaban Udara Rata-Rata dan Suhu Udara Rata-Rata Di Kabupaten Majene 5 (lima) Tahun Terakhir (2020-2024) ..... II - 13

Tabel 2.5. Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 15

Tabel 2.6. Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Lahan Basah Tahun 2024 ..... II - 26

Tabel 2.7. Luas Lahan Pemanfaatan Pertanian Lahan Basah Tahun 2024 ..... II - 27

Tabel 2.8. Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Lahan Kering Tahun 2024 ..... II - 28

Tabel 2.9. Luas Lahan Pemanfaatan Pertanian Lahan Kering Tahun 2024 ..... II - 29

Tabel 2.10. Luas Panen Produktif Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 30

Tabel 2.11. Luas Panen Produktif Per Komoditas Hortikultura Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 31

Tabel 2.12. Luas Panen Produktif Komoditi unggulan Sektor Perkebunan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024..... II - 34

Tabel 2.13. Perkembangan Komoditas Unggulan Sektor Peternakan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 35

Tabel 2.14. Kawasan Sentra Pengembangan Ternak Kabupaten Majene..... II - 36

Tabel 2.15. Perkembangan Komoditi Unggulan Sektor Perikanan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 39

Tabel 2.16. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024..... II - 40

Tabel 2.17. Potensi Pertambangan Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 41

Tabel 2.18. Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Majene Tahun 2029 ..... II - 49

Tabel 2.19. Status Daya Dukung Pangan Di Kabupaten Majene Tahun 2029 ..... II - 50

Tabel 2.20. Kebutuhan dan Ketersediaan Air Kabupaten Majene Tahun 2029 ..... II - 51

Tabel 2.21. Status Daya Dukung Air Di Kabupaten Majene Tahun 2029 ..... II - 52
Tabel 2.22. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 55
Tabel 2.23. Komponen Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 58
Tabel 2.24. Persentase Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 59
Tabel 2.25. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 62
Tabel 2.26. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 66
Tabel 2.27. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 68
Tabel 2.28. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 69
Tabel 2.29. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 70
Tabel 2.30. Proyeksi Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2025-2030 ..... II - 72
Tabel 2.31. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Majene Tahun 2025-2030 ..... II - 73
Tabel 2.32. Rasio Ketergantungan Kabupaten Majene Tahun 2025-2030 ..... II - 74
Tabel 2.33. Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2024 ..... II - 82
Tabel 2.34. Pendapatan Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 84
Tabel 2.35. Pendapatan Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 85
Tabel 2.36. Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Majene Periode 2020-2024 ..... II - 86
Tabel 2.37. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene Periode 2020-2024 ..... II - 87
Tabel 2.38. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 ..... II - 94
Tabel 2.39. Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 95
Tabel 2.40. Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 ..... II - 107

Tabel 2.41. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Majene Tahun 2021-2025 ..... II - 109

Tabel 2.42. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Majene Tahun 2024..... II - 118

Tabel 2.43. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024..... II - 122

Tabel 2.44. Pilar Aspek Ekosistem Inovasi Pada IDSD Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 123

Tabel 2.45. Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 139

Tabel 2.46. Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 144

Tabel 2.47. Indikator Indeks Penilaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 145

Tabel 2.48. Nilai Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... II - 148

Tabel 2.49. Angka Kriminalitas Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 151

Tabel 2.50. Angka Partisipasi Kasar SD-SMA Sederajat Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 157

Tabel 2.51. Angka Partisipasi Murni SD-SMA Sederajat Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 157

Tabel 2.52. Angka Partisipasi Sekolah SD-SMA Sederajat Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 158

Tabel 2.53. Jumlah Fasilitas Pendidikan PAUD-PT Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 159

Tabel 2.54. Angka Putus Sekolah Jenjang SD-SMA Sederajat Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 159

Tabel 2.55. Angka Kelulusan Jenjang SD-SMA Sederajat Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 160

Tabel 2.56. Rasio Guru dan Murid Kabupaten Majene 2020-2024.. II - 161

Tabel 2.57. Rasio Posyandu Terhadap Per Satuan Balita Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 164

Tabel 2.58. Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Per Satuan Penduduk di Kab. Majene 2020-2024 ..... II - 165

Tabel 2.59. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 166

Tabel 2.60. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 167

Tabel 2.61. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 168
Tabel 2.62. Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Kab. Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 168
Tabel 2.63. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 170
Tabel 2.64. Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 171
Tabel 2.65. Cakupan Pelayanan Kebidanan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 171
Tabel 2.66. Cakupan Pelayanan Kebidanan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 172
Tabel 2.67. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Km) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 174
Tabel 2.68. Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 176
Tabel 2.69. Panjang Jalan Memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 177
Tabel 2.70. Panjang Drainase/Saluran Pembuangan Air Dalam Kondisi Baik Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 178
Tabel 2.71. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 179
Tabel 2.72. Akses Penduduk Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 181
Tabel 2.73. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 183
Tabel 2.74. Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 184
Tabel 2.75. Jumlah RLH, RTLH dan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024 ..... II - 185
Tabel 2.76. Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 187
Tabel 2.77. Rekapitulasi Data Backlog Perumahan Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 188
Tabel 2.78. Perkembangan Infrastruktur Perumahan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 190
Tabel 2.79. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 192
Tabel 2.80. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 194

Tabel 2.81. Indikator Capaian Pembangunan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 197
Tabel 2.82. Kinerja Indikator Kunci Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 197
Tabel 2.83. Kinerja Indikator Kunci Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 198
Tabel 2.84. Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 200
Tabel 2.85. Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 201
Tabel 2.86. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 203
Tabel 2.87. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 204
Tabel 2.88. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 208
Tabel 2.89. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 211
Tabel 2.90. Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 212
Tabel 2.91. Capaian Kinerja Utama Urusan Perhubungan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 216
Tabel 2.92. Capaian Kinerja Utama Urusan Perhubungan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 217
Tabel 2.93. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024..... II - 220
Tabel 2.94. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 222
Tabel 2.95. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 223
Tabel 2.96. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 226
Tabel 2.97. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 227
Tabel 2.98. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 228
Tabel 2.99. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 229
Tabel 2.100. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 230
Tabel 2.101. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 232

Tabel 2.102. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 233
Tabel 2.103. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 233
Tabel 2.104. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Produksi Perkebunan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 237
Tabel 2.105. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Produksi Hortikultura Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 238
Tabel 2.106. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Produksi Peternakan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 239
Tabel 2.107. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 246
Tabel 2.108. Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 247
Tabel 2.109. Capaian Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 251
Tabel 2.110. Capaian Kinerja Unsur Perencanaan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 252
Tabel 2.111. Capaian Kinerja Unsur Keuangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 253
Tabel 2.112. Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 256
Tabel 2.113. Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 258
Tabel 2.114. Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 258
Tabel 2.115. Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 259
Tabel 2.116. Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 261
Tabel 2.117. Realisasi APBD Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 .. II - 265
Tabel 2.118. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah..... II - 270
Tabel 2.119. Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Periode 2020-2024 ..... II - 270
Tabel 2.120. Neraca Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024... II - 277
Tabel 2.121. Perkembangan Rasio Likuiditas dengan Pendekatan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene 2020-2024 ..... II - 279

Tabel 2.122. Perkembangan Rasio Likuiditas dengan Pendekatan Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 280
Tabel 2.123. Perkembangan Rasio Likuiditas dengan Pendekatan Rasio Kas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 282
Tabel 2.124. Tren Rasio Solvabilitas-Debt to Equity Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 284
Tabel 2.125. Tren Rasio Solvabilitas-Debt to Assets Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 285
Tabel 2.126. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 285
Tabel 2.127. Realisasi Pendapatan Masing-Masing Objek Pendapatan Kabupaten Majene Periode 2020-2024 ..... II - 289
Tabel 2.128. Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene Per Objek Pendapatan Periode 2026-2030 ..... II - 292
Tabel 2.129. Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene Periode 2026-2030 ..... II - 296
Tabel 2.130. Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Majene (Milyar Rupiah) Tahun 2026-2030 ..... II - 299
Tabel 2.131. Rumusan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Majene ..... II - 305
Tabel 2.132. Isu Strategis Daerah ..... II - 328
Tabel 3.1. Penyelarasan Misi AST-RITA dengan Misi RPJMD Kab. Majene Periode 2025-2029 ..... III - 6
Tabel 3.2. Keterkaitan antara Visi dan Misi pada Penjelasan Misi RPJMD Kab. Majene 2025-2029 ..... III - 7
Tabel 3.3. Matriks Keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD Kab. Majene Periode 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kab. Majene Periode 2025-2045 ..... III - 8
Tabel 3.4. Matriks Keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD Kab. Majene Periode 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Periode 2025-2029 ..... III - 10
Tabel 3.5. Matriks Keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD Kab. Majene Periode 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Prov. Sulawesi Barat Periode 2025-2029 ..... III - 11
Tabel 3.6. Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Visi : “Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya” ..... III - 13
Tabel 3.7. Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Visi : “Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya” ..... III - 15
Tabel 3.8. Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Rumusan Tujuan dan Sasaran ..... III - 19
Tabel 3.9. Penahapan Pembangunan Daerah ..... III - 24

Tabel 3.10.	Lokus Pembangunan Daerah	III - 28
Tabel 3.11.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	III - 30
Tabel 3.12.	Rumusan Program Prioritas RPJMD Kab. Majene Tahun 2025-2029	III - 33
Tabel 3.13.	Penyesuaian Nomenklatur Program Bupati / Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majene ke dalam Nomenklatur Program Pendukungnya Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024	III - 50
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.....	IV - 8
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majene.....	IV - 41
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.....	IV - 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Lainnya ..... I - 11
Gambar 1.2. Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ..... I - 15
Gambar 1.3. Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RKPD Perangkat Daerah ..... I - 16
Gambar 1.4. Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten Majene ..... I - 17
Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 2
Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Majene dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat..... II - 3
Gambar 2.3. Peta Administrasi Kabupaten Majene ..... II - 4
Gambar 2.4. Peta Topografi Kabupaten Majene ..... II - 6
Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Majene ..... II - 7
Gambar 2.6. Peta Hidrologi Kabupaten Majene..... II - 10
Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Majene..... II - 14
Gambar 2.8. Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Majene . II - 21
Gambar 2.9. Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 56
Gambar 2.10. Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 57
Gambar 2.11. Grafik Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 61
Gambar 2.12. Grafik Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 65
Gambar 2.13. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 67
Gambar 2.14. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Majene Periode 2020-2024 ..... II - 67
Gambar 2.15. Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (5 Tahunan) dan Jenis Kelamin Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 70
Gambar 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 75

Gambar 2.17. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten Lainnya di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... II - 75

Gambar 2.18. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Dan Nasional Periode 2020-2024 ..... II - 77

Gambar 2.19. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene Periode 2020-2024 ..... II - 78

Gambar 2.20. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Periode 2020-2024 ..... II - 80

Gambar 2.21. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Periode 2020-2024 ..... II - 81

Gambar 2.22. Kontribusi PDRB Kab. Majene terhadap Perkembangan PDRB Regional Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 ..... II - 84

Gambar 2.23. Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 88

Gambar 2.24. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan ADHB Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 88

Gambar 2.25. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan ADHK Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 89

Gambar 2.26. Perkembangan TPT Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 91

Gambar 2.27. Posisi Relatif TPT Kabupaten Majene, Nasional Provinsi Sulawesi Barat Dan Kabupaten Lainnya Tahun 2024 .. II - 91

Gambar 2.28. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 92

Gambar 2.29. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024 ..... II - 96

Gambar 2.30. Perbandingan Usia Harapan Hidup Se-Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2024 ..... II - 96

Gambar 2.31. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024 ..... II - 98

Gambar 2.32. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024 ..... II - 100

Gambar 2.33. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 100

Gambar 2.34. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024 ..... II - 101

Gambar 2.35. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 102

Gambar 2.36. Perkembangan Angka Literasi/Numerasi (Angka Melek Huruf) Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024 ... II - 103

Gambar 2.37. Perbandingan Angka Literasi/Numerasi (Angka Melek Huruf) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 104

Gambar 2.38. Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2024 ..... II - 105

Gambar 2.39. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024 ..... II - 108

Gambar 2.40. Perbandingan Indeks Kerukunan Ummat Beragama Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 110

Gambar 2.41. Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 111

Gambar 2.42. Capaian Indeks Perlindungan Anak dan Data Pembentuknya Kabupaten Majene Tahun 2021-2023 .. II - 112

Gambar 2.43. Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 ..... II - 113

Gambar 2.44. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 114

Gambar 2.45. Perbandingan IKG Kabupaten Majene Dibandingkan dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 ..... II - 115

Gambar 2.46. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II - 116

Gambar 2.47. Angka Ketergantungan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 117

Gambar 2.48. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 119

Gambar 2.49. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 120

Gambar 2.50. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 121

Gambar 2.51. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 124

Gambar 2.52. Perbandingan Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... II - 125

Gambar 2.53. Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2023 ..... II - 127

Gambar 2.54. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Pernah Menggunakan Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024..... II - 129

Gambar 2.55. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (Milliar Rupiah) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 . II - 130

Gambar 2.56. Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah/Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 133

Gambar 2.57. Capaian Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 134

Gambar 2.58. Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 136

Gambar 2.59. Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2024 ..... II - 138

Gambar 2.60. Tingkat Inflasi Regional Kabupaten Majene Tahun 2015-2024 ..... II - 139

Gambar 2.61. Perkembangan Nilai Indeks SPBE Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 142

Gambar 2.62. Perkembangan Indeks Integritas Nasional Kabupaten Majene Tahun 2021-2024 ..... II - 145

Gambar 2.63. Perkembangan Persentase Penegakan Perda Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 147

Gambar 2.64. Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten Se Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... II - 149

Gambar 2.65. Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024..... II - 150

Gambar 2.66. Perbandingan Nilai Capaian Tiap Pilar Dalam IDSD Kabupaten Majene Tahun 2023-2024 ..... II - 154

Gambar 2.67. Perbandingan Nilai Capaian IDSD Se Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ..... II - 155

Gambar 2.68. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kab. Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 155

Gambar 2.69. Persentase Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Kondisi Baik Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 161

Gambar 2.70. Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Kewenangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 162

Gambar 2.71. Persentase Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 175

Gambar 2.72. Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 176

Gambar 2.73. Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 178

Gambar 2.74. Perkembangan Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Rusak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024..... II - 179

Gambar 2.75. Kondisi Jaringan Irigasi Berdasarkan Jenis Irigasi Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 180

Gambar 2.76. Akses Penduduk Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Majene Tahun 2024 ..... II - 182

Gambar 2.77. Perkembangan RLH dan RTLH Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 185

Gambar 2.78. Perkembangan Kawasan Kumuh Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 186

Gambar 2.79. Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 202

Gambar 2.80. Perkembangan Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 213

Gambar 2.81. Perkembangan Angka Kelahiran Remaja (ASFR) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 214

Gambar 2.82. Perkembangan Angka mCPR dan MKJP Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 215

Gambar 2.83. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 240

Gambar 2.84. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 242

Gambar 2.85. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 .... II - 243

Gambar 2.86. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Majene 2020-2024 ..... II - 245

Gambar 2.87. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 266

Gambar 2.88. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 Berdasarkan Sumber Pendapatan ..... II - 268

Gambar 2.89. Tren Rasio Kemandirian Kabupaten Majene 2020-2024 ..... II - 271

Gambar 2.90. Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 272

Gambar 2.91. Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 273

Gambar 2.92. Grafik Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, Dan Ekuitas Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 277

Gambar 2.93. Perkembangan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene 2020-2024 ..... II - 279

Gambar 2.94. Grafik Perkembangan Rasio Cepat (Quick Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 281

Gambar 2.95. Perkembangan Rasio Kas (Cash Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 282

Gambar 2.96. Grafik Komposisi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020-2024 ..... II - 283

Gambar 2.97. Pertumbuhan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 ..... II - 286

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa untuk setiap periode jabatan kepala daerah, harus disusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berlaku sejak pelantikan kepala daerah hingga akhir periode jabatan selama 5 tahun. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Majene Dr. H. Andi Achmad Syukri, SE.MM dan Wakil Bupati Majene Dr. Andi Ritamariani, M.Pd pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu tugas Kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, dan menetapkan dokumen RPJMD tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun, adalah dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN Tahun 2025-2029 diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 merupakan Tahun pertama pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 dengan visi ***"Majene Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan",*** dan disusun secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Majene merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen RPJMD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah :

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.
2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene.
3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD.

4. Pendekatan *Top-down dan Bottom Up*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025-2029. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Majene.
5. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
6. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
7. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6
3. Landasan Operasional, yaitu:
    1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
    2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14) Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

29) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
30) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor36);
31) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
32) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
33) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
34) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
35) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB SDG'S) Sustanable Development Goal's; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
36) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
37) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
38) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;
39) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

47) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
48) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
49) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
50) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
51) Keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
53) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 85);
54) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126);
55) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Barat Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 130);

56) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
57) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12) ;
58) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 1);
59) Peraturan Bupati Majene Nomor 32 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 32)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat Nasional maupun Daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dimana dokumen tersebut adalah:

1. RTRW Nasional 2008-2028
2. RTR Pulau Sulawesi 2011-2031
3. RPJPN Periode 2025-2045
4. RPJMN Periode 2025-2029
5. RPJPD Provinsi Sulawesi Barat periode 2025-2045
6. RTRW Provinsi Sulawesi Barat periode 2014-2034
7. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat periode 2025-2029
8. RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025 – 2045
9. RTRW Kabupaten Majene Tahun 2011-2031
10. Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Majene Tahun 2023

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Majene Tahun 2025-2029, sebagai bahan pertimbangan formulasi isu strategis, dan arah kebijakan terkait lingkungan hidup;
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya

Secara substansi, keberadaan RPJMD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Sementara dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala Nasional RTRW Nasional.

Hubungan keterkaitan antara dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Lainnya

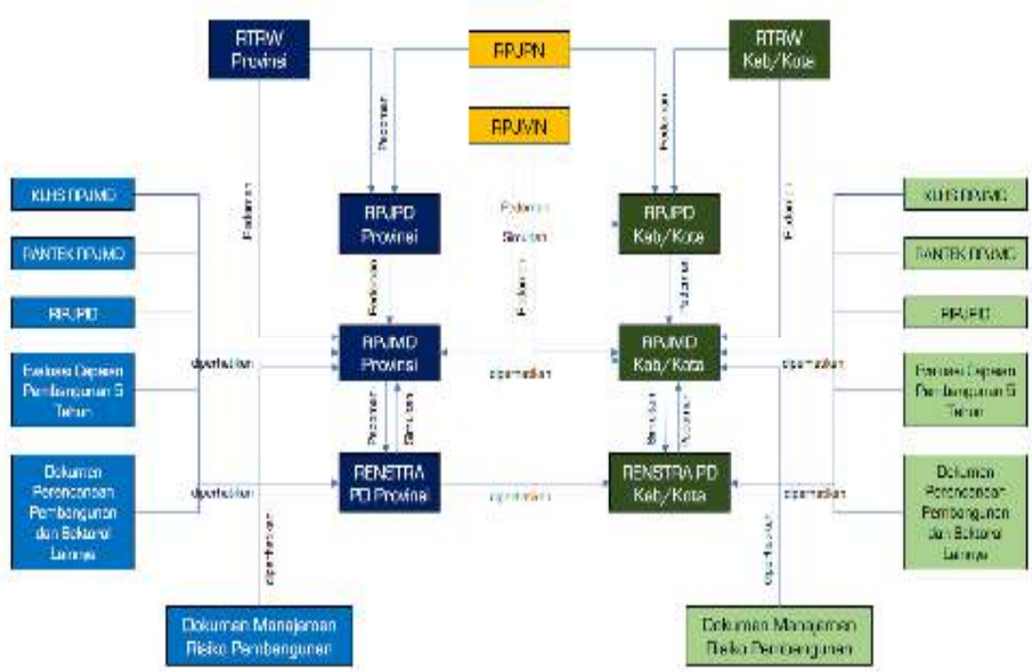

1. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJM Nasional

RPJMD memperhatikan dan memedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 memperhatikan dan memedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2025–2045, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2025–2029. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029, adalah:

"BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 8 (delapan) prioritas nasional atau yang umum dikenalkan sebagai "8 Asta Cita Prabowo – Gibran" yakni sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut di atas akan ditopang dengan 5 (lima) agenda pembangunan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima agenda pembangunan tersebut mencakup :

Transformasi Sosial:
Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif

Transformasi Ekonomi:
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

Transformasi Tata Kelola:
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia:
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan Pembangunan

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

2. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat

Mekanisme Penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 berdasarkan pada Gambar 1.1 tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergitas pembangunan antara program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan program pembangunan di Kabupaten Majene.

3. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJPD Kabupaten Majene

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa RPJMD memedomani RPJPD. RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD tahun pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 yakni pada tahapan ***"Penguatan Pondasi Pembangunan".*** Di satu sisi, RPJMD periode 2025-2029 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi pembangunan jangka panjang tahun 2025 – 2045.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPD mengenai sasaran pokok yang harus sesuai dengan arah kebijakan pada setiap tahapan periode pelaksanaannya, maka pada tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dari tahapan RPJPD harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana yang telah diatur dalam RPJPD Kabupaten Majene 2025 - 2045 dan kemudian disinkronisasikan dengan Visi, Misi dan rencana pembangunan bupati dan wakil bupati terpilih sehingga pembangunan dapat berjalan searah dan sinergis serta sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah ditetapkan. Karena itu, visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Majene masa bakti tahun 2025-2029 harus merespon penuntasan pencapaian visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Majene Tahun 2025-2029.

4. RPJMD Kabupaten Majene dengan Renstra PD

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun Dokumen Renstra PD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan sampai kepada penentuan indikasi

program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Majene sebagai *leading sector* penyusunan Dokumen ini.

Tujuan, Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dimaksudkan untuk pencapaian target atau sasaran program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh masing-masing PD pada akhir periode Renstra ini harus selaras dan sejalan dengan apa yang menjadi pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam dokumen RPJMD.

Proses perumusan Renstra PD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyusunan RPJMD. Pada tahapan penyusunan Renstra PD ini dimulai setelah tahap rancangan awal RPJMD. Rancangan awal Renstra PD ini merupakan dokumen pendukung yang berjalan secara beriringan dengan dokumen RPJMD untuk saling menyempurnakan baik dari segi data maupun substansi. Sementara itu penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD dalam rangka menyempurnakan dokumen Renstra PD berpedoman kepada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan ini bertujuan untuk menguatkan relevansi dan keselarasan tujuan, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.2

Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

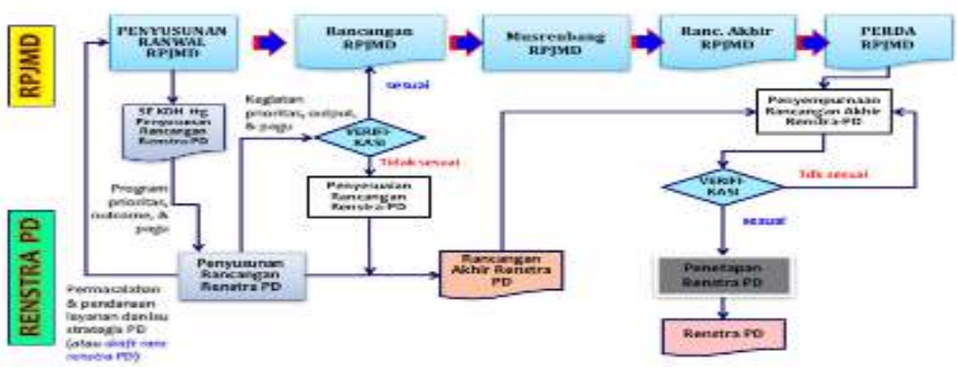

5. RPJMD Kabupaten Majene dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD sebagai dokumen strategis dijabarkan kedalam kebijakan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi acuan bagi masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Program dan kegiatan tahunan (Renja PD) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKPD ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambar 1.3

Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RKPD Perangkat Daerah

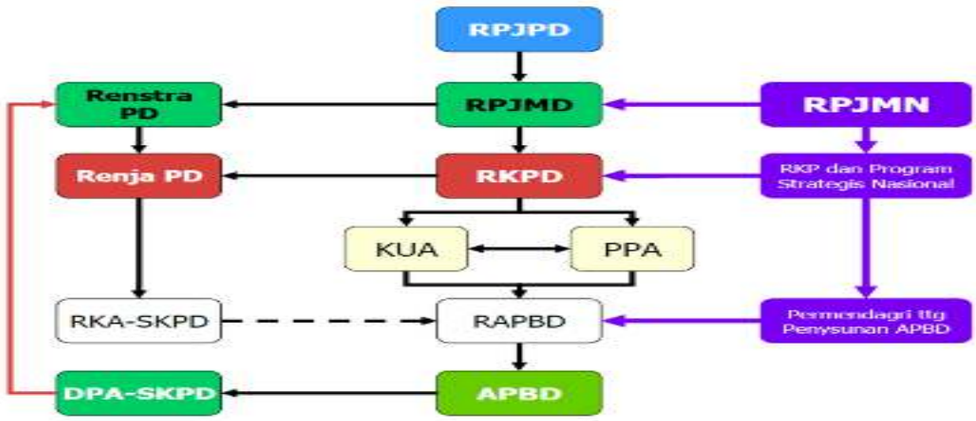

6. RPJMD Kab. Majene dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW-N, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten)

Sementara Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala Nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, bermanfaat secara maksimal dan berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.

Gambar 1.4

Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten Majene

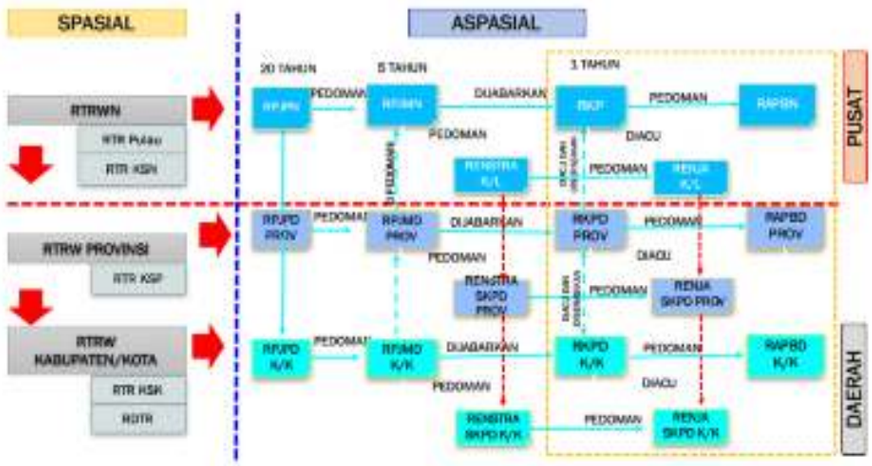

7. RPJMD Kab. Majene dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Majene

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam Revisi RPJMD Kabupaten Majene yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD).

8. RPJMD Kab. Majene dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah. Dengan kata lain, pelayanan dasar di daerah harus mampu terlaksana minimal mencapai batas waktu yang ditetapkan Pemerintah.

Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.

Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM. Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Majene ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025 s/d 2029.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah :

a. Sebagai bahan untuk penyelarasan substansi arah kebijakan pembangunan daerah 2025-2029 dengan Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
b. Sebagai bahan untuk penyelarasan arah kebijakan keuangan daerah 2025-2029 dengan Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
c. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Majene periode perencanaan Pembangunan Daerah 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Majene tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lain, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Majene.

Bab ini menjelaskan gambar umum Kondisi daerah dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan. Dalam Bab II juga memuat gambaran keuangan daerah yang menjelaskan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Kemudian menjelaskan juga permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah

BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi visi, penjelasan pokok visi, misi, penjelasan misi, tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah

BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program. Kemudian juga memuat kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari penyusunan dokumen RPJMD, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 serta disajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, Gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini akan ditinjau berbagai aspek yang menyangkut Aspek geografi dan demografi Kabupaten Majene, yang meliputi posisi dan peran strategis daerah dalam gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim dan demografi.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Majene merupakan kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dan merupakan salah satu daerah otonom yang termasuk dalam 6 (enam) kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, terletak di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah daratan Kabupaten Majene adalah 947,84 km² atau 5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat dan luas wilayah laut ±13.124km², dengan panjang garis pantai ±125 km². Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 dan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pemekaran Desa/Kelurahan, maka sejak tahun 2011 Kabupaten Majene mengalami pemekaran wilayah dari 40 Desa/Kelurahan menjadi 82 Desa/Kelurahan. Sehingga secara administratif Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan, 20 kelurahan, 62 desa dan 361 SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang terbagi dalam 257 Dusun dan 104 Lingkungan. Adapun pembagian administrasi, luas dan persentase wilayah kecamatan secara detail di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km²)	%	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Banggae	25.15	2.65	6	2
2	Banggae Timur	30.04	3.17	8	1
3	Pamboang	70.19	7.41	2	13
4	Sendana	82.24	8.68	2	14
5	Tammero'do	55.40	5.84	-	7
6	TuboSendana	41.17	4.34	-	7
7	Ulumanda	456	48.11	-	8
8	Malunda	187.65	19.80	2	10
Jumlah		**947.84**	**100.00**	**20**	**62**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Gambar 2.1.
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Majene Tahun 2024

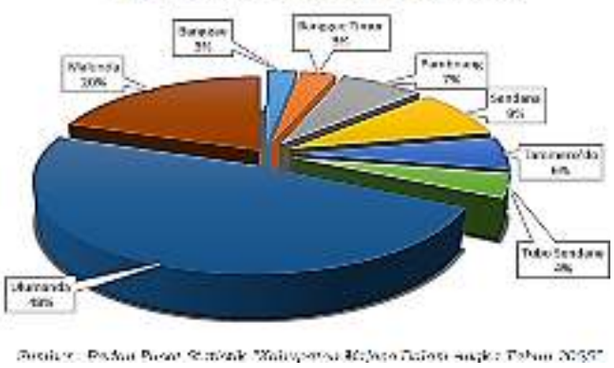

Wilayah Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni 456 Km² atau 48,11%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,65 Km² atau 19,80%, sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, dengan luas wilayah masing-masing adalah Kecamatan Banggae 25,15 Km² atau 2,65% dan Kecamatan Banggae Timur 30,04 Km² atau 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene.

Gambar 2.2.
Posisi Kabupaten Majene dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

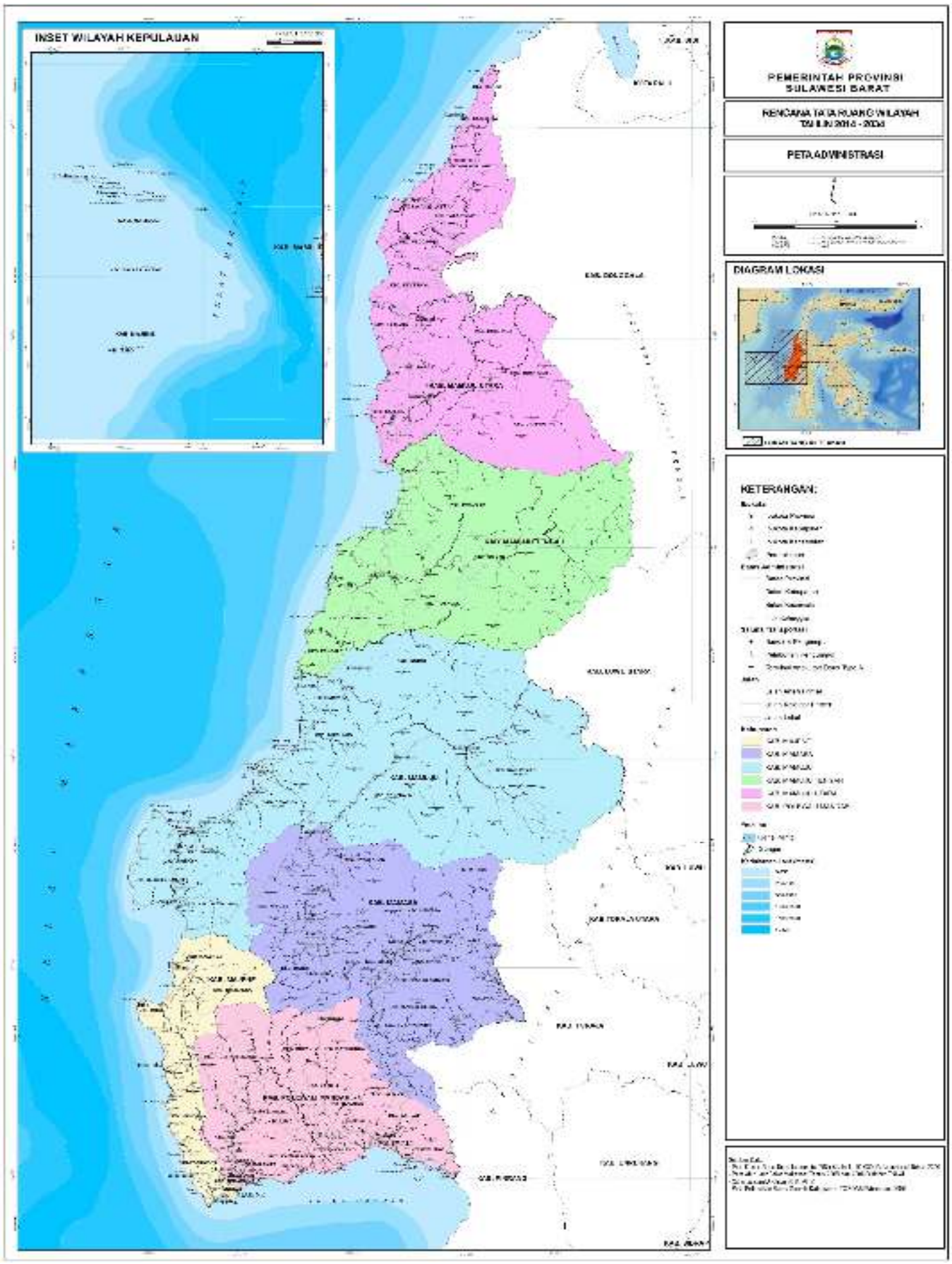

Sumber : Bapeda Kabupaten Majene Tahun 2025.

Gambar 2.3.
Peta Administrasi Kabupaten Majene

Sumber : Bapeda Kabupaten Majene Tahun 2025.

B. Letak Dan Kondisi Geografis

Pada dasarnya wilayah Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap daerah sekitarnya ini dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene secara geografis terletak antara 20^0 38’ 45” – 30^0 38’ 15” Lintang Selatan dan antara 118^0 45’ 00” - 119^0 4’ 45” Bujur Timur. Kabupaten Majene terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. 95% dari total wilayah perairan Kabupaten Majene masuk dalam alur pelayaran Selat Makassar, yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan masuk memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibukota Provinsi Sulawesi Barat kurang lebih 146 km. Letak geografis Kabupaten Majene berada dalam jalur lintas barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabupaten Majene terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi, diantaranya Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur merupakan kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten Majene, dengan kondisi wilayah yang relatif datar. Sedangkan enam kecamatan lainnya yaitu Pamboang, Sendana, Tammero’do, Tubo, Malunda dan Ulumanda didominasi wilayah berbukit dan pegunungan. Persentase luas wilayah Kabupaten Majene dengan rata-rata ketinggian lokasi yang berada pada ketinggian 100 – 500 mdpl adalah 38,7%.

Secara kondisi Geomorfologi Kabupaten Majene berada pada ketinggian (5-1.327) meter dari permukaan laut. Berdasarkan keadaan bentang alamnya terdiri atas satuan 4 morfologi yaitu : Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati Pegunungan Manatattuang; Satuan Morfologi Perbukitan terletak di Daerah Banggae dan Pamboang; Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara (Daerah Tubo) dan Satuan Morfologi Pedataran menempati pesisir pantai barat.

C. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Majene dibangun oleh wilayah yang topografinya bervariasi dari datar sampai berbukit dan bergunung,

Gambar 2.4.
Peta Topografi Kabupaten Majene

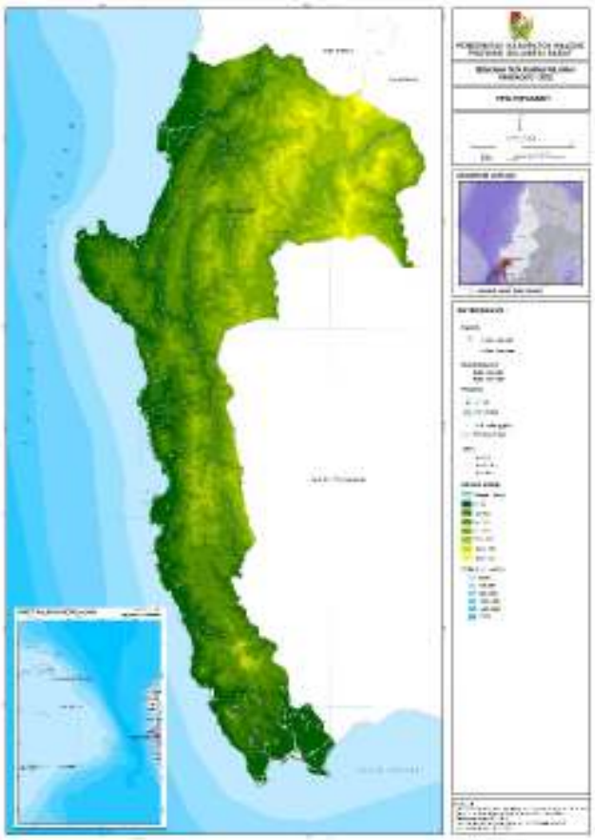

Sumber : Bapeda Kabupaten Majene Tahun 2025

dengan kemiringan lereng kurang dari 3% sampai lebih dari 100%. Hamparan daerah dengan topografi datar ditemukan di sepanjang wilayah paralel dengan garis pantai kabupaten ini. Hamparan wilayah datar terutama ditemukan mulai dari pantai barat Kecamatan Sendana menuju ke selatan sampai ke Kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang merupakan (Ibukota Kabupaten). Sebagian besar wilayah Kabupaten Majene dengan kondisi topografi berbukit dan bergunung yang hampir merata di semua kecamatan di Kabupaten Majene.

Klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Majene dari permukaan air laut mulai dari 0-25 m sampai diatas 1.000 meter. Berdasarkan kelas ketinggian muka laut yang tersebar pada umumnya tergolong kelas ketinggian 100-500 meter yakni 38,69% dan ketinggian 500-1000 meter yakni 35,98% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah dengan luas wilayah terluas pada umumnya dan merupakan wilayah yang berada di pegunungan dengan ketinggian antara 500-1000 meter dengan luas sebesar 30.219 Ha.

D. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Bentang alam wilayah Kabupaten Majene yang merupakan wilayah datar, bergelombang, berbukit sampai bergunung yang tersebar di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Majene. Secara umum jenis tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Majene adalah Alluvial, Mediteran, Latosol, Gromosol, Poksolik Merah, dan Laterik yang tersebar di semua kecamatan. Kondisi geologi regional wilayah Kabupaten Majene sangat spesifik karena merupakan pertemuan dua gugusan benua yaitu Benua

Gambar 2.5.
Peta Geologi Kabupaten Majene

Sumber : Bapeda Kabupaten Majene Tahun 2025

Asia dan Australia. Karakteristik geologis wilayah perencanaan merupakan satu kesatuan dengan kondisi geologis wilayah Majene yang terbagi ke dalam kondisi geomorfologi, fisiografi, stratigrafi dan struktur batuan yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Geomorfologi

Daerah Kabupaten Majene berada pada ketinggian (5-1.327) meter dari permukaan laut. Berdasarkan keadaan bentang alamnya terdiri atas satuan 4 morfologi yaitu (1) Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati Pegunungan Manatattuang di Kecamatan Ulumanda. (2) Satuan Morfologi Perbukitan terletak di Daerah Banggae, Banggae Timur dan Pamboang. (3) Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara (Wilayah Kecamatan Tubo) dan (4) Satuan Morfologi Pedataran menempati pesisir di sepanjang pantai barat Kabupaten Majene.

2. Fisiografi

Kondisi Fisiografi adalah kondisi yang menggambarkan kondisi pegunungan yang membentang dari arah utara sampai ke arah timur. Secara fisiografis dilihat dari utara, selatan, dan timur membujur Kawasan Pegunungan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Jalur fisiografisnya berupa sesar naik yang dimulai dari sesar kontak di wilayah Majene dan berakhir dengan sesar naik di daerah Pasangkayu. Secara keseluruhan terdiri dari sesar naik dan kontak diselang Antiklin dan Siklin yang membentuk daerah menjadi bergelombang mulai dari tepi pantai. Umumnya sesar ini membentuk daerah berbukit dengan batas daerah yang datar.

3. Stratigrafi

Secara umum stratigrafi Kabupaten Majene dicirikan oleh singkapan-singkapan dari batuan sedimen, batuan gunung api yang bersifat menengah, dan basa serta batuan terobosan. Batuan-batuan mempunyai usia yang berbeda-beda yaitu usia tersier dan kwarter yang terjadi pada zaman yang berbeda : Paleosen, Oligosen, Miosen, Pliosen, Plestosen, dan Holosen. Umumnya batuan-batuan ini kaya akan kandungan mineral.

4. Struktur Batuan

Litologi jenis batuan di daerah penyelidikan ditentukan berdasarkan kenampakan fisik yang dijumpai di lapangan, dengan tetap mengacu pada formasi batuan yang telah ditentukan oleh para peneliti terdahulu. Lokasi penyelidikan / pengukuran geolistrik dan topografi di sepanjang poros jalan provinsi Trans Sulawesi Bagian Barat, Kecamatan Banggae dan Pamboang. Secara keseluruhan litologi jenis batuan daerah tersebut tersusun oleh Satuan Napal Tufaan (Qm=Quarter Marl) dan Endapan Alluvial (Qal=Quarter Alluvial) yang dijelaskan berikut ini :

a. Batuan Napal Tufaan, Periode Kwarter (Qm)

Satuan Napal Tufaan terdiri atas perselingan antara napal tufaan dengan bongkah koral, serpin napalan, batu pasir tufaan dengan lensa-lensa konglomerat. Hasil pengamatan lapangan pada setiap perselingan batuan adalah sebagai berikut :

1) Napal tufaan ; berwarna abu-abu kecokelatan, struktur tidak berlapis dan bersifat agak rapuh atau tidak terkonsolidasi dengan baik, terdapat bongkah koral pada permukaan.
2) Serpihan Napalan ; berwarna putih abu-abu, tekstur klastik halus, porositas besar dan permiabilitas kecil. Struktur menyerpih sangat kuat dengan bentuk sperodial (kulit bawang), resistensi batuan sangat rendah. Pada batuan ini dijumpai perlapisan, jurus perlapisan berarah Barat laut – Tenggara dengan kemiringan Timur laut (N 30^{o}E/18^{o}).

3) Batu pasir Tufaan ; berwarna putih pucat dan putih dengan bercak berwarna coklat pada lapisan bagian bawah. Batu pasir tufaan terdiri dari dua lapisan yakni pada bagian atas dengan tekstur klastik halus serpih napalan dan bagian bawah dengan tekstur agak kasar. Secara umum struktur batuan kompak (terkonsolidasi dengan baik).

Hasil pengukuran stratigrafi terukur menunjukkan urutan perlapisan batuan adalah bagian atas dengan napal tufaan dengan ketebalan 5,4 meter. Selanjutnya pada bagian bawah terdiri atas perselingan antara batu pasir tufaan dengan serpih napalan. Perulangan perlapisan sebanyak 5 lapisan untuk batu pasir tufaan, dan 4 lapisan untuk serpih napalan. Ketebalan masing-masing berkisar antara (0,6 – 2) meter pada batu pasir tufaan, dan antara (0,4 – 1,8) meter pada serpih napalan. Selanjutnya pada bagian bawah terdiri atas batu pasir kasar dengan ketebalan 1,5 meter (ketebalan tersingkap). Satuan batuan ini dominan menempati daerah perbukitan dan sedikit pedataran.

b. Batuan Endapan Alluvial, Periode Kwarter (Qal)

Endapan Alluvial Periode Kwarter adalah endapan yang terbentuk dari proses pengendapan material oleh air yang mengalir, seperti sungai atau banjir, selama periode kuarter yang terdiri atas koral, kerikil, pasir, lempung dan lumpur. Penyebarannya sempit menempati daerah pedataran sepanjang garis pantai. Endapan ini merupakan endapan geologi muda, tidak terkonsolidasi dengan baik, dan belum terkompasi menjadi batuan (merupakan sedimen lepas).

Formasi batuan penyusun geologi di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur Majene adalah batuan dari formasi Mapi, yang terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung, batu gamping pasiran, dengan ketebalan sekitar 400 meter. Di wilayah Pamboang hingga Tubo, banyak dijumpai endapan alluvial yang merupakan endapan tanah lempung dan pasir. Berdasarkan sistem klasifikasi taksonomi tanah, tanah di wilayah pesisir Majene termasuk dalam golongan entisol, yang terbentuk dari hasil proses erosi dan senantiasa mengalami pengendapan sehingga

proses pembaruannya berlangsung cepat. Di Wilayah Kecamatan Tubo hingga Malunda, tekstur tanah relatif bervariasi dari tanah kasar berpasir lempung hingga sampai tekstur halus liat.

E. Kondisi Hidrologi

Gambar 2.6.
Peta Hidrologi Kabupaten Majene

Sumber : Bapeda Kabupaten Majene Tahun 2025

Kondisi hidrologi wilayah Kabupaten Majene sangat berkaitan dengan tipe iklim yang ada, dilain sisi juga dipengaruhi oleh kondisi stratigrafi dan struktur batuan dimana dicirikan oleh singkapan-singkapan dari batuan sedimen, batuan gunung api yang bersifat menengah, dan basa serta batuan terobosan dan litologi jenis batuan daerah tersebut tersusun oleh Satuan Napal Tufaan (Qm = Quarter Marl) dan Endapan Alluvial (Qal = Quarter Alluvial). Keberadaan air tanah dangkal ± 4 m. Kondisi hidrologi permukaan juga ditentukan oleh sungai-sungai yang ada dengan jumlah sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Majene berkisar 73 sungai baik besar maupun kecil. Untuk lebih jelasnya potensi sumber daya air di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Nama-Nama Sungai Di Wilayah Kabupaten Majene
Di Rinci Berdasarkan Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Sungai	
1.	Banggae	• Sungai Majene	• Sungai Camba
2.	Banggae Timur	• Sungai Lembang Siruppa	
3.	Pamboang	• Sungai Pamboang • Sungai Koi • Sungai Lembang Piung • Sungai Lembang Taduang	• Sungai Lembang Abaga • Sungai Lembang Lena • Sungai Lembang Teppo
4.	Sendana	• Sungai Mosso • Sungai Pumalla • Sungai Teleppo • Sungai Apoleang	• Sungai Labuang • Sungai Lembang • Sungai Palipi • Sungai Kadopo

No	Kecamatan	Sungai	
		• Sungai Para • Sungai Sirua Kota	• Sungai PallaPallang • Sungai Manyamba
5.	Tammeroddo Sendana	• Sungai Potandek • Sungai Polo - Polo • Sungai Sipitu • Sungai Wai Sepong • Sungai Taridi	• Sungai Lombongan • Sungai Tamerodo • Sungai Mayatapi • Sungai Mayamba • Sungai Talakomi
6.	Tubo Sendana	• Sungai Sumakuyu • Sungai Wai Sering • Sungai Labuang • Sungai Pumbiu • Sungai Tapamekan • Sungai LabuangOnang • Sungai Laia	• Sungai Galung - Galung • Sungai Batu Roro • Sungai Pulung • Sungai Kulasi • Sungai Takombe • Sungai Salabulo
7.	Malunda	• Sungai Asa – Asaang • Sungai Tamalere • Sungai Meletung • Sungai Ipo • Sungai Maliaya • Sungai Reruang • Sungai Lombang	• Sungai Kalangae • Sungai Serepo • Sungai Samalio • Sungai RattePunaga • Sungai Malunda • Sungai Dopi • Sungai Lemo
8.	Ulumanda	• Sungai Potenaan • Sungai Malamakula • Sungai Toe - Toe • Sungai Samabaho - Baho • Sungai Pesawang • Sungai Pulosok • Sungai Maiting • Sungai Tikaung • Sungai Tambung • Sungai Lamoliang • Sungai Tapango • Sungai Lemo • Sungai Palang	• Sungai Kayang • Sungai Lombongan • Sungai Tatung • Sungai Pekalong • Sungai Pondang • Sungai Lasa • Sungai Tubo • Sungai Baulu • Sungai Tamerindi • Sungai Takang • Sungai Makulak • Sungai Manda • Sungai Tamalonag

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif besar yaitu Sungai Tubo, Tammerodo yang berada di wilayah Kecamatan Sendana, sungai Maitting, Manyamba, Pamboang di Kecamatan Pamboang, sungai Malunda di Kecamatan Malunda dan sungai Kaiyong. Sungai terbesar yang di Kabupaten Majene adalah Sungai Tubo dan sungai Maitting yang memiliki debit air yang relatif besar dan merupakan sungai yang berhulu di pegunungan dan bermuara di Selat Makassar.

Keberadaan debit air sungai tersebut perlu dijaga kelestariannya mengingat masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sumber keperluan rumah tangga dan kedepan perlu dikembangkan sebagai sumber air bersih mengingat pertambahan penduduk semakin merasakan pentingnya air bersih.Sumberdaya air disamping berfungsi untuk kehidupan sehari-hari juga berfungsi untuk berusaha dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan manusia seperti pertanian, perikanan, perindustrian, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedaan hidrologi yaitu curah hujan, tipeiklim dan sungai. Kondisihidrologi di KabupatenMajene, meliputi potensi air tanah dan potensi air sungai, dimana potensi air tanah di Kabupaten Majene cukup baik.

F. Kondisi Klimatologi

Parameter klimatologi Kabupaten Majene adalah tipe iklim, curah hujan dan suhu udara. Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relative tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk mandar). Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Majene yang merupakan laporan hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kab. Majene, Curah Hujan terbesar di Kabupaten Majene pada tahun 2024 terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan sebesar 381,60 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan 8 mm. Untuk hari hujan terbanyak berdasarkan bulan pada tahun 2024 terjadi pada bulan Agustus dan Oktober yaitu sebanyak 31 hari hujan dan terendah terjadi pada bulan Juni dengan 11 hari hujan. Berdasarkan data tersebut, bahwa musim penghujan berada pada Bulan Oktober hingga Bulan Desember dan setelah itu memasuki musim kemarau pada bulan Juli sampai dengan September. Untuk lebih jelasnya kondisi iklim wilayah kabupaten Majene dapat dilihat secara detail pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Majene
Tahun 2020 – 2024

No	Bulan	Curah Hujan (mm^3)					Hari Hujan (hari)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	325,7	403,1	255,1	204,80	120,90	15	24	14	21	20
2	Februari	153,5	133,3	214,4	141,60	78,90	12	18	19	18	13
3	Maret	71,7	178,8	28,1	121,60	154,70	18	15	14	18	18
4	April	107,7	105,8	68,9	94,00	62,60	18	16	19	18	16
5	Mei	66,3	66,8	243,5	144,60	145,70	19	15	19	14	12
6	Juni	87,5	161,3	219,1	216,50	225,50	16	19	19	15	11
7	Juli	91,3	32,0	149,4	81,70	15,10	15	14	13	7	27
8	Agustus	20,2	319.7	146	1,50	8,00	10	17	18	2	31
9	September	60,3	124,9	227,3	8,00	79,00	16	18	17	1	30
10	Oktober	132	164,9	354,6	32,60	164,20	15	18	26	7	31
11	November	95,8	164,3	218,9	42,90	130,20	21	21	21	14	30
12	Desember	215,4	371,0	372,9	153,10	381,60	25	20	25	17	29

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Sementara kondisi kelembapan udara dan suhu udara pada data tahun terakhir (tahun 2024) memperlihatkan bahwa kisaran rata-rata kelembapan udara pada bulan januari-desember adalah 80,22 %. Kelembapan udara tertinggi berada pada bulan April, Mei, dan bulan Juni, kelembapan udara terendah berada pada bulan Januari, Agustus dan bulan September. Sedangkan pada suhu udara rata-rata pada tahun 2024 menunjukkan bahwa suhu udara terendah berada pada bulan Juli, Agustus dan Desember dengan suhu 27 ^{0}C dan tertinggi berada pada bulan Januari, Mei, September dan Oktober dengan suhu udara sebesar 28,7 ^{0}C. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Kelembaban Udara Rata-Rata dan Suhu Udara Rata-Rata
Di Kabupaten Majene 5 (lima) Tahun Terakhir (2020-2024)

No	Bulan	Kelembaban Udara (%)					Suhu Udara (^{0}C)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	79	82	79	86,9	76,3	28,2	27,1	27,2	26,9	28,7
2	Februari	80	81	80	86,5	80,4	28,2	27,3	27,2	27,3	28,6
3	Maret	80	80	80	87,2	81,4	28,3	27,3	27,9	27,4	28,5
4	April	80	79	82	84,1	82,2	28,3	28,1	28,0	28,1	28,5
5	Mei	80	81	85	81	82,2	28,3	28,1	27,8	28,4	28,7
6	Juni	78	82	85	81,4	83,2	27,9	27,6	27,2	27,8	28,0
7	Juli	78	82	84	78,6	81,1	27,5	27,2	27,0	27,8	27,6
8	Agustus	73	80	83	75	75,3	28,1	27,7	27,3	27,9	27,8
9	September	74	80	85	72,8	77,2	28,3	27,6	27,5	28,5	28,7
10	Oktober	76	82	87	79	80,2	28,4	28,0	27,2	29,3	28,7
11	November	79	83	87	82	81,5	28,2	27,6	27,3	29,1	28,5
12	Desember	80	83	86	81,3	81,6	27,3	27,4	27,1	28,8	27,4

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

G. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Majene pada tahun 2024, terdiri dari lahan sawah yang meliputi irigasi teknis, dan non irigasi/tadah hujan. Untuk lahan pertanian bukan sawah meliputi tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, kolam/empang/tebat, padang gembalaan/rumput, dan lahan yang belum diusahakan, sedangkan lahan bukan pertanian meliputi pekarangan dan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, pola penggunaan lahan di Kabupaten Majene sebesar 90.455 Ha, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis penggunaan lahan yaitu lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut terkait Peta Tutupan Lahan Kabupaten Majene.

Gambar 2.7.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Majene

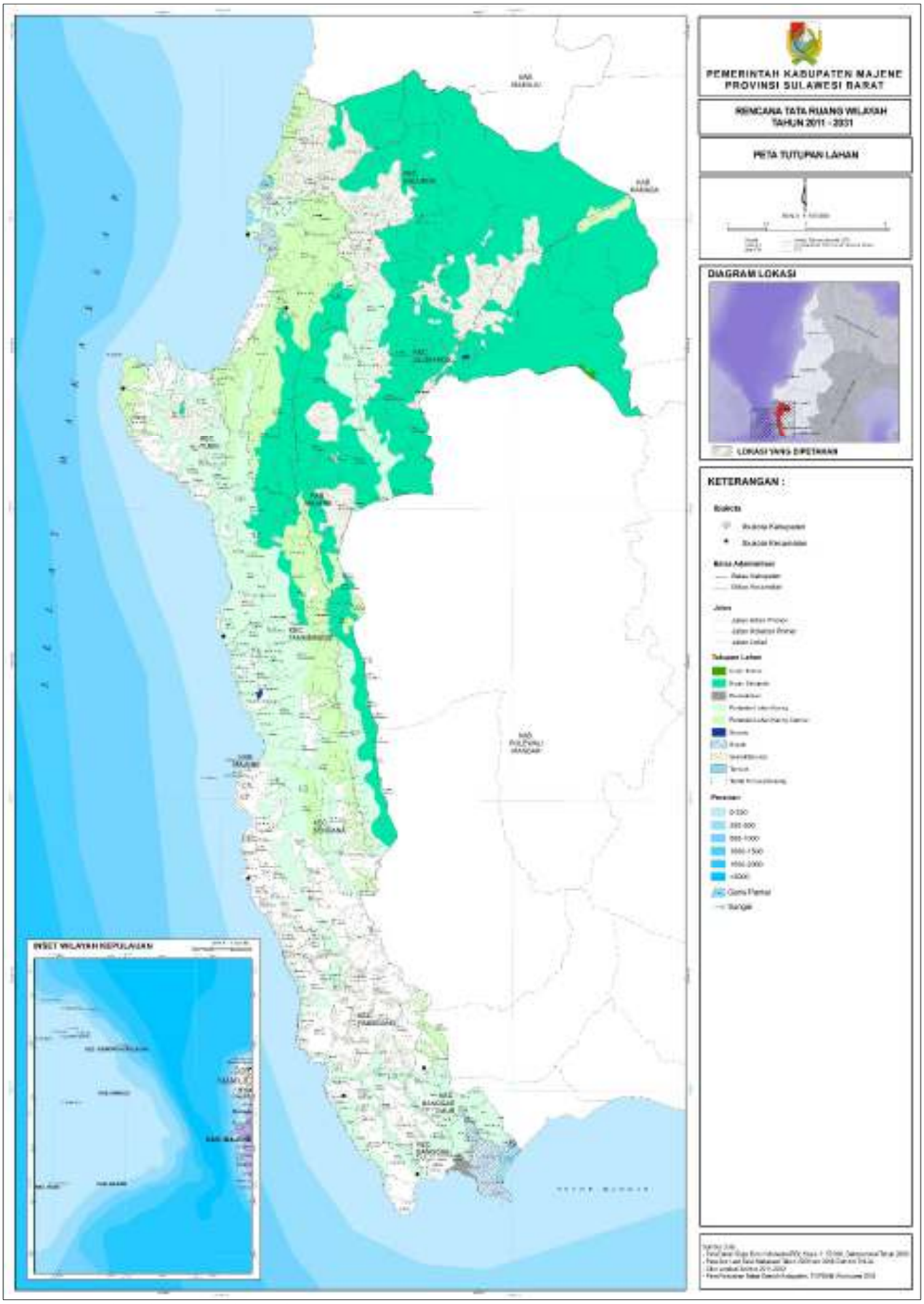

Sumber : Bapeda Kabupaten Majene Tahun 2025.

Tabel 2.5.
Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	**Lahan Sawah**	**1.648**	**100**
	1. Irigasi	683	41,44
	2. Non Irigasi/Tada Hujan	965	58,56
2	**Lahan Pertanian Bukan Sawah**	**79.654**	**100**
	1. Tegal/Kebun	11.062	13,89
	2. Ladang/Huma	8.625	10,83
	3. Perkebunan	14.715	18,47
	4. Hutan Rakyat	35.684	44,80
	5. Kolam/Empang/Tebat	1.017	1,28
	6. Padang Gembalaan/Rumput	4.283	5,38
	7. Sementara Tidak Diusahakan	4.323	5,43
3	**Lahan Bukan Pertanian**	**9.098**	**100**
	Jumlah	**90,455**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk Lahan Sawah, jenis penggunaan lahan terbesar yaitu non irigasi/tadah hujan yang mencapai angka 965 Ha dengan tingkat persentase 58,56 %, sedangkan untuk lahan sawah yang beririgasi mencapai 683 Ha dengan tingkat persentase 41,44 %. Untuk lahan pertainan bukan sawah, jenis penggunaan lahan terbesar yaitu hutan rakyat yang mencapai angka 35.684 Ha dengan tingkat persentase 44,80 %, sedangkan untuk yang terendah yaitu penggunaan lahan berupa kolam/empang/tebal yang mencapai 1.017 Ha dengan tingkat persentase 1,28 %. Untuk lahan bukan pertanian mencapai angka 9.098Ha dengan tingkat persentase terhadap luas keseluruhan penggunaan lahan yaitu mencapai 100%.

H. Peran Strategis Daerah

Posisi strategis daerah merujuk pada kedudukan suatu wilayah dalam konteks yang lebih luas, baik secara geografis, ekonomi, politik, social maupun budaya. Posisi ini dapat memberikan keunggulan komparatif atau kompetitif bagi daerah tersebut. Beberapa aspek yang membentuk posisi strategis daerah antara lain geografis, demografis, ekonomi, social budaya dan politik. Sedangkan peran strategis daerah adalah fungsi atau kontribusi yang diberikan oleh suatu daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan nasional maupun regional. Kabupaten Majene, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki sejumlah fungsi dan kontribusi penting, baik bagi wilayah sekitarnya

maupun dalam skala yang lebih luas. Secara keseluruhan posisi dan peran strategis daerah saling terkait dan merupakan kunci keberhasilan Pembangunan di wilayah Kabupaten Majene yang digambarkan sebagai berikut;

1. **Sektor Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

   Majene dicanangkan atau ditetapkan sebagai kota Pendidikan (Pusat Pendidikan) di Sulawesi Barat. Keberadaan berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Universitas Terbuka (UT), dan STAIN Majene dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya. Selain itu, keberadaan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, menjadikan Majene sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, yang menyatakan bahwa salah satu Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Barat adalah Kawasan Strategis Pendidikan Tinggi yang terletak di Kabupaten Majene.

2. **Sektor Perikanan dan Kelautan**

   Sebagai daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan Teluk Mandar, Majene memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar. Garis pantai yang panjang (sekitar 125 km) dan luas wilayah laut yang mencapai hampir 1.000 km² menjadi modal utama. Sektor perikanan, terutama perikanan tangkap dan budidaya, menjadi salah satu kontributor utama perekonomian Majene dan memberikan pasokan hasil laut bagi wilayah sekitarnya. Pengembangan pelabuhan rakyat juga berfungsi sebagai pusat pengumpul dan distribusi hasil perikanan. Salah satu keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi di Desa Sendana Kecamatan Sendana berangsur melengkapi fasilitas pendukung Salah satunya yang didorong adalah percepatan pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

3. **Sektor Pertanian**

   Selain perikanan, Kabupaten Majene juga memiliki potensi di sektor pertanian. Pengembangan kawasan pertanian yang produktif diarahkan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan

masyarakat. Kabupaten Majene berupaya menetapkan pusat-pusat pengumpul/akumulasi hasil pertanian untuk mendukung distribusi ke wilayah lain. Kontribusinya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor pertanian merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Majene. Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor ini, khususnya sebagai petani.

b. Penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum sektor pertanian menjadi sektor utama yang mendorong perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa di Majene, sektor pertanian juga memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB daerah.

c. Sumber Bahan Pangan dan Gizi

Sektor pertanian menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk Kabupaten Majene dan memastikan ketahanan pangan daerah. Selain itu, juga berperan dalam penyediaan gizi melalui beragam hasil pertanian.

d. Pemasok Bahan Baku Industri

Hasil pertanian di Kabupaten Majene juga berfungsi sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri, baik industri skala rumah tangga maupun industri kecil. Salah satu contoh adalah pengolahan kelapa menjadi minyak VCO (Virgin Coconut Oil).

e. Pendorong Sektor Ekonomi Lainnya

Perkembangan sektor pertanian di Majene dapat mendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa, karena adanya kebutuhan akan distribusi hasil pertanian dan pasokan sarana produksi yang dihasilkan.

f. Komoditas Unggulan

Kabupaten Majene memiliki beberapa komoditas pertanian unggulan yang menjadi andalan untuk dapat dikembangkan dalam periode lima tahun kedepan, di antaranya:

1) Jagung, Merupakan salah satu komoditi andalan dengan produksi yang cukup tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Sendana, Tammerodo Sendana dan wilayah kecamatan lainnya.
2) Kelapa, Tanaman kelapa sangat berguna dalam kehidupan ekonomi pedesaan, dengan produk olahan seperti VCO yang banyak diproduksi.
3) Kakao, meskipun produktivitas kakao di Kabupaten Majene masih tergolong rendah, namun ini merupakan komoditas perkebunan penting yang terus diupayakan pengembangannya.
4) Bawang Merah, Memiliki potensi besar untuk menjadi komoditas unggulan yang berkualitas tinggi dan menjadi salah satu komoditas pertanian utama di Sulawesi Barat, dan pemerintah daerah diharapkan serius dalam pengembangannya. Salah satu keseriusan pemerintah Kabupaten Majene adalah keberadaan Kawasan Food Esteate dengan luasan sekitar 157 ha.
5) Komoditas Perkebunan Lainnya, Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene, terdapat 13 jenis komoditas unggulan perkebunan seperti sagu, pala, kapuk, aren, jambu mete, cengkeh, lada, kemiri, panili, dan kopi robusta.

Meskipun memiliki kontribusi besar, sektor pertanian di Kabupaten Majene juga menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas pada beberapa komoditas (misalnya kakao), serta masih minimnya pengolahan hasil pertanian menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Majene terus berupaya mengoptimalkan potensi pertanian melalui berbagai program pengembangan, seperti pemberian bantuan sarana produksi (saprodi) pertanian, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, petani, dan penyuluh dalam penerapan standar instrumen pertanian, serta pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

4. Simpul Transportasi dan Konektivitas

Kabupaten Majene dilengkapi dengan terminal induk dan terminal pembantu, serta beberapa pelabuhan laut (seperti Pelabuhan Majene di Kecamatan Banggae, Pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana, serta pelabuhan laut di Kecamatan Pamboang dan Malunda). Fasilitas transportasi ini berperan penting dalam menjamin aksesibilitas wilayah-wilayah di sekitarnya, melancarkan lalu lintas barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah secara lebih terpadu di Sulawesi Barat. Selain itu, di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdapat rencana jalur trase Kereta Api dan rencana jalan tol yang menghubungkan wilayah jalur lintas barat Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

5. Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Kabupaten Majene juga berupaya melestarikan warisan budaya lokal dan mengembangkan potensi budaya pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah bertujuan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus melestarikan kesenian dan budaya lokal. Hal ini dapat menarik wisatawan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

6. Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana

Pemerintah Kabupaten Majene memiliki fungsi dalam pengendalian, pelestarian, dan rehabilitasi kawasan rawan bencana alam. Selain itu, Majene juga berupaya meningkatkan pengelolaan dan pemantapan kawasan-kawasan konservasi di sekitar kawasan tanaman tahunan dan perkebunan untuk menghindari risiko banjir di wilayah hulu daerah aliran sungai. Ini menunjukkan peran Majene dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mitigasi bencana yang berdampak pada wilayah sekitarnya.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Majene memiliki kekayaan alam yang beragam. Potensi sumber daya alam merupakan modal dasar bagi pembangunan wilayah ini. Selain itu, Kabupaten Majene memiliki kawasan strategis yang berpotensi

dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah Kabupaten Majene dimasa mendatang. Adapun potensi sumber daya tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kabupaten Majene memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah Kabupaten Majene dimasa mendatang sesuai yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032, yang diantaranya adalah:

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene, diarahkan pada:

a. Kawasan Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara, terdapat di Kecamatan Sendana;
b. Kawasan Strategis Agropolitan, terdapat di Kecamatan Malunda;
c. Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata, meliputi Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana;
d. Kawasan Strategis Minapolitan, Meliputi Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang dan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana.
e. Pengembangan kawasan pesisir/pulau-pulau kecil Pulau Lerelerekang.

2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Majene akan diarahkan pada:

a. Kawasan Budaya yang terdapat di Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, dan Kecamatan Malunda.
b. Kawasan Pusat Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan perguruan tinggi lainnya yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Majene.
c. Kawasan Water Front City Kota Majene terdapat di sepanjang pesisir Kelurahan Baru, Kelurahan Labuang, Kelurahan Pangali-Ali dan Kelurahan Banggae.

Gambar 2.8.
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Majene

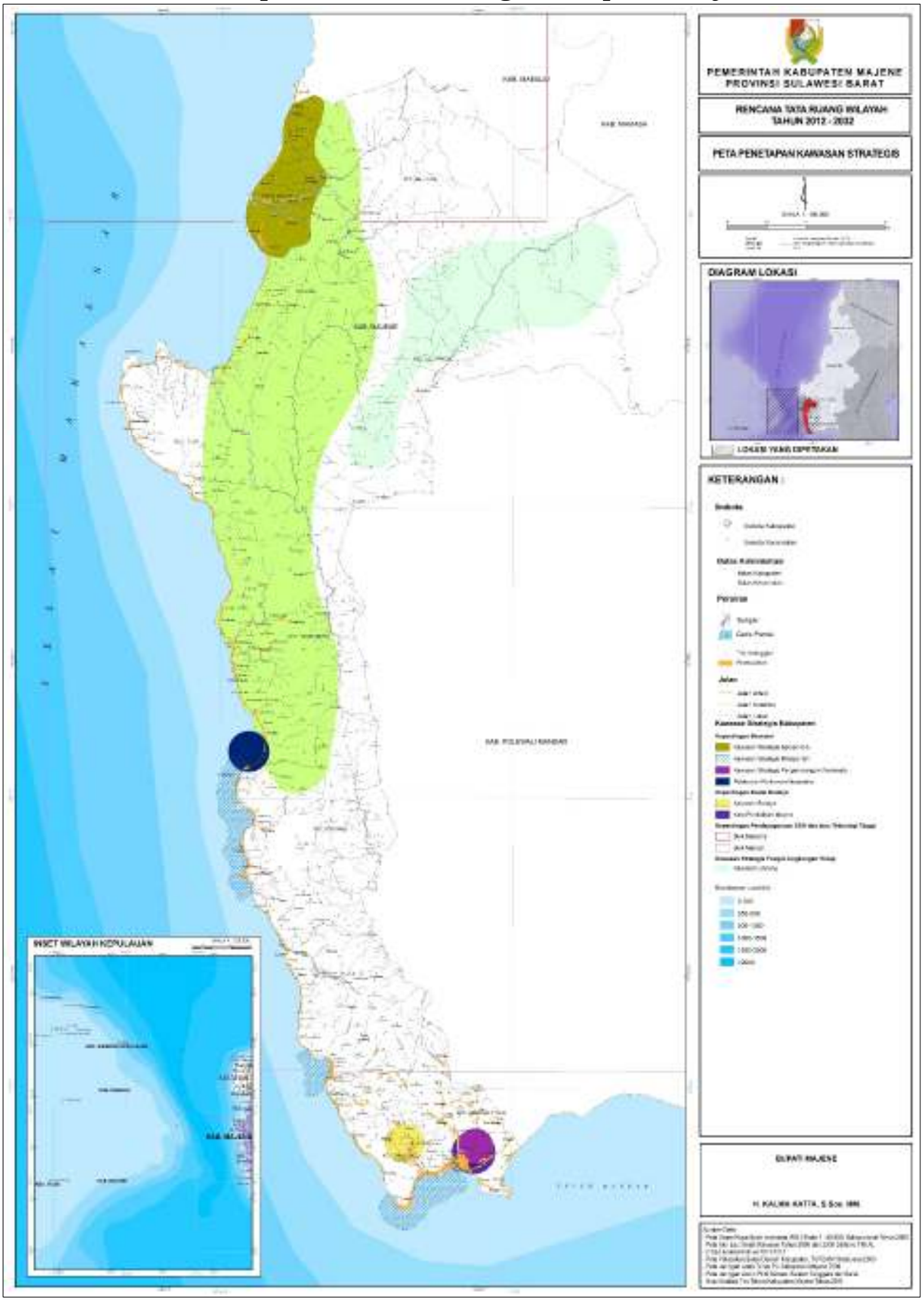

Sumber : Bapeda Kabupaten Majene Tahun 2025.

d. Kawasan Pusat Pemerintahan terpusat Kabupaten Majene terdapat di Kelurahan Totoli dan Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae.

3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Majene, diarahkan pada :

a. Kawasan Pengelolaan sumber daya alam minyak Blok South Mandar dengan luas 3.882 Km^2 meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur;
b. Kawasan Pengelolaan sumberdaya alam minyak Blok Malunda dengan luas 5.148,68 Km^2 meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Malunda, Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana;
c. Kawasan Pengelolaan sumber daya alam minyak Blok Karama dengan luas 5.389,68 Km^2 meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, Tubo Sendana dan Kecamatan Tammero'do Sendana;
d. Kawasan Pengelolaan Sumber daya alam pertambangan batubara terdapat di Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana dan Desa Talubanua Kecamatan Sendana;
e. Kawasan pertambangan Batu Gamping terdapat di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda;
f. Kawasan pertambangan Lempung terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Malunda, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana;
g. Kawasan pertambangan Oker terdapat di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
h. Kawasan pertambangan Dasit / Andesit terdapat di Desa Bambangan Kecamatan Malunda, Kelurahan Lalampanua – Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda;

i. Kawasan pertambangan Zeolit terdapat di Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana;
j. Kawasan pertambangan Basal terdapat di Desa Bambangan Kecamatan Malunda;
k. Kawasan pertambangan Kerakal Bongkah terdapat di Sungai Deking Desa Lombang Kecamatan Malunda, Sungai Manyamba Kecamatan Tammero'do Sendana, Sungai Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Sungai Panawar Desa Adolang Kecamatan Pamboang;
l. Kawasan pertambangan Emas terdapat di Dusun Sambabo Kecamatan Ulumanda berupa kawasan pertambangan Bijih Besi; dan Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Ulumanda dan Malunda;
m. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terdapat di Kelurahan Totoli dan Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae.

4. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Majene, diarahkan pada :

a. Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Rakyat yang tersebar Kecamatan Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda;
   1) Kawasan Cagar Alam Geologi yang meliputi:
      - Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati pegunungan Manatattuang;
      - Satuan Morfologi perbukitan terletak di daerah Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang;
      - Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara di daerah Tubo Kecamatan Tubo Sendana; dan
      - Satuan Morfologi pedataran menempati pesisir pantai barat.
   2) Kawasan perlindungan laut di sekitar Pulau Pantai Maluno, Pulau Idaman Tai Manu yang terletak di Kecamatan Sendana;
   3) Kawasan Terumbu Karang yang meliputi:
      - Kawasan terumbu karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
      - Kawasan terumbu karang Pantai Bautapa di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;

- Kawasan terumbu karang di Kecamatan Pamboang, Sendana, Tubo Sendana, Tammero'do Sendana, Ulumanda dan Kecamatan Malunda; dan

4) Kawasan Pantai Berhutan Bakau meliputi seluruh wilayah pesisir kecamatan yang ada di Kabupaten Majene; dan
5) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Majene.

B. Sub Sektor Kawasan Hutan

1. Sektor Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Majene yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan secara terbatas. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 yang bersumber dari hasil identifikasi kondisi penutupan lahan Kabupaten Majene berdasarkan hasil Revisi RTRW Kabupaten Majene Tahun 2017 yang bersumber dari Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 6029 Tahun 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sulawesi Barat Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas di Kabupaten Majene dengan luas ± 7.662,47 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Ulumanda dengan luas ± 3.405,95 Ha, Kecamatan Malunda dengan luas ± 4.234,41 Ha dan Kecamatan Tubo Sendana dengan luas ± 22,11 Ha.

Pada umumnya Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Majene merupakan hutan pegunungan dengan kondisi tanah kering dan lereng landai. Kondisi penutupan lahan masih berhutan dengan potensi kayu rendah sampai sedang. Jenis yang cocok untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri (HTI) adalah sengon dan Acacia mangium. Berdasarkan hal tersebut, maka arahan rencana pemanfaatan budidaya kehutanan dengan peruntukan sebagai kawasan peruntukan hutan produksi adalah:

a. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

b. Pemanfaatan kawasan dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal;
c. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan dalam bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
d. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dalam bentuk usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam; dan
e. Pemungutan hasil hutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

2. Sektor Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air, serta untuk mendukung kecukupan luas kawasan berhutan, baik dalam skala DAS, Kabupaten, maupun Provinsi. Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana dengan luasan ± 6.962 Ha. Lokasi tersebut bertipe hutan pegunungan dengan kondisi lereng landai-bergelombang. Jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan adalah jenis Kemiri dan Sengon. Aksesibilitas menuju ke lokasi hutan rakyat dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu perjalanan ± 2 jam dari ibukota kabupaten. Dimana kondisi jalan umumnya berupa jalan aspal/beton serta berupa tanah yang telah diperkeras.

C. Sub Sektor Tanaman Pangan

1. Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah memerlukan kedalam efektif tanah (solum tanah) minimal 60 cm. Produktivitas dan mutu panen cenderung menurun bila kedalaman efektif tanah semakin dangkal. Batas ambang kedalaman efektif tanah ini adalah 30 cm, sedangkan tekstur tanah yang baik bagi jenis pertanian lahan basah adalah tanah

yang berliat, berdebu halus, sampai berlempung halus. Tanah-tanah yang berkuarsa sangat tidak sesuai untuk pengembangan pertanian kecuali kandungan kuarsanya sedang. Potensi banjir dan genangan musiman tidak baik bagi tanaman lahan basah.

Produktivitas dan kualitas panen dapat menurun bila resiko banjir dan genangan musiman berlangsung antara 2 sampai 7 bulan tanpa adanya genangan permanen. Batas resiko banjir dan genangan yang tidak dapat ditolerir lagi adalah pada kondisi terjadi genangan permanen dan banjir musiman 7 bulan atau lebih.Berdasarkan dari hasil analisis, maka pengembangan lahan basah yang termasuk dalam tanaman pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Malunda seluas 697 Ha, Kecamatan Sendana seluas 410 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 67 Ha dan Kecamatan Ulumanda seluas 446 Ha. Sedangkan pengembangan untuk budidaya tanaman padi sawah yang bukan termasuk tanaman pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Sendana dengan luas 280 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 60 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 94 Ha dan Kecamatan Malunda seluas 503 Ha. Adapun kesesuaian lahan pengembangan pertanian lahan basah, sebagaimana pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6.
Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Lahan Basah Tahun 2024

No	Kriteria	Sesuai	Sesuai Bersyarat	Tidak Sesuai
1	Jenis Tanah	• Grumusol, Alluvial As. Hidromorp	• Latosol • Regosol	• Mediteran • Latosol
2	Lereng	0% - 15%	-	> 25%
3	Kedalaman Efektif	> 60 Cm	30 – 60 Cm	< 30 Cm
4	Tekstur Tanah	Rendah	Agak rendah dan agak tinggi	Tinggi dan sangat tinggi
5	Porositas	Rendah	Agak rendah dan agak tinggi	Tinggi dan sangat tinggi
6	Curah Hujan	1.000 – 5.000 mm	500 – 1.000 mm	< 500 mm dan > 5.000 mm
7	Drainase	Terhambat	Agak terhambat, sangat terhambat	Baik, agak cepat dan sangat cepat
8	Banjir dan Genangan Air Musiman	Tanpa banjir dan genangan	Antar 2 – 7 bulan, tanpa ada genangan permanen	> 7 bulan dan atau genangan permanen

Sumber :Laboratorium PWK-ITB

Dari hasil kesesuaian lahan diatas maka, kriteria pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Majene meliputi:

a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah dan termasuk dalam lahan pertanian berkelanjutan.

b. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah mampu memberikan manfaat:
   - Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
   - Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
   - Meningkatkan fungsi lindung;
   - Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
   - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
   - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
   - Menciptakan kesempatan kerja;
   - Meningkatkan ekspor; dan
   - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil analisis tersebut bahwa, luas lahan pemanfaatan pertanian lahan basah di Kabupaten Majene terdiri dari sesuai 1.580 Ha atau 1,6% dan sesuai bersyarat 937 Ha atau 0,98 % dari luas total Kabupaten Majene. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7.
Luas Lahan Pemanfatan Pertanian Lahan Basah Tahun 2024

No	Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sesuai	1.580	1.60
2	Sesuai Bersyarat	937	0.98
3	Tidak Sesuai	-	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

2. Pertanian Lahan Kering

Tanaman lahan kering adalah jenis tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang di lahan yang memiliki kadar air yang rendah atau tidak memiliki irigasi yang memadai. Pertanian lahan kering juga memerlukan kedalaman efektif tanah minimal 60 cm. Produktivitas dan mutu panen pada pertanian lahan kering cenderung menurun bila kedalaman efektif tanah menurun. Batas ambang kedalaman efektif tanah ini adalah 30 cm. Sedang tekstur tanah yang terbaik bagi jenis pertanian lahan kering adalah tanah yang berliat, berdebu halus, sampai berlempung halus. Dalam hal ini tanah-tanah yang berkuarsa sangat tidak sesuai untuk pengembangan pertanian

kecuali kandungan kuarsanya sedang. Potensi banjir dan genangan musiman tidak baik bagi tanaman lahan kering. Pertanian lahan kering sangat sesuai pada kelerengan 0-15 %, namun pada kelerengan antara 15 – 25 % masih memungkinkan untuk dikembangkan. Sebaran pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Majene, dimana luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai lahan kering adalah 6.218 Ha atau 6,5% dari luas Kabupaten Majene. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Lahan Kering Tahun 2024

No	Kriteria	Sesuai	Sesuai Bersyarat	Tidak Sesuai
1	Jenis Tanah	• Grumusol, Alluvial • Hidromorp	• Latosol • Regosol	• Mediteran • Latosol
2	Lereng	0% - 15%	-	> 25%
3	Kedalaman Efektif	60 Cm	30 – 60 Cm	< 30 Cm
4	Tekstur Tanah	Berliat, Berdebuhalus, Berlempung Halus	Berdebu halus dan kasar, berkuarsa sedang	Berkuarsa
5	Porositas	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sedang dan rendah	Sangat Rendah
6	Curah Hujan	1.000 – 5.000 mm	500 – 1.000 mm	< 500 mm dan > 5.000 mm
7	Drainase	Baik	Agak Ceat	Cepat, sangat cepat, terhambat, sangat terhambat
8	Banjir dan Genangan AirMusiman	Tanpa banjir dan genangan	Antar 2 – 4 bulan, tanpa ada genangan permanen	> 4 bulan dan atau genangan permanen

Sumber : Laboratorium PWK-ITB

Sesuai dengan tabel kesesuaian lahan di atas, maka kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman padi ladang dan palawija. Kriteria kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang tidak mempunyai system atau potensi pengembangan pengairan dan memiliki:

a. Ketinggian< 1000 m dan Kelerengan< 40%;
b. Kedalaman efektif lapisan tanah atas> 30 cm; dan
c. Curah hujan antara 1500 – 4000 mm per tahun.

Adapun kriteria kawasan peruntukan pertanian lahan kering meliputi:

a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan kering.
b. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan kering mampu memberikan manfaat:

- Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sector serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Meningkatkan fungsi lindung;
- Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor; dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya analisis luas lahan pemanfaatan pertanian lahan kering di Kabupaten Majene, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.9.
Luas Lahan Pemanfatan Pertanian Lahan Kering Tahun 2024

No	Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sesuai	7.713	9
2	Sesuai Bersyarat	-	-
3	Tidak Sesuai	-	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

Pengembangan budidaya tanaman padi sawah terdapat di Kecamatan sendana seluas 290 Ha, Kecamatan Tubo sendana seluas 135 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 566 Ha dan Kecamatan Malunda seluas 473 Ha. Wilayah pengembangan peruntukan budidaya tanaman padi ladang terdapat di Kecamatan Sendana seluas 465 Ha, Kecamatan Tammero'do Sendana seluas 400 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 135 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 819 Ha, dan Kec. Malunda seluas 385 Ha. Sedangkan pengembangan budidaya tanaman palawija terdapat di Kecamatan Banggae Timur seluas 200 Ha, Kecamatan Banggae seluas 300 Ha, Kecamatan Pamboang seluas 300 Ha, Kecamatan Sendana seluas 500 Ha, Kecamatan Tammerodo Sendana seluas 100 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 250 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 700 Ha dan Kecamatan Malunda seluas 500 Ha.

Berdasarkan pada tabel dibawah, memperlihatkan bahwa luas panen produktif Kabupaten Majene di Tahun 2024 untuk komoditas yang mengalami penurunan luas panen produktif yaitu komoditas padi sawah mengalami penurunan menjadi seluas 1.199 Ha, kemudian ubi jalar seluas 99 Ha, komoditas kacang hijau seluas 90 Ha, serta kacang tanah seluas 62 Ha. Sedangkan komoditas yang mengalami peningkatan luas panen produktif dari tahun sebelumnya adalah tanaman komoditas padi ladang seluas 2.384 Ha dan komoditas jagung seluas 1.325 Ha. Untuk jenis komoditas ubi kayu tidak mengalami peningkatan atau penurunan luas lahan produktif dari tahun sebelumnya dengan luas lahan 264 Ha. Adapun luas panen produktif beberapa komoditas tanaman pangan di Kabupaten Majene tahun 2020–2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.10.
Luas Panen Produktif Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditi	Luas Lahan (Ha)					Lokasi Pengembangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Padi Sawah	2.199	915	1905	1464	1.199	5 Kec.
2	Padi Ladang	4.701	4196	2488	2169	2.384	6 Kec.
3	Ubi Kayu	305	915	296	264	264	8 Kec.
4	Ubi Jalar	167	154	89	105	99	8 Kec.
5	Jagung	3.952	607	1885	1010	1.325	8 Kec.
6	Kacang Hijau	187	151	173	152	90	8 Kec.
7	Kedelai	251	*	*	*	*	8 Kec.
8	Kacang Tanah	108	93	69	87	62	6 Kec.

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

D. Sub Sektor Pertanian Hortikultura

Strategi dasar pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Majene dapat diawali dengan optimalisasi komoditas unggulan yang telah berkembang seperti pisang, mangga, dan sayuran secara terfokus dan terarah kemudian dikembangkan melalui pendekatan agribisnis dengan memperhatikan keterkaitan hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan hortikultura tidak berdiri sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan dari beberapa program dan kegiatan pengembangan antar sektor/sub sektor, antar institusi dan antar pelaku yang telah ada, yang terfokus di kawasan.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian bahwa penetapan kawasan budidaya hortikultura dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung dengan sarana dan prasarana budidaya, panen, dan pasca panen.
2. Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
3. Mempunyai akses, prasarana transportasi jalan serta pengangkutan yang mudah dan dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Tabel 2.11.
Luas Panen Produktif Per Komoditas Hortikultura
Kabupaten MajeneTahun 2020–2024

No.	Komoditas	Luas Panen Produktif (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	**Sayuran**					
1	Bawang Daun	*	17,00	*	*	15,00
2	Bawang Merah	73	61,00	76,00	78,00	81,00
3	Bawang Putih	151	*	*	*	*
4	Bayam	*	66,00	57,50	27,50	36,00
5	Buncis	*	*	*	0,50	*
6	Cabai Besar/TW/Teropong	50	39,00	90,00	87,00	198,00
7	Cabai Keriting	*	16,00	38,00	46,50	46,50
8	Cabai Rawit	107	66,00	83,00	89,50	281,00
9	Jamur Tiram	*	*	*	*	*
10	Jamur Merang	*	*	*	*	*
11	Jamur Lainnya	*	*	*	*	*
12	Kacang Panjang	*	55,00	48,00	24,50	28,50
13	Kangkung	42	57,00	42,00	35,00	33,50
14	Kembang Kol	*	*	*	*	*
15	Kentang	*	*	*	*	*
16	Ketimun	*	26,00	28,00	9,00	12,75
17	Kubis	2	*	*	*	*
18	Labu Siam	*	*	*	*	*
19	Petsai	5	6,00	8,00	5,00	6,00
20	Terung	*	39,00	38,50	25,00	23,50
21	Tomat	71	61,00	93,00	50,00	56,50
22	Wortel	*	*	*	*	*
II	**Buah-Buahan**					
1	Melon	*	2,00	6,00	5,00	4,00
2	Semangka	*	1,00	4,00	8,00	14,00

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa komoditas hortikultura yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hanya pada komoditas bawang merah, bayam, kacang panjang, ketimun, petsai, tomat, dan semangka. Rata- rata komoditas mengalami peningkatan dan yang mengalami peningkatan luas panen secara signifikan adalah komoditas Cabai besar sebesar 87 Ha di tahun 2023 meningkat menjadi 198 Ha di tahun 2024, kemudian komoditas cabai rawit dengan luas panen sebesar 89,50 Ha di tahun 2023 dan mengalami peningkatan tahun 2024 menjadi sebesar 281 Ha. Sedangkan komoditas lainnya hanya mengalami penurunan luas panen yang tidak signifikan.

Wilayah pengembangan pertanian holtikultura di Kabupaten Majene adalah seluas kurang lebih 5,776 Ha yang terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Malunda dengan komoditi andalan yaitu komoditi nasional berupa Nenas di Kecamatan Pamboang dan Komodita lokal pisang pere di Kecamatan Pamboang.

E. Sub Sektor Perkebunan

Kriteria kesesuaian lahan bagi pengembangan tanaman keras/ tahunan/perkebunan sangat beragam sesuai dengan jenis komoditinya. Pada dasarnya berbagai jenis tanaman keras dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 – 2.500 m di atas permukaan laut. Kriteria kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

1. Kawasan perkebunan (skor <125) / yang berada di luar kawasan lindung
2. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan
3. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan mampu memberikan manfaat :
    a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
    b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
    c. Meningkatkan fungsi lindung;
    d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;

e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
g. Menciptakan kesempatan kerja;
h. Meningkatkan ekspor;
i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan perkebunan ini dipergunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada:

1. Meningkatkan perekonomian penduduk di sekitar kawasan penyangga hutan lindung melalui pengembangan agroforestry yang sudah ada dengan jenis komoditas yang komersial dan memiliki keterkaitan dengan industri serta dapat memantapkan fungsi kawasan lindung;
2. Area lahan tegalan, semak/belukar atau alang-alang dengan kemiringan lahan 15 - 40 % sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga kawasan lindung;
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas perkebunan dalam mendukung pertumbuhan agroindustri;
4. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan pada kawasan yang mempunyai kelerengan lebih dari 25 % perlu dilakukan dengan land covering untuk mencegah erosi. Sedangkan pembukaan lahan perkebunan pada daerah rawa perlu dibuat drainase untuk mengeringkannya dan tetap menyisakan sebagian wilayahnya tetap berupa rawa untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah;
5. Pengawasan dan pengendalian pembukaan lahan perkebunan baru sehingga tidak terjadi overlap dengan kegiatan lainnya;
6. Perbaikan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan.
7. Pembinaan dan penyuluhan terpadu terutama untuk perkebunan rakyat dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan pengelolaan dan penanganan pasca panen.

Kawasan perkebunan dipergunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Arahan kawasan pengembangan perkebunan di Kabupaten Majene yaitu seluas kurang lebih 28.056 Ha, terdiri atas :

1. Kawasan perkebunan Kopi, terdapat di Kecamatan Ulumanda;

2. Kawasan Perkebunan Kelapa Dalam, terdapat di Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Sendana, Pamboang, Tammero'do Sendana, Tubo Sendana, dan Kecamatan Malunda;
3. Kawasan yang potensial untuk komoditas kakao yang terdapat di Sendana, Tubo Sendana, Tammero'do Sendana, Malunda, dan Ulumanda;
4. Kawasan yang potensial untuk komoditas kemiri yang terdapat di Kecamatan Tammero'do Sendana dan Tubo Sendana.

Untuk lebih jelasnya luas panen produktif komoditi unggulan sektor perkebunan Kabupaten Majene tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Luas Panen Produktif Komoditi unggulan Sektor Perkebunan Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Jenis Komoditi	Luas Lahan (Ha)					Lokasi Pengembangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kakao	13.759	13.165	13.019	12.694	11.899	8 Kec
2	Kelapa	8.318	8.273	8.218	8.124	8.107	8 Kec
3	Kemiri	2.369	*	*	*	*	-
4	Cengkeh	1.174	*	*	*	*	-
5	Kopi	707	622	622	622	622	6 Kec

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Jumlah komoditi dan luas panen produktif di Kabupaten Majene telah mengalami penurunan, terdapat 5 (lima) komoditi produktif sektor unggulan perkebunan Kabupaten Majene tahun 2019-2020 diantaranya kakao, kelapa, kemiri, cengkeh dan kopi. Kemudian berkurang menjadi 3 (tiga) komiditi unggulan di tahun 2021-2024 di antaranya kakao, kelapa, dan kopi. Luas panen terbesar di tahun 2020–2024 masih berada pada komoditas Kelapa dan komoditas kakao. Luas panen kembali mengalami penurunan secara berturut turut di tahun 2022-2024.

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2024, 2 (dua) komoditi mengalami penurunan luas panen dari tahun sebelumnya yaitu komoditas Kakao dengan luas panen sebesar 13.019 Ha lebih kecil dari tahun 2024 sebesar 11.899 Ha, dan komoditas Kelapa dengan luas panen 8.107 Ha lebih kecil dari tahun 2023 sebesar 8.124 Ha, sedangkan komoditas kopi tetap dengan luas panen yaitu 622 Ha, dan komoditas kemiri dan komoditas cengkeh sudah tidak memiliki luas panen.

F. Sub Sektor Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Majene meliputi ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam potong, itik dan itik manila. Perkembangan populasi ternak sapi pada kurun waktu 2020-2023 rata-rata mengalami peningkatan jumlah produksi, kecuali pada tahun 2024 angka masih bersifat sementara. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penduduk Kabupaten Majene memiliki ternak keluarga yang dikelola secara tradisional, namun hasilnya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan sehingga komoditas ini potensial untuk dikembangkan. Komoditi ternak kambing merupakan primadona dan bahkan daerah ini menjadi pusat peternakan Kambing di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene memiliki potensi pengembangbiakan ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing), dan juga ternak unggas. Pengembangan ternak berdasarkan jenisnya tersebar di beberapa kecamatan, yang meliputi:

1. Lokasi Peternakan Sapi terdapat di Kecamatan Sendana, Tammero'do, Tubo Sendana, Ulumanda Dan Kecamatan Malunda.
2. Lokasi Peternakan Kambing terdapat di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Banggae, dan Kecamatan Sendana.
3. Lokasi Peternakan Unggas terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang.

Tabel 2.13.
Perkembangan Komoditas Unggulan Sektor Peternakan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Jenis Komoditi	Jumlah Ternak (ekor)					Lokasi Pengembangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sapi Potong	18.508	19.015	19.296	9.637	10.102	8 Kec.
2	Kerbau	175	185	192	10	20	5 Kec.
3	Kuda	197	203	205	9	9	8 Kec.
4	Kambing	72.513	74.004	75.570	19.783	21.738	8 Kec.
5	Ayam Buras	194.927	198.823	202.799	31.892	33.956	8 Kec.
6	Ayam Potong	608.546	623.758	985.261	355.741	470.000	8 Kec.
7	Ayam Petelur	44.780	46.125	46.817	7.788	11.400	2 Kec.
8	Itik	14.751	14.750	15.435	760	768	8 Kec.
9	Itik Manila	2.744	15.542	2.871	451	456	8 Kec.

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) jenis komoditi unggulan yang mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, antara lain itik dengan jumlah produksi naik sekitar 2,29%, ayam potong jumlah produksi naik sebanyak 2,5%, ayam kampung jumlah produksi naik sebesar 2,00%, Sapi jumlah produksi naik sekitar 1,99%, kambing jumlah produksi naik sebanyak 2,15%, dan ayam petelur jumlah produksi naik sebanyak 1,49%. Itik Manila dengan jumlah produksi naik 2,29% dan Kerbau jumlah produksi sebesar 5,21%, serta kuda mengalami kenaikan jumlah produksi sebesar 6,4%.

Dalam upaya pengembangan komoditas unggulan pada sektor Peternakan, maka Pemerintah Kabupaten Majene menggarap Upaya Khusus (Upsus) Pengembangan ternak kambing jenis Peranakan Etawa (PE), sebagai langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Majene untuk dapat ditetapkan menjadi Sentra Pengembangan Kambing Nasional oleh Menteri Pertanian RI. Dalam upaya mewujudkan keseriusan menjadikan Majene sebagai Sentra Pengembangan Nasional dimana upaya tersebut telah dilakukan dalam kurung waktu tahun 2020-2024, dimana Pemerintah Kabupaten Majene melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Sentra Pembibitan Kambing pada wilayah Dusun Kaida Desa Betteng Kecamatan Pamboang.
2. Pengembangan Sentra pembibitan Kambing sesuai dengan Dokumen Grand Design Sentra Pengembangan Kambing Kabupaten Majene yang telah disusun.
3. Mengoptimalkan lahan seluas ±2 Ha sebagai lokasi Hijauan Makan Ternak dan kawasan Pengembalaan Kambing.

Untuk pengembangan wilayah pada sektor peternakan berdasarkan komoditas dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Kawasan Sentra Pengembangan Ternak Kabupaten Majene

No.	Wilayah (Kecamatan)	Jenis Komoditi
1.	Banggae	Kambing dan Ayam Buras
2.	Banggae Timur	Kambing Sapi dan Ayam Buras
3.	Pamboang	Kambing dan Sapi
4.	Sendana	Kambing dan Sapi
5.	Tammeroddo Sendana	Kambing dan Sapi
6.	Tubo Sendana	Kambing, Sapi dan Ayam Buras
7.	Malunda	Kambing, Sapi dan Ayam Buras dan Itik
8.	Ulumanda	Kambing, Sapi dan Ayam Buras

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Majene, 2024

G. Sub Sektor Perikanan

Penangkapan ikan, pelabuhan dan pengolahan ikan dipandang sebagai satu sistem. Pendekatan satu sistem pada kegiatan perikanan tersebut disebabkan masyarakat di Kabupaten Majene sudah menyatu pada kegiatan ini, sehingga lokasi penangkapan ikan, lokasi pelabuhan (penampungan) ikan dan lokasi pengolahan ikan perlu berada pada sebaran yang optimal dari perhitungan ekonomi skala masyarakat. Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

- Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
- Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Majene dibagi atas:

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Majene, terdapat di Kecamatan Banggae, Sendana dan Kecamatan Tammero'do Sendana dengan luasan kurang lebih 13,124 Km^2.
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten Majene, terdapat di Kecamatan Banggae Timur, Banggae, Pamboang, Sendana, Tubo Sendana dan Malunda dengan luas kurang lebih 600 Ha untuk budidaya di darat dan kurang lebih 500 Ha untuk budidaya laut.
3. Arahan Kawasan Budidaya Perikanan:
   - Budidaya Air Tawar terdapat di 8 (delapan) kecamatan
   - Budidaya Air Laut di sepanjang pantai di Kabupaten Majene
4. Kawasan pengolahan ikan, terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, yang diantaranya:
   - Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Palipi Desa Sendana Kecamatan Sendana;
   - Pengembangan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Majene sebanyak 300 Unit;
   - Pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI) di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, dan Desa Sendana Kecamatan Sendana; dan
   - Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Sendana Kecamatan Sendana.
5. Kawasan Industri Kapal/Pembuatan Kapal Nelayan secara resmi modern dan tradisional di semua kecamatan di Kabupaten Majene

6. Pengembangan Galangan Kapal Rakyat di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae.
7. Pengembangan *Fish Apartement* (Apartemen Ikan) sebagai habitat baru budidaya perikanan dan sebagai pengganti terumbu karang yang rusak, direncanakan di sepanjang pantai di Kabupaten Majene.

Konsepsi pengembangan infrasruktur penunjang budidaya perikanan terpadu yang diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Majene sebagai kabupaten dengan potensi aktivitas perikanan potensial di Provinsi Sulawesi Barat. Upaya- upaya yang ditempuh, antara lain:

1. Pengembangan industri kecil/kerajinan rakyat khususnya perikanan darat dan laut menuju usaha yang semakin efisien, mampu berkembang/mandiri serta mampu mendorong lapangan kerja baru;
2. Pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha kerajinan rakyat untuk kemudahan dan interaksi yang saling menguntungkan dengan dunia usaha dan lembaga perbankan dan keuangan hubungannya dalam peningkatan modal usaha;
3. Pengembangan sistem informasi dan promosi hasil-hasil industri;
4. Pembangunan industri harus tetap memperhitungkan prinsip-prinsip pemanfaatan sumberdaya kini dan masa datang, sehingga orientasi perkembangan industri senantiasa dilaksanakan berdasarkan kelestarian lingkungan dan daya dukung sumberdaya yang ada;
5. Pemberiaan kemudahan dalam hal permodalan dan pemasaran kepada industri-industri kecil dan menengah;
6. Penataan struktur industri disertai dengan penetapan kawasan pengembangan industri pada lokasi-lokasi strategis yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan;
7. Pengembangan kawasan/zona industri yang terpadu dengan mengikutsertakan para investor dalam menamkan modalnya dalam sektor industri menengah dan besar;
8. Pengembangan kawasan/zona industri yang terpadu dengan tingkat kemudahan infrastruktur dan pemanfaatan transportasi moda darat dan laut; dan
9. Kebijakan pendukung, seperti regulasi dan peraturan lainnya yang mempermudah industriawan untuk berusaha secara maksimal, yang dimulai dari kemudahan perizinan, pajak dan retribusi mulai dari proses produksi serta pasca produksi.

Pada tahun 2024 jumlah produksi ikan campuran sebesar3.670,1 ton jumlah ini lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.674,5 ton dan merupakan jenis komoditi dengan jumlah produksi terbanyak, kemudian komoditas ikan terbang yang merupakan salah satu ikon jenis ikan yang ada di Kabupaten Majene pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan jumlah produksi sebesar 1,116,2 ton dan di tahun 2023 hanya sebesar 956 ton. Untuk jenis lainnya berupa ikan tuna, cakalang, tongkol, dan ikan layang mengalami jumlah produksi menurun di tahun 2024 jika dibandingkan hasil produksi di tahun 2023. Sedangkan untuk perikanan budidaya, tidak terdapat kenaikan jumlah produksi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, hanya komoditas ikan lainnya yang mengalami peningkatan produksi yaitu sebesar 32,44 ton ditahun 2024 dan 18 ton di tahun 2023. Jenis komoditas baru yang dibudidayakan di tahun 2024 adalah komoditas udang putih yang menghasilkan jumlah produksi sebesar 4,18 ton. Untuk lebih jelasnya jenis komoditi, jumlah produksi sentra sentra produksinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15.
Perkembangan Komoditi Unggulan Sektor Perikanan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)					Lokasi Pengembangan/ Penangkapan Kecamatan
		2020	2021	2022	2023	2024	
Perikanan Tangkap							
1	Ikan Tuna	911.50	1,053.90	1,037.20	1,199.0	1,120.2	8 Kecamatan
2	Cakalang	615.90	616.20	483.90	645.2	624.3	8 Kecamatan
3	Tongkol	1.211,4	2.006,9	2,262.90	2481.1	1,753.7	8 Kecamatan
4	Layang	213,5	517,1	756.60	447.9	357.1	Banggae, Banggae Timur, Sendana, Tammerodo, Tubo Sendana, Malunda
5	Ikan Terbang	644,8	877,2	989.60	956.0	1,116.2	Banggae,Sendana,Tammerodd o Sendana, Tubo Sendana
6	Kakap Merah	437,7	793,1	1,107.60	1,032.2	1,073.6	8 Kecamatan
7	Campuran	3,795.20	3,023.10	2,283.10	2,674.5	3,670.1	8 Kecamatan
Perikanan Budidaya							
1	Udang Windu	21.1	18.2	177.2	15.4	15.36	Banggae Timur, Pamboang,Tubo Sendana dan Malunda
2	Ikan Bandeng	400.4	424	284.8	348.9	366.94	Banggae Timur,Pamboang, Sendana, Tubo Sendana,Ulumanda dan Malunda
3	Udang Vanname	383.6	141.8	154.8	243.6	238.73	Banggae Timur, Pamboang,Tubo Sendana,dan Malunda
4	Udang Putih	*	*	*	*	4.18	8 Kecamatan
5	Lainnya	178.6	147.3	23	18.0	32.44	Banggae Timur, Pamboang, sendana, Tubo Sendana, Malunda

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Selain itu capaian kinerja terkait urusan kelautan dan perikanan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir (2020–2024) memperlihatkan bahwa jumlah beberapa produksi perikanan tangkap tersebut terus meningkat, terlihat pada tahun 2023–2024 masing masing sejumlah 9.435,9 ton dan 9.715,1 ton. Sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 983,7 ton dan menurun menjadi 731,3 ton di tahun 2021, 634,8 ton tahun 2022 dan 625,9 ton tahun 2023 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 657,65 ton. Selain dari capaian indikator jumlah produksi tersebut indikator untuk konsumsi ikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2020-2024, dari 42,11 kg/orang/pertahun pada tahun 2020 naik menjadi 43,80 kg/orang/pertahun pada tahun 2024. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7,830.0	8,887.5	8,920.6	9,435.9	9.715,1
2	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (Ton)	983.7	731.3	634.8	625,9	657,65
3	Konsumsi Ikan (Kg/Orang/pertahun)	42.11	43.00	43.00	43.80	43.80

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

H. Sub Sektor Pertambangan

Litologi jenis batuan di Kabupaten Majene ditentukan berdasarkan kenampakan fisik dengan tetap mengacu pada formasi batuan. Lokasi penyelidikan/pengukuran geolistrik dan topografi di sepanjang poros jalan provinsi Trans Sulawesi Bagian Barat, Kecamatan Banggae dan Pamboang. Secara keseluruhan litologi jenis batuan daerah tersebut tersusun oleh Satuan Napal Tufaan (Qm=Quarter Marl) dan Endapan Alluvial (Qal=Quarter Alluvial) yang dijelaskan berikut ini:

1. Batuan Napal Tufaan, Periode Kwarter (Qm)

   Satuan Napal Tufaan terdiri atas perselingan antara napal tufaan dengan bongkah koral, serpin napalan, batupasir tufaan dengan lensa-lensa konglomerat.

2. Batuan Endapan Alluvial, Periode Kwarter (Qal)

Endapan Alluvial terdiri atas koral, kerikil, pasir, lempung dan lumpur. Penyebarannya sempit menempati daerah pedataran sepanjang garis pantai. Endapan ini merupakan endapan geologi muda, tidak terkonsolidasi dengan baik, dan belum terkompasi menjadi batuan (merupakan sedimen lepas).

Sektor pertambangan yang memiliki potensi dikembangkan di Kabupaten Majene pada umumnya adalah berupa tambang mineral dan batubara; minyak dan gas bumi serta air tanah. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal, maka diarahkan ekplorasi tambang ini akan mampu menyebabkan bertambahnya daya ungkit perekonomian wilayah Kabupaten Majene dan sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Selain itu harus pula dipikirkan pembangunan sumber pendapatan baru dari hasil keuntungan penambangan ini, serta revitalisasi fungsi lingkungan pasca tambang. Rincian rencana pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Majene, yaitu:

Tabel 2.17.
Potensi Pertambangan Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Komoditi	Manfaat	Lokasi (Kecamatan)
1	Batu Gamping	- Bahan baku peleburan dan Pemurnian besi dan logam - Penjernihan Air - Menghilangkan karbona	- Desa Tubo Selatan, Kec.Tubo Sendana. - Lingk. Tunda, Kec. Banggae Timur. - Desa Palipi Soreang Kec. Banggae. - Desa Mekkatta Kec. Malunda.
2	Bentonit	- Industri Sawit - Industri Kosmetika	- Desa Tinambung, Kec. Pamboang. - Desa Sula, Kec.Ulumanda.
3	Felspar	- Industri Keramik - Isolator dalam - Industri Kaca/Gelas	- Dusun Pesuloang, Kec. Pamboang.
4	Zeolit	- Menghilangkan bau - Pertukaranion	- Desa Bukit Samang, Kec. Sendana - Desa Seppong Kec. Tammerodo Sendana
5	Dasit/Andesit	- Bahan Konstruksi (Cipping) - Batu Alam - Penahan Abrasi Pantai (Boulder)	- Desa Bambangan Kec. Malunda - Kel. Lalampanua dan Desa Betteng Kec. Pamboang - Desa Tubo Kec. Tubo - Desa Kabiraan Kec. Ulumanda

No	Komoditi	Manfaat	Lokasi (Kecamatan)
6	Batu Bara	- Alternatif Bahan Bakar	- Desa Manyamba, Kec. Tammerodo Sendana - Desa Ratte Padang Kec.Tubo Sendana - Desa Tallubanua Kec. Sendana
7	Bijih Besi	- Bahan Pembuatan Besi	- Desa Sambabo Kec. Ulumanda
8	Potensi Emas	- Bahan Pembentuk Emas	- Desa Betteng Kec. Pamboang - Kec. Ulumanda - Kec. Malunda

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene Tahun 2024.

Selain potensi kawasan pertambangan mineral dan batu bara tersebut, Kabupaten Majene terdapat potensi kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, berupa:

1. Blok Malunda seluas 5.148,68 Km^2 terdapat di perairan Selat Makassar, Kec. Malunda, Ulumanda dan Tubo Sendana;
2. Blok Karama seluas 5.389,68 Km^2 terdapat di perairan Selat Makassar, Kecamatan Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana dan Tammero'do Sendana;
3. Blok Mandar seluas 4.196,25 Km^2 terdapat di perairan Selat Makassar, Kecamatan Tubo Sendana, Tammero'do Sendana, Sendana, Pamboang, Banggae dan Kecamatan Banggae Timur; dan
4. Blok South Mandar seluas 3.882 Km^2 terdapat di perairan Selat Makassar Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur.

I. Sub Sektor Industri Kecil dan Menengah

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah sehingga keberadaan dan tingkat pertumbuhan sektor industri umumnya dapat menentukan seberapa besarnya perkembangan ekonomi daerah tersebut. Melihat potensi tersebut maka program pengembangan industri di Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan-kawasan yang mempunyai bahan baku yang cukup memadai, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan tidak terletak atau berdekatan dengan kawasan lindung dan pertanian lahan basah;
2. Lokasi industri yang tidak sesuai rencana tata ruang harus dikendalikan pengembangannya dan untuk lokasi industri baru ditempatkan di zone industri yang telah direncanakan atau disekitarnya.

3. Kegiatan industri yang mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan perlu dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah industri;
4. Pengembangan kegiatan industri ditujukan untuk dapat menyerap tenaga kerja, menggalakan ekspor, dan pengembangan industri yang terkait dengan sektor pertanian;
5. Pengeluaran izin lokasi kegiatan industri baru harus di lengkapi dengan ijin pemanfaatan ruang dan persyaratan teknis yang berlaku.

Melihat potensi dan pengembangan sektor industri baik industri kecil maupun menengah di Kabupaten Majene, maka pengembangan di sektor industri diarahkan pada :

1. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Majene diarahkan dengan Pembangunan Pusat Kawasan Industri Majene.
2. Industri sedang berupa Pengolahan Ikan di Palipi Kecamatan Sendana;
3. Industri sedang berupa pembuatan es balok di Palipi Kecamatan Sendana, di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae dan di Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
4. Industri sedang berupa Penggaraman dan Pengeringan Ikan di Palipi Kecamatan Sendana;
5. Industri Sedang berupa Batu Bata dari Tanah liat di Lingkungan Leppe Kecamatan Banggae Timur;
6. Industri Sedang berupa gula Merah di Kecamatan Banggae, Pamboang, Sendana, Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda;
7. Industri sedang pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Malunda dan Ulumanda;
8. Industri sedang berupa Pembuatan Perahu di Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang dan di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
9. Industri sedang berupa Pupuk Alam di Kecamatan Sendana dan Kecamatan Malunda;
10. Industri Sedang berupa pengolahan Minyak Kelapa di Kecamatan Banggae Timur; dan
11. Industri sedang berupa Penggilingan dan pembersihan Padi-Padian di Kecamatan Malunda.

Sedangkan untuk peruntukan kawasan/lokasi industri rumah tangga (*home industry*), diarahkan pada:

1. Industri Pengolahan Minyak Kelapa di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Malunda;
2. Industri Pembuatan Perahu di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Banggae;
3. Industri Pengolahan Tebu di Kecamatan dan Kelapa di Kecamatan Banggae Timur;
4. Industri Meubel di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur;
5. Industri Pandai Besi di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae;
6. Industri Pengupasan hasil-hasil Pertanian di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda;
7. Industri penerbitan jasa Foto Copy dan Foto-Foto (Graffer) di semua kecamatan;
8. Industri Bahan Kimia berupa Arang Aktif di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tammero'do Sendana, dan Kecamatan Malunda;
9. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga di Kecamatan Banggae, Kecamatan Tubo Sendana, dan Kecamatan Ulumanda;
10. Industri Percetakan di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur;
11. Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tubo Sendana, dan Kecamatan Malunda; dan
12. Industri Makanan di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do Sendana, dan Kecamatan Malunda.

J. Sub Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Objek wisata di Kabupaten Majene meliputi objek wisata budaya, alam, bahari, maupun objek wisata buatan. Untuk pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Majene, maka beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas :
   - Kawasan Museum Mandar terletak di Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Mesjid Tua Salabose di Puncak Salabose Kelutahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Mesjid Raya/Mesjid Tua di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Upacara Maulid Nabi Muhammad SAW di Puncak Salabose Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Upacara Pa'bandangan Manu – Manu di Pettaweang Desa Kayuanging Kecamtan Malunda;
   - Kawasan Makam Tabulese di Lingkungan Camba Utara Banggae;
   - Kawasan Makam Raja-Raja Banggae di Ondongan Lingkungan Pa'leo Tobandaq Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Makam Syekh Abdul Mannan di Lingkungan Salabose Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Benteng Ammana Wewang di Desa Betteng Kecamatan Pamboang;
   - Kawasan Makam Raja-Raja Pamboang di Lingkungan Kopel Desa Lalampanua Kecamatan Pamboang;
   - Kawasan Makam Imannang di Lingkungan Pamboborang Kelurahan Baru Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Makam Lombeng Susu dan Puang Rambang di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
   - Kawasan Makam Nenenk Ular, Makam Reso dan Makam Pappesse Bassi yang terletak di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga dan Kecamatan Banggae Timur;
   - Kawasan Makam Mara'dia Parappe di Lingkungan Tangnga-Tangnga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur.
   - Kelompok Pandai Besi di Kawasan Pamboborang Desa Pamboborang Kec. Banggae sebagai Kawasan Wisata Budaya dan merupakan kawasan perindustrian tradisional; dan
   - Perayaan Budaya Cakkuriri di Kecamatan Sendana.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam dan bahari, terdiri atas:
   - Wisata Puncak Salabose Kelurahan Pangali Ali Kec. Banggae;

- Wisata Puncak Pohon Pinus di Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur;
- Wisata Puncak Sigintung di Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur;
- Wisata Agro Wisata Bambangan di Bambangan Desa Bambangan Kecamatan Malunda;
- Wisata Takkesi di Bambangan Desa Bambangan Kecamatan Malunda;
- Wisata Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
- Wisata Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
- Wisata Pantai Pasir Putih dan Terumbu Karang Pantai Leppe, Barane, Tamo dan Pangale di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
- Pantai Luaor dan Pantai Pasir Putih soreang di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
- Pantai Rewataa di Kecamatan Pamboang;
- Pulau Pantai Maluno, Pulau Idaman Tai Manu, dan Pantai Pasir Putih Bonde-Bonde serta Pulau Lere-Lerekang yang terletak di Kecamatan Sendana;
- Permandian Sungai Teppo di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae;
- Air Terjun Orongan Puawang di Lingkungan Puawang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
- Permandian Udhuhun Pokki di Galung Kecamatan Pamboang;
- Permandian Sungai Tubo di Kecamatan Tubo Sendana;
- Permandian Air Panas di Limboro dan Makula serta Wisata Wai Makula Tinggas di Kecamatan Sendana; dan
- Air Terjun Mario dan Takkulilia di Kecamatan Malunda.
- Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
- Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae; dan
- Terumbu Karang Pantai Bautapa di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur.

- Wisata Pantai Dato Kel. Baurung – Kel. Lembang Kec. Banggae Timur
- Wisata Pantai Barane Kel Baurung Kec. Banggae Timur
- Wisata Pantai Tarraujung Kel. Lalampanua Kec. Pamboang
- Wisata Pantai Baluno/Hutang Mangrove Desa Binanga Kec. Sendana
- Wisata Alam Air Panas Makula Desa Tallubanua Utara, Desa Limboro Ratte Kec. Sendana
- Wisata Pantai Ulidang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana
- Wisata Pantai Tubo Selatan Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana
- Wisata Pantai Tubo Tengah Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana
- Wisata Pantai Lembang Putih Desa Tubo Kec. Tubo Sendana
- Wisata Embung Sulai Desa Sulai Kec. Ulumanda
- Wisata Pantai Salutambung Desa Salutambung Kec. Ulumanda
- Wisata Pantai Bukit Tinggi Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda
- Wisata Alam Air Terjung Palappang Desa Paminggalan Kec. Sendana
- Wisata Alam Air Terjung Lembang Tallullotang Desa Mekkatta Kec. Malunda
- Wisata Bawah Laut Terumbu Karang Tubo Desa Tubo Selatan, Desa Tubo Tengah dan Desa Tubo Kec. Tubo Sendana.
- Agrowisata Takakesi Desa Bambangan Kec. Malunda.

3. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan, terdiri atas:
   - Kolam Renang Tirta di Deteng – Deteng kelurahan Totoli Kecamatan Banggae.
   - Pusat Rekreasi Masyarakat (Pusrekmas) Labuang di Kel. Labuang Kec. Banggae Timur
   - Taman Kota Majene Kel. Banggae Kec. Banggae
   - Perencanaan Kawasan Waterfront City Majene di Kel. Banggae-Pangali-Ali Kec. Banggae
   - Pasar Ikan Tradisional Pacitan Kel. Pangali Ali Kec. Banggae
   - Wisata Kuliner Labuang Somba di Kel. Mosso Kec. Sendana
   - Wisata Kuliner Apoleang Desa Bukit Samang Kec. Sendana
   - Wisata Kuliner Onang Desa Onang Kec. Tubo Sendana
   - Wisata Kuliner Tubo Tengah Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana

- Kawasan Pengrajin Cenderamata/Souvenir Pariwisata Tenung Sarung Sutera Mandar Desa Bonde Kec. Pamboang
- Kawasan Pengrajin Cenderamata/Souvenir/Pariwisata Nuget Ikan Parappe Kel. Labuang Kec. Banggae Timur
- Kawasan Pengrajin Cenderamata / Souvenir Miniatur Perahu Sandeq Mini Parappe Kel. Labuang Kec. Banggae Timur; dan
- Kawasan Pengrajin Cenderamata/Souvenir Pariwisata Rumah Seni Lembang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendeskripsikan bahwa kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Adapun daya tampung lingkungan hidup digambarkan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sehingga Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dipahami sebagai suatu analisis yang dilakukan dengan mengukur kemampuan suatu ekosistem guna mendukung satu atau serangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada.

Pada kajian ini, ambang batas Jasa Lingkungan penyedia digunakan untuk menganalisis kemampuan lingkungan Kabupaten Majene yang dikuantifikasi sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi DDLH. Yang dimaksud dengan "Daya Dukung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk : mendukung perikehidupan manusia, Makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara "Daya Tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Data tersebut disimpulkan dari hasil Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 yang telah mendapatkan Persetujuan Validasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat.

A. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) berbanding lurs terhadap jumlah sumber daya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlalf konsumsi penduduk. Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem.

Perhitungan DDLH penyedia pangan KLHS RPJMD. Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 dilakukan secara spasial menggunakan grid dengan resolusi 5"x5" G150 m x 150 m), sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan. ambang batas penduduk, dan status DDLHnya. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKIE). AKE adalah besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian. yaitu sebesar 2.150 kkal/orang/hari. Sedangkan Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan di Kabupaten Majene dalam satu tahun, yang kemudian dikonversi ke satuan kilo-kalori (kkal). Ketersediaan pangan tersebut selanjunya didistribusikan ke setiap grid, dengan menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IEPBP) sebagai bobot pendistribusian. Kebutuhan pangan di Kabupaten Majene tahun 2029 dari penduduk proyeksi sebesar 199.013 jiwa yaitu 14.574,113 Kkal dengan luasan ketersediaan pangan yaitu 1,867,40 Kkal, yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18.
Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Majene Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Kkal)	Ketersediaan Pangan (Kg)
1	Banggae	49.878	3.627,448	55,25
2	Banggae Timur	34.133	2.416,998	95,07
3	Pamboang	28.566	2.018,357	276,78
4	Sendana	14.398	2.077,040	132,36
5	Tammero'do	11.170	1.083,110	115,59
6	Tubo Sendana	22.829	831,900	397,59
7	Ulumanda	11.197	839,922	199,99
8	Malunda	26.842	1.679,338	594,77
Jumlah		**199.013**	**14.574,113**	**1.867,40**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2024.

Setelah diperoleh sebaran kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, selanjutoya dihitung nilai selisih ketersediaan bahan pangan. Kabupaten Majene didominasi oleh selisih ketersediaan yang bemilai positif disetiap kecamatan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Majene masih dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan ini menggunakan konsep insitu, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kabupaten Majene tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Jadi, jika terjadi selisih negatif tidak mengindikasikan bahwa pada daerah tersebut terjadi kelaparan.

Penentuan status daya dukung penyedia pangan sendiri dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk tahun proyeksi, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa status daya dukung pangan di Kabupaten Majene Tahun 2029 Belum Melampaui Ambang Batas sebesar 85,1 5% dan sudah melampaui sebesar 14,85%. Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui ambang batas pada tahun 2029 paling luas berada di Kecamatan Pamboang dengan luas 4.664,13 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Ulumanda dengan luas 30.186,01 Ha Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Majene Tahun 2029 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19.
Status Daya Dukung Pangan Di Kabupaten Majene Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Status Pangan 2029		Luas (Ha)
			Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
1	Banggae	49.878	297,71	1.704,40	2.002,10
2	Banggae Timur	34.133	1.018,01	2.686,60	3.704,61
3	Pamboang	28.566	2.965,43	4.664,13	7.629,56
4	Sendana	14.398	11.701,07	2.128,55	13.829,6062
5	Tammero'do	11.170	7.028,18	177,04	7.205,23
6	Tubo Sendana	22.829	6.177,22	141,38	6.318,60
7	Ulumanda	11.197	30.186,01	1.325,00	31.511,01
8	Malunda	26.842	20.240,85	1.062,05	1.302,90
Jumlah		**199.013**	**79.614,48**	**13.889,15**	**93.503,63**
Persentase		**-**	**85,15**	**14,85**	**100**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2024.

B. Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia air dianalisis secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (i) perhitungan ketersediaan air, (i) perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, (iii) perhitungan ambang batas penduduk, dan (iv) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Empat tahapan tersebut dilakukan pada sistem grid dengan resolusi 5"x5" (t150 m X 150 m). Total ketersediaan air Kabupaten Majene bersumber dari SK. No 146 MENLHK 1.2.2023. Kemudian dihitung dengan mendistribusikan ketersediaan air di setiap kecamatan pada Kabupaten Majene dengan menggunakan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air (JEPA) sebagai bobot pendistribusian.

Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan air untuk 1ahan dan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air lahan dihitung berdasarkan jenis penutupan lahan. Penutupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airya adalah sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, dan tambak. Sementara itu, kebutuhan air domestik dihitung berdasark an kebutuhan air untuk hidup layak per kapita, yaitu sebesar 43,³ m3 /tahun. Dalam perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai *safety factor.* Distribusi kebutuhan dan ketersediaan air di Kabupaten Majene Tahun 2029 ditunjukkan pada sebagai berikut.

Tabel 2.20.
Kebutuhan dan Ketersediaan Air Kabupaten Majene Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air (M^3)	Kebutuhan Air Domestik (M^3)	Kebutuhan Air Lahan (M^3)	Total Kebutuhan Air (M^3)
1	Banggae	49.878	3.079,459	4.336,675	11.060,401	15.397,076
2	Banggae Timur	34.133	5.906,833	2.889,562	19.785,683	22.675,244
3	Pamboang	28.566	15.523.702	2.412,979	37.291,669	39.704,649
4	Sendana	14.398	32.292,013	2.483,136	17.497,422	19.980,558
5	Tammero'do	11.170	15.089,799	1.294,877	1.915,970	3.210,848
6	Tubo Sendana	22.829	15.501,366	994,550	1.611,753	2.606,303
7	Ulumanda	11.197	76.376,539	1.004,141	10.867,647	12.875,323
8	Malunda	26.842	53.315,292	2.007,677	21.812,474	22.816,615
Jumlah		**199.013**	**14.574,113**	**1.867,40**	**121.843,020**	**139.266,617**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2024.

Berdasarkan Gambaran tabel di atas menunjukkan bahwa kebutuhan air di Kabupaten Majene hingga tahun 2029 dari total penduduk proyeksi sebesar 199.013 jiwa yaitu 121.843,020 m^3 dengan luas ketersediaan air 217.080,003 m^3. Kecamatan dengan kebutuhan air domestik tertinggi adalah Kecamatan Banggae sebesar 4.336,675 m^3 dan Kecamatan Banggae Timur sebesar 2.889,562 m^3. Sedangkan kecamatan dengan kebutuhan air lahan tertinggi adalah Kecamatan Pambaoang sebesar 37.291,669 m^3 dan Kec. Ulumanda sebesar 21.812.474 m^3. Adapun kecamatan dengan kebutuhan air tertinggi adalah Kecamatan Pamboang dengan nilai total kebutuhan air sebesar 39.704,649 m^3.

Dalam perspektif pengembangan wilayah, penggunaan konsep ambang batas pada Daya Dukung Lingkungan Hidup (DLH) bertujuan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, ambang batas ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membatasi pertumbuhan. DDLH digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dapat dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk. Artinya, peningkatan jumlah penduduk tanpa ada peningkatan jumlah sumber daya akan menyebabkan DDLH semakin mendekati ambang batasnya.

Sama halnya dengan penentuan status daya dukung penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk tahun proyeksi, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH air wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDL H air terlihat bahwa status daya dukung air di Kabupaten Majene Tahun 2029 Belum Melampaui Ambang Batas sebesar 82,89% dan sudah melampaui sebesar 17,11%. Status Daya Dukung Air di Kabupaten Majene Tahun 2029 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.21.
Status Daya Dukung Air Di Kabupaten Majene Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Status Pangan 2029		Luas (Ha)
			Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
1	Banggae	49.878	296,64	1.705,46	2.002,10
2	Banggae Timur	34.133	704,95	2.997,66	3.704,61
3	Pamboang	28.566	2.806,09	4.823,48	7.629,56

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Status Pangan 2029		Luas (Ha)
			Belum Melampaui Ambang Batas	Telah Melampaui Ambang Batas	
4	Sendana	14.398	11.549,41	2.280,21	13.829,62
5	Tammero'do	11.170	6.963,92	241,31	7.205,23
6	Tubo Sendana	22.829	6.103,49	215,11	6.318,60
7	Ulumanda	11.197	29.199,27	1.426,75	31.511,01
8	Malunda	26.842	19.876,15	2.311,73	1.302,90
Jumlah		**199.013**	**77.501,93**	**16.001,71**	**93.503,63**
Persentase		**-**	**82,89**	**17,11**	**100**

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2024.

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang telah melampaui ambang batas pada tahun 2029 paling luas berada di Kecamatan Pamboang dengan luas 4.823,48 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Ulumanda dengan luas 29.199,27 Ha.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan salah satu pilar strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Konsumsi listrik per kapita menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat akses masyarakat terhadap energi listrik serta kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial di suatu daerah. Dalam periode 2020-2024, Kabupaten Majene menunjukkan tren peningkatan konsumsi listrik per kapita, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi lokal, perluasan rasio elektrifikasi, dan investasi infrastruktur kelistrikan, seperti penyediaan jaringan listrik ke wilayah pedesaan dan kepulauan. Namun, tantangan seperti keterbatasan pasokan listrik, ketergantungan pada sumber energi fosil, dan distribusi yang belum merata masih menjadi fokus perhatian untuk memastikan ketahanan energi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Majene relatif rendah, mencerminkan tantangan akses listrik di wilayah terpencil dan dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan bertahap seiring pemulihan ekonomi, peningkatan investasi di sektor perikanan dan

pariwisata, serta program pemerintah untuk memperluas akses listrik melalui jaringan PLN dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) skala kecil, seperti pembangkit listrik tenaga surya. Pada tahun 2024, konsumsi listrik per kapita di Majene diperkirakan mencapai sekitar 360 kWh, sejalan dengan proyeksi Dinas ESDM Sulawesi Barat, meskipun masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 1.408 kWh/kapita. Untuk periode 2025-2029, RPJMD Kabupaten Majene akan memprioritaskan peningkatan konsumsi listrik per kapita melalui investasi di sektor industri pengolahan, pengembangan EBT, dan digitalisasi layanan kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Targetnya adalah mendekati angka 500 kWh/kapita pada tahun 2029, dengan fokus pada pemerataan akses dan efisiensi energi.

Selain itu, telah direncanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau tenaga angin di wilayah Kecamatan Banggae (Kelurahan Totoli, Kelurahan Rangas, Desa Pamboborang dan Desa Palipi Soreang) dan Kecamatan Pamboang (Desa Bonde dan Desa Buttu Pamboang) Kabupaten Majene dengan jumlah menara kincir angina atau turbin sebanyak 15 menara yang menghasilkan 60-70 MW untuk dapat menyuplai kebutuhan 150 ribu hingga 250 ribu rumah. Perencanaan tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 50 hektar lahan untuk pembangunan 15 turbin, termasuk jalur penghubung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene untuk periode Tahun 2020-2040.

B. Ketahanan Air

Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Kabupaten Majene memiliki beberapa upaya untuk meningkatkan ketahanan air melalui pemanfaatan secara maksimal potensi sumber daya air, perlindungan hutan mangrove yang dapat membantu mengendalikan erosi dan banjir rob dan mengembangkan inovasi teknologi *remote sensing* untuk memantau kualitas air dan kondisi perairan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene. Lebih jelasnya persentase jumlah rumah tangga berakses air minum Kabupaten Majene tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	174.407	175.788	177.390	181.360	188.780
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	34.881	35.158	35.478	36.272	37.756
3	Jumlah Rumah Tangga berkases air minum (RT)	24.180	24.445	25.306	24.793	27.079
4	Jumlah Rumah Tangga tidak berakses air minum (RT)	10.702	10.713	10.172	11.479	10.677
5	Persentase Rumah Tangga berakses air minum (%)	69,32	69,53	71,33	68,35	71,72
6	Persentase Rumah Tangga tidak berakses air minum (%)	30,68	30,47	28,67	31,65	28,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, 2025

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum di Kabupaten Majene pada tahun 2024 sebesar 71,72% atau sebanyak 27.079 rumah tangga yang berakses air minum dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum sebesar 28,28% atau sebanyak 10.677 rumah tangga. Angka ini kembali meningkat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 68,35% atau sebanyak 24.793 rumah tangga yang berakses air minum dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum sebesar 31,65% atau sebanyak 11.479 rumah tangga. Dari 71,72% penduduk yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Majene merupakan sambungan dari PDAM Kab. Majene dan beberapa program lainnya yang bersentuhan langsung dengan penyediaan air minum (Pamsimas dan Hibah Air Minum).

C. Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator strategis yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan bagi seluruh penduduknya. Kabupaten Majene menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah, mengingat pentingnya pangan sebagai hak dasar manusia dan fondasi kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya peningkatan produksi pangan lokal,

penguatan kelembagaan petani, serta perbaikan infrastruktur distribusi pangan terus dilakukan guna menjaga kestabilan pasokan dan menekan ketergantungan pada pangan dari luar daerah.

Meskipun terdapat sejumlah kemajuan, tantangan terhadap pencapaian ketahanan pangan yang tangguh masih perlu diatasi, seperti fluktuasi harga pangan, dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, serta ketimpangan akses pangan di wilayah terpencil. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai IKP melalui pendekatan lintas sektor, termasuk pengembangan teknologi pertanian, edukasi gizi, dan peningkatan data pangan yang akurat dan responsif serta peningkatan koordinasi lintar sektor terkait. Dengan strategi yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Majene optimis dapat mewujudkan sistem pangan yang kuat, tanggap terhadap krisis, dan menjamin pemenuhan kebutuhan gizi seluruh warganya secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional dari tahun 2020-2024, bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Majene pada tahun 2020 berada diangka 73,71 dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 5,08 atau sebesar 68,63. Tahun 2022 kembali menurun diangka 61,63 dan mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 4,70 atau sebesar 66,33. Hingga tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 0,53 atau berada diangka 65.80.

Gambar 2.9.
Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Majene
Tahun 2020-2024

Sumber : Situs Badan Pangan Nasional, 2025

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat ketahanan pangan suatu daerah, yang mencerminkan persentase penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum hariannya. Di Kabupaten Majene, meskipun belum tersedia data spesifik PKKP per tahun, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Pemerintah daerah melalui program ketahanan pangan, penyuluhan gizi, serta penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga, terus mendorong agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kemampuan konsumsi pangan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Seperti halnya data indeks ketahanan pangan, data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional dari tahun 2020-2024, bahwa Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada tahun 2020 berada diangka 7,45 % dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 2,41 atau sebesar 9,86 %. Untuk tahun 2022 kembali menurun diangka 9,25 % dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 2,59 % atau sebesar 6,66 %. Hingga akhir tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 1,19 % atau berada diangka 5.47 %.

Gambar 2.10.
Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

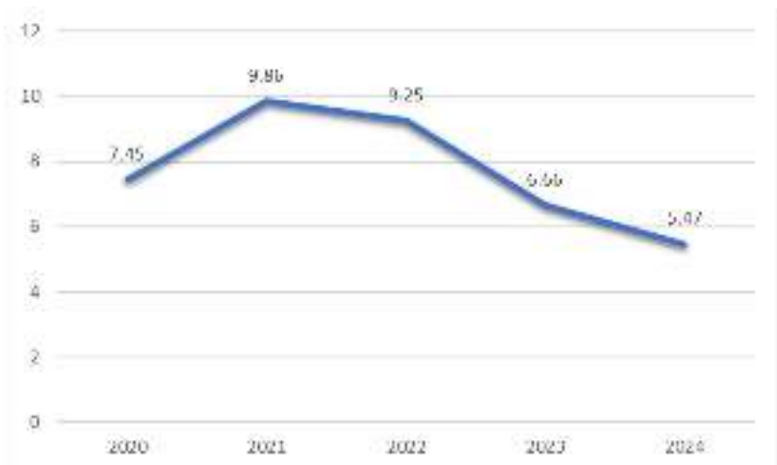

Sumber : Situs Badan Pangan Nasional, 2025

Namun demikian, tantangan terhadap ketahanan pangan masih cukup signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, dan lansia. Faktor keterbatasan daya beli, distribusi pangan yang belum merata, serta rendahnya kesadaran akan konsumsi pangan bergizi menjadi penyebab utama ketidakcukupan konsumsi pangan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dengan program pangan, pemantauan data PKKP secara berkala, serta penguatan sinergi antar-sektor untuk menekan angka ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Majene. Mewujudkan masyarakat yang bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi adalah pondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lingkungan hidup berkualitas adalah lingkungan yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKL). Untuk lebih jelas komponen perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Majene Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23.
Komponen Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	60.33	61,43	61,11	66,00	70,00
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	81.74	88,16	86,90	88,95	92,76
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	58.90	64,04	64,04	65,03	65,63
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,99	72,83	72,20	75,08	78,76

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Majene, 2025

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IKLH Kabupaten Majene sebesar 66,99 dari komponen perhitungan IKA sebesar 60,33, IKU sebesar 81,74 dan IKL sebesar 58,90. Sampai tahun 2021 IKLH meningkat diangka 72,83 dari komponen perhitungan IKA sebesar 61,43, IKU sebesar 88,16 dan IKL sebesar 64,04. Kembali menurun di tahun 2022 IKLH diangka 72,20 dari komponen perhitungan IKA sebesar 61,11, IKU sebesar 86,90 dan IKL sebesar 64,04. Perkembangan membaik pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2023 IKLH meningkat diangka 75,08 dari komponen perhitungan IKA sebesar 66,00, IKU sebesar 88,95 dan IKL sebesar 65,03 dan pada tahun 2024 IKLH Kabupaten Majene berada diangka 78,76 dengan komponen perhitungan IKA sebesar 70,00, IKU sebesar 92,76 dan IKL sebesar 65,63. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Majene masih tergolong baik.

B. Volume Sampah Tertangani

Meningkatnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat, dan kemajuan teknologi akan meningkatkan jumlah timbulan sampah. Sampah yang belum terkelola akan menimbulkan banyak masalah seperti sumber penyakit, tercemarnya lingkungan, banjir, dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk menimbun sampah. Paradigma lama pengelolaan sampah dengan sistem kumpul-angkut-buang hingga saat ini masih diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Majene. Untuk lebih jelasnya persentase jumlah volume sampah yang ditangai di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Persentase Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah (Ton)	24.685	25.463	25.899	25.899	33.098
2	Timbulan sampah yang ditangani (Ton)	15.779	9.636	11.242	7.468	8.251
3	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	3,60	2,01	3,07	2,94	3,80
4	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	63,92	37,84	43,41	28,83	24,93

Sumber : Neraca Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Majene, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa timbunan sampah di Kabupaten Majene setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sampah yang tertangani setiap tahunnya mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2020 timbulan sampah di Kabupaten Majene mencapai 24.685 ton per tahun dan mampu ditangani sebesar 15.779 ton pertahun atau sekitar 63,92 %, mengalami penurunan di tahun 2021 dimana timbulan sampah bertambah menjadi 25.463 ton per tahun dan mengalami penurunan sampah yang tertangani sebesar 9.636 ton per tahun atau sekitar 37,84 %. Tahun 2022-2023, timbulan sampah Kembali meningkat diangka 25.899 ton dan hanya mampu ditangani sebanyak 11.242 ton atau sekitar 43,41 % tahun 2022 sedangkan tahun 2023 sampah tertangani sebesar 7.468 ton atau sebesar 28,83%. Hingga tahun 2024 jumlah timbulan sampah Kembali bertambah menjadi 33.098 ton dan tertangani sebanyak 8.251 ton atau sebesar 24,93 %. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam periode lima tahun, kinerja pengelolaan sampah mengalami penurunan.

Sedangkan persentase jumlah sampah yang tertangani melalui proses 3R berfluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 hanya mampu ditangani sebesar 3,60% dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 2,01 %. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan jumlah sampah yang ditangani menjadi 3,07 % dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 2,94 %. Hingga akhir tahun 2024, persentase sampah yang terkurangi melalui 3R hanya sebesar 3,80 %.

C. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana rumah tangga memiliki akses ke layanan pengumpulan sampah yang memadai. Layanan penuh pengumpulan sampah dapat diartikan sebagai layanan yang memenuhi standar tertentu, seperti Pengumpulan sampah secara teratur, Pengumpulan sampah yang mencakup semua jenis sampah, Pengumpulan sampah yang dilakukan oleh petugas yang terlatih dan Pengumpulan sampah yang tidak menimbulkan masalah lingkungan atau Kesehatan.

Gambar 2.11.
Grafik Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

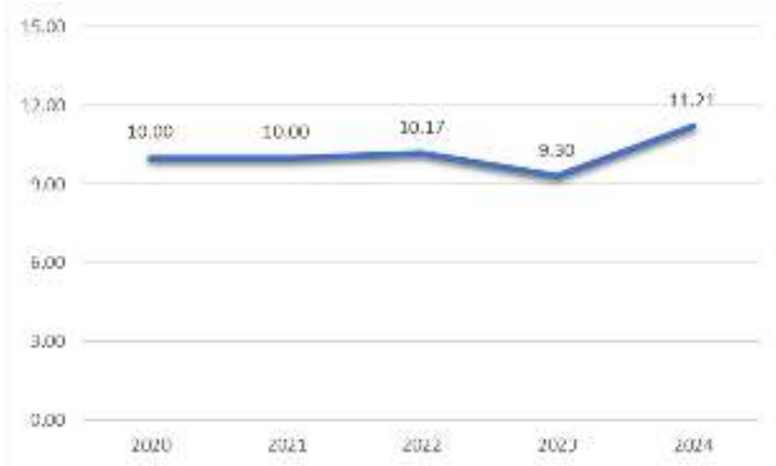

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

Berdasarkan data grafik tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene bahwa pada tahun 2020-2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah berada dikisaran 10 % dan mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan sebesar 0,17 % atau sekitar 10,17% pada tahun 2022. Tahun 2023 Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kembali menurun sebesar 0,87 % atau berada diangka 9,30 % dan hingga tahun 2024 kinerja layanan Kembali meningkat sebesar 1,91 % atau sebesar 11,21 %.

Dengan mengukur proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, pemerintah dan penyedia layanan Kabupaten Majene dapat memonitoring dan mengevaluasi efektivitas layanan pengumpulan sampah, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, meningkatkan aksesibilitas layanan pengumpulan sampah bagi rumah tangga maupun fasilitas umum lainnya dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat pada setiap tahunnya.

D. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak merujuk pada proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Fasilitas sanitasi layak dapat mencakup jamban yang higienis, jamban yang tertutup, memiliki

saluran pembuangan yang baik, dan tidak mencemari lingkungan, saluran pembuangan limbah, saluran pembuangan limbah yang tertutup dan tidak mencemari lingkungan, akses ke air bersih dan akses ke air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut disajikan tabel persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024, sebagai berikut.

Tabel 2.25.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kabupaten Majene
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (RT) Layak	24.766	25.184	25.051	25.808	26.958
2	Jumlah Rumah Tinggal (RT)	34.881	35.158	35.478	36.272	37.756
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	71,00	71,63	70,61	71,15	71,40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, 2025

Pada tabel di atas dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi cenderung fluktuasi, dimana dari tahun 2020 hingga tahun 2021 meningkat dari angka 71,00 % atau sebanyak 24.766 rumah tangga menjadi 71,63 % atau sebanyak 25.184 rumah tangga dan terjadi penurunan di tahun 2022 dikisaran angka 70,61 % atau sebanyak 25.051 rumah tangga yang disebabkan oleh adanya bencana gempa bumi di wilayah Kecamatan Malunda dan Ulumanda serta disusul bencana banjir bandang yang menimpa wilayah Kecamatan Malunda yang menyebabkan kerusakan beberapa sarana sanitasi pada wilayah tersebut. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 71,15 % atau sebanyak 25.808 rumah tangga dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 71.40 % atau sebanyak 26.958 rumah tangga.

Manfaat akses sanitasi layak antara lain meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi yang buruk. Meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Mengurangi beban ekonomi dengan mengurangi biaya pengobatan dan perawatan kesehatan yang terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

2.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Kabupaten Majene, sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Barat, menghadapi tantangan besar dalam mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim. Upaya penurunan intensitas emisi GRK di Kabupaten Majene dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pengelolaan lahan yang berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengendalian deforestasi. Program reboisasi dan pengembangan pertanian ramah lingkungan telah diterapkan untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan pertanian, yang merupakan penyumbang utama GRK di wilayah ini. Selain itu, pemerintah daerah mendorong penggunaan energi surya untuk kebutuhan rumah tangga dan fasilitas publik guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Hingga bulan Mei tahun 2025, perhitungan GRK di Kabupaten Majene belum pernah dilaksanakan sehingga pemerintah daerah tetap mengupayakan untuk dilakukan proses perhitungan capaian pengurangan GRK di tahun-tahun sebelumnya dan bahkan mengupayakan untuk mengestimasi besaran penurunan emisi GRK untuk target lima tahun kedepan (2025-2030).

Akan tetapi berdasarkan hasil kesepakatan forum desk Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada kegiatan Forum Bapperida se Sulawesi Barat, Kabupaten Majene ditetapkan target penurunan GRK untuk tahun 2025-2026, dimana pada tahun 2025 target Kabupaten Majene untuk GRK Komulatif sebesar 91.380,68 Ton CO_2e, sedangkan GRK Tahunan sebesar 10.639,83 Ton CO_2e. Sehingga target Intensitas GRK Kabupaten Majene jika dibagi dengan PDRB ADHK 2010 tanpa dipengaruhi inflasi untuk tahun 2025 sebesar 48,9 Ton CO_2e dan tahun 2026 sebesar 45,39 Ton CO_2e.

Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan dalam mencapai target penurunan emisi yang signifikan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pelibatan komunitas lokal dalam

program edukasi tentang dampak GRK serta peningkatan kapasitas teknologi hijau diharapkan dapat memperkuat komitmen Majene dalam menekan intensitas emisi. Keberhasilan ini tidak hanya mendukung ketahanan iklim, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

B. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Majene memiliki risiko bencana yang cukup tinggi karena letak geografisnya yang rawan gempa bumi, tsunami, dan banjir, yang diperparah oleh dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem. Indeks Risiko Bencana (IRB) di Majene menunjukkan bahwa sejumlah wilayah pesisir dan dataran rendah memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi dan geologi. Untuk mengurangi risiko ini, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan zona bahaya dan memperkuat sistem peringatan dini, seperti instalasi sensor gempa dan sirene tsunami. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang tidak terduga.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Majene sebagaimana yang diril oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional melalui Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dalam kurung waktu 2020-2024, Kabupaten Majene termasuk dalam kategori kelas risiko tinggi tetapi dalam kurung waktu tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan tingkat risiko meskipun penurunan tersebut tidak begitu signifikan. Dari tahun 2020-2021 Kabupaten Majene secara nasional berada pada peringkat 2 dan secara provinsi berada pada peringkat 1 dengan poin IRBI sebesar 216,08 tahun 2020 dan 217,62 di tahun 2021. Pada tahun 2022 Kabupaten Majene mengalami peningkatan, dimana secara nasional sudah berada pada posisi ke 8 meskipun secara provinsi masih tetap berada pada peringkat 1 dengan nilai IRBI sebesar 208,30. Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan sudah berada pada posisi ke 22 secara nasional dan masih berada pada posisi 1 di tingkat provinsi dengan nilai IRBI sebesar 186,83. Tahun 2024 kembali menunjukkan peningkatan yang cukup baik dengan nilai IRBI sebesar 171,16 poin sehingga secara nasional sudah berada pada peringkat ke 50 dan ditingkat provinsi berada pada peringkat 2. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.12.
Grafik Perkembangan Indeks Resiko Bencana
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

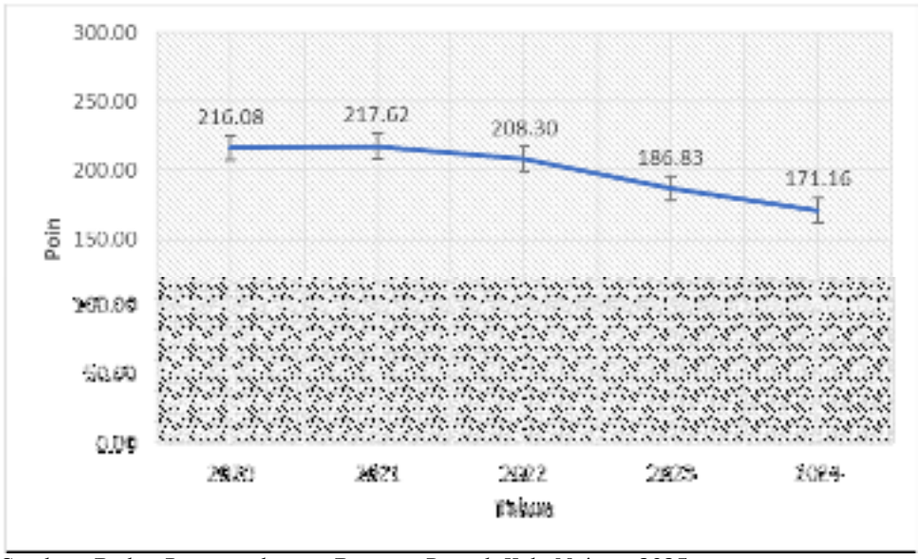

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Majene, 2025

Tingkat risiko bencana Kabupaten Majene masih dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, seperti tingkat kemiskinan dan rendahnya akses terhadap infrastruktur tangguh bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana dan simulasi evakuasi. Selain itu, penguatan regulasi tata ruang berbasis risiko bencana diterapkan untuk mencegah pembangunan di zona rawan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Indeks Risiko Bencana di Majene dapat terus menurun, sehingga kerugian akibat bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.

C. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Majene mencerminkan kemampuan wilayah untuk bertahan dan pulih dari guncangan bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Faktor utama yang mendukung ketahanan daerah meliputi infrastruktur tangguh, kesiapan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Pemerintah daerah telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur fisik, seperti tanggul penahan banjir dan bangunan tahan gempa, serta memperkuat sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan di tengah variabilitas iklim. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan diversifikasi mata pencaharian, membantu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga di wilayah rawan bencana.

Meskipun telah ada kemajuan, IKD di Majene masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan pendanaan untuk program ketahanan jangka panjang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memanfaatkan teknologi serta inovasi, Majene dapat terus meningkatkan indeks ketahanan daerahnya, sehingga mampu menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim dengan lebih baik di masa depan.

2.1.7. Kondisi Demografi

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk seperti wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Data perkembangan jumlah penduduk yang tersaji dalam sistem pendataan merupakan akumulasi dari faktor-faktor tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Majene periode tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.26.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene
Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banggae	43.304	43.665	44.080	45.083	46.316
2	Banggae Timur	30.304	30.598	30.650	31.108	34.865
3	Pamboang	23.059	24.279	24.511	25.065	25.750
4	Sendana	24.147	24.568	24.868	25.503	26.279
5	Tammerodo	12.646	12.785	12.947	13.279	13.261
6	Tubo Sendana	9.759	9.859	9.980	10.231	10.370
7	Malunda	19.894	20.079	20.288	20.770	21.163
8	Ulumanda	9.839	9.949	10.066	10.321	10.776
Kabupaten Majene		**174.407**	**175.788**	**177.390**	**181.360**	**188.780**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Gambar 2.13.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene
Tahun 2020 – 2024

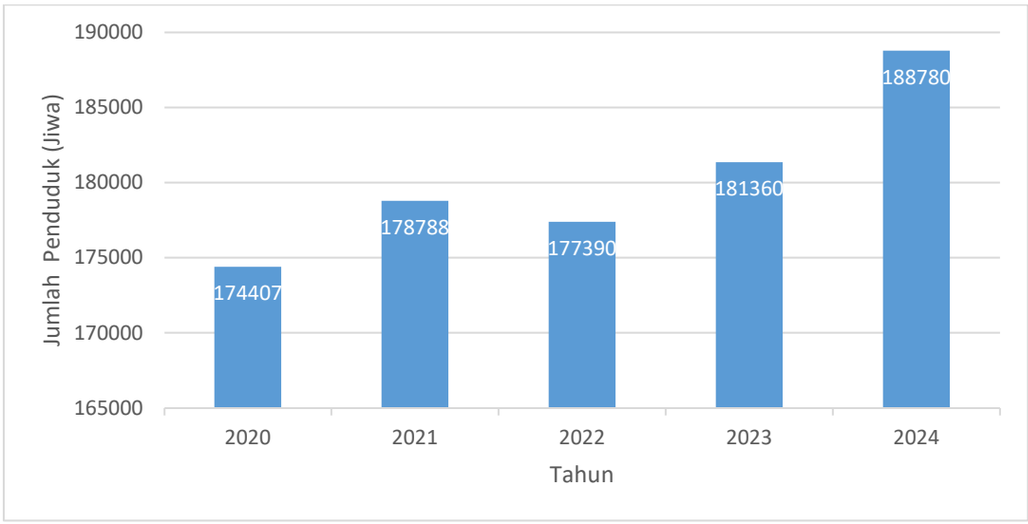

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Majene dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan angka peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 174.407 jiwa dan tahun 2021 berjumlah 175.788 jiwa, pada tahun 2022 dan 2023 terus mengalami kenaikan masing-masing berjumlah 177.390 jiwa dan 181.360 jiwa hingga pada tahun 2024 mencapai 188.780 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun (2020-2024) sekitar 7,61 %.

Gambar 2.14.
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Majene Periode 2020 – 2024

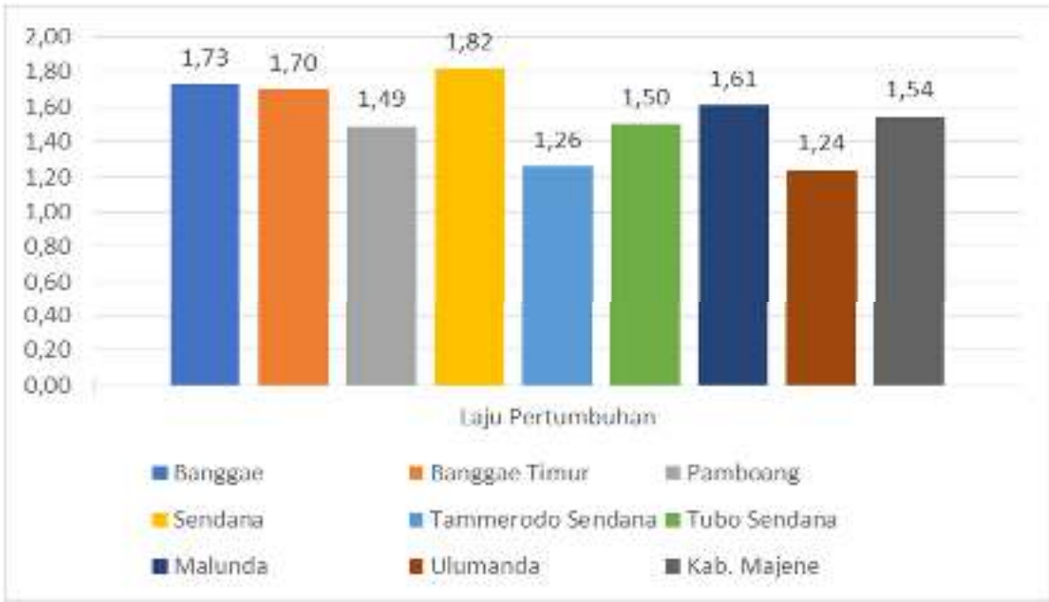

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Berdasarkan pada grafik diatas, memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Majene pada periode 2020-2024, dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sendana Sebesar 1,82%, kemudian Kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang masing-masing sebesar 1,73% dan 1,70% sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Ulumanda yaitu sebesar 1,24%.

B. Rasio Penduduk

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Majene Tahun 2024 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin/Sex Ratio (SR) penduduk Kabupaten Majene adalah 99 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi berada pada Kecamatan Tameroddo Sendana dengan angka 102,46 sedangkan rasio terendah berada pada Kecamatan Banggae Timur sebesar 97,41 dimana jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Untuk lebih jelasnya lihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27.
Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1	Banggae	100,01
2	Banggae Timur	97,41
3	Pamboang	100,08
4	Sendana	100,14
5	Tammerodo	102,46
6	Tubo Sendana	100,39
7	Malunda	100,77
8	Ulumanda	104,40
Kabupaten Majene		**100,07**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Majene Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Majene Tahun 2025 menunjukan jumlah penduduk Kabupaten Majene menurut jenis kelamin, dimana penduduk laki-laki sebesar 94.424 jiwa atau sebesar 49,88% sedangkan penduduk perempuan sebesar 90.719 jiwa atau sebesar 50,12%.

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Dengan memiliki data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang akurat dan terkini, pemerintah dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk serta data ini digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk kelompok umur dan jenis kelamin yang berbeda.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Majene Tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 20-24 tahun memiliki jumlah yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya dengan jumlah penduduk sebesar 19.049 jiwa yang terbagi kedalam jenis kelamin laki-laki sebesar 9.666 jiwa dan perempuan sebesar 9383 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 101 jiwa. Sedangkan persentase penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah berada pada kisaran umur 70-74 tahun dengan dengan jumlah penduduk sebesar 2.714 jiwa yang terbagi kedalam jenis kelamin laki-laki sebesar 1.179 jiwa dan perempuan sebesar 1535 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100 jiwa. Untuk rasio jenis kelamin secara keseluruhan, kelompok umur 75+ memiliki rasio terendah dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Untuk lebih jelasnya Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (5 Tahunan) Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 2.28.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	0-4	7.945	7.525	15.470	105,58
2	5-9	9.854	9.069	18.923	108,66
3	10-14	9.630	9.068	18.698	106,20
4	15-19	9.954	9.452	19.406	105,31
5	20-24	9.666	9.383	19.049	103,02
6	25-29	8.167	7.862	16.029	103,88
7	30-34	6.873	6.534	13.407	105,19
8	35-39	6.392	6.572	12.964	97,26
9	40-44	5.969	5.818	11.787	102,60
10	45-49	4.997	5.479	10.476	91,20
11	50-54	4.676	4.831	9.507	96,79
12	55-59	3.532	3.943	7.475	89,58
13	60-64	2.506	2.870	5.376	87,32
14	65-69	1.700	2.208	3.908	76,99
15	70-74	1.179	1.535	2.714	76,81
16	75+	1.384	2.207	3.591	62,71
Jumlah		**94.424**	**94.356**	**188.780**	**100,00%**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Gambar 2.15.
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (5 Tahunan)
Dan Jenis Kelamin Kabupaten Majene Tahun 2024

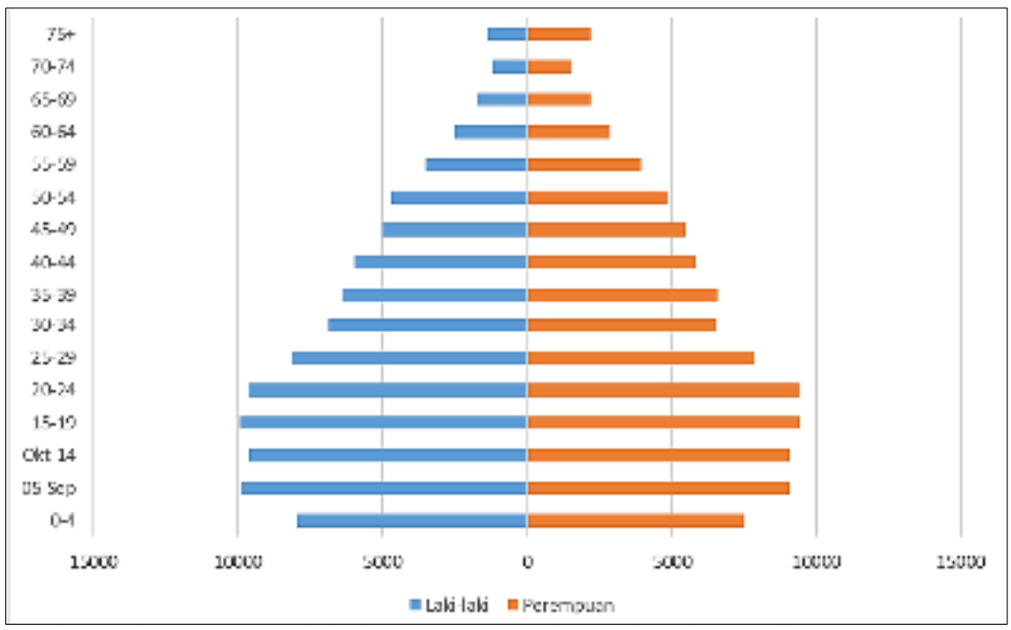

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

D. Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk suatu wilayah berdasarkan batas-batas geografis maupun batas-batas administrasi pemerintahan yang memberi gambaran terhadap pola persebaran permukiman dan kecenderungannya. Pada dasarnya jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut. Secara rinci persebaran dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majene diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)
1	Banggae	25,15	8	46.316	1841,59
2	Banggae Timur	30,04	9	34.865	1160,62
3	Pamboang	70,19	15	25.750	366,86
4	Sendana	82,24	16	26.279	319,54
5	Tammerodo	55,40	7	13.261	239,37
6	Tubo Sendana	41,17	7	10.370	251,88
7	Malunda	187,65	12	21.163	112,78
8	Ulumanda	456,00	8	10.776	23,63
Kabupaten Majene		**947,84**	**82**	**188.780**	**199,17**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Majene pada tahun 2024 terdistribusi pada 8 (delapan) wilayah kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki tingkat distribusi penduduk yang berbeda, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur sebagai Ibukota Kabupaten Majene dengan jumlah penduduk di Kecamatan Banggae sebanyak 46.316 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1841,59 jiwa/km^2 sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Banggae Timur sebanyak 34.865 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1160,62 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Ulumanda dengan jumlah penduduk sebesar 10.776 jiwa dengan kepadatan penduduk 23,63 jiwa/km^2.

E. Proyeksi dan Analisis Penduduk

Saat ini paradigma pembangunan tidak hanya pembangunan yang berwawasan lingkungan saja tetapi sudah berubah menjadi pembangunan yang berwawasan kependudukan, artinya semua kegiatan pembangunan harus memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memperhatikan aspek aspek lingkungan baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dibuat perencanaan dengan menggunakan data atau informasi kependudukan yang dapat memberikan informasi yang lengkap pengetahuan akan tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah Kabupaten Majene, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia. Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Tabel 2.30.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2024	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Banggae	46.316	46.103	46.798	47.503	48.219	48.945	49.683
2	Banggae Timur	34.865	31.290	31.507	31.725	31.944	32.162	32.388
3	Pamboang	25.750	25.623	26.005	26.392	26.785	27.185	27.590
4	Sendana	26.279	26.231	26.702	27.181	27.668	28.165	28.670
5	Tammerodo	13.261	13.664	13.912	14.164	14.421	14.683	14.949
6	Tubo Sendana	10.370	10.515	10.699	10.887	11.078	11.272	11.470
7	Malunda	21.163	21.282	21.624	21.971	22.324	22.683	23.047
8	Ulumanda	10.776	10.611	10.799	10.991	11.186	11.384	11.586
Kabupaten Majene		**188.780**	**185.319**	**188.045**	**190.814**	**193.626**	**196.482**	**199.383**

Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025.

Menurut proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Majene dalam dokumen RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2025-2045, diperkirakan akan meningkat dari 188.780 jiwa pada tahun 2024 menjadi 199.383 jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan penduduk sebesar 3.078 jiwa atau sekitar 1,4 persen dalam periode lima tahun. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, pertumbuhan penduduk terjadi di empat kecamatan, sementara empat kecamatan lainnya menunjukkan peningkatan yang sangat kecil. Kecamatan Banggae diperkirakan akan naik secara signifikan dari 46.316 jiwa pada tahun 2024 menjadi 49.683 jiwa pada tahun 2030. Kecamatan Pamboang, Sendana dan Malunda juga mengalami peningkatan dari 25.750 jiwa, 26.279 jiwa dan 21.163 jiwa tahun 2024 menjadi 27.590 jiwa, 28.670 jiwa, dan 23.047 jiwa tahun 2030, yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

Kecamatan Tammerodo Sendana, Tubo Sendana dan Ulumanda juga mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi, berturut-turut dari 13.261 jiwa, 10.370 jiwa dan 10.776 jiwa pada tahun 2024 menjadi 14.949 jiwa, 11.470 jiwa dan 11.586 jiwa tahun 2030. Berbeda dengan Kecamatan Banggae Timur jika dilihat dari hasil proyeksi mengalami perlambatan peningkatan jumlah penduduk yang menandakan tingkat pertumbuhan yang relatif stagnan akibat di kecamatan tersebut telah berpusat perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta.

Sementara proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan perkiraan jumlah penduduk di masa depan yang dikelompokkan berdasarkan rentang usia tertentu (0-4 tahun, 5-9 tahun,

15-74 tahun, 75+ tahun). Proyeksi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang masa depan demografi, sehingga memungkinkan perencanaan yang lebih strategis, kebijakan yang lebih efektif, dan alokasi sumber daya yang lebih bijaksana demi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, proyeksi ini memberikan kita gambaran detail tentang bagaimana struktur usia penduduk akan berubah. Kita bisa melihat berapa banyak anak-anak yang akan masuk sekolah, berapa banyak individu yang akan menjadi bagian dari angkatan kerja, dan berapa proporsi lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Tanpa proyeksi ini, perencanaan akan menjadi sebuah anlisa tebak-tebakan dan berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil masyarakat dengan alokasi sumber daya. Untuk lebih jelasnya Gambaran tentang hasil proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Majene tahun 2025-2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31.
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Majene Tahun 2025-2030

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	0-4	15.470	15.547	15,625	15,703	15,782	15,861	15,940
2	5-9	18.923	19,009	19,096	19,183	19,270	19,358	19,446
3	10-14	18.698	18,841	18,985	19,130	19,276	19,423	19,571
4	15-19	19.406	19,683	19,964	20,249	20,538	20,831	21,128
5	20-24	19.049	19,468	19,896	20,334	20,781	21,239	21,706
6	25-29	16.029	16,270	16,516	16,764	17,017	17,273	17,534
7	30-34	13.407	13,522	13,639	13,756	13,875	13,994	14,114
8	35-39	12.964	13,116	13,270	13,425	13,583	13,742	13,903
9	40-44	11.787	11,943	12,102	12,262	12,425	12,589	12,756
10	45-49	10.476	10,700	10,929	11,163	11,402	11,645	11,895
11	50-54	9.507	9,870	10,246	10,637	11,043	11,464	11,901
12	55-59	7.475	7,712	7,957	8,209	8,470	8,739	9,016
13	60-64	5.376	5,548	5,725	5,907	6,096	6,291	6,491
14	65-69	3.908	4,002	4,099	4,198	4,299	4,403	4,509
15	70-74	2.714	2,755	2,797	2,840	2,883	2,927	2,972
16	75+	3.591	3,725	3,863	4,007	4,156	4,311	4,472
Kab. Majene		**188.780**	**191.713**	**194.708**	**197.768**	**200.895**	**204.090**	**207.355**

Sumber : Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025.

Rasio ketergantungan (atau *dependency ratio*) adalah sebuah indikator demografi yang menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif dalam suatu wilayah. Angka ini seringkali dinyatakan dalam persentase, yang artinya "berapa banyak penduduk non-produktif yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk produktif". Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Majene Tahun 2025-2030

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	0-14	53.091	53.397	53.706	54.016	54.328	54.642	54.957
2	15-64	125.476	127.833	130.243	132.707	135.228	137.807	140.445
3	65+	10.213	10.482	10.760	11.045	11.339	11.642	11.953
Dependency Ratio		50	50	49	49	49	48	48
Child Dependency Ratio		42	42	41	41	41	40	40
Elderly Dependency Ratio		8	8	8	8	8	8	8

Sumber : Hasil Proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hingga tahun 2030 setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 48 penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Untuk Rasio Ketergantungan Anak, secara khusus mengukur beban anak-anak terhadap penduduk usia produktif dimana tahun 2030 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 40 anak. Sedangkan Rasio Ketergantungan Lansia, secara khusus mengukur beban lansia terhadap penduduk usia produktif Dimana tahun 2030 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 8 lansia.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dianalisis melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang tercermin dalam nilai PDRB ADHK. Selama periode 2020 - 2024, trend positif cenderung meningkat dalam nilai laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi

di Kabupaten Majene. Pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami eskalasi tinggi menjadi 5,30 % di tahun 2024, dibandingkan tahun 2020 yang masih stagnasi diangka -3,38 % akibat Pandemi Covid-19. Selengkapnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.16.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene,
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

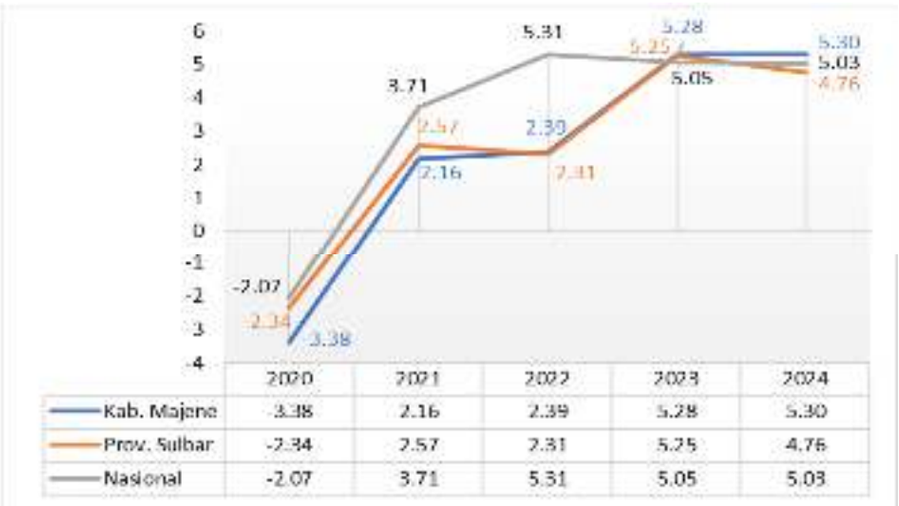

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	-3.38	2.16	2.39	5.28	5.30
Prov. Sulbar	-2.34	2.57	2.31	5.25	4.76
Nasional	-2.07	3.71	5.31	5.05	5.03

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Gambar 2.17.
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene
Dibandingkan Dengan Provinsi dan Kabupaten Lainnya
Di Prov. Sulawesi Barat Tahun 2024

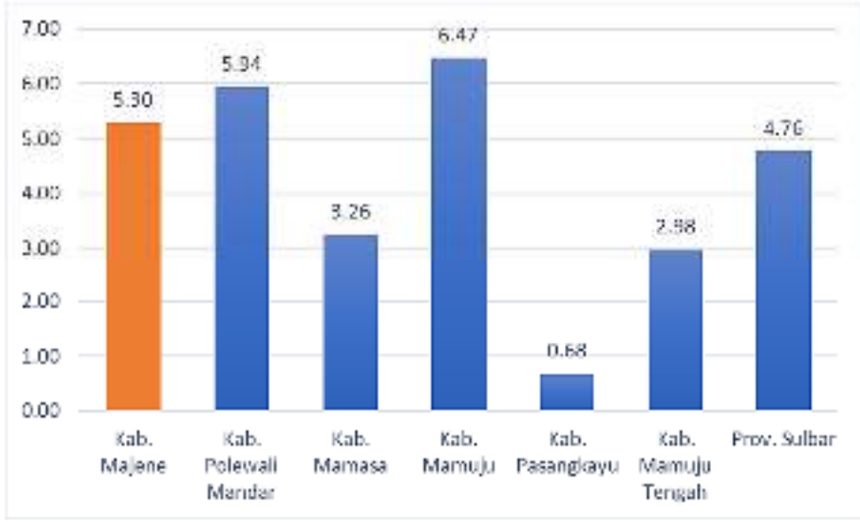

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene tidak sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional selama periode 2020-2024, terjadi fluktuasi cenderung meningkat dalam nilai laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian jika dibandingkan laju pertumbuhan

ekonomi, Kabupaten Majene lebih tinggi dari Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene ditahun 2024 menunjukkan lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene tebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar.

Faktor pertumbuhan ekonomi tersebut diatas dipengaruhi oleh Konsumsi rumah tangga tumbuh positif seiring dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang minim pembatasan kegiatan. Investasi mengalami pertumbuhan signifikan didorong oleh pembangunan pasca bencana dan realisasi proyek infrastruktur pemerintah yang massif diakhir tahun. Perekonomian Kabupaten Majene tahun 2024 diproyeksikan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Tingkat vaksinasi serta pembangunan infrastruktur dan pembangunan pasca gempa yang terus berjalan akan meningkatkan aktivitas perekonomian selama tahun 2024. Konsumsi masyarakat akan tumbuh lebih baik yang terus meningkat. Sektor investasi diperkirakan akan tumbuh dengan baik didorong oleh pembangunan.

B. Tingkat Kemiskinan

Dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu dapat dilihat dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan tren tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2020 – 2024. Paparan kemiskinan ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari). Sedangkan Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene

Garis Kemiskinan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan dan 51 komoditi non-makanan (47 komoditi di desa) yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan kilo kalori per kapita per hari. Dengan kata lain, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai pengeluaran minimum yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Besaran garis kemiskinan menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak.

Dari gambar grafik dibawah dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan garis kemiskinan di Kab. Majene meningkat setiap tahunnya seiring dengan Prov. Sulbar. Peningkatan ini tidak lepas dari inflasi yang terjadi rutin tiap tahunnya. Adapun besaran garis kemiskinan Kab. Majene ditahun 2024 sebesar 482.173 rupiah/kapita/bulan masih berada di atas garis kemiskinan Prov. Sulawesi Barat sebesar 454.897 rupiah/kapita/bulan (meski masih berada di bawah garis kemiskinan nasional yang mencapai 595.242 rupiah/kapita/bulan) dapat disimpulkan bahwa harga kebutuhan pembentuk garis kemiskinan di Kab. Majene masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi dan memerlukan langkah strategis pemerintah dan swasta dalam menjaga kestabilan harga di tengah pergerakan inflasi rutin tahunan. Untuk lebih jelasnya terkait Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene terhadap Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 2.18.
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Dan Nasional Periode 2020 – 2024

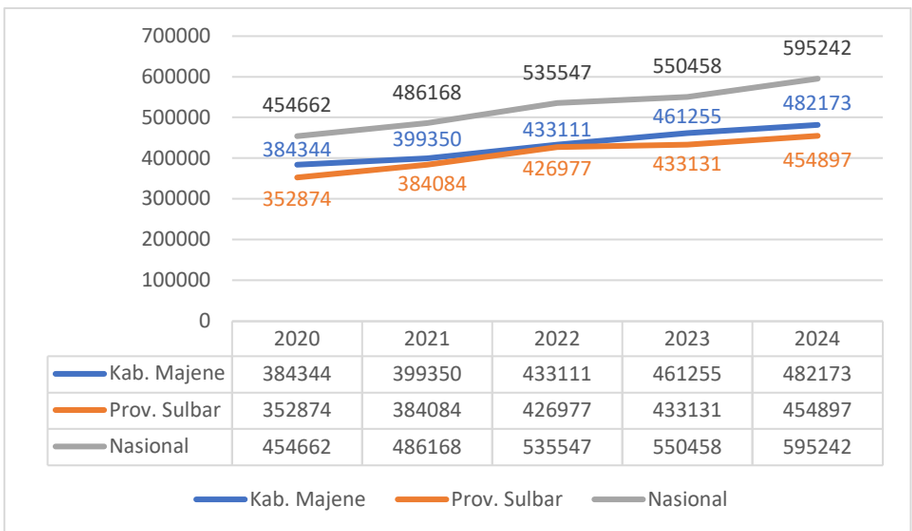

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	384344	399350	433111	461255	482173
Prov. Sulbar	352874	384084	426977	433131	454897
Nasional	454662	486168	535547	550458	595242

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

2. Persentase Penduduk Miskin

Selama periode 2020 – 2024, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kab. Majene mengalami fluktuatif, kondisi tersebut setiap tahunnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan skala Prov. Sulbar dan Nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami penurunan selama empat tahun terakhir (2020-2024) hingga mencapai angka 13,64 persen pada tahun 2024 dari 14,54 persen di tahun 2023. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase penduduk miskin tertinggi adalah tahun 2022 (15,13 persen), sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2021 dan 2020 yaitu 14,34 persen dan 13,73 persen. Lebih jelasnya jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.19.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene
Periode 2020 – 2024

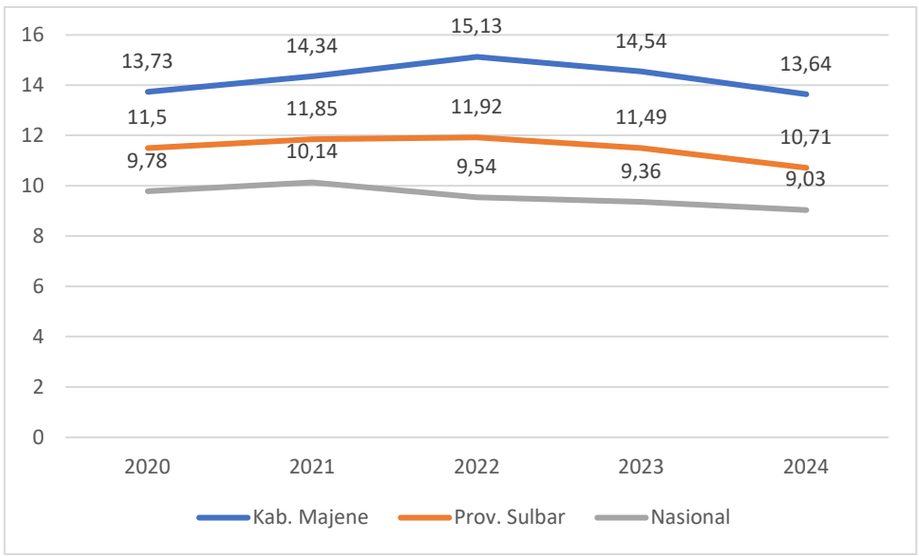

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Dari grafik di bawah terlihat bahwa Kab. Majene telah menunjukkan kinerja yang baik, dimana Kab. Majene dalam periode lima tahun mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,93 %, lebih baik dibandingkan dengan kinerja pengentasan kemiskinan pada skala Provinsi Sulawesi Barat yang mampu menurunkan angka

kemiskinan sebesar 0,71% dan lebih diatas dari kinerja pengentasan kemiskinan secara nasional yang hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,33%. Meski demikian, angka kemiskinan di Kab. Majene masih jauh di atas angka kemiskinan skala provinsi, dengan selisih sebesar 2,86%. Hal tersebut menjadi catatan pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berprinsip keberpihakan dengan harapan angka kemiskinan di Kab. Majene dapat terus ditekan hingga paling tidak berada di bawah angka kemiskinan rata-rata di Provinsi Sulawesi Barat maupun Nasional.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Persoalan kemiskinan bukan hanya mengacu pada jumlah dan persentase penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan Tingkat keparahan kemiskinan merupakan dimensi lain yang ikut menjadi parameter kemiskinan suatu wilayah. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten Majene dibandingkan dengan kabupaten lain dalam provinsi dan perbandingannya dengan capaian provinsi dan nasional. Dari grafik di bawah terlihat bahwa selama periode 2020–2024 terjadi fluktuasi pada indeks kedalaman kemiskinan, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan.

Gambar 2.20.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Periode 2020 – 2024

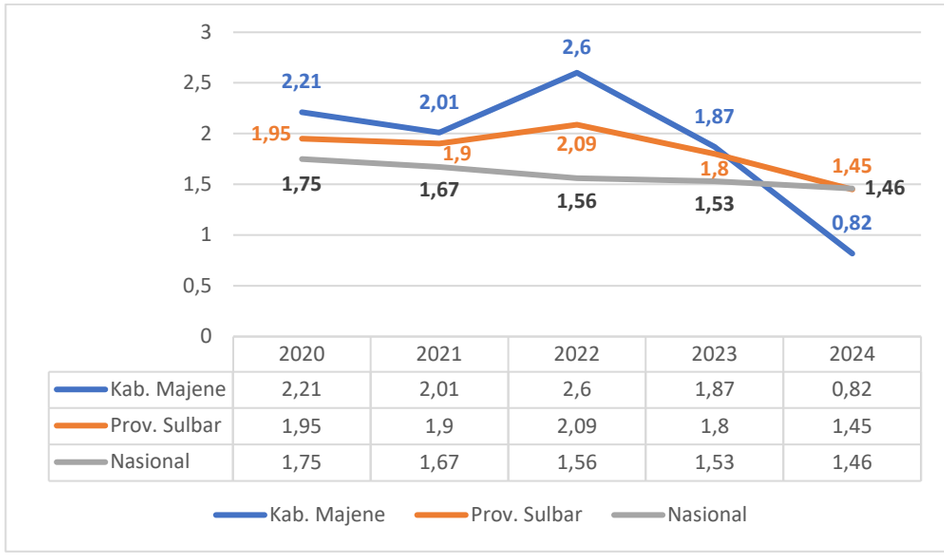

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	2,21	2,01	2,6	1,87	0,82
Prov. Sulbar	1,95	1,9	2,09	1,8	1,45
Nasional	1,75	1,67	1,56	1,53	1,46

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Majene tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,82 dibanding tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Majene semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Secara nasional, indeks kedalaman kemiskinan stabil di angka 1,46 poin sementara di Kab. Majene meningkat sebesar 0,22 poin, lebih tinggi dibanding kenaikan skala provinsi yang juga mengalami kenaikan sebesar 1,45 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga komoditi di Kab. Majene masih sangat rentan terhadap instabilitas perekonomian. Oleh sebab itu, kebijakan pemerataan pembangunan menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar kesenjangan antar warga miskin tidak semakin melebar.

4. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene

Indeks keparahan kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selain itu,

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) selama tahun 2022 – 2023 cenderung menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2022 naik 0,13 poin dibanding tahun 2021, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Begitu juga dengan tahun 2024, dimana indeks kedalaman kemiskinan naik 0,06 dibanding tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.21.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Periode 2020 – 2024

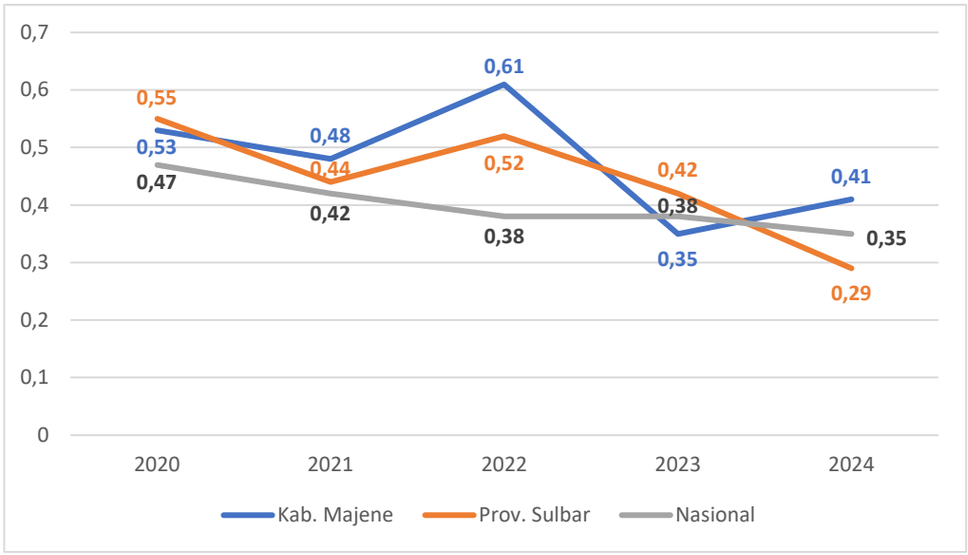

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2020 – 2024 terjadi fluktuasi pada indeks keparahan kemiskinan, khususnya pada periode 2022 – 2023 dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan. Secara nasional, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan di angka 0,03 poin sementara skala Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami

Penurunan seiring penurunan ditingkat nasional sebesar 0,13 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Majene menghadapi kondisi yang lebih pelik dari rata-rata penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh sebab itu, kebijakan bantuan dan jaminan sosial tepat sasaran menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar warga miskin di Kab. Majene tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan yang akan semakin mempersulit perwujudan komitmen Pemkab. Majene dalam pengentasan kemiskinan.

C. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling esensial untuk kelangsungan hidup. Ini melampaui sekadar kemiskinan biasa, karena mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrem menghadapi kekurangan yang parah dalam berbagai aspek. Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.33.
Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2024

No.	Nama Daerah	Jumlah Kemiskinan Ekstrem (Ribu Jiwa)				Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)			
		2021*	2022*	2023**	2024**	2021*	2022*	2023**	2024**
1	**Sulawesi Barat**	**34.07**	**41.41**	**10.68**	**n/a**	**2,45**	**2,94**	**0,75**	**1,46**
2	Majene	4.94	5.04	0.66	n/a	2,83	2,87	0,37	0,78
3	Polewali Mandar	16.07	27.90	8.24	n/a	3,64	6,27	1,84	0,94
4	Mamasa	5.23	3.76	0.63	n/a	3,23	2,30	0,38	0,66
5	Mamuju	4.87	1.79	0.39	n/a	1,63	0,59	0,12	2,06
6	Pasangkayu	0.96	2.10	0.00	n/a	0,53	1,15	0,00	2,82
7	Mamuju Tengah	2.01	0.82	0.77	n/a	1,47	0,59	0,54	1,75

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Tahun 2025.
Keterangan:
** : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)*
*** : Estimasi dihitung oleh Satgas Data P3KE*

Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah dan tingkat kemiskinan ekstrem di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2021-2024, memperlihatkan bahwa pada data 2023 Provinsi Sulawesi Barat, jumlah kemiskinan ekstrem sebanyak 10.68 ribu jiwa dengan Tingkat persentase sebesar 0.78% dan mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Penurunan ini bisa jadi merupakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem di

Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan pada wilayah Kabupaten Majene sedikit meningkat dari 4,94 ribu jiwa (2021) menjadi 5,04 ribu jiwa (2022) dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 0,66 ribu jiwa dengan Tingkat persentase 0,37%, meskipun data capaian untuk tahun 2024 belum tersedia.

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatudata PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar " harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Majene pada tahun 2020 mencapai 4.986 miliar dan tahun 2021 meningkat menjadi 5.204 miliar rupiah, tahun 2022 kembali meningkat menjadi 5.534 miliar rupiah, dan ditahun 2023 mencapai sebesar 5.968 miliar rupiah serta ditahun 2024 meningkat 6.495 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan perkembangan PDRB Sulawesi Barat, maka rata-rata PDRB Kabupaten Majene berkontribusi 10,19%. Jumlah ini relatif tidak proporsional, karena PDRB Sulawesi Barat diakumulasikan oleh 6 Kabupaten. Oleh karena itu, untuk Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah yang tepat dalam melakukan intervensi pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan proporsional. Adapun kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Majene terhadap Perkembangan PDRB Sulawesi Barat periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.22.
Kontribusi PDRB Kab. Majene terhadap Perkembangan PDRB Regional Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

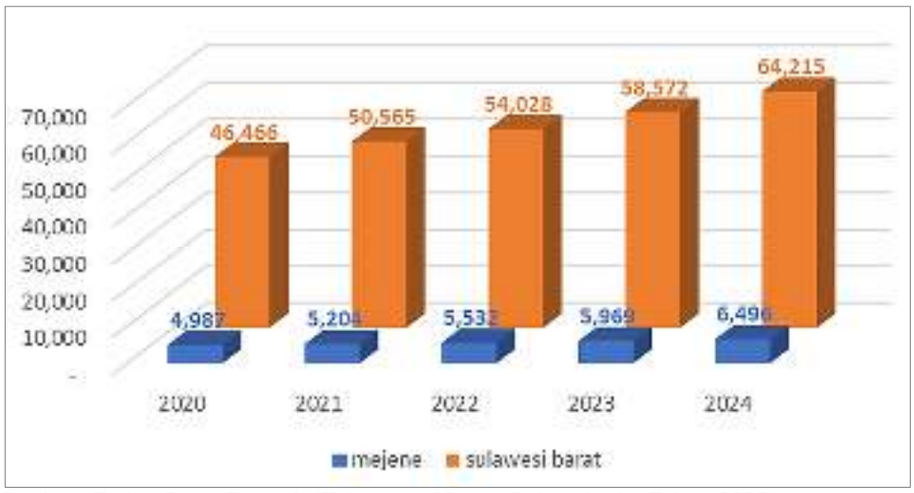

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Struktur ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan sejauh mana suatu kategori lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah untuk menyumbang perekonomian daerah pada kurun waktu tertentu. Penggambaran struktur ekonomi daerah antara lain digunakan untuk merancang suatu kebijakan dalam rangka pengembangan kategori lapangan usaha tertentu ke masa yang akan datang.

Terkait perkembangan 17 sektor PDRB Kabupaten Majene dalam periode 2020–2024 baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Majene dominan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan dominasi lebih dari sepertiganya dan juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan kedua dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene meskipun setiap tahunnya hanya memberikan kontribusi rata-rata 11,24% pada PDRB atas dasar harga berlaku dan 9,66% pada PDRB atas dasar harga konstan. Adapun Komposisi PDRB Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024 (Juta Rp.) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.
Pendapatan Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1245,73	1263,6	1304,01	1385,3	1456,65
Pertambangan dan Penggalian	89,89	95,04	97,25	99,4	105,53
Industri Pengolahan	199,88	211,65	215,1	241,11	255,67
Pengadaan Listrik dan Gas	4,62	4,46	5,15	5,57	6

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	5,15	5,39	5,32	5,35	5,13
Konstruksi	244,44	268,01	260,64	273,71	294,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	335,4	345,72	350,19	366,6	394,39
Transportasi dan Pergudangan	57,35	59,11	64,41	71,78	75,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,19	10,71	11,67	12,92	13,67
Informasi dan Komunikasi	218,87	219,25	223,71	245,82	258,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	126,63	134,12	132,2	131,02	133,82
Real Estate	123,41	120,02	124,3	129,94	137,11
Jasa Perusahaan	1,74	1,74	1,81	1,91	2,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	369,35	369,77	378,1	378,44	384,86
Jasa Pendidikan	320,5	315,12	324,44	336,37	357,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,41	53,36	55,57	58,05	62,99
Jasa lainnya	116,27	120,67	128,74	134,85	139,46
Total	**3.522,83**	**3.597,74**	**3.682,61**	**3.878,14**	**4.083,85**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Tabel 2.35.
Pendapatan Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.894,70	1963,83	2.124,60	2.351,63	2601,67
Pertambangan dan Penggalian	128,2	137,21	145,3	154,28	163,79
Industri Pengolahan	261,5	288,8	310,02	340,54	373,13
Pengadaan Listrik dan Gas	3,4	3,27	3,79	4,22	4,55
Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	5,4	5,38	5,5	5,59	5,5
Konstruksi	313,3	357,62	365,69	396,21	435,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	547	579,27	617,2	668,3	730,09
Transportasi dan Pergudangan	76	78,85	91,8	111,2	119,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,8	14,72	16,34	18,38	19,93
Informasi dan Komunikasi	274,3	274,77	280,77	309,98	326,85
Jasa Keuangan dan Asuransi	182	203,6	218,43	219,39	227,39
Real Estate	167,2	163,44	173,96	187,45	201,24
Jasa Perusahaan	2,1	2,14	2,29	2,47	2,76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	485,6	482,37	496,12	484,51	504,9
Jasa Pendidikan	429,6	432,14	445,71	462,01	509,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,3	67,45	70,97	77,35	86
Jasa lainnya	142,15	149,17	163,24	175,21	183,51
Total	**4.986,82**	**5204,03**	**5.531,73**	**5.968,72**	**6495,82**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Diurutan ketiga dan keempat yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Majene adalah sector administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib serta sector jasa pendidikan. Meskipun demikian pertumbuhan kedua sektor tersebut dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Namun pada sektorjasa konstruksi menunjukkan adanya peningkatan

dari tahun sebelumnya dan menempati urutan kelima dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene. Lebih jelasnya terkait Distribusi Persentase PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene Periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK
Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Majene Periode 2020-2024

Lapangan Usaha / Kategori	2020		2021		2022		2023		2024	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,92	1,52	37,74	1,43	38,35	3,20	39,40	6,23	40,05	5,15
Pertambangan dan Penggalian	2,57	-5,39	2,64	5,73	2,62	2,32	2,58	2,21	2,52	6,17
Industri Pengolahan	5,28	1,64	5,55	5,89	5,59	2,02	5,71	11,66	5,74	6,04
Pengadaan Listrik dan Gas	0,7	5,14	0,07	-3,40	0,07	15,34	0,07	8,22	0,07	7,78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,64	0,11	4,73	0,10	-1,28	0,9	0,55	0,8	-4,08
Konstruksi	6,28	-11,59	6,87	9,64	6,61	-2,75	6,64	5,01	6,71	7,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,97	-1,55	11,13	3,08	11,14	1,29	11,20	4,69	11,24	7,58
Transportasi dan Pergudangan	1,52	-5,34	1,52	3,07	1,66	8,97	1,86	11,45	1,83	5,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	5,29	0,28	5,08	0,28	8,99	0,30	10,76	0,31	5,80
Informasi dan Komunikasi	5,50	5,36	5,28	0,17	5,07	2,03	5,19	9,88	5,03	5,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	7,03	3,91	5,93	3,94	-1,44	3,68	-0,89	3,50	2,14
Real Estate	3,35	2,79	3,14	-2,75	3,14	3,57	3,14	4,53	3,10	5,52
Jasa Perusahaan	0,04	-5,22	0,04	0,10	0,04	4,25	0,04	5,11	0,04	9,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,64	-6,61	9,27	0,11	8,96	2,25	8,12	0,09	7,77	1,70
Jasa Pendidikan	8,61	-5,68	8,30	-1,68	8,19	2,96	7,74	3,68	7,84	6,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	3,21	1,30	-0,08	1,28	4,14	1,30	4,46	1,32	8,50
Jasa lainnya	2,85	-3,41	2,87	3,79	2,95	6,69	2,94	4,74	2,83	3,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Berdasarkan tabel diatas, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi harapan yang diinginkan disetiap periode pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari suatu pembangunan. Selain mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerintah juga diharapkan memperhatikan pemerataan dari pembangunan yang telah dicapai tersebut. Secara umum, perekonomian Kabupaten Majene tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 meningkat diangka 5,30 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang terkontraksi diangka 5,29 persen. Adapun jika dicermati selama lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Majene cenderung mengalami perlambatan dimana tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berada di kisaran -1,38 persen.

Pada tahun 2024, jika dirinci menurut kategori lapangan usaha Nampak kategori yang menunjukkan pertumbuhan yang paling cepat yaitu Jasa Perusahaan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan masing-masing mencapai 9,23 persen dan 8,50 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan kategori lapangan usaha lainnya. Kategori yang menunjukkan kontraksi pertumbuhan yang paling tinggi yaitu Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang dan Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib.

Tabel 2.37.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Majene Periode 2020–2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian Kehutanan & Perikanan	1,51	1,55	3,20	6,23	5,15
2	Pertambangan dan Penggalian	-5,39	5,73	2,32	2,21	6,17
3	Industri Pengolahan	1,64	5,89	2,02	11,66	6,04
4	Pengadaan Listrik & Gas	5,14	-3,4	15,34	8,22	7,78
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,64	4,73	-2,28	0,55	-4,08
6	Konstruksi	-11,88	9,64	-2,75	5,01	7,63
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-1,55	3,08	1,29	4,69	7,58
8	Transportasi & Pergudangan	-5,34	3,07	8,97	11,45	5,54
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-6,04	5,08	8,99	10,76	5,80
10	Informasi & Komunikasi	5,36	0,17	2,03	9,88	5,35
11	Jasa Keuangan & Asuransi	7,03	5,92	-1,44	-0,89	2,14
12	Real Estate	2,79	-2,7	3,57	4,53	5,52
13	Jasa Perusahaan	-4,94	0,10	4,25	5,11	9,23
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	-6,36	0,11	2,25	0,09	1,70
15	JasaPendidikan	-5,68	-1,68	2,96	3,68	6,18
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,21	-0,08	4,14	4,46	8,50
17	Jasa Lainnya	-3,41	3,79	6,69	4,47	3,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**-1,38**	**2,13**	**2,38**	**5,29**	**5,30**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Jumlah penduduk juga menggambarkan seberapa banyak penduduk yang harus ditanggung kesejahteraan perekonomiannya dalam suatu wilayah. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pertumbuhan Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Majene selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung baik dan meningkat, dimulai dari tahun 2020 sebesar 2,71 juta rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi 3,07 juta ripiah tahun 2021. Tahun 2022 kembali meningkat sebesar 4.95 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 6,25 juta rupiah. Hingga tahun 2024 nilai pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Majene mencapai 7,35 juta rupiah. Selama periode lima tahun terakhir. PDRB Per Kapita Kabupaten Majene mengalami peningkatan sebesar 4,64 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.23.
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

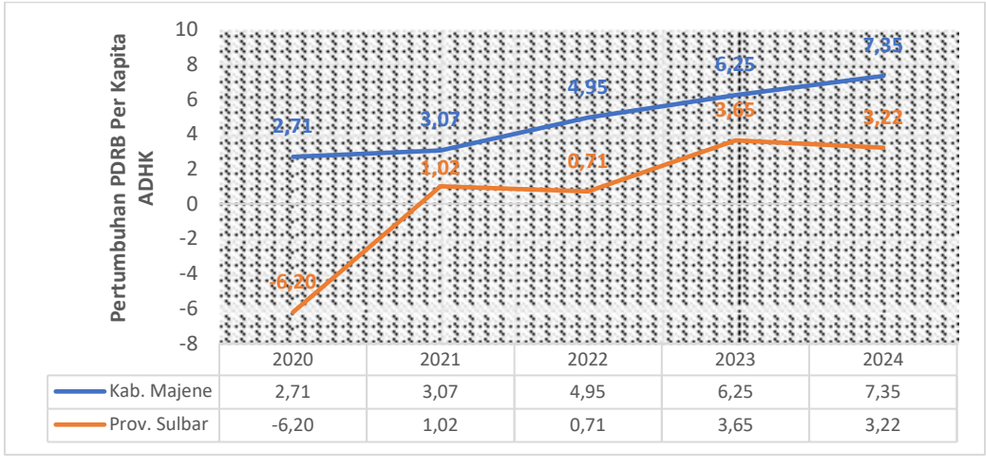

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	2,71	3,07	4,95	6,25	7,35
Prov. Sulbar	-6,20	1,02	0,71	3,65	3,22

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Gambar 2.24.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan ADHB
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

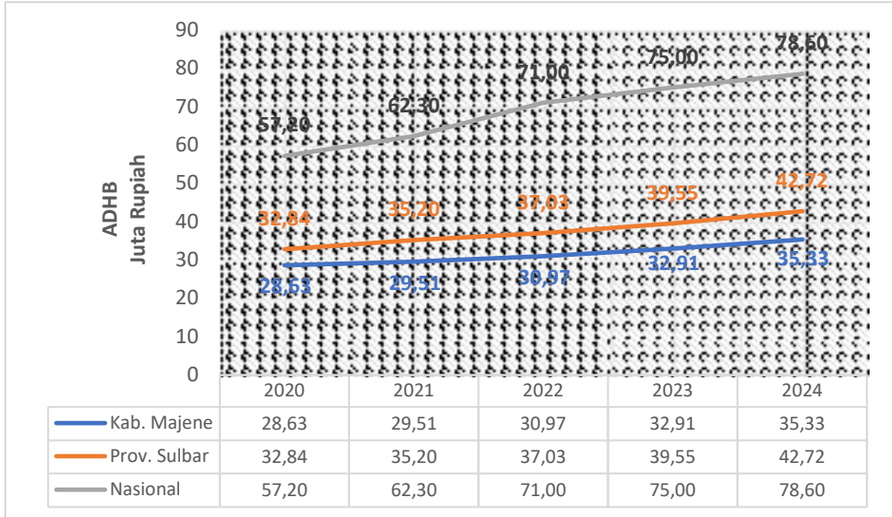

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	28,63	29,51	30,97	32,91	35,33
Prov. Sulbar	32,84	35,20	37,03	39,55	42,72
Nasional	57,20	62,30	71,00	75,00	78,60

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Majene baik atas dasar harga berlaku dan harga konstan meningkat pada tahun 2024 jika dibandingkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Majene di tahun 2023. Nilai PDRB per kapita ADHB naik menjadi 35,33 juta rupiah per tahun dari tahun sebelumnya sebesar 32.91 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, nilai PDRB per kapita ADHK per kapita naik menjadi 22,21 juta rupiah per tahun dari tahun sebelumnya 21,38 juta rupiah. Kenaikan PDRB ADHB dan ADHK per Kapita ini terjadi secara bertahap selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai aktivitas ekonomi per orang di Kabupaten Majene mengalami peningkatan tiap tahunnya. dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat, PDRB Per Kapita Kabupaten Majene berdasarkan ADHB maupun ADHK masih berada dibawah dari nilai Nasional maupun Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.25.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan ADHK Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

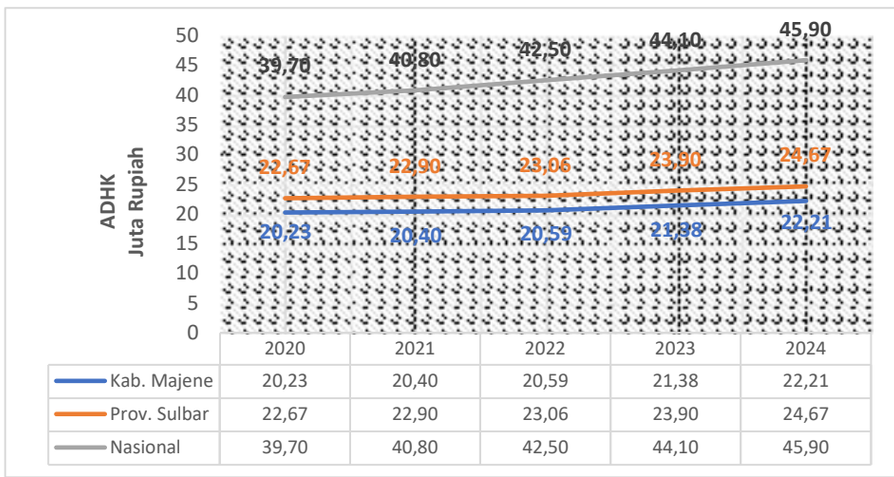

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	20,23	20,40	20,59	21,38	22,21
Prov. Sulbar	22,67	22,90	23,06	23,90	24,67
Nasional	39,70	40,80	42,50	44,10	45,90

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Dalam suatu wilayah regional ataupun yang lebih luas, masalah ketimpangan tidak dapat dihindari. Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak buruk terhadap kestabilan perekonomian regional. Untuk mengukur tingkat ketimpangan antara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene dilakukan perhitungan kuantitatif dengan menggunakan nilai Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yangtelah dikenal secara luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungan indikator ini adalah dengan menggunakan PDRB perkapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah, Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$VW = \frac{\sqrt{\sum(Yj - Yr)^2 Pj/P}}{Yr}$$

Dimana :

VW = IndeksWilliamson
Yj = PDRB Per Kapita Kabupaten Majene
Yr = PDRB Per Kapita Sulawesi Barat
Pj = Jumlah Penduduk Kabupaten Majene
P = Jumlah Penduduk Sulawesi Barat

Keterangan :

- Jika VW mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antara kabupaten di tingkat Provinsi adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata.
- Jika VW mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antara kabupaten di tingkat Provinsi adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

Setelah dilakukan perhitungan untuk mengukur ketimpangan pendapatan Kabupaten Majene dan Sulawesi Barat dengan rata-rata PDRB 2020-2024, nilai VW yang didapatkan adalah 0,31. Dengan demikian, ketimpangan distribusi pendapatan antara Kabupaten Majene ditingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas). Nilai TPT mencerminkan seberapa besar jumlah tenaga kerja yang belum dimanfaatkan. Menurut BPS Kabupaten Majene, pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan TPT di Kabupaten Majene antara tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat di periode dua tahun terakhir. Di tahun 2020 TPT Kabupaten Majene sebesar 4,26 %, menurun menjadi 2,85 % di tahun 2021 dan 2.19 % di tahun 2022. Mulai tahun 2023 TPT Kabupaten Majene meningkat di angka 2,64 % dan tahun 2024 sebesar 4,19 %. Kabupaten Majene pada tahun 2024, TPT lebih tinggi dibandingkan

Provinsi Sulawesi Barat yang berada di angka 2,68 % dan lebih rendah dibandingkan Tingkat nasional yang mencapai 4,82 %. Sedangkan pada lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene menduduki peringkat pertama dengan Tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Secara rinci dapat Tingkat Pengangguran Terbuka dijelaskan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.26.
Perkembangan TPT Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024

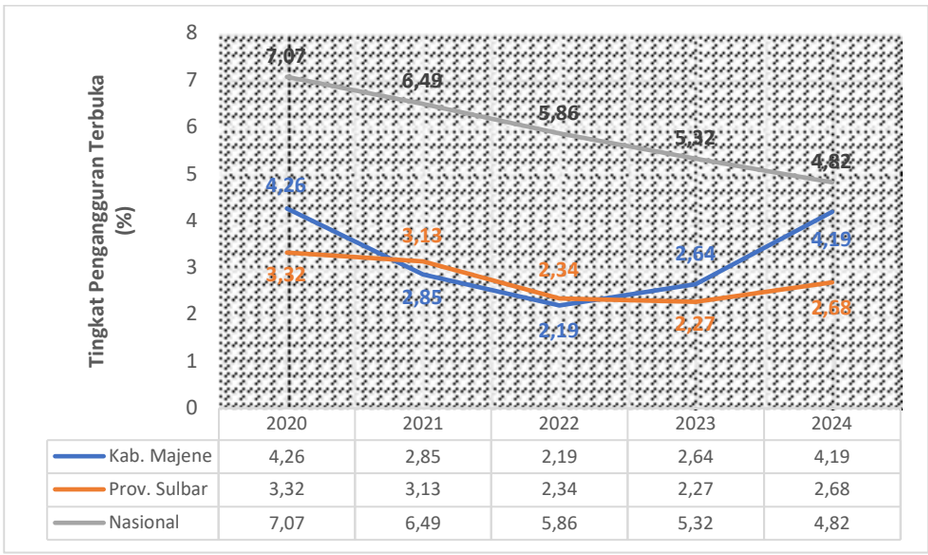

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	4,26	2,85	2,19	2,64	4,19
Prov. Sulbar	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Gambar 2.27.
Posisi Relatif TPT Kabupaten Majene, Nasional Provinsi Sulawesi Barat Dan Kabupaten Lainnya Tahun 2024

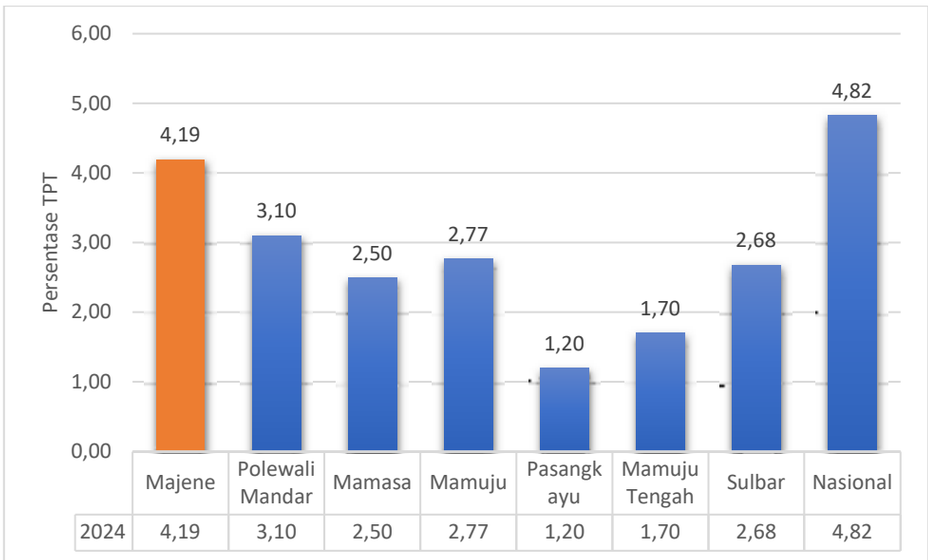

	Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah	Sulbar	Nasional
2024	4,19	3,10	2,50	2,77	1,20	1,70	2,68	4,82

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

F. Indeks Gini / Gini Rasio

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan yang menunjukkan pemerataan yang sempurna. Tingkat ketimpangan dalam Indeks Gini dibagi menjadi tiga kategori diantaranya rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4), dan tinggi (Indeks Gini > 0,4). Gambaran perbandingan nilai Indeks Gini atau Gini Rasio antara wilayah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode lima tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.28.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024

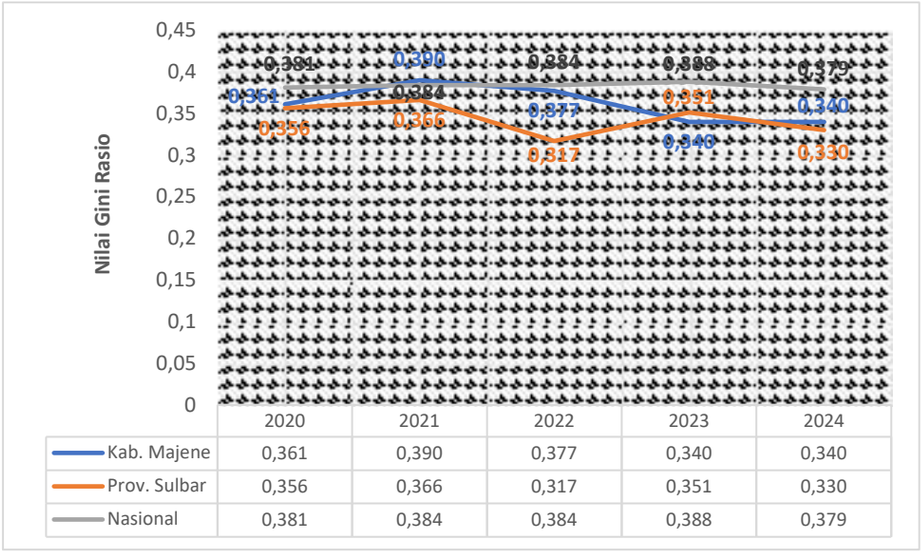

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	0,361	0,390	0,377	0,340	0,340
Prov. Sulbar	0,356	0,366	0,317	0,351	0,330
Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Secara umum, Indeks Gini Kabupaten Majene masih berada di bawah Indeks Gini Nasional dan lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat. Data Indeks Gini Kabupaten Majene pada tahun 2024 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Majene sehingga masih menggunakan asumsi Indeks Gini Tahun 2023 untuk tahun 2024. Dari tahun 2020 sampai 2024 indeks gini Kabupaten Majene fluktuatif, cenderung meningkat. Dari tahun 2020 sebsar 0,361 menjadi 0,340 di tahun 2023 dengan meningkat di tahun

2021 dengan angka 0,390. Untuk Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 0,356 dan menurun pada tahun 2024 sebesar 0,330. Sedangkan pada Tingkat Nasional, tahun 2020 sebesar 0,381 dan menurun di tahun 2024 menjadi 0.379.

G. Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan manusia adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh peningkatan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun kondisi ideal dalam pembangunan manusia bukan hanya sampai pada pencapaian target tersebut, tetapi sampai pada pemanfaatan dari capaian target telah dicapai. Dengan terbuka luasnya akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan taraf hidup masyarakat, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental yang tercermin dalam pola hidup, pola sikap dan tingkat kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan manusia tersebut dapat diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berkorelasi positif dan berbanding lurus dengan IPM. Dengan demikian

apabila tingkat IPM semakin tinggi maka bisa dipastikan pembangunan ke arah kesejahteraan semakin dekat dan apabila kesejahteraan sosial tercapai maka IPM suatu daerah akan tinggi.

Di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024, Kabupaten Majene dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di peringkat ke 1 (pertama) nilai IPM yaitu sebesar 73,25 dan lebih besar dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 70,46 atau lebih besar 2,79. Nilai IPM terbesar kedua di Sulawesi Barat berada di Kabupaten Mamuju dengan nilai IPM sebesar 71,86 atau dengan selisih 1.39 dari IPM Kab. Majene dan kemudian disusul Kabupaten Pasangkayu dengan nilai IPM 71,04 atau dengan selisih 2,21 dari nilai IPM Kabupaten Majene. Sedangkan nilai IPM terendah di Provinsi Barat berada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan nilai IPM sebesar 68,53 atau lebih kecil 4,72 nilai IPM dari Kabupaten Majene. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Uraian	Majene	Polman	Mamasa	Mamuju	Pasang Kayu	Mamuju Tengah	SulBar
2020	IPM	**66,91**	63,84	66,02	68,15	67,79	65,71	**64,30**
	Peringkat	**3**	6	4	1	2	5	
2021	IPM	**67,29**	64,32	66,63	68,32	66,18	66,18	**66,36**
	Peringkat	**3**	5	4	1	2	5	
2022	IPM	**67,84**	64,79	67,21	68,88	68,61	66,89	**66,92**
	Peringkat	**3**	6	4	1	2	5	
2023	IPM	**68,62**	65,59	67,83	69,61	69,11	67,45	**67,55**
	Peringkat	**3**	6	4	1	2	5	
2024	IPM	**73,25**	69,88	68,68	71,86	71,04	68,53	**70,46**
	Peringkat	**1**	4	5	2	3	6	

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Dalam kurun waktu Tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Majene sangat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Tahun 2024, IPM Kabupaten Majene telah mencapai 73,25 atau meningkat sebesar 4,63 poin dari Tahun 2023. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk yang tercermin dalam bentuk kontribusi komponen utama IPM yang meliputi: Indikator Kesehatan dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) berdasarkan

perhitungan metode baru Hasil Long Form SP2020 (Tahun); Indikator pengetahuan penduduk diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta Indikator Ekonomi melalui indikator Pengeluaran per Kapita.

Tabel 2.39.
Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
2020	70,71	69,04	13,61	8,65	10.056
2021	71,10	69,26	13,99	8,91	10.028
2022	71,64	69,65	13,63	9,10	10.152
2023	72,44	70,06	13,71	9,28	10.462
2024	73,25	70,39	13.72	9,46	10.909

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Capaian IPM Kabupaten Majene pada tahun 2020-2024 yang senantiasa menempatkan Kabupaten Majene sebagai Peringkat IPM tertinggi pertama di wilayah Sulawesi Barat. Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Majene serta keempat komponen tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel diatas.

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan gambaran pembangunan di bidang kesehatan. Data ini disadur dari BPS berdasarkan perhitungan metode baru Hasil Long Form SP2020 (Tahun).

Berdasarkan gambar grafik dibawah, bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Majene menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 69,04 tahun, dan terus meningkat menjadi 69,26 tahun pada tahun 2021, mencerminkan peningkatan sebesar 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana UHH mencapai 69.65 tahun, atau bertambah 0,39 tahun dari tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan UHH mencapai

70,06 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,41 tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024, ketika UHH Kabupaten Majene mencapai 70,39 tahun, naik 0,33 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Majene meningkat sebesar 1,35 tahun. Adapun perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Majene selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.29.
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Majene
Metode Baru Hasil Long Form SP2020 (Tahun)
Periode Tahun 2020-2024

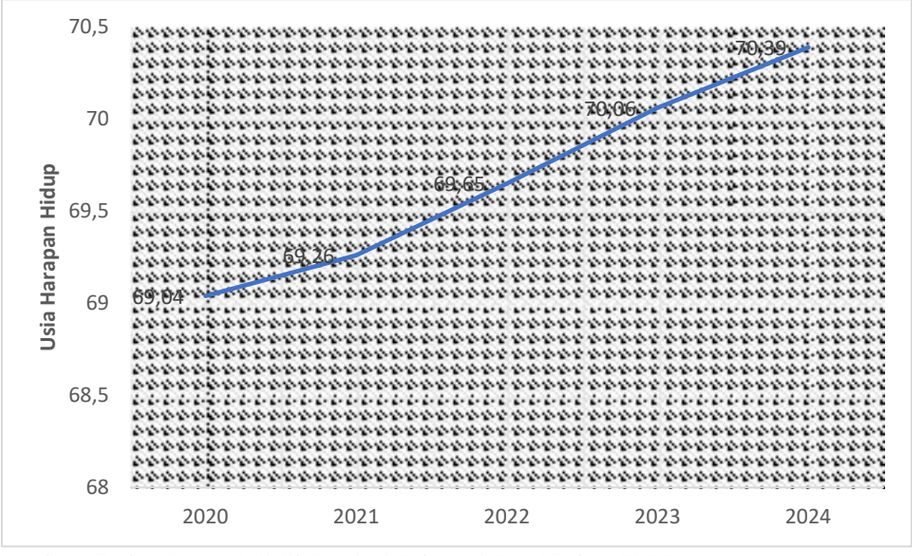

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Gambar 2.30.
Perbandingan Usia Harapan Hidup
Se Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2024
Metode Baru Hasil Long Form SP2020 (Tahun)

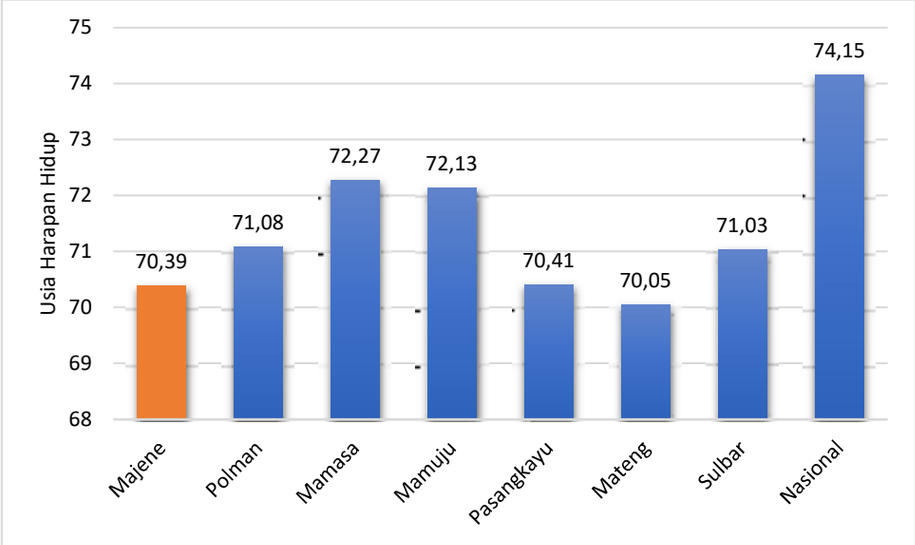

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Majene pada tahun 2024 tercatat sebesar 70,39 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Majene diharapkan dapat hidup hingga usia tersebut. Jika dibandingkan dengan kabupaten se Sulawesi Barat dan tingkat Provinsi Sulawesi Barat serta Nasional, Kabupaten Majene memiliki UHH terendah kedua dari Kabupaten Mamuju Tengah dengan capaian 70,05 tahun ditingkat Provinsi Sulawesi Barat, Dimana tertinggi berada di Kabupaten Mamasa yang mencapai 72,27 tahun, disusul Kabupaten Mamuju sebesar 72,13 tahun, Kabupaten Polewali Mandar sebesar 71,08 tahun dan Kabupaten Pasangkayu sebesar 70,41 tahun. Sementara capaian Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional masing-masing sebesar 71,03 tahun dan 74,15 tahun. Ini memperlihatkan bahwa secara nasional capaian angka harapan hidup Kabupaten Majene masih tergolong rendah.

B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu metode untuk menentukan apakah sebuah keluarga termasuk dalam kategori sehat, prasehat, atau tidak sehat, dengan ketentuan nilai IKS Sehat > 0,80, IKS Prasehat 0,50 – 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5. Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, bayi menerima imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru menerima pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi menjalani pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan perawatan dan tidak ditelantarkan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta keluarga memiliki akses terhadap air bersih dan menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan data Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Majene Per Juni 2019 adalah 0,190 yang menunjukkan bahwa 19% dari keluarga yang terdata tergolong sehat. Sedangkan pada tahun 2020, Puskesmas Banggae 1 Kabupaten Majene memiliki capaian IKS tertinggi di Sulawesi Barat pada tahun itu, dengan nilai 0,354. Ini berarti sekitar 35,4 % keluarga di wilayah kerja Puskesmas Banggae 1 tergolong sehat. Melihat

data dua tahun terakhir tersebut, IKS Kabupaten Majene masih tergolong dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Berdasarkan hal tersebut maka pihak OPD teknis terkait perlu mengadakan perhitungan IKS terbaru, mengingat data yang ada sudah tergolong enam tahun lalu serta data dalam wilayah cakupan puskesmas.

C. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting pada balita adalah persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang terklasifikasi sebagai stunted yaitu memiliki ukuran tinggi badan untuk usia yang lebih dari dua standar deviasi di bawah median dari Standar Pertumbuhan Anak WHO. Berdasarkan data dari Aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) dan data dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)/SKI yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, bahwa Prevalensi stunting di Kabupaten Majene menunjukkan penurunan pada tahun 2020-2022 dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 hingga 2024 berdasarkan laporan (e-PPGBM) sedangkan SSGI/SKI terjadi penurunan pada tahun 2020-2021 dan meningkat pada tahun 2022. Untuk tahun 2023 kembali menurun secara signifikan dan berada diangka 30,40% dan pada tahun 2024 kembali meningkat diangka 37,50%. Selengkapnya perkembangan pravelensi stunting pada balita Kabupaten Majene tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.31.
Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Majene
Periode Tahun 2020-2024

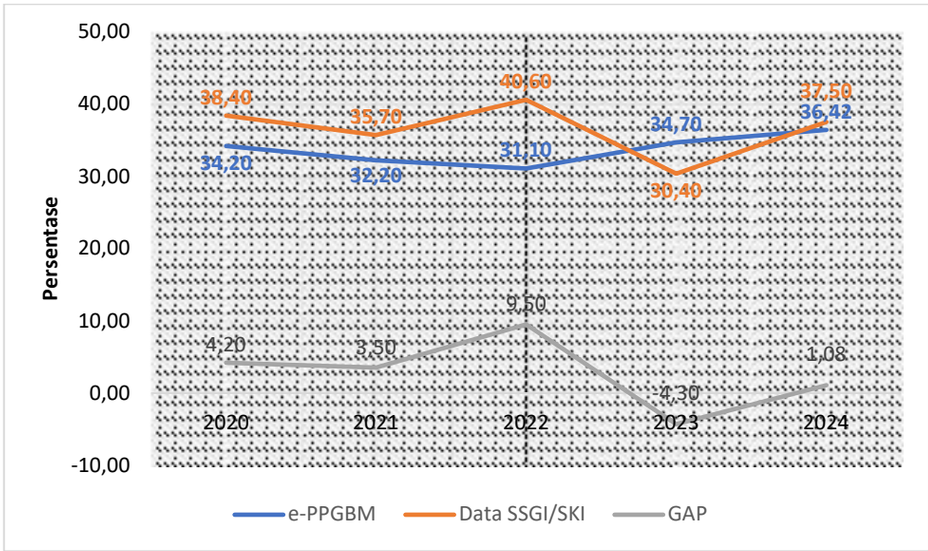

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Tahun 2025.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majene per Juli Tahun 2024 mencatat bahwa Kecamatan Pamboang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Majene, yakni mencapai 42,92 %, diikuti oleh Kecamatan Sendana dengan 41,08 %. Kondisi stunting tersebut paling sering terjadi pada anak-anak usia 6 bulan hingga 1 tahun, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pola makan anak. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlunya memaksimalkan program rutin gizi yang termasuk dalam Intervensi Gizi Spesifik. Langkah ini mencakup pemantauan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil dan remaja putri, serta edukasi tentang pemberian MP-ASI dan ASI eksklusif kepada kelompok sasaran yang mengalami masalah gizi.

Selanjutnya, perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Program Pemantauan Tumbuh Kembang (PMT) lokal bagi balita dan ibu hamil pada bulan Juli juga menjadi fokus penting. Langkah ketiga adalah memfasilitasi pelayanan kesehatan di posyandu dengan memenuhi kebutuhan alat ukur antropometri dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pendukung, seperti kelas ibu hamil dan kelas balita.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan suatu populasi, khususnya dalam pendidikan formal. RLS menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 8,65 tahun. Angka ini terus meningkat mencapai 9,64 tahun di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene meningkat sebesar 0,99 tahun, menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang menyelesaikan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dengan angka 9,64 tahun pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Majene telah menempuh pendidikan hingga tingkat menengah atas atau setara dengan SMA mulai dari tahun 2022-2024.

Gambar 2.32.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024

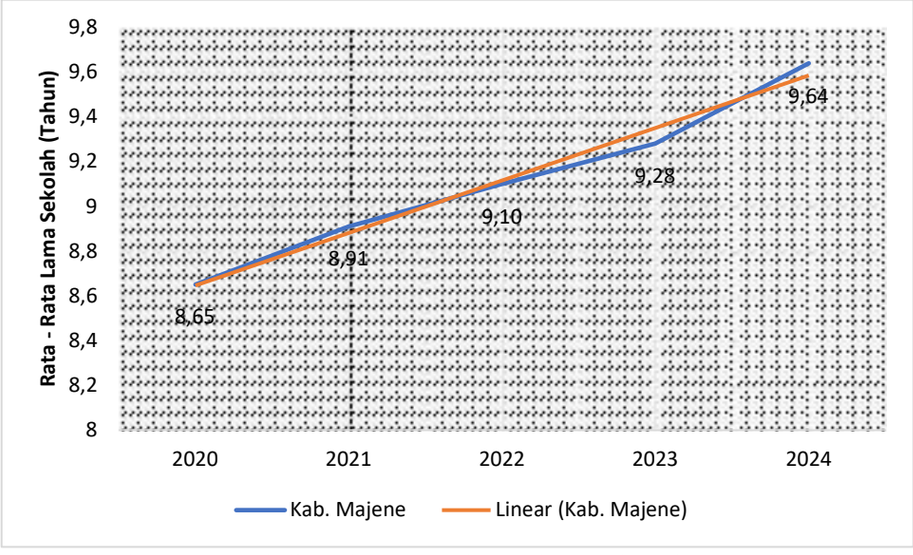

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Gambar 2.33.
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

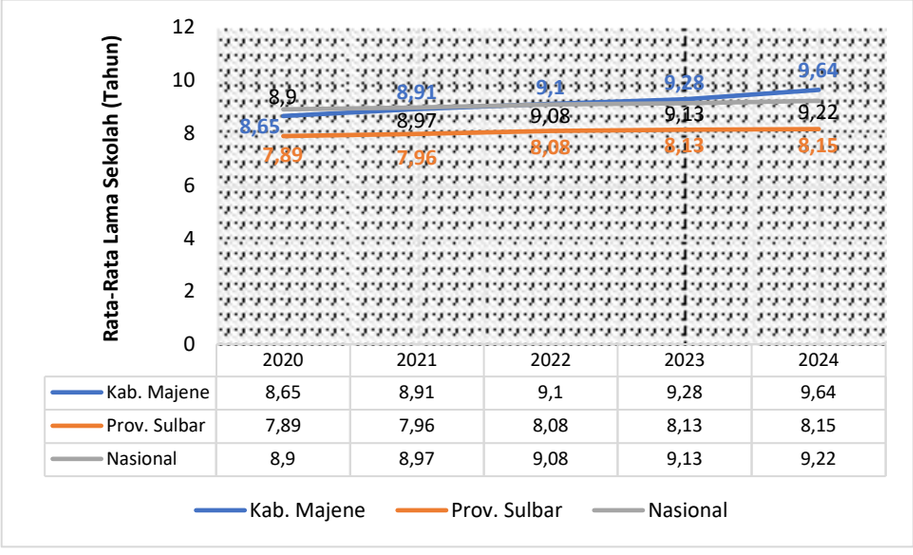

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	8,65	8,91	9,1	9,28	9,64
Prov. Sulbar	7,89	7,96	8,08	8,13	8,15
Nasional	8,9	8,97	9,08	9,13	9,22

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majene penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah (dalam tahun) pada tahun 2024 sebesar 9,64 tahun. Angka ini berada di atas angka rata-rata lama sekolah Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat pada tahun 2024 adalah 8,15 Tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah Nasional pada tahun 2024 adalah 9,22 Tahun atau lebih rendah dari angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene. Jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan

Kabupaten Majene tidak tamat SLTP atau masih kelas 3 (tiga) SLTP, oleh karena itu untuk mencapai RLS maksimal 9 tahun (setara Wajar 9 tahun) masih memerlukan pembenahan pada sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Majene menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.34.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024

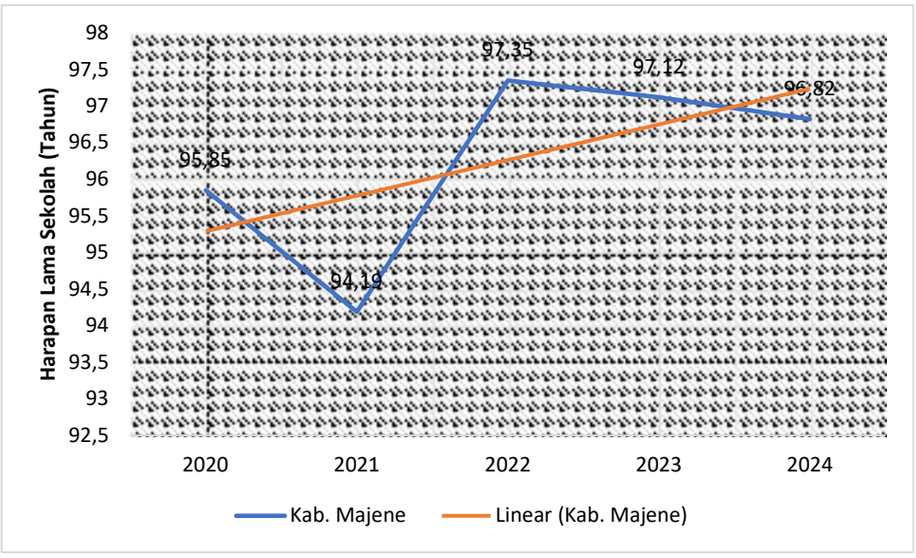

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 13,61 tahun, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 13,99 tahun. Tahun 2022, nilai HLS Kabupaten Majene mengalami penurunan sebesar 0,36 tahun atau berada diangka 13,63 tahun. Hingga tahun 2023-2024 nilai

HLS Kembali meningkat masing-masing angka 13,71 tahun dan 13,72 tahun. Peningkatan HLS ini mengindikasikan bahwa anak-anak yang lahir di Kabupaten Majene selama periode 2020 sampai 2024 memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Diploma atau Sarjana (S1).

Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Majene tercatat sebesar 13,72 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Majene memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Diploma atau Sarjana (S1). Jika dibandingkan dengan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, Kabupaten Majene lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional, Dimana harapan lama sekolah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 sebesar 12,89 tahun lebih rendah dari Tingkat nasional yang mencapai angka 13,21 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.35.
Perbandingan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

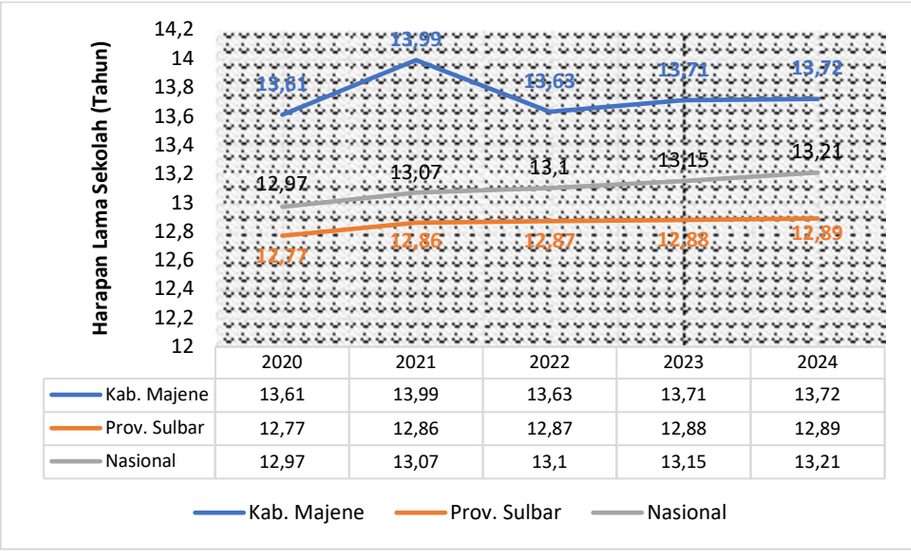

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	13,61	13,99	13,63	13,71	13,72
Prov. Sulbar	12,77	12,86	12,87	12,88	12,89
Nasional	12,97	13,07	13,1	13,15	13,21

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

C. Angka Literasi/Numerasi

Angka Literasi/Numerasi atau Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau lainnya, tanpa harus memahami isi dari apa yang dibaca atau ditulis. Setelah tahun 2010, Angka Melek Huruf (AMH) tidak lagi digunakan sebagai indikator dalam penyusunan Indeks

Pendidikan pada dimensi pengetahuan/tingkat pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AMH dianggap tidak relevan untuk mengukur pendidikan secara menyeluruh karena tidak mencerminkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena Angka Melek Huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, indikator ini tidak dapat dengan baik membedakan tingkat pendidikan antar daerah.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Majene dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020, AMH Kabupaten Majene tercatat sebesar 95,85 %, dan menurun secara signifikan menjadi 94,19 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 kembali meningkat secara signifikan sebesar 3.16 % atau berada di angka 97.35 % dan Kembali mengalami penurunan di dua tahun berikutnya, tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing berada diangka 97,12 % dan 96,82 %. Dengan melihar perkembangan AMH Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan sebesar 0,97 %. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 96 dari 100 orang dewasa di Kabupaten Majene mampu membaca dan menulis. Lebih jelasnya perkembangan AMH di Kabupaten Majene pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.36.
Perkembangan Angka Literasi/Numerasi (Angka Melek Huruf)
Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024

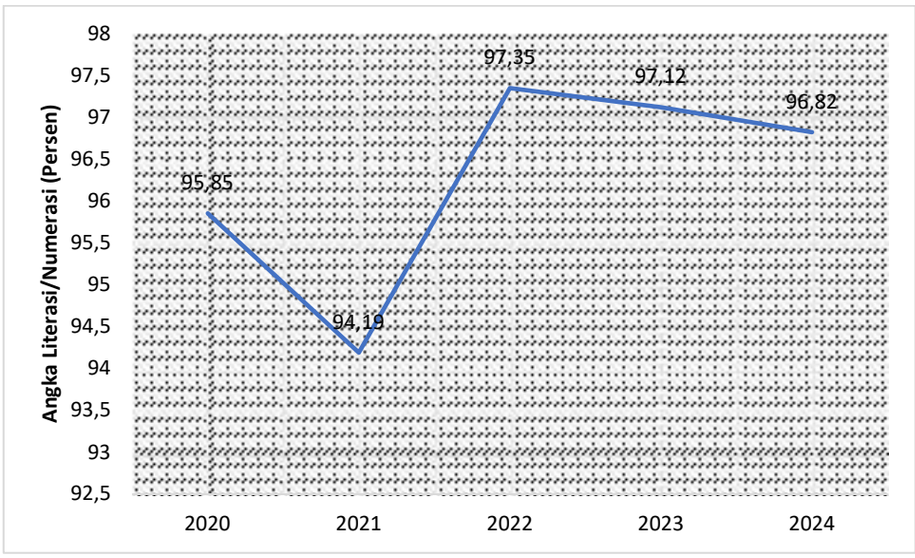

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Berdasarkan gambar grafik perbandingan angka AMH diatas, jika dibandingkan dengan Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, pada tahun 2024, AMH Kabupaten Majene lebih tinggi dari Tingkat provinsi

maupun nasional, Dimana angka AMH Provinsi Sulawesi Barat sebesar 95.00 % atau lebih rendah dari Tingkat nasional dan angka AMH secara nasional berada diangka 96,67 %.

Gambar 2.37.
Perbandingan Angka Literasi/Numerasi (Angka Melek Huruf)
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

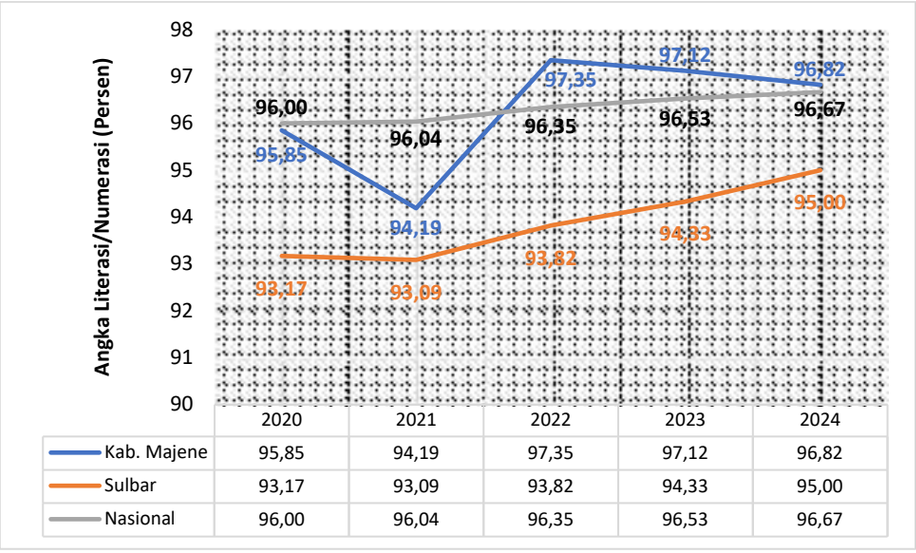

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Majene	95,85	94,19	97,35	97,12	96,82
Sulbar	93,17	93,09	93,82	94,33	95,00
Nasional	96,00	96,04	96,35	96,53	96,67

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Dengan literasi, kemampuan seseorang dalam memahami dan menarik kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. IPLM mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi di masyarakat. Terdapat tujuh unsur dalam pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan harian, jumlah perpustakaan ber-SNP, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM ke dalam lima kategori: Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100). Berikut disajikan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Majene Tahun 2024, sebagai berikut.

Gambar 2.38.
Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2024

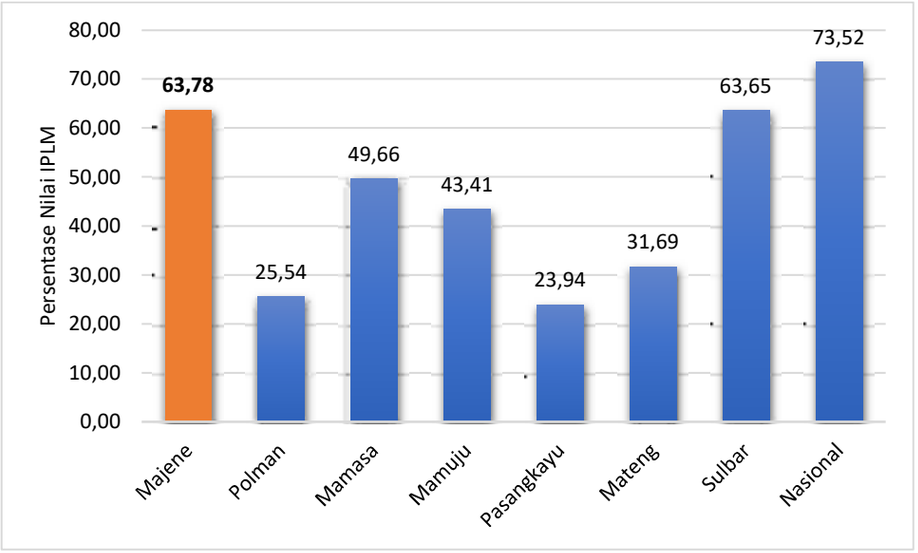

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat seperti yang tertera pada gambar grafik perbandingan diatas, bahwa data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat hanya terdapat dua periode yaitu tahun 2024 dan 2023. Dimana tahun 2023 IPLM Kabupaten Majene berada diangka 74,95 % atau masuk dalam kategori sedang dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar 11,17 % atau berada diangka 63,78 % atau tetap berada dalam kategori sedang. Jika dilihat data pada tahun 2024, Kabupaten Majene merupakan kabupaten dengan nilai IPLM tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat bahkan melebihi nilai IPLM Provinsi Sulawesi Barat yang berada diangka 63,65 % atau masuk dalam kategori sedang tetapi masih dibawah dari angka nasional yang berada pada angka 73.52 %.

E. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan serta memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lainnya. Indeks ini terdiri dari empat pilar utama, yaitu Keterampilan Digital, Etika Digital, Keamanan Digital, dan Budaya Digital. Pada tahun 2023, Nilai Indeks Literasi Digital Nasional adalah 3,65, dengan Pilar Etika Digital sebagai pilar yang memiliki nilai tertinggi 3,99, sementara Pilar Keamanan Digital merupakan pilar dengan nilai indeks

terendah 3,29. Sedangkan nilai Pilar Kecakapan Digital sebesar 3,50 dan Pilar Budaya Digital sebesar 3,81. Berdasarkan Laporan Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022, menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan 0,24 poin pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2021). Selain itu, tahun tersebut Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam 5 besar secara nasional untuk Indeks Budaya Literasi Digital (*Digital Culture*) dengan skor 4,07, ini menunjukkan kekuatan disalah satu pilar literasi digital.

Data Indeks Literasi Digital untuk Kabupaten Majene tidak tersedia karena perhitungan Indeks Literasi Digital hanya pada level Nasional dan Provinsi, Untuk tetap dapat menggambarakan kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat maka akan digunakan indeks pengganti yaitu Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI).

Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Sebagai salah satu upaya strategis, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkenalkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun 2022. IMDI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital.

Berdasarkan nilai IMDI, Kabupaten Majene memiliki trend peningkatan dalam tiga periode terakhir, yaitu tahun 2022 nilai IMDI sebesar 23,25 dan meningkat di tahun 2022 sebesar 37,28 serta tahun 2024 mencapai 40,55. Sedangkan pada Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, nilai IMDI tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2023) dengan nilai sebesar 41,65 tahun 2024 dan 42,07 tahun 2023 serta tahun 2022 sebesar 29,87. Melihat nilai IMDI Kabupaten Majene dari periode tahun 2022-2024, yang menunjukkan trend kenaikan setiap tahunnya, maka kenaikan ini mencerminkan perkembangan positif dalam pemanfaatan teknologi digital di Kabupaten Majene, ini sejalan dengan ditetapkan wilayah Kabupaten Majene sebagai wilayah Pusat Pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Berikut disajikan nilai IMDI Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.40.
Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022–2024

Kabupaten/Kota	Infrastruktur Ekosistem 2024	Kemampuan Digital 2024	Pemberdayaan 2024	Pemanfaatan 2024	Nilai IMDI 2022 - 2024	Kategori IMDI 2024
MAJENE	52,25	52,20	22,39	38,24	23,25 → 37,28 → 40,55	Cukup
MAMASA	39,43	63,34	26,34	38,48	36,30 → 47,45 → 41,75	Cukup
MAMUJU	46,72	56,19	25,54	37,96	31,06 → 43,88 → 41,24	Cukup
MAMUJU TENGAH	46,93	58,07	25,31	38,59	32,71 → 44,58 → 41,84	Cukup
PASANGKAYU	45,11	59,45	24,81	37,95	32,67 → 42,70 → 41,51	Cukup
POLEWALI MANDAR	58,18	56,20	23,05	36,22	23,38 → 36,51 → 43,00	Cukup

Sumber : Buku IMDI 2024, Kementerian Komunikasi dan Digitasl RI, Tahun 2025.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi tenaga kerja dalam program perlindungan sosial ketenagakerjaan, seperti yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi tenaga kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan, sehingga berperan penting dalam menjamin keberlangsungan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Peningkatan cakupan kepesertaan mencerminkan komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin besar jumlah tenaga kerja yang telah memperoleh haknya atas jaminan sosial, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan sosial daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.39.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kabupaten Majene Periode Tahun 2020-2024

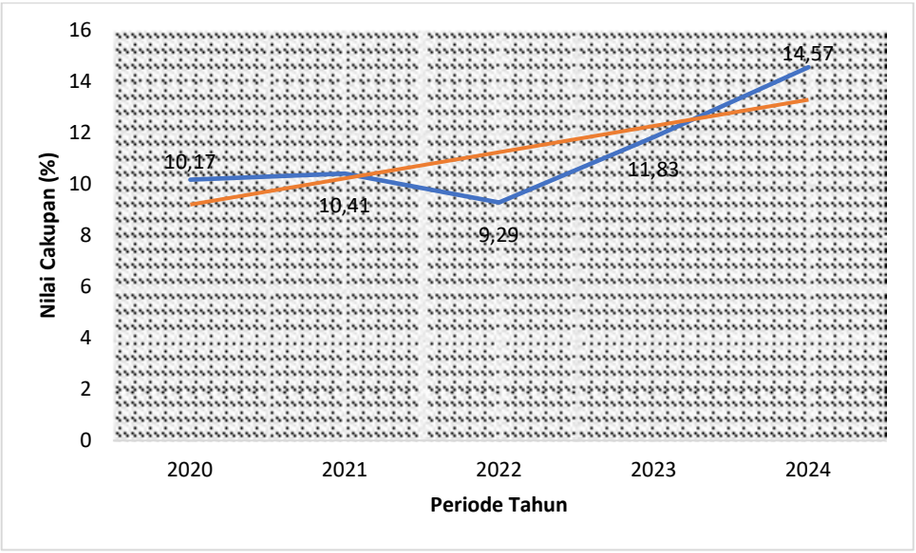

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Majene dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukan tren yang meningkat tiap tahunnya. Dari tahun 2020 sebesar 10,17 % menjadi 14,57 % pada tahun 2024. Hal ini menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Kabupaten Majene mengalami peningkatan sebesar 4,40 %.

B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan menggambarkan seberapa besar penduduk di Kabupaten Majene yang memiliki akses terhadap jaminan kesehatan, seperti asuransi kesehatan atau program jaminan kesehatan nasional.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Sosial Kabupaten Majene tahun 2021-2025, cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan pada tahun 2021 sebesar 102,87 % Dimana peserta aktif sebanyak 146.364 jiwa, peserta non aktif sebanyak 31.866 jiwa sehingga total capaian peserta sebanyak 178.230 jiwa. Hingga tahun 2025 Mengalami peningkatan peserta aktif sebanyak 17.567 jiwa atau berada diangka 163.931 jiwa, sedangkan peserta non aktif mengalami penurunan sebanyak 16.090 jiwa

dengan capaian peserta sebanyak 1.477 jiwa sehingga cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan tahun 2025 sebesar 94.47 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Kabupaten Majene Tahun 2021–2025

Tahun	Cakupan Kepesertaan Jaminan			
	Peserta Aktif (Jiwa)	Peserta Non Aktif (Jiwa)	Capaian Peserta (Jiwa)	Cakupan (%)
2021	146,364	31,866	178,230	102.87%
2022	158,343	12,733	171,076	94.50%
2023	169,718	16,658	186,376	100.93%
2024	167,728	16,813	184,541	97.75%
2025	163,931	15,776	179,707	94.47%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Majene, Tahun 2025.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian program-program kerukunan. IKUB diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria pencapaian IKUB dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), dan IKUB Sangat Tinggi (80-100). Karena data IKUB untuk Kabupaten Majene tidak tersedia, analisis dilakukan pada IKUB Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Untuk Provinsi Sulawesi Barat data yang ada dari tahun 2021-2024 sedangkan Tingkat nasional dari tahun 2020-2024.

Berdasarkan gambar grafik dibawah, menunjukkan bahwa nilai IKUB Nasional tahun 2020 mencapai 67,46 poin sedangkan wilayah Provinsi Sulawesi Barat belum dilakukan pengukuran secara spesifik. Untuk tahun 2021, Nasional mengalami kenaikan di angka 72,39 poin sedangkan Provinsi Sulawesi Barat berada di angka 74,62 poin atau lebih tinggi dari nilai nasional. Tahun 2022 secara nasional Kembali mengalami kenaikan menjadi 73,09 poin dan sejalan dengan Provinsi Sulawesi Barat yang juga mengalami kenaikan diangka 75.77 poin. Hingga tahun 2023-2024 nasional Kembali meningkat diangka 76,02 poin dan 76,47 poin. Sementara Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 mengalami penurunan

yang cukup signifikan diangka 73,25 poin dan Kembali meningkat tajam di tahun 2024 sebesar 77,90 poin. Melihat tren yang positif di Sulawesi Barat, diharapkan IKUB dapat terus meningkat di masa mendatang, menjadi cerminan keberhasilan Sulawesi Barat sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kebersamaan di tengah perbedaan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.40.
Perbandingan Indeks Kerukunan Ummat Beragama
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

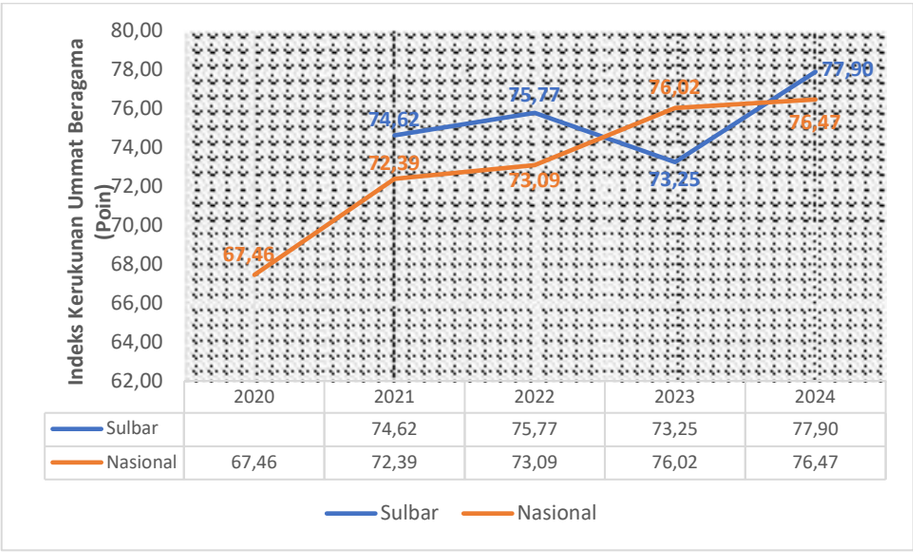

Sumber : Balitbang Diklat Kementerian Agama RI, Tahun 2025.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang dirancang untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan kebudayaan, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan serta sebagai acuan untuk koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Kriteria pencapaian IPK adalah sebagai berikut: IPK ≤ 20 (Kurang), 20 < IPK ≤ 40 (Sedang), 40 < IPK ≤ 60 (Cukup), 60 < IPK ≤ 80 (Baik), dan 80 < IPK ≤ 100 (Amat Baik). Karena data IPK untuk Kabupaten Majene tidak tersedia, analisis dilakukan pada IPK Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional.

Berdasarkan grafik diatas, Nilai IPK Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2020-2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai IPK Provinsi Sulawesi Barat adalah 47,14 poin, yang termasuk dalam kriteria cukup. Pada tahun berikutnya 2021, nilainya menurun sebesar 0,35 poin menjadi 46,79 poin yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021. Kondisi serupa juga terlihat pada nilai IPK Nasional, di mana pada tahun 2020, nilai IPK Nasional adalah 54,65 poin, yang kemudian turun menjadi 51,90 poin pada tahun 2021. Pada tahun 2022-2023, nilai IPK Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan pertumbuhan positif, dengan IPK Provinsi masing-masing mencapai 46,92 poin dan IPK Nasional sebesar 55,13 poin tahun 2022, sedangkan tahun 2023 capaian IPK Provinsi Sulawesi Barat sebesar 50,47 poin dan IPK Nasional sebesar 57,13 poin. Sampai pada tahun 2024 nilai IPK belum dirilis oleh Kementerian terkait baik itu Tingkat nasional maupun provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.41.
Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

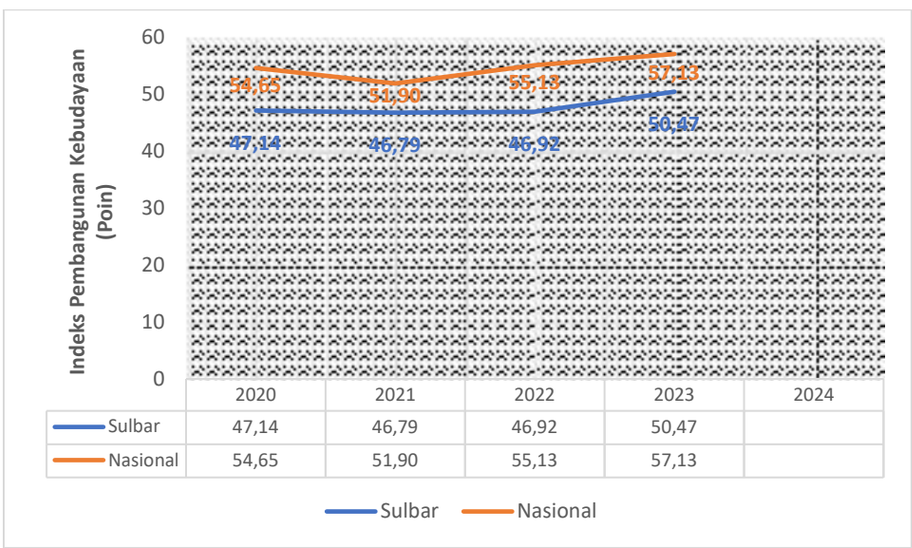

Sumber : Pusdatin Kemendikdasmen RI, Tahun 2025.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah merupakan indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan;

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus. IPA terdiri dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA adalah Indikator yang menggambarkan capaian pemenuhan hak anak, yang tersusun dari 4 klaster hak anak, yaitu; hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Sedangkan IPKA adalah Indikator yang menggambarkan capaian perlindungan khsususs anak yang tersusun dari 5 indikator pada klaster perlindungan khusus anak, yaitu; persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet; rasio APS anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas); persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.42.
Capaian Indeks Perlindungan Anak dan Data Pembentuknya
Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2023

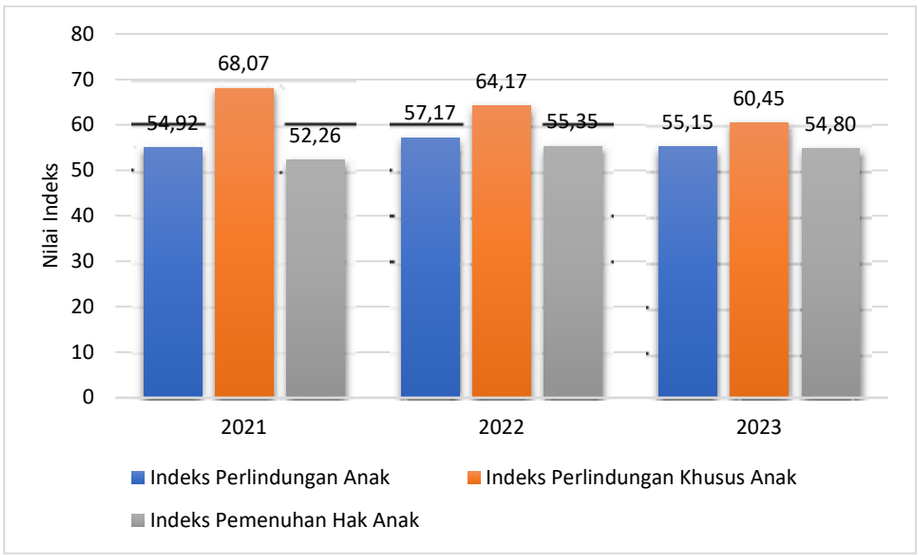

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Majene, Tahun 2025.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene melalui situs website SIGA KemenPPPA untuk tahun 2020 dan 2024 belum tersedia sehingga data IPA dan pembentuknya hanya berada pada periode tahun 2021-2023. Nilai IPA serta nilai pembentuknya IPKA dan IPHK Kabupaten Majene dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang

fluktuatif. Selama periode 2021-2022 nilai IPA Kabupaten Majene mengalami perkembangan positif, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Nilai IPA tertinggi untuk Kabupaten Majene tercatat pada tahun 2022 yaitu sebesar 57,17 yang kemudian turun menjadi 55,15 pada tahun 2023. Sedangkan data pembentuknya berupa IPKA pada tahun 2021 tercatat 68,07 dan tahun 2023 tercatat 60,45. Sedangkan nilai IPHK tahun 2021 sebesar 52.26 dan tahun 2023 tercatat sebesar 54.80.

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian Kualitas Keluarga. IKK berfungsi sebagai dasar perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mencapai Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan kategori indeks berkisar antara 0,00 hingga 100. Kategori IKK adalah sebagai berikut IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK terdiri dari lima pilar atau dimensi, yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Karena data IKK untuk Kabupaten Majene tidak tersedia, maka analisis dilakukan pada IKK Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional.

Gambar 2.43.
Capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2023

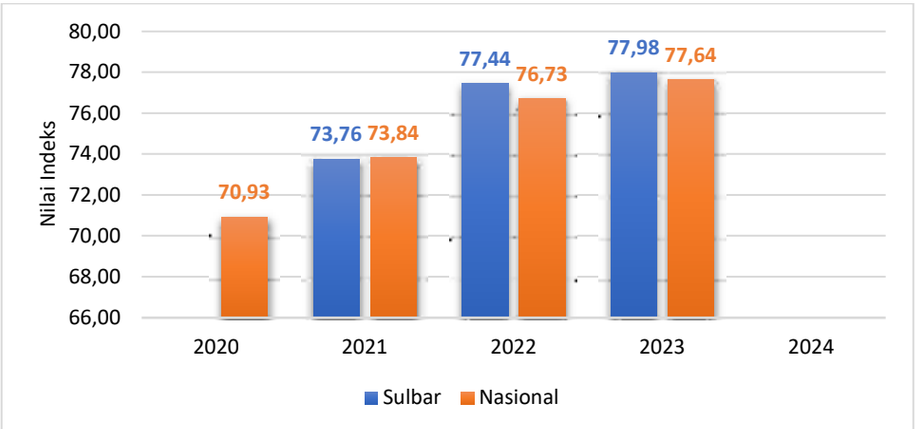

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Majene, Tahun 2025.

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 dan 2024 belum tersedia dan dari tahun 2021 hingga 2022 nilai IKK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, nilai IKK Provinsi Sulawesi Barat adalah 73,76, yang kemudian tumbuh menjadi 77,44 pada tahun 2022, dan mencapai 77,98 pada tahun 2023 atau dibawah dari capaian nasional yang berada di angka 77,64. Kondisi ini menempatkan Provinsi Sulawesi Barat dalam kategori wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terlihat pada tingkat nasional, di mana nilai IKK Nasional meningkat dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,84 pada tahun 2021, dan naik lagi menjadi 76,73 pada tahun 2022 serta tahun 2023 mencapai 77,64. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia termasuk dalam kategori wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mencerminkan kegagalan dalam pencapaian pembangunan manusia akibat ketidaksetaraan gender, yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, dan akses ke pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG bertujuan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pencapaian pembangunan berdasarkan gender serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat. Lebih jelasnya IKG Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.44.
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024

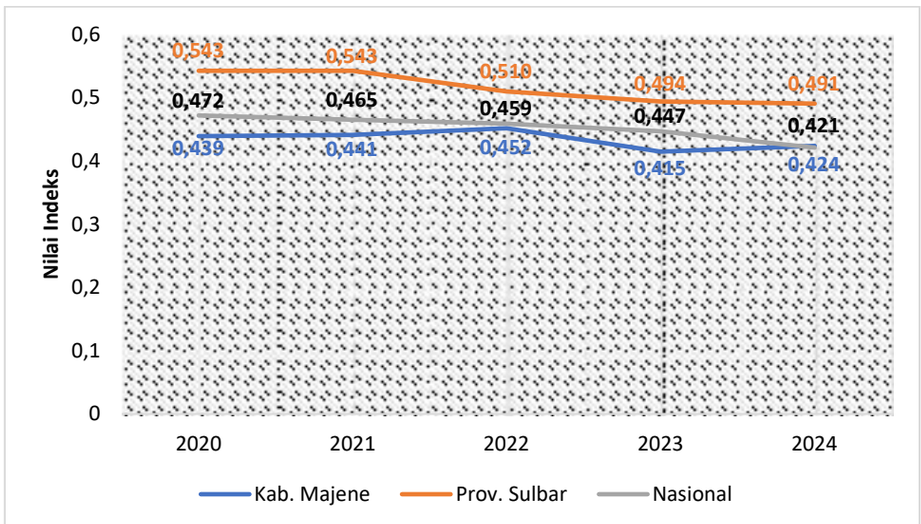

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Majene dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai IKG Kabupaten Majene sebesar 0,439 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yang mencapai 0,441 dan terus meningkat hingga tahun 2022 yang mencapai angka 0,452, tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi 0,415 pada tahun 2023, tetapi kemudian mengalami perbaikan dengan Kembali meningkat menjadi 0,424 pada tahun 2024. Nilai IKG tertinggi di Kabupaten Majene dalam lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2022, yaitu sebesar 0,452. Jika dibandingkan dengan nilai IKG Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat, nilai IKG Kabupaten Majene berada di bawah nilai IKG Nasional dan Provinsi. Sementara itu, indeks kesetaraan gender jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene berada di posisi paling terendah diantara 5 kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.45.
Perbandingan IKG Kabupaten Majene Dibandingkan Dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2020 – 2024

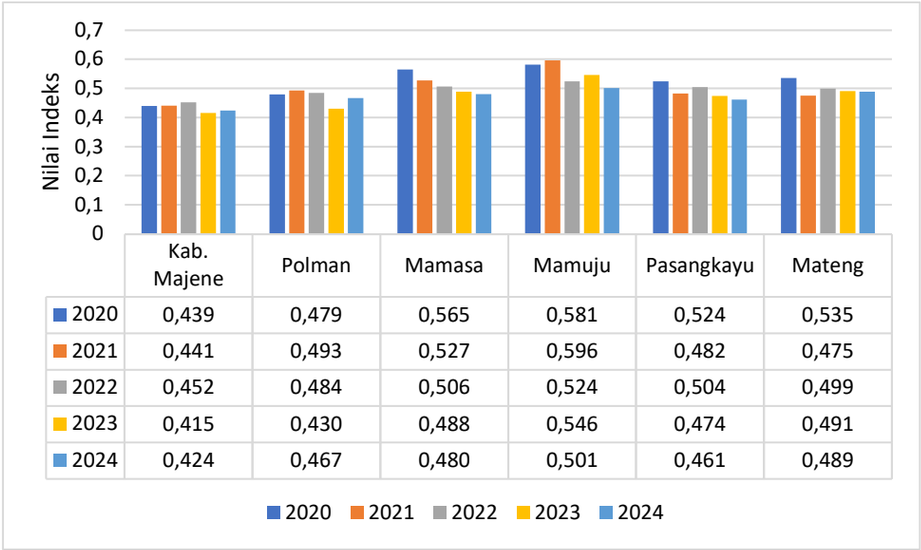

	Kab. Majene	Polman	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mateng
2020	0,439	0,479	0,565	0,581	0,524	0,535
2021	0,441	0,493	0,527	0,596	0,482	0,475
2022	0,452	0,484	0,506	0,524	0,504	0,499
2023	0,415	0,430	0,488	0,546	0,474	0,491
2024	0,424	0,467	0,480	0,501	0,461	0,489

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

D. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP berfungsi sebagai tolak ukur pembangunan yang didasarkan pada tiga lapisan, yaitu pembangunan individu,

pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, yang dipetakan dalam lima domain dengan 15 indikator penyusunnya. Karena data IPP untuk Kabupaten Majene belum tersedia, sehingga analisis dilakukan pada IPP Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional.

Sulawesi Barat pada tahun 2023 memiliki jumlah pemuda tercatat 24,46 persen (Statistik Pemuda, 2023). Nilai IPP Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebesar 2,27 dari 55,33 pada tahun 2022 menjadi 55.5 pada tahun 2023. Peningkatan nilai IPP ini disebabkan oleh naiknya domain kesehatan dan kesejahteraan dari 65 menjadi 72,5 pada tahun 2023. Domain pendidikan juga mengalami peningkatan dari 63,33 pada tahun 2022 menjadi 66,67 pada tahun 2023. Ketiga domain lainnya mengalami stagnasi yaitu domain gender dan diskriminasi (43,33), domain partisipasi. Kondisi serupa juga terlihat pada nilai IPP Nasional, di mana nilai IPP Nasional mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan dan sempat turun pada tahun 2020. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan nilai IPP di tingkat Nasional maupun Provinsi adalah pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga tahun 2021.

Gambar 2.46.
Capaian Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

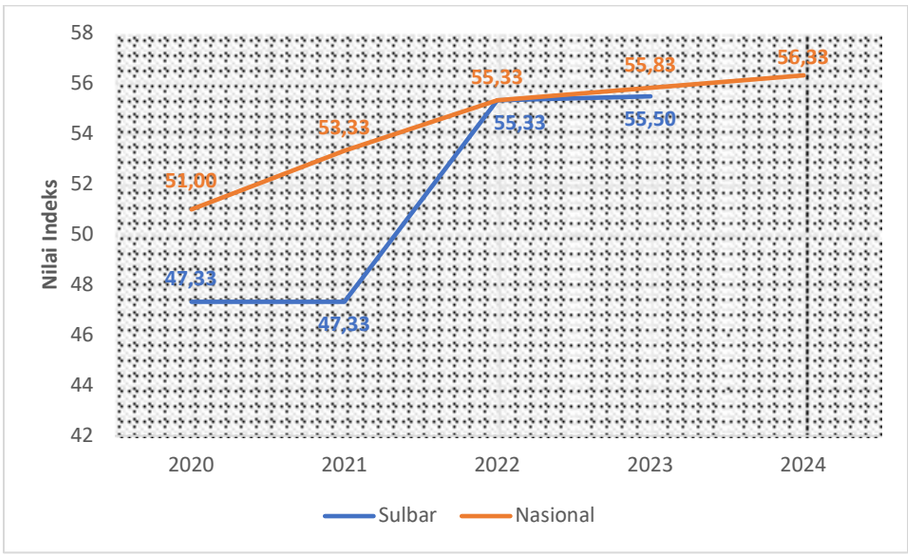

Sumber : Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Tahun 2025.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau penduduk berdasarkan umur menjadi salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif dan yang tidak produktif lagi. Sebaliknya , Persentase Angka Ketergantungan yang lebih rendah menunjukan berkurangnya beban yang ditanggung oleh penduduk produktif dan yang tidak produktif lagi. Penduduk berdasarkan umur dikabupaten majene dan tahun 2020 hingga 2024 menunjukan persentase rendah. Pada tahun 2024, angka ketergantungan mengalami penurunan signifikan menjadi 50,5, dibanding dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 54,9. Ini berarti ditahun 2024, setiap 100 penduduk usia produktif dan tidak produktif mengalami penurunan pada angka ketergantungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar statistik dibawah ini :

Gambar 2.47.
Angka Ketergantungan Kabupaten Majene
Tahun 2020-2024

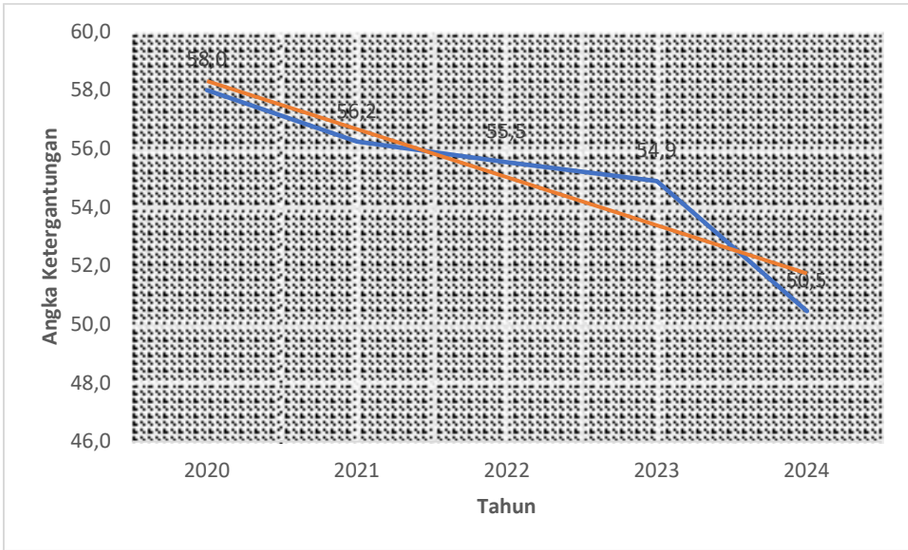

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

B. Penduduk Berdasarkan Kegiatan Selama Seminggu

Jumlah penduduk berdasarkan kegiatan selama seminggu merujuk pada distribusi dan fluktuasi populasi di suatu wilayah geografis tertentu pada waktu yang berbeda dalam siklus mingguan, yang

ditentukan oleh pola aktivitas harian dan mingguan penduduknya. Ini bukan sekadar menghitung berapa banyak orang yang tinggal di suatu tempat secara permanen, tetapi lebih pada aktivitas yang mendasari bahwa pergerakan dan konsentrasi penduduk ini didorong oleh berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, berbelanja, rekreasi, beribadah, atau pulang ke rumah dan lainnya. Pada wilayah Kabupaten Majene jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu terakhir dan jenis kelamin di Kabupaten Majene tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Majene Tahun 2024

No.	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	**Angkatan Kerja**	**51.533**	**30.936**	**82.469**
	1. Bekerja	49.816	29.195	79.011
	2. Pengangguran Terbuka	1.717	1.741	3.458
II	**Bukan Angkatan Kerja**	**12.780**	**34.297**	**47.077**
	1. Sekolah	5.266	6.771	12.037
	2. Mengurus Rumah Tangga	3.180	24.940	28.120
	3. Lainnya	4.334	2.586	6.920
Jumlah		**64.313**	**65.233**	**129.546**

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2024 sekitar 129.546 jiwa penduduk Kabupaten Majene berumur 15 tahun keatas bekerja/ berkegiatan selama seminggu terakhir yang dibagi kedalam jenis laki-laki sebanyak 64.313 jiwa dan Perempuan sebanyak 65.233 jiwa. Kegiatan tersebut berupa bekerja sebanyak 79.011 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 3.456 jiwa. Sedangkan yang masuk bukan Angkatan kerja sebanyak 47.077 jiwa yang terbagi kedalam jenis kegiatan utama berupa sekolah sebanyak 12.037 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 28.120 jiwa dan kegiatan lainnya sebanyak 6.920 jiwa.

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 263,432 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 373,128 miliar rupiah atau sekitar 5,74 persen terhadap PDRB Majene pada tahun 2024. Kontribusinya

bertambah sebesar 0,46 persen selama lima tahun terakhir berdasarkan harga berlaku. Sedangkan laju pertumbuhan sub-sektor ini cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Setelah mengalami percepatan pertumbuhan yang cenderung tinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 11,66 persen, laju per tumbuhan industri ini sedikit melambat pada angka 6,04 persen di tahun 2024.

Selama lima tahun terakhir, pergerakan laku pertumbuhan Industri Pengolahan cenderung fluktuatif, namun tetap dalam tren percepatan pertumbuhan. Terjadi percepatan pertumbuhan di tahun 2021 selepas Covid-19, kemudian laju pertumbuhan Kembali melambat dan kembali naik di tahun 2023. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan sektor ini didukung oleh sub-sektor Industri Makanan dan Minuman; Industri Tekstil; Industri Furnitur; dan Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional dengan masing-masing pertumbuhan subsektor bernilai 9 persen, 7 persen, 8 persen, dan 18 persen. Kenaikan yang tinggi pada sub-sektor ndustri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional terjadi karena meningkatknya produksi minyak asiri sebagai efek dari melimpahnya produksi nilam di tahun 2024.

Gambar 2.48.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

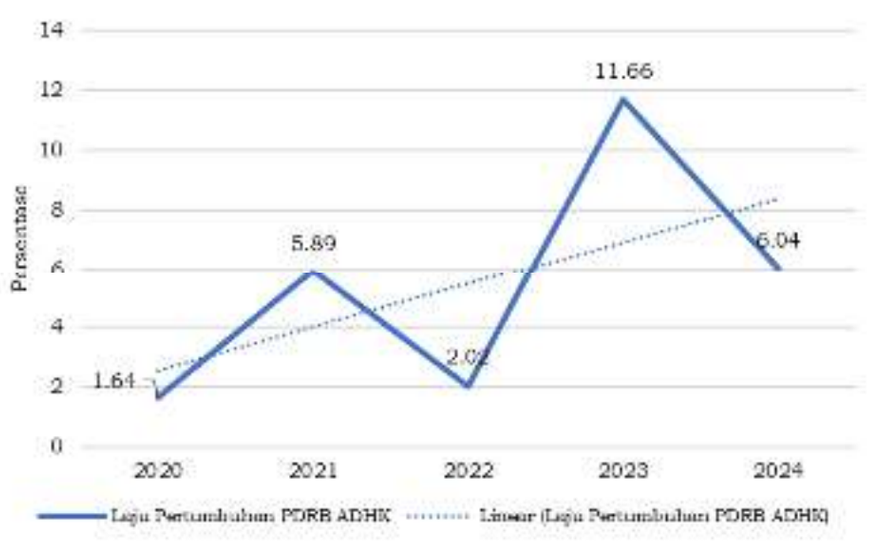

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Pada tahun 2024, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Majene sebesar 19,93 miliar rupiah atau sekitar 0,31 persen. Berdasarkan harga berlaku, terjadi peningkatan pada PDRB sektor ini dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Sementara itu, kontribusi dari sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Majene cenderung stagnan dari tahun 2020, pada posisi 0,28 sampai dengan 0,31 persen.

Laju pertumbuhan sektor ini terus meningkat sejak mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat Covid-19. Percepatan pertumbuhan sektor ini mencapai posisi 10,76 persen di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi perlambatan pertumbuhan dengan angka laju pertumbuhan sektor ini senilai 5,80 persen di tahun 2024. Laju Pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di tahun ini didorong oleh aktivitas hotel yang berjalan seiring dengan banyaknya even yang dilaksanakan. Selain itu, terdapat peningkatan pada penyediaan jumlah kos-kosan, utamanya untuk mahasiswa, mengikuti penambahan jumlah fakultas di Universitas Sulawesi Barat. Dari sub-sektor Penyediaan Makan Minum, terdapat peningkatan jumlah kios-kios penyedia makanan cepat saji sehingga menyokong pertumbuhan sektor ini di tahun 2024. Berikut disajikan grafik perkembangan rasio PDRB akomodasi makan dan minum, sebagai berikut.

Gambar 2.49.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

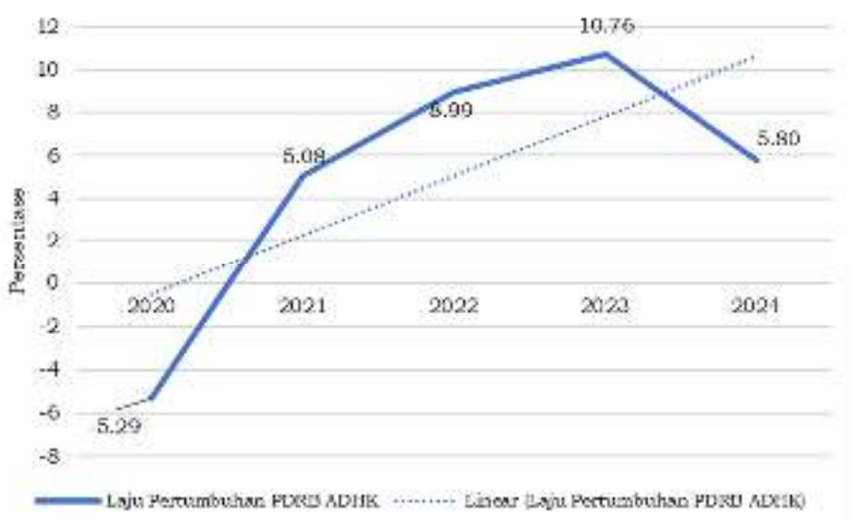

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

C. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang relevan dalam menilai sejauh mana masyarakat di suatu negara terlibat dalam kegiatan wirausaha. Kewirausahaan membuka pintu untuk inovasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika lebih banyak orang terlibat dalam berwirausaha, mereka memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Mereka tidak hanya menciptakan peluang untuk diri mereka sendiri tetapi juga memberdayakan orang lain. Karena data Rasio Kewirausahaan untuk Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat belum tersedia, sehingga analisis dilakukan pada Tingkat Rasio Kewirausahaan Nasional dari tahun 2020-2024.

Gambar 2.50.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

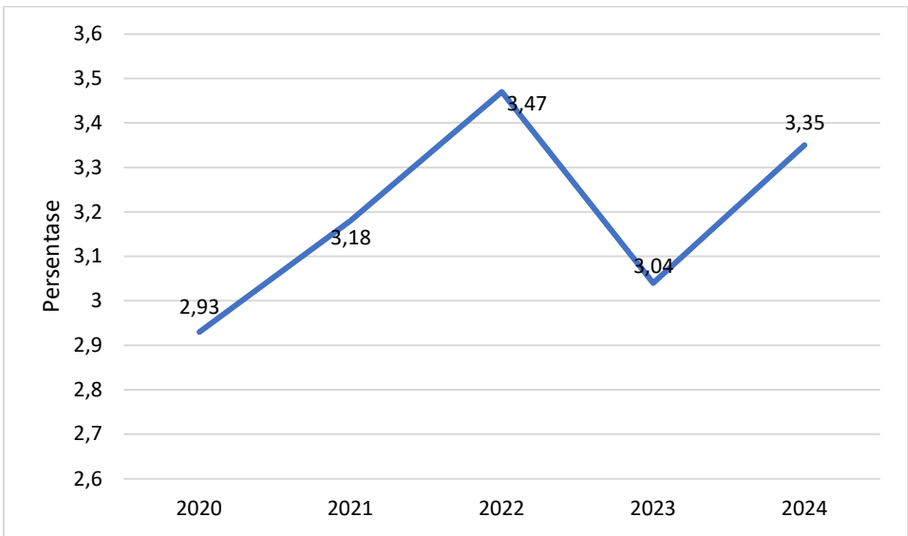

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI, Tahun 2025

Capaian Rasio Kewirausahaan Nasional tahun 2024 sebesar 3,35% atau 4,9 juta dari jumlah angkatan kerja nasional. Rasio ini meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 3,04%. Kementerian Koperasi dan UKM menjelaskan kenaikan rasio ini menjadi implementasi dari wirausaha yang terus mengembangkan usahanya. Pada saat pandemi Covid-19 rasio kewirausahaan mengalami pertumbuhan negative sebesar 7,16% sehingga rasio tersebut turun menjadi 2,93% pada 2020. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai respon hal tersebut.

Landasan hukum ini melandasi kolaborasi dengan 27 Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah termasuk wilayah Kabupaten Majene untuk bergerak maju dan meningkatkan rasio kewirausahaan ditahun-tahun berikutnya.

D. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan di suatu wilayah, seperti negara bagian, provinsi, atau kota. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu daerah berhasil dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah berfungsi untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan mendorong inovasi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Majene menunjukkan kondisi yang baik dalam kurun tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020-2021, indeks inovasi Kabupaten Majene tergolong kurang inovatif, namun dari tahun 2022 hingga 2024, indeks tersebut meningkat dan masuk dalam kategori inovatif. Berikut adalah tabel Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024.

Tabel 2.43.
Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Majene
Dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indeks Inovasi Daerah			
		Kabupaten Majene		Provinsi Sulawesi Barat	
1	2020	67,00	Kurang Inovatif	794	Inovatif
2	2021	25,35	Kurang Inovatif	36,64	Inovatif
3	2022	39,44	Inovatif	46,41	Inovatif
4	2023	39,54	Inovatif	29,04	Kurang Inovatif
5	2024	36,02	Inovatif	49,50	Inovatif

Sumber : SK Menteri Dalam Negeri Tentang Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

Selain itu, inovasi daerah juga merupakan salah satu pilar dalam menentukan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks ini mencerminkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing baik di pasar domestik maupun internasional, demi mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mencapai

kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan daerah, penting untuk mengoptimalkan potensi yang ada guna menciptakan daya saing daerah. Daya saing daerah dapat diukur melalui empat aspek, yaitu Faktor Penguat/*Enabling Environment*, Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Pasar, dan Faktor Ekosistem Inovasi. Pada tahun 2024, aspek Ekosistem Inovasi memiliki nilai sebesar 3,80, yang didukung oleh dua pilar pendukung seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.44.
Pilar Aspek Ekosistem Inovasi Pada IDSD
Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Nomor Pilar	Aspek Ekosistem Inovasi	Skor
1	11	Adopsi Teknologi	4,43
2	12	Kapabilitas Inovasi	3,17
Rata-Rata Skor			**3,80**

Sumber : Buku IDSD, Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025

Pengembangan ekosistem inovasi saat ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing serta pelayanan umum kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan. Kemampuan inovasi bertumpu pada lembaga penelitian dan pengembangan untuk menyokong ekosistem inovasi. Berdasarkan aspek ekosistem inovasi tersebut maka dibagi ke dalam dua pilar, yaitu :

1. Pilar Kapabilitas Inovasi

   Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan kapasitas inovasi adalah dengan pendekatan kapasitas inovasi kepemimpinan, kapasitas inovasi pelaksana yang berkualitas, kapasitas struktur inovasi dan kapasitas jaringan pendukung inovasi.

2. Pilar Adopsi Teknologi

   Implementasi tata kelola e-government di Pemerintah Majene memungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perencanaannya. Kesenjangan itu menjadi hambatan dalam mewujudkan kesempurnaan tata kelola e-government. Dikarenakan adanya ketidakselarasan dalam penyusunan e-government dan koordinasi antar perangkat daerah pengampu e-government. Oleh karena itu dilakukan tata kelola yang terstruktur dengan baik mulai dari perencanaan sampai penerapannya oleh dinas terkait. Di samping

itu melakukan penerapan IPTEK dan inovasi daerah juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga kelitbangan dan Perguruan Tinggi khususnya di bidang kelitbangan.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK diguankan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah penduduk yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar produksi penduduk usia kerja yang terlibat atau berusah untuk terlibat dalam kegiatan produktif. BPS mengelompokkan nilai TPAK menjadi tiga kategori: tinggi (TPAK ≥ 70), sedang (50 < TPAK < 70) dan Rendah (TPAK ≤ 50).

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di kabupaten majene dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukan tren yang fluktuatif, tetapi cenderung meningkat dan menurun. pada tahun 2020 TPAK kabupaten majene tercatat sebesar 68,1 %, kemudian ditahun 2021 mengalami penurunan sebasar 65,35, sedangkan tahun 2022 kembali mengalami penigkatan sebesar 68,05, untuk tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan sebesar 64,03 dan 63,66. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.51.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

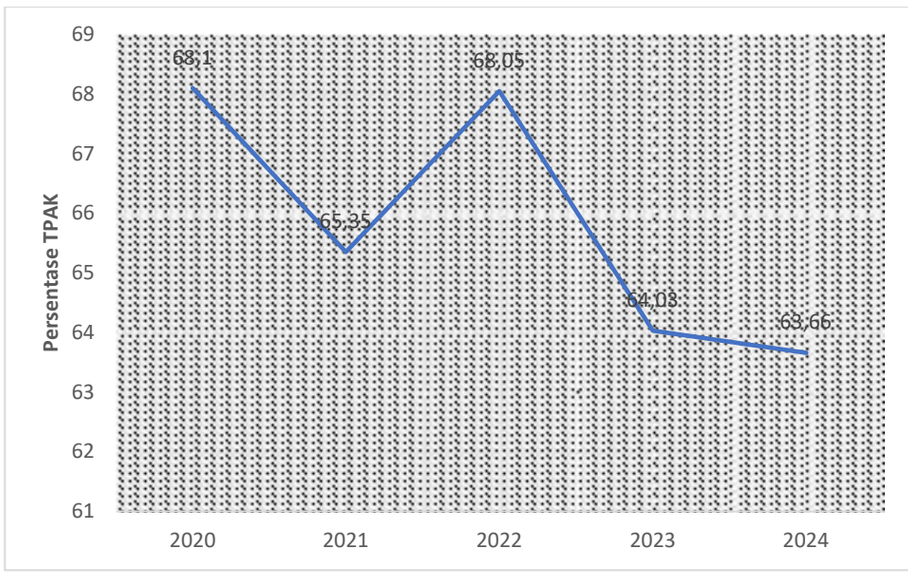

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Apabila dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tingkat kabupaten di Sulawesi Barat, TPAK Kabupaten Majene adalah yang paling terendah diantara lima kabupaten lainnya, pada tahun 2024 dengan Nilai TPAK Kabupaten Majene sebesar 63,66 %. Untuk TPAK peringkat pertama dan kedua adalah Kabupaten Mamasa dan kabupaten Mamuju dengan nilai sebesar 75,75 % dan 75,48 %. Untuk Kabupaten Pasangkayu, Polewali Mandar dan Mamuju Tengah berada pada tingkatan sedang dengan nilai TPAK secara berurutan.

Gambar 2.52.
Perbandingan Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

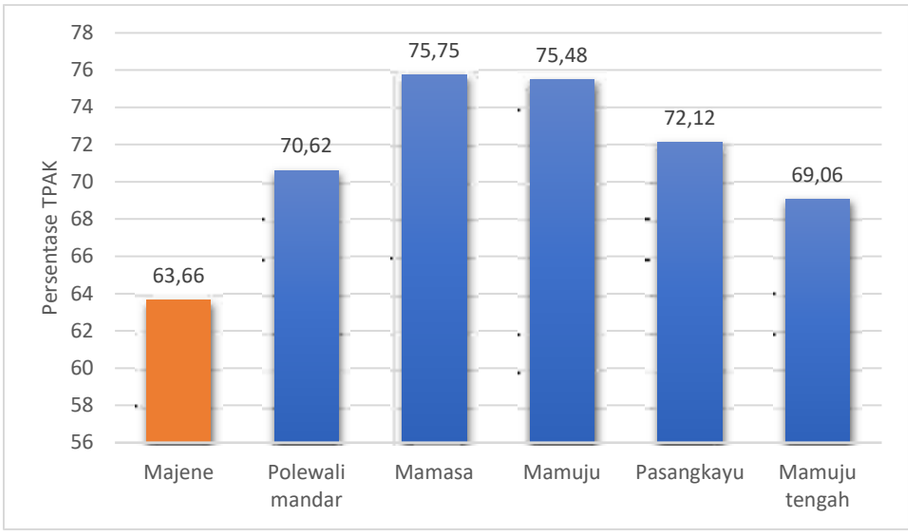

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau di Kabupaten Majene mencakup pembangunan yang memprioritaskan kelestarian lingkungan melalui pertanian organik, pengelolaan sampah, dan penggunaan energi terbarukan, sementara ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya kelautan seperti perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari. Saat ini, Majene memiliki potensi besar dengan garis pantai yang mendukung pariwisata dan lahan pertanian yang subur, namun menghadapi tantangan seperti kerusakan ekosistem laut akibat sampah plastik dan praktik pertanian yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Pemerintah daerah telah meluncurkan program pelatihan petani organik dan pembersihan pantai, meskipun keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan.

Kategori Indeks Ekonomi Hijau dihitung ditataran tingkat Nasional sehingga di Kabupaten Majene belum terdapat capaian Indeks Ekonomi Hijau, akan tetap pada tingkat Provinsi Sulawesi Barat pernah dihitung dan dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas Pertanggal 19 Mei 2023 dengan capai 47,06 pada tahun 2021 dengan kategori sedang sedangkan pada tingkat Nasional Indeks Ekonomi Hijau mencapai 59,17 dengan kategori baik. Pada tahun 2024 secara Nasional, Indonesia masuk dalam peringkat ke 3 se Asia Tenggara dengan capaian skor 41, dibawah Singapura dengan skor 55 dan Malaysia dengan skor 43. Sementara capaian Indeks Ekonomi Biru secara Nasional pada tahun 2023 mencapai skor 43,98 dan secara Provinsi Sulawesi Barat berada di angka sekitar 50 sampai 60. Nilai tertinggi untuk Indeks Ekonomi Berada terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian skor sebesar 80,86, kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan pada indikator Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) atau Porsi RBT dalam Bauran Energi Primer, diwilayah Kabupaten Majene maupun Provinsi Sulawesi Barat belum terdapat hitungan porsi tersebut, karena menginat urusan Energi berada pada Tingkat nasional sehingga melalui Kementerian ESDM, Indonesia menargetkan bauran EBT hingga 19,5 persen dalam bauran energi primer pada tahun 2024. Mengungat wilayah Kabupaten Majene direncanakan aka nada Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang masuk dalam kategori energi terbarukan sehingga perlu untuk tahun-tahun depan melakukan perhitungan Porsi RBT dalam Bauran Energi Primer.

Dalam RPJMD, Majene menargetkan menjadi wilayah dengan ekonomi hijau, biru dan energi yang seimbang, di mana Pembangunan mendukung kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Program prioritas meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya untuk desa terpencil, restorasi mangrove, dan promosi wisata Bahari seperti Pantai Dato. Kolaborasi dengan LSM untuk pengelolaan limbah laut dan pelatihan nelayan dalam praktik perikanan berkelanjutan juga akan diperkuat. Dengan langkah ini, Majene berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam sebagai warisan generasi mendatang.

2.3.4. Transformasi Digital

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran standar yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tingkat Nasional, maupun provinsi. Tujuan dan Manfaat IP-TIK adalah memberikan gambaran kuantitatif mengenai sejauh mana TIK telah berkembang di suatu wilayah, Mengidentifikasi adanya perbedaan atau kesenjangan dalam akses dan penggunaan TIK antarwilayah atau kelompok masyarakat, Memberikan informasi yang relevan bagi perumusan kebijakan dan program untuk mendorong pembangunan TIK lebih lanjut, dan memantau kemajuan suatu wilayah dalam rangka menuju masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang mampu memanfaatkan TIK secara optimal untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

IP-TIK diukur dalam skala 0 hingga 10, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin baik atau pesatnya pembangunan TIK di suatu wilayah. Berdasarkan penjelasan diatas maka IP-TIK Kabupaten Majene belum tersedia sehingga analisis dilakukan pada Tingkat Nasional dan Provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.53.
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2020-2023

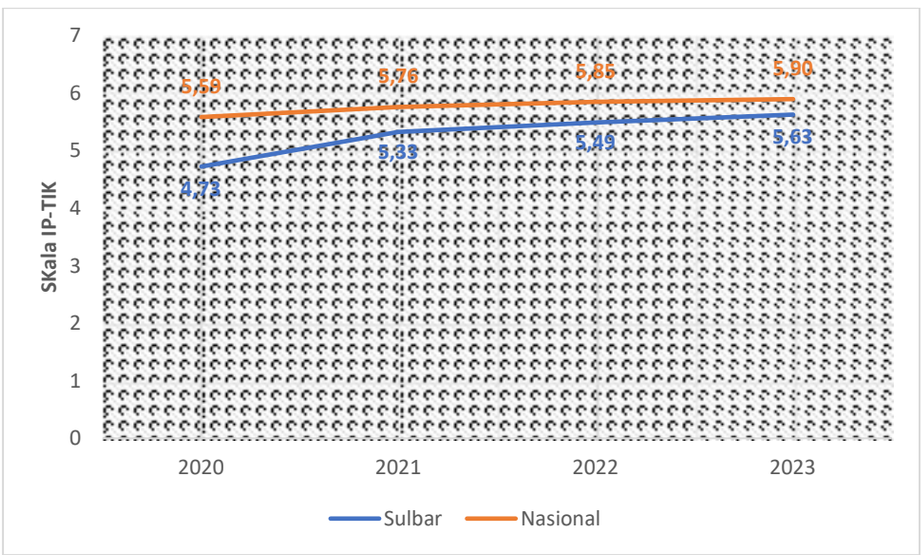

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan tren positif dalam peningkatan IP-TIK dari tahun 2020 hingga 2023. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di ketiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Sedangkan IP-TIK Sulawesi Barat tercatat sebesar 5,49. Pada tahun 2020, Sulawesi Barat masuk dalam kategori provinsi dengan IP-TIK "rendah" (skor 2,51-5,00) bersama beberapa provinsi lain, meskipun secara nilai sudah mendekati kategori "sedang". Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan IP-TIK dan masuk dalam kategori "sedang" (skor 5,01-7,50) dengan capaian skor 5.33. Tahun 2022 IP-TIK Sulawesi Barat adalah 5,49. Ini menunjukkan bahwa nilai IP-TIK di provinsi ini meningkat dari tahun 2021, meskipun masih berada di kategori "sedang". Tahun 2023 Data IP-TIK Sulawesi Barat untuk tahun 2023 menunjukkan nilai 5,74. Ini merupakan peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun 2022, melanjutkan tren positif pembangunan TIK di Provinsi Sulawesi Barat.

Secara keseluruhan, Sulawesi Barat menunjukkan upaya peningkatan dalam pembangunan TIK. Meskipun sempat berada di kategori "rendah", provinsi ini berhasil naik ke kategori "sedang" dan terus menunjukkan peningkatan nilai IP-TIK. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional (yang pada tahun 2023 mencapai 5,90), IP-TIK Sulawesi Barat masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Untuk Tahun 2024 data IP-TIK provinsi maupun nasional belum dirilis secara resmi oleh BPS per Juni 2025. Publikasi biasanya dilakukan pada akhir tahun berikutnya. Namun, dengan tren positif yang terlihat hingga tahun 2023, diharapkan IP-TIK Sulawesi Barat akan terus menunjukkan peningkatan.

Transformasi digital di Majene merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendukung ekonomi lokal, dan memperluas akses pendidikan. Saat ini, wilayah perkotaan seperti Banggae memiliki akses internet yang memadai, namun desa-desa terpencil masih terkendala sinyal lemah, membatarkan adopsi e-commerce dan layanan digital. UMKM mulai menggunakan media sosial untuk pemasaran, tetapi literasi digital masyarakat masih rendah. Pemerintah daerah telah memulai program “Desa Digital” untuk memperluas jaringan internet dan memberikan pelatihan teknologi, meskipun tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia masih menghambat.

Melalui RPJMD, Majene menargetkan ekosistem digital yang inklusif dengan akses internet merata dan masyarakat yang terampil dalam teknologi. Program strategis mencakup pembangunan menara telekomunikasi di wilayah pedalaman, pelatihan literasi digital untuk pelajar dan pelaku usaha, serta pengembangan aplikasi pasar online untuk produk lokal seperti ikan dan kopi Mandar. Digitalisasi administrasi desa juga menjadi prioritas untuk meningkatkan transparansi. Dengan memperkuat keamanan siber dan kerja sama dengan penyedia teknologi, Majene berupaya menjadi kabupaten yang kompetitif di era ekonomi berbasis digital.

B. Persentase Penduduk Pernah Menggunakan Akses Internet

Persentase penduduk yang memiliki akses internet merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk di suatu daerah yang dapat mengakses layanan internet, baik melalui jaringan kabel (fiber optik), nirkabel (Wi-Fi), maupun data seluler. Indikator ini mencerminkan tingkat penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat serta menjadi salah satu ukuran kemajuan digital di suatu wilaya. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas pernah menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir di Kabupaten Majene tahun 2024 mencapai 63.35 %, yang mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Majene telah terhubung dengan layanan internet. Angka ini menjadi indikator penting dalam mendukung transformasi digital di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. Lebih jelasnya Persentase Penduduk Pernah Menggunakan Akses Internet di Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut.

Gambar 2.54.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas
Pernah Menggunakan Internet Dalam 3 Bulan Terakhir
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

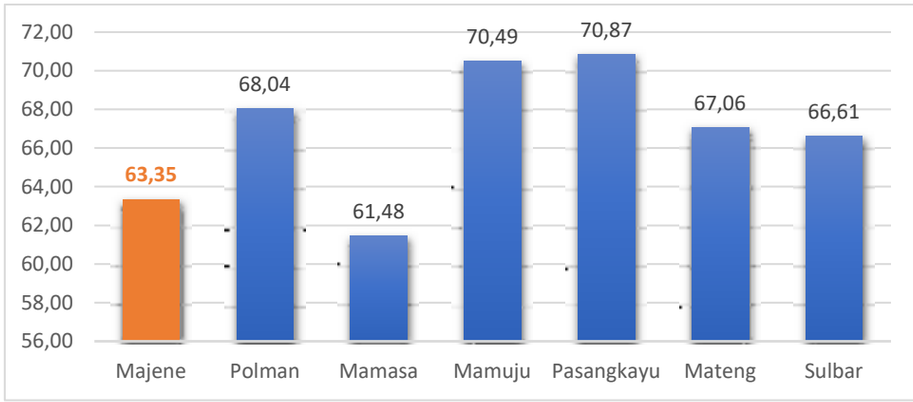

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam penyajian PDRB berdasarkan pengeluaran lebih menjelaskan tentang proporsi pendapatan yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik. Di sisi lain, komponen ini juga dapat diartikan sebagai representasi dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan untuk investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung dalam proses produksi di berbagai sektor usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi dalam negeri maupun dari impor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Majene berdasarkan PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menunjukkan tren peningkatan dari 846,73 Miliar Rupiah pada tahun 2020 menjadi 1.711,31 Miliar Rupiah pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kontribusi investasi terhadap PDRB. Peningkatan ini mengindikasikan menguatnya aktivitas investasi di sektor-sektor produktif, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain mulai adanya kepastian ekonomi global pasca-pandemi, rendahnya suku bunga yang menekan minat investasi, percepatan realisasi proyek infrastruktur daerah, serta pergeseran kebijakan fiskal ke arah konsumsi dan bantuan sosial dari pada belanja modal.

Gambar 2.55.
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto
(Miliar Rupiah) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

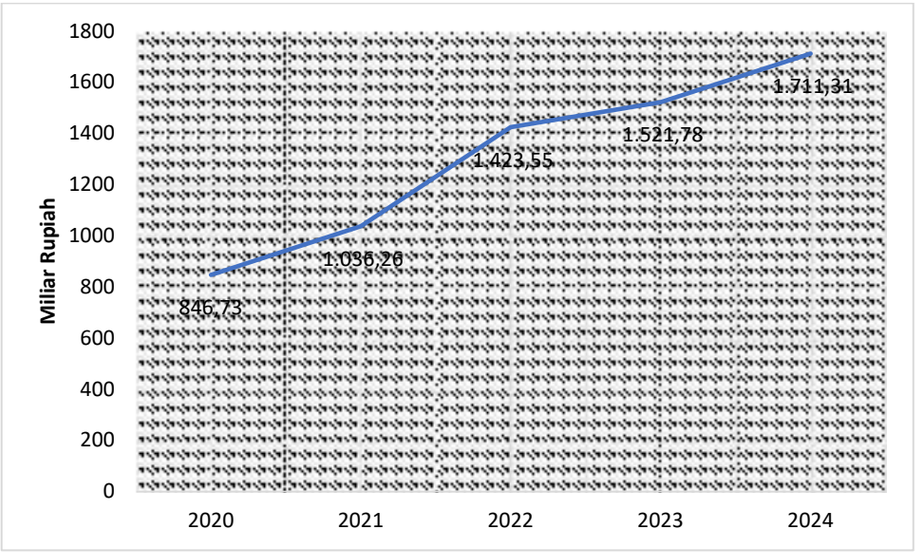

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Integrasi ekonomi domestik di Majene bertujuan menghubungkan pasar lokal, seperti hasil perikanan dan pertanian, dengan pasar regional dan nasional melalui infrastruktur dan logistic yang efisien, sementara integrasi global mempromosikan produk unggulan ke pasar internasional. Saat ini, produk seperti ikan segar dan kopi Mandar memiliki potensi besar, tetapi akses ke Pelabuhan besar dan standar ekspor masih terbatas. Pemerintah daerah telah meluncurkan pelatihan pengolahan produk perikanan dan sertifikasi untuk UMKM, namun konektivitas transportasi dan promosi produk ke luar negeri perlu diperkuat.

Dalam RPJMD, Majene berfokus pada penguatan rantai pasok lokal dan peningkatan daya saing produk di pasar global. Program prioritas meliputi perbaikan jalan antar-desa, pengembangan pelabuhan kecil, dan promosi kopi Mandar serta produk kelautan di pameran internasional. Kerja sama dengan platform e-commerce global juga akan didorong untuk memperluas akses pasar UMKM. Dengan langkah ini, Majene diharapkan menjadi pusat perdagangan regional yang mampu berkontribusi pada perekonomian nasional dan global, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa terdiri dari transaksi barang dan jasa (penjualan, barter, dan hadiah) dari penduduk ke non-penduduk . Ekspor barang terjadi ketika kepemilikan ekonomi atas barang berubah antara penduduk dan non-penduduk. Berdasarkan laporan PDRB Kabupaten Majene, "Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Majene" pada periode 2020-2024 selalu bertanda negatif. Ini menunjukkan bahwa Majene lebih banyak melakukan impor dari pada ekspor dalam memenuhi kebutuhan di wilayahnya. Artinya, nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor.

Sedangkan pada Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2020 angka ekspor barang dan jasa mencapai US$ 420,45 juta dan mengalami peningkatan total nilai ekspor selama tahun 2021 yang mencapai US$ 647,23 juta (tertinggi dalam rentang 2020-2024). Tahun 2022 kembali mengalami penurunan total nilai ekspor yang berada di angka US$ 475,95 dan Kembali menguat di tahun 2023 mencapai US$ 546,47. Untuk tahun 2024 total nilai ekspor barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat

menunjukkan angka fluktuasi, dimana pada bulan April mencapai US$ 35,77 juta, Mei US$ 31,58 juta, Proyeksi Oktober US$ 39,48 juta, November US$ 49,95 juta, dan Bulan Desember mencapai US$ 28,67 juta. Perlu diperhatikan bahwa data tahun 2024 masih bersifat parsial dan mungkin ada pembaruan data dari sumber yang mengeluarkan data yaitu BPS Provinsi Sulawesi Barat seiring berjalannya waktu terhadap nilai ekspor barang dan jasa.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan perkotaan di Majene, seperti Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, berperan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan administrasi, sementara wilayah perdesaan menggerakkan ekonomi melalui pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis budaya. Saat ini, perkotaan Majene berkembang dengan pasar tradisional dan usaha kecil, tetapi perdesaan masih tertinggal akibat minimnya infrastruktur dan akses pasar, mendorong urbanisasi yang tidak seimbang. Pemerintah daerah telah memulai pembangunan pasar desa dan pelatihan agribisnis, namun tantangan seperti rendahnya produktivitas pertanian masih perlu diatasi.

RPJMD Majene menargetkan sinergi antara perkotaan dan perdesaan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Program strategis meliputi pengembangan sentra kuliner di Banggae, promosi desa wisata berbasis budaya Mandar, dan investasi dalam irigasi serta teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil panen. Pembangunan transportasi umum di perkotaan juga akan mengurangi kemacetan, sementara akses kredit untuk petani diharapkan mendorong produktivitas desa. Dengan pendekatan ini, Majene berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat peran kedua wilayah sebagai penggerak pembangunan.

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau *City Development Index* (CDI), yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menjadi komponen Indeks Infrastruktur meliputi akses air bersih, sanitasi, listrik, dan telepon. Semakin tinggi nilai Indeks Infrastruktur, semakin baik tingkat pembangunan di suatu kota.

Tahun 2024 Kabupaten Majene memiliki akses terhadap air bersih layak sebesar 71,72%, akses sanitasi layak sebesar 71,40%, akses masyarakat terhadap Listrik PLN sebesar 99,17%, kondisi jalan mantap sebesar 42,20% dan akses internet/telepon dirumah sendiri sebesar 85,34%. Berdasatkan data komposit pembentuk Indeks Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Majene, maka didapat nilai indeks tahun 2024 sebesar 58,32 %. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.56.
Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah/Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

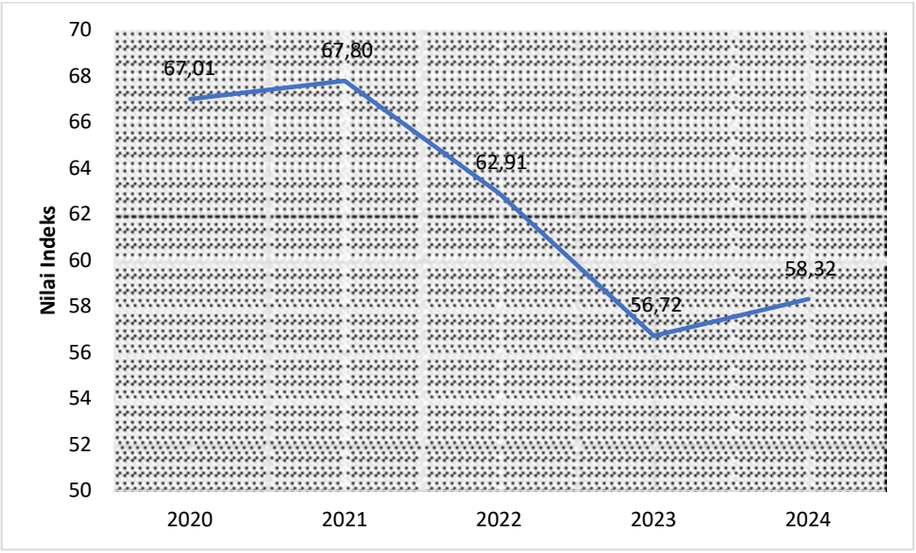

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kab. Majene Tahun 2025.

B. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak

Permukiman yang layak huni merupakan kondisi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Selain itu, pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Oleh karena itu, analisis persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene, bahwa capaian akses terhadap rumah tangga dengan hunian layak dari tahun 2020-2024

menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan Tingkat akses tetapi ditahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2020 capaian akses hunian layak sebesar 77,80% dan menurun di tahun 2021 dengan capaian 62,14%. Tahun 2022 capaian dengan akses hunian layak Kembali meningkat diangka 63,01% dan Kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing capaian rumah tangga dengan hunian layak sebesar 70,35% dan 74,59%. Untuk lebih jelasnya akses rumah tangga dengan hunian layak dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.57.
Capaian Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

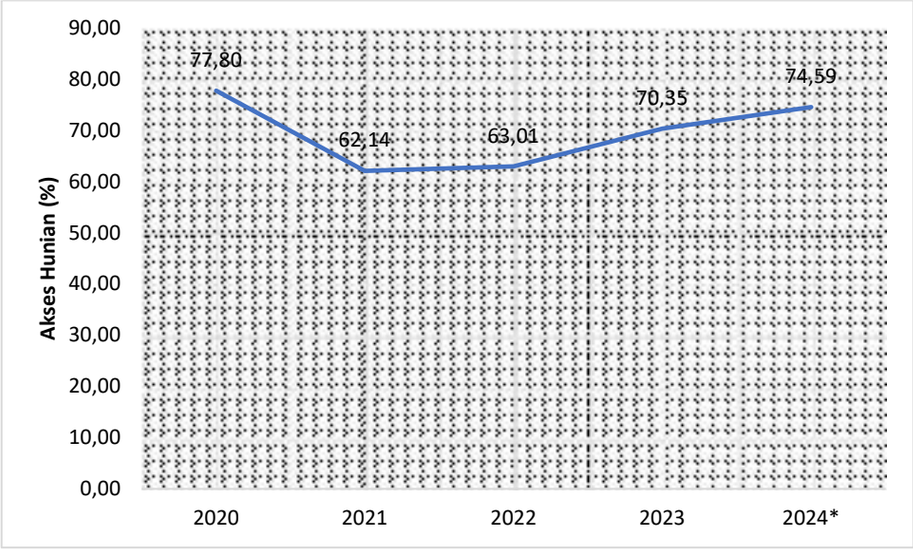

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kab. Majene Tahun 2025.
*Keterangan : * Data masih bersifat sementara per Juni 2024*

C. Persentase Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 poin.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) hingga tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT), bahwa Kabupaten Majene yang terdiri 62 desa dari 8 kecamatan hingga tahun 2024 belum

terdapat desa yang masuk dalam kategori Desa Mandiri, capaian tertinggi yaitu kategori Desa Maju sebanyak 11 desa, kategori Desa Berkembang sebanyak 37 desa, kategori Desa Tertinggal sebanyak 10 desa dan kategori sangat tertinggal sebanyak 4 desa. Menjadi desa yang mandiri akan semakin penting mengingat perubahan iklim dan ketergantungan pada sumber daya luar yang semakin tinggi sehingga kedepan Kabupaten Majene dalam dokumen RPJMD mengarahkan agar memanfaatkan potensi alam desa setempat secara optimal, mengembangkan industry kecil dan menengah yang berbasis pada potensi alam setempat, memanfaatkan teknologi yang dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi desa untuk mengembangkan diri menjadi desa yang mandiri, mengembangkan potensi pariwisata, baik potensi wisata alam, budaya dan Sejarah sebagai sumber pendapatan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro di Majene mencakup pengendalian rasio pajak daerah terhadap PDRB dan Inflasi, serta dukungan penciptaan lapangan kerja, dan pengelolaan anggaran daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Saat ini, ekonomi Majene bergantung pada perikanan dan pertanian, tetapi fluktuasi harga komoditas sering memengaruhi pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah telah meluncurkan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan subsidi harga ikan untuk menjaga daya beli, meskipun pendapatan asli daerah (PAD) masih rendah, membatasi investasi infrastruktur.

RPJMD menargetkan ekonomi Majene yang tangguh dengan diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan fiskal yang prudent. Program prioritas meliputi pengembangan pariwisata dan industry pengolahan ikan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal, serta peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah yang transparan. Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda dan perluasan lapangan kerja di sektor kreatif juga menjadi fokus. Dengan koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat dan provinsi, Majene berupaya menciptakan stabilitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

A. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai sumber pajak, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah yang dibangun (BPHTB).

Di Kabupaten Majene, Rasio Pajak Daerah tetap menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektifitas kebijakan fiskal dan kemandirian daerah. Pada Tahun 2024, Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB mengalami peningkatan berada pada angka sebesar 55,8 % dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 55,5 %. Pada tahun 2021 dan 2022 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB mengalami staknan dengan angka sebesar 58,5 %. Untuk Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB tahun 2020 memiliki angka paling tertinggi sebesar 60,7 %. Sehingga jika dilihat persentase Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Majene dari tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,3 % di tahun 2024. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Majene dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.58.
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

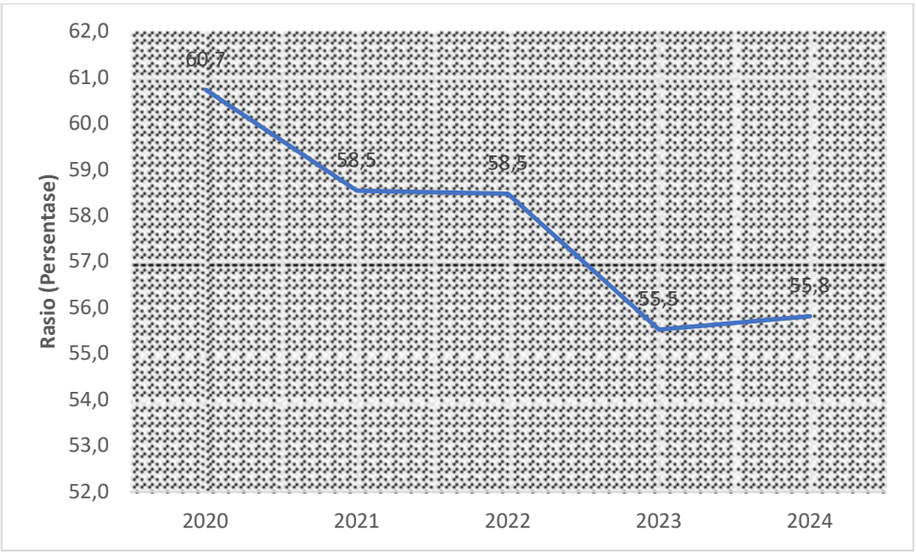

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

B. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Inflasi dihitung pada 98 kota pada 38 Provinsi se-Indonesia.

Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan Nilai Inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasioleh BPS yaitu Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu kewaktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

1. Perkembangan Inflasi Bulanan (Month on Month)

Inflasi bulanan adalah perbandingan IHK bulanan disbanding bulan n-1. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, inflasi Kabupaten Majene dipengaruhi oleh beberapa komoditas. Ikan segar dan hortikultura menjadi komoditas penyumbang utama inflasi Kabupaten Majene tahun 2024. Kondisi cuaca ekstrem dan momentum HBKN merupakan faktor utama yang mendorong inflasi komoditas tersebut.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tetap menjadi contributor andil terbesar dalam penyumbang inflasi, oleh Meningkatnya andil inflasi pada Kelompok Makanan. Kelompok makanan, minuman, kelompok pengeluaran Perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,49 persen. Sementara itu, laju inflasi pada Pakaian dan Alas kaki mencapai 0,77 persen. Untuk lebih jelasnya Tingkat Inflasi Regional Kabupaten Majene pada bulan Januari s/d Desember tahun 2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.59.
Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2024

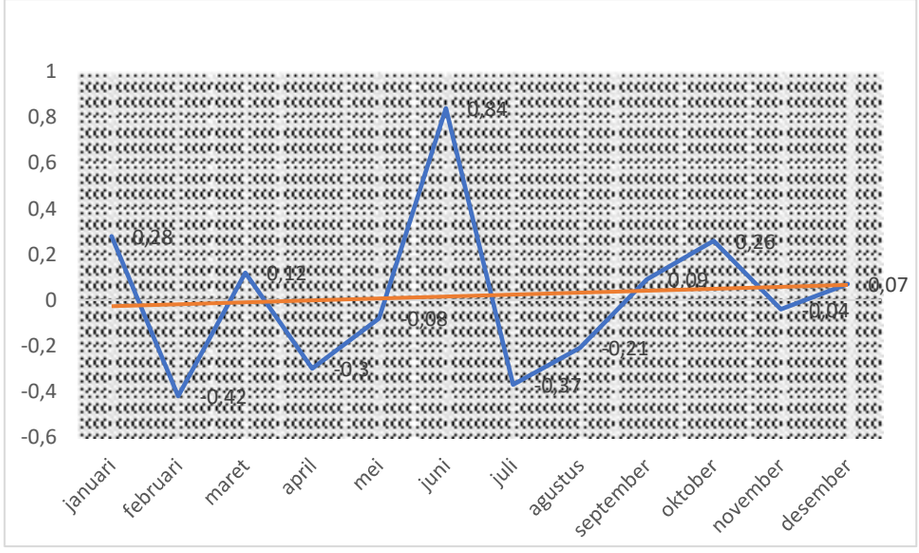

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

2. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender

Inflasi tahun kalender adalah perbandingan IHK bulan n tahun y disbanding bulan Desember tahuny-1. Laju inflasi secara umum pada tahun 2024 adalah 0,87 persen. Apabila ditinjau dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,78 persen. Sementara itu, laju inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki mencapai 0,77 persen. Pada kelompok Penyediaan makanan dan minuman/restoran pada tahun 2024 mencapai 0,03 persen dan menjadi laju inflasi paling terendah dibandingkan dengan laju inflasi kelompok pengeluaran yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kabupaten Majene Tahun 2024

No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2024
Inflasi Umum		**0,87**
Menurut Kelompok Pengeluaran		
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,47
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,77
3	Perumahan, Air,Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,57
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,64
5	Kesehatan	0,64
6	Transportasi	0,51
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,57
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,39
9	Pendidikan	0,71
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,03
11	Perawatan Pribadidan Jasa Lainnya	1,78

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

3. Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year)

Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan n tahun y-1. Selama kurun waktu tahun 2015-2024 inflasi tertinggi tercatat di Tahun 2022 yakni sebesar 4,85 persen, tercatat pada tahun 2019 laju inflasi sebesar 1,43 meningkat di tahun 2020 sebesar 1,78 namun kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 4,39 kembali naik di tahun 2022, kemudian menurun di tahun 2023 dan 2024 sebesar 1,82 dan 0,87. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari 10 tahun terakhir (2015-2024) dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.60.
Tingkat Inflasi Regional Kabupaten Majene Tahun 2015–2024

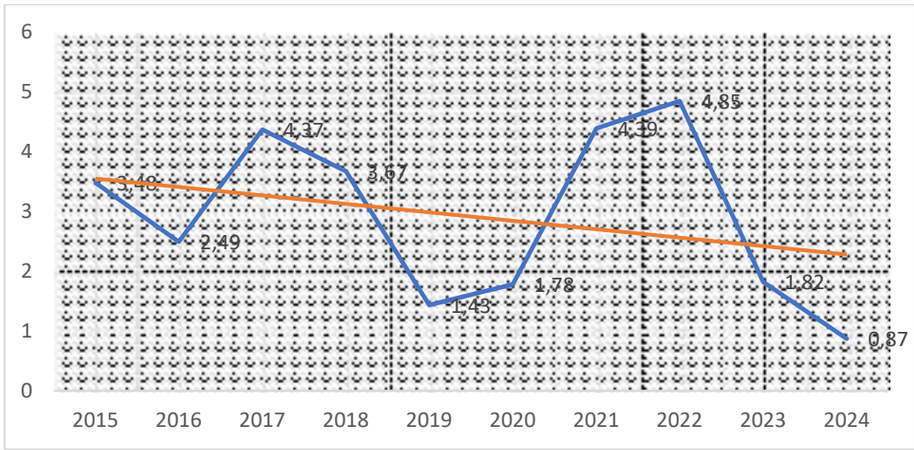

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola di Majene menekankan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan, seperti perkembangan teknologi atau tantangan lingkungan, untuk mendukung investasi dan pembangunan. Saat ini, birokrasi masih menghadapi kendala seperti proses perizinan yang lambat dan risiko praktik tidak berintegritas. Pemerintah daerah telah memperkenalkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pelaporan keuangan digital, namun kapasitas aparatur dan sosialisasi ke masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Melalui RPJMD, Majene menargetkan tata kelola yang efisien dan bebas korupsi, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Program strategis mencakup pelatihan integritas bagi aparatur sipil negara, perluasan digitalisasi perizinan, dan penyederhanaan regulasi untuk UMKM, seperti izin usaha mikro. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan juga akan ditingkatkan melalui forum konsultasi publik. Dengan pendekatan ini, Majene berupaya menjadi daerah dengan tata kelola yang adaptif, mendukung Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pembangunan nasional maupun daerah. Untuk mengukur kemajuan reformasi di bidang hukum, diperlukan suatu instrumen yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum di suatu negara atau daerah. Salah satu instrumen tersebut adalah Indeks Reformasi Hukum. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Indeks Reformasi Hukum di Pemerintahan Kabupaten Majene merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan reformasi di bidang hukum, termasuk perbaikan regulasi,

penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan transparansi dalam proses hukum. Indeks ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data dari Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Majene yang berdasarkan hasil penilaian Kementerian Hukum RI, bahwa pada tahun 2023, Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Majene mendapatkan nilai 55,82 masuk dalam kategori "CC" dengan predikat "CUKUP". Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian nilai sebesar 88,00 yang masuk dalam kategori "A" dengan predikat "SANGAT BAIK". Kemudian Pemerintah Kabupaten Majene akan menetapkan target jangka menengah untuk meningkatkan Indeks Reformasi Hukum hingga tahun 2030. Penentuan target tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Majene dalam memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di daerah.

Sementara pada Tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang juga berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Hukum RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan dengan nilai 97,04 masuk kategori "AA" dengan Predikat "ISTIMEWA" pada penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, penilaian IRH tahun ini merupakan capaian yang sangat baik, karena terjadi meningkat dari penilaian Tahun 2023 dengan nilai 77,03 pada kategori "BB" dengan predikat "BAIK".

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu pendekatan atau konsep di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. SPBE bertujuan untuk memanfaatkan teknologi elektronik, seperti komputer, internet, dan aplikasi perangkat lunak, untuk memodernisasi operasi pemerintah dan memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan

aparatur negara melalui penerapan SPBE atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, capaian Kabupaten Majene pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai masing-masing Indeks SPBE adalah 1,00 dan 1,52 dan masuk dengan predikat kurang. Tahun 2022 dan 2023 meningkat menjadi 2,58 dan 2.56 dengan kategori cukup. Hingga Tahun 2024 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,48 atau sebesar 3.04 dengan predikat baik. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik perkembangan berikut.

Gambar 2.61.
Perkembangan Nilai Indeks SPBE Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

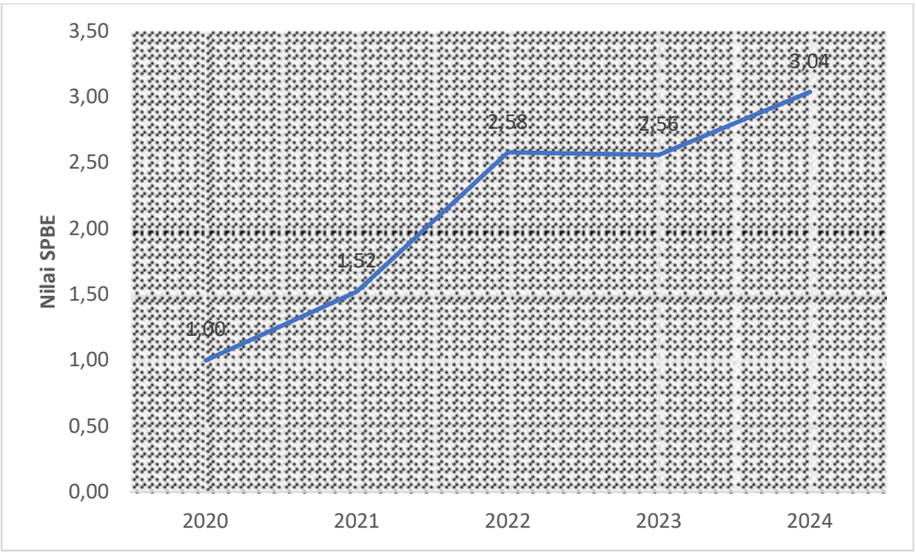

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Majene Tahun 2025".

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene untuk meningkatkan nilai SPBE adalah dengan meluncurkan Portal Satu Data Indonesia (SDI) yang menjadi upaya untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan akurat. SDI sebagai muara data dari instansi pemerintah juga sejalan dengan pencanangan empat fokus reformasi birokrasi tematik, salah satunya adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. SDI juga merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat serta daerah.

C. Indeks Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan. Standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolak ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Di sana hendak diuji keterpenuhan pelaksanaan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Berdasarkan PermenPAN RB No. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Penyusunan indikator IPP dilakukan dengan mengaitkan enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan enam aspek penilaian kinerja instansi dalam pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Kabupaten Majene memiliki dua indeks pelayanan publik, yaitu IPP yang dievaluasi oleh Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Tapi dalam hal ini yang ditampilkan adalah penilaian dari Ombudsman karena hasil

penilaian sudah ada hingga tahun 2024, akan tetapi hasil penilaian tahun 2020 diganti dengan hasil penilaian tahun 2019 karena pada saat itu Ombudsman tidak melakukan penilaian akibat wabah penyakit Covid-19. Pada tahun 2019, IPP Kabupaten Majene mencapai nilai 75,66, yang termasuk dalam Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Kategori C. Meningkat secara signifikan pada tahun 2024 yang masuk dalam Zona Hijau, dengan Predikat Kepatuhan Tinggi dan masuk dalam Kategori B. Selengkapnya penilaian Pemerintah Kabupaten Majene disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Perkembangan Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Nilai	Kategori	Opini	Zonasi
1	2020	75,66	C	Kualitas Sedang	Kuning
2	2021	85,95	B	Kualitas Tinggi	Hijau
3	2022	83,90	B	Kualitas Tinggi	Hijau
4	2023	83,76	B	Kualitas Tinggi	Hijau
5	2024	86,96	B	Kualitas Tinggi	Hijau

Sumber : Ombudsman RI, Tahun 2025.

D. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan indikator penting untuk menilai tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Indeks ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki praktik antikorupsi, serta mendorong terciptanya budaya integritas di sektor publik. Dengan adanya indeks ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, jujur, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. KPK memberikan label hijau untuk pemerintah daerah yang mendapat rentang penilaian di atas 77,5 poin dalam skala 100. Adapun rentang 73,7-77,4 poin mendapat label waspada, 68-73,6 poin sebagai rentan, dan 0-67,9 poin sangat rentan.

Pada tahun 2020-2024, Indeks Integritas Nasional Kabupaten Majene berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan capaian sebesar 77,71 poin pada tahun 2020 dengan kategori “HIJAU”. Kemudian tahun 2021 nilai SPI Kabupaten Majene mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,64 poin atau berada di skor 74,07

dengan kategori “RENTANG”. Tahun 2022, Kembali mengalami penurunan nilai SPI sebesar 5,77 poin atau dengan capaian sebesar 68,30 poin yang masuk dalam kategori “WASPADA” dan kemudian Kembali turun pada tahun 2024 sebesar 7,63 poin atau dengan capaian sebesar 60,67 poin yang masuk dalam kategori “SANGAT RENTAN”. Melihat data tersebut bahwa dari tahun 2020-2024 kondisi integritas Kabupaten Majene mengalami penurunan poin sebesar 17,04 poin. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 2.47.
Indikator Indeks Penilaian Indeks Integritas Nasional
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No.	SPI	2021	2022	2023	2024
1	Komponen Internal	78,72	78,51	78.82	74,68
2	Komponen Eksternal	80,41	80,95	92,65	87,19
3	Komponen Eksper	78,41	92,65	57,22	48,88
4	**Skor SPI**	**77,71**	**87,19**	**68,30**	**60,67**

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Tahun 2025.

Gambar 2.62.
Perkembangan Indeks Integritas Nasional Kabupaten Majene
Tahun 2021–2024

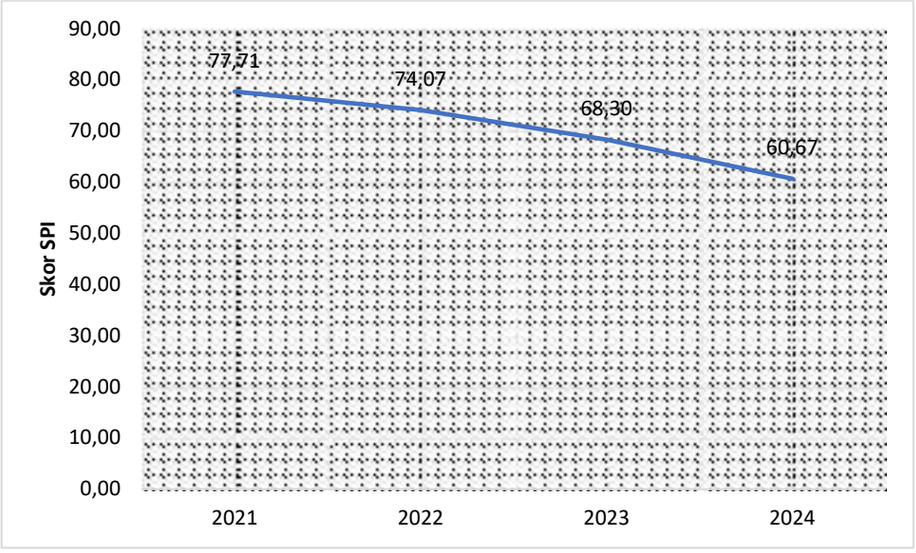

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Tahun 2025.

Melihat kondisi hasil SPI tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Majene masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi secepatnya, khususnya di level Pemerintah Daerah (Pemda), yang secara umum masih berwarna merah atau masuk di kategori Sangat Rentan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Majene menetapkan target jangka menengah untuk dicapai hingga tahun 2030. Target ini mencerminkan

komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan di Majene mencakup penegakan hukum yang adil dan merata, keamanan nasional menjamin perlindungan masyarakat dan wilayah, serta demokrasi substansial mendorong partisipasi publik dalam pemerintahan. Saat ini, akses ke layanan hukum di desa-desa terpencil masih terbatas, dan potensi konflik sosial, seperti sengketa lahan, tetap ada. Pemerintah daerah telah meningkatkan patroli keamanan bersama kepolisian dan mendukung musyawarah desa untuk memperkuat demokrasi lokal, meskipun sumber daya untuk mediasi hukum masih minim.

RPJMD menargetkan Majene sebagai daerah yang aman, adil, dan demokratis. Program prioritas meliputi perluasan bantuan hukum gratis, pelatihan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai, dan penguatan pos keamanan di wilayah rawan. Pelatihan kebencanaan untuk masyarakat juga akan ditingkatkan untuk mendukung ketahanan lokal. Untuk demokrasi, transparansi pemilu lokal dan forum diskusi publik akan diperkuat. Dengan langkah ini, Majene berupaya menciptakan harmoni sosial dan pemerintahan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

A. Persentase Penegakan Perda

Persentase Perda/Perkada yang Ditegakkan sesuai dengan standar. Persentase Penegakan Perda merupakan indikator yang mengukur tingkat penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, Persentase Perda/Perkada menghitung perbandingan antara Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dengan jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi juga Menghitung perbandingan antara jumlah gangguan yang ditangani dengan jumlah pengaduan yang masuk dan Menghitung perbandingan antara jumlah gangguan yang ditangani dengan jumlah pengaduan yang masuk selanjutnya Masyarakat yang menerima pelayanan sebagai akibat dari penerapan hukum Perda dan Perkada.

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Majene selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian 100% setiap tahunnya. Angka ini mencerminkan bahwa seluruh pelaksanaan dan penegakan Perda di Kabupaten Majene dilakukan secara optimal dan konsisten. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat". Selengkapnya Persentase Penegakan Perda Kabupaten Majene dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.63.
Perkembangan Persentase Penegakan Perda Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

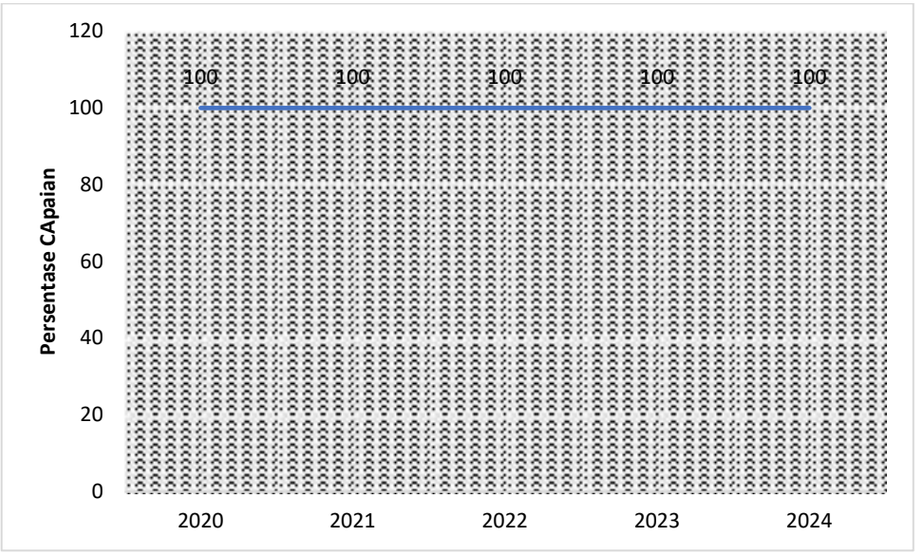

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene, Tahun 2025.

B. Persentase Capaian Aksi HAM

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah kebijakan strategis yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia. RANHAM bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara serta oleh masyarakat. Setiap daerah di Indonesia diharapkan untuk melaksanakan dan melaporkan kemajuan implementasi RANHAM sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat berhasil mencapai capaian yang menggembirakan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Kabupaten ini memperoleh nilai 92,50, yang mencerminkan komitmen dan upaya serius dalam meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat daerah. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat yang turut berperan dalam mewujudkan kebijakan dan program yang berfokus pada HAM sebagaimana tertuang dalam 6 aksi pelaporan HAM Kabupaten Majene.

Tabel 2.48.
Nilai Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten Se Sulawesi Barat Tahun 2024

NO	PEMERINTAH DAERAH	B.04	B.08	B.12	NILAI CAPAIAN
		(I)	(II)	(V)	$\frac{(I)+(II)+(V)}{3}$
1	Kab. Pasangkayu	71.67	97.5	90.83	86.7
2	Kab. Mamuju	68.33	100	100	89.3
3	Kab. Mamasa	9.17	40.83	9.17	19.7
4	Kab. Polewali Mandar	69.17	79.17	90.83	79.7
5	Kab. Majene	77.5	97.5	100	92.5
6	Kab. Mamuju Tengah	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene, Tahun 2025.

Pelaksanaan Aksi HAM di daerah, termasuk Kabupaten Majene, diawasi melalui berbagai indikator yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, serta kebebasan sipil dan politik. Pemerintah daerah diharapkan untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang ada. Kabupaten Majene berhasil memperoleh nilai 92,50 dalam pelaksanaan Aksi HAM 2024. Nilai ini diperoleh setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program-program yang mendukung pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Meski meraih capaian yang baik, Kabupaten Majene menyadari bahwa masih ada tantangan dalam implementasi Aksi HAM yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih adanya ketimpangan akses terhadap layanan publik di daerah terpencil, serta perlunya penguatan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan

yang terkait dengan HAM di tingkat lokal. Ke depan, Kabupaten Majene berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan Aksi HAM dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak lainnya. Dengan adanya evaluasi yang terus menerus dan pembaruan kebijakan yang berbasis pada hak asasi manusia, diharapkan Kabupaten Majene dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi dalam tahun-tahun mendatang utamanya dalam 5 tahun kedepan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.64.
Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten Se Sulawesi Barat Tahun 2024

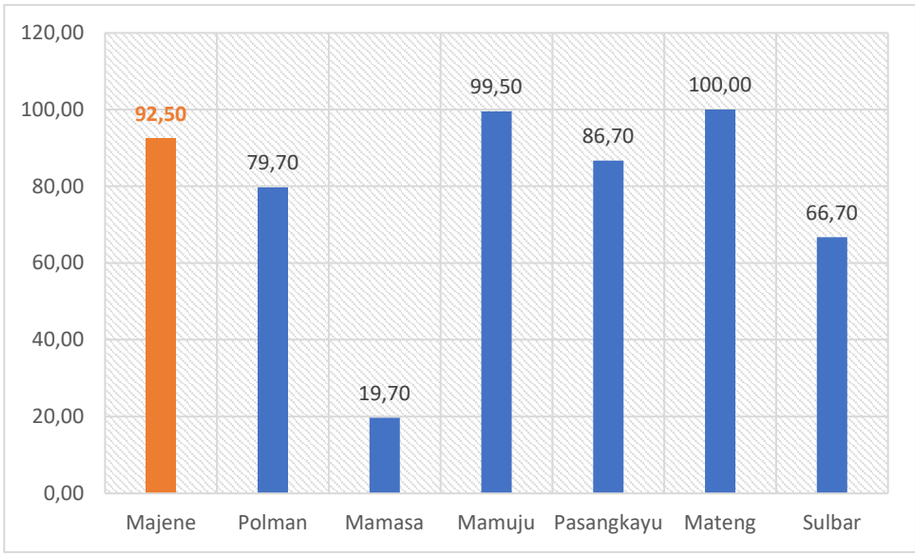

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene, Tahun 2025.

C. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Tingkat pencapaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Saat ini, pengukuran IDI hanya dilakukan pada tingkat Nasional dan Provinsi, sehingga data Indeks Demokrasi untuk Kabupaten Majene belum tersedia.

Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2020, IDI Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 73,09 sedangkan Nasional sebesar 73,66 poin, kemudian menurun sebesar 1,79 poin menjadi 71,30 pada tahun 2021

sedangkan nasional mengalami peningkatan diangka 78,12 poin. Tahun 2022 kembali meningkat secara signifikan sebesar 2,73 poin menjadi 74,03 poin dan nasional sebesar 80,41 poin. Tahun 2023-2024, angka IDI Sulawesi Barat kembali meningkat dengan capaian sebesar 74,55 poin tahun 2023 dan 75,05 poin tahun 2024, sedangkan di Tingkat nasional mengalami penurunan diangka 79,51 poin tahun 2023 dan 78,37 poin tahun 2024. Berdasarkan data tersebut di Sulawesi Barat menunjukkan realisasi kehidupan masyarakat menuju bebas, aman dan sejahtera dengan perkembangan dan penerapan demokrasi yang semakin membaik. Analisis yang dilakukan akan menggunakan data IDI Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2.65.
Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia
Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

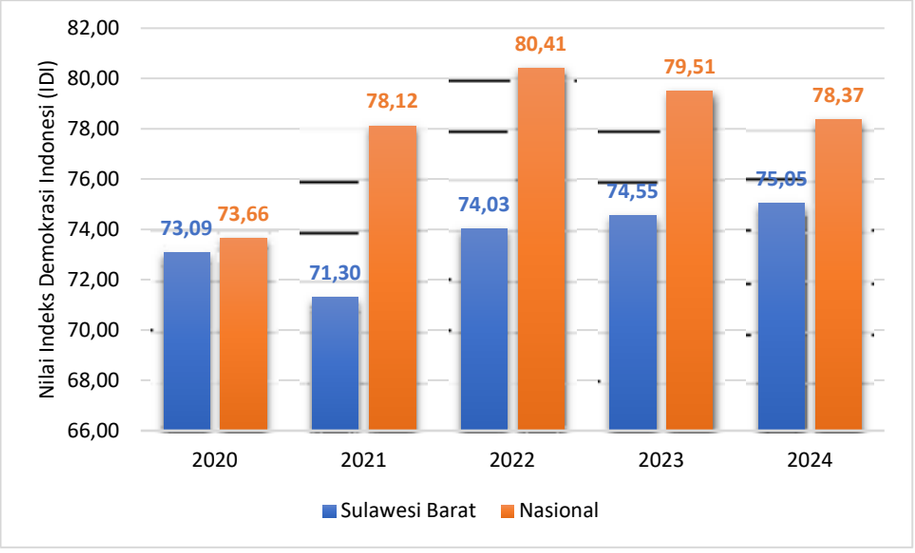

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025.

D. Indeks Rasa Aman

Rasa Aman menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Mengingat rasa aman merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, diperlukan alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah indeks yang berkaitan dengan keamanan manusia, yang dikenal sebagai Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks Rasa Aman dirancang untuk menggambarkan kondisi keamanan di masyarakat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran Indeks Rasa Aman merujuk pada empat dimensi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yaitu Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan, serta Keamanan dari Kekerasan. Namun, data lengkap mengenai Indeks Rasa Aman untuk Kabupaten Majene hingga saat ini belum tersedia sehingga data yang akan disajikan berupa data kriminalitas berupa jumlah tindak pidana di wilayah Kabupaten Majene tahun 2020-2024, sebagai berikut.

Tabel 2.49.
Angka Kriminalitas Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No.	Kepolisian Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Polsek Banggae	26	3	-	-	-
2.	Polsek Pamboang	12	6	-	2	-
3.	Polsek Sendana	24	5	5	13	1
4.	Polsek Malunda	5	4	16	24	25
5.	Polres Majene	190	169	168	163	138
Jumlah		**257**	**187**	**189**	**202**	**164**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Tahun 2025.

Tahun 2020, Total jumlah tindak pidana di Kabupaten Majene adalah 257 kasus, Polres Majene menyumbang angka tertinggi (190 kasus), diikuti oleh Polsek Banggae (26 kasus) dan Polsek Sendana (24 kasus). Polsek Pamboang (12 kasus) dan Polsek Malunda (5 kasus) memiliki jumlah yang lebih rendah. Tahun 2021 Total kriminalitas menurun signifikan menjadi 187 kasus dari 257 kasus di tahun sebelumnya. Penurunan paling besar terlihat di Polres Majene (dari 190 menjadi 169 kasus) dan Polsek Banggae (dari 26 menjadi 3 kasus). Polsek Pamboang juga menurun (dari 12 menjadi 6 kasus), sementara Polsek Sendana dan Malunda menunjukkan sedikit perubahan atau peningkatan kecil. Tahun 2022, Total kriminalitas sedikit meningkat dari 187 menjadi 189 kasus. Polsek Malunda menunjukkan peningkatan signifikan (dari 4 menjadi 16 kasus) sedangkan Polres Majene mengalami sedikit penurunan (dari 169 menjadi 168 kasus).

Tahun 2023, Total kriminalitas kembali meningkat menjadi 202 kasus. Polsek Sendana menunjukkan peningkatan signifikan (dari 5 menjadi 13 kasus). Polsek Malunda juga meningkat drastis (dari 16 menjadi 24 kasus) sedangkan Polres Majene kembali mengalami penurunan dari 168 menjadi 163 kasus. Tahun 2024, Total kriminalitas menunjukkan penurunan yang cukup besar, menjadi 164 kasus.

Polsek Sendana dan Malunda menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 (dari 13 menjadi 1 kasus di Sendana, dan dari 24 menjadi 25 kasus di Malunda. Sedangkan Polres Majene menunjukkan penurunan yang cukup besar (dari 163 menjadi 138 kasus).

Sepanjang periode, Polres Majene secara konsisten mencatat jumlah tindak pidana terbanyak dibandingkan Polsek-Polsek lainnya. Hal ini wajar karena Polres menangani kasus-kasus yang lebih besar atau kasus yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Polsek. Angka kriminalitas total di Kabupaten Majene menunjukkan fluktuasi, menurun pada 2021, sedikit naik pada 2022 dan 2023, kemudian menurun lagi pada 2024. Tanpa data lengkap dari semua Polsek untuk setiap tahun, sulit untuk menarik kesimpulan yang kuat mengenai tren keseluruhan atau efektivitas upaya pencegahan kejahatan.

E. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan instrumen yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan di suatu daerah. Stabilitas keamanan ini berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban, seperti demonstrasi, yang dapat berdampak pada ketentraman masyarakat. Indeks ini berfungsi sebagai salah satu parameter yang dipertimbangkan oleh investor saat akan melakukan penanaman modal di suatu daerah. Namun, data lengkap mengenai Indeks Ketentraman dan Ketertiban untuk Kabupaten Majene saat ini belum tersedia. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Majene perlu melakukan perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban didalam dokumen RPJMD hingga tahun 2030 mengingat wilayah Kabupaten Majene merupakan Pusat Pendidikan di Sulawesi Barat.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Dalam konteks Majene, diplomasi berfokus pada promosi potensi lokal, seperti budaya Mandar, pariwisata, dan produk kelautan, ke tingkat regional dan internasional, sementara pertahanan menjaga keamanan pesisir dari ancaman seperti illegal fishing. Saat ini, Majene mulai mempromosikan Pantai Dato dan produk lokal di pameran regional, tetapi keterlibatan dalam pasar internasional masih terbatas. Patroli laut oleh polisi air berjalan, namun fasilitas pertahanan pesisir perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah telah memulai kerja sama dengan komunitas nelayan untuk pengawasan wilayah pesisir dan laut.

RPJMD menargetkan Majene sebagai pusat diplomasi budaya dan ekonomi di Sulawesi Barat dengan pertahanan pesisir yang kuat. Program strategis mencakup promosi produk lokal melalui pameran internasional dan kerja sama dengan kedutaan, serta pengembangan desa wisata berbasis budaya Mandar. Untuk pertahanan, penguatan pos polisi air dan pelatihan nelayan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan akan diprioritaskan. Dengan memanfaatkan posisi strategis di pesisir, Majene berupaya memperkuat kontribusi pada keamanan maritim nasional dan hubungan regional melalui diplomasi budaya dan perdagangan.

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai daya saing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari tahun 2023-2024. Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk mendapatkan ukuran daya saing daerah yang komprehensif, yang dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang membentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen ini didukung oleh 12 pilar daya saing. Komponen lingkungan pendukung terdiri dari pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia didukung oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar terdiri dari pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Sementara itu, komponen ekosistem inovasi didukung oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Majene tahun 2023 tercatat sebesar 3,15 poin dan meningkat sebesar 0,57 poin atau berada diangka 3.72 poin di tahun 2024 dan lebih tinggi dari capaian IDSD Provinsi Sulawesi Barat yang tercatat sebesar 3,24 poin. Rincian nilai pilar pada komponen lingkungan pendukung adalah 0 untuk pilar 1, 2,89 untuk pilar 2, 3,92 untuk pilar 3, dan 3,55 untuk pilar 4. Nilai pada komponen sumber daya manusia adalah 3,13 untuk pilar 5 dan 4,24 untuk pilar 6. Pada komponen pasar, nilai pilar adalah 4,72 untuk pilar 7, 4,02 untuk pilar 8, 2,22 untuk pilar 9, dan 3,68 untuk pilar 10. Terakhir, nilai pada komponen ekosistem inovasi adalah 4,43 untuk pilar 11 dan 3,17 untuk pilar 12. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.66.
Perbandingan Nilai Capaian Tiap Pilar Dalam IDSD
Kabupaten Majene Tahun 2023-2024

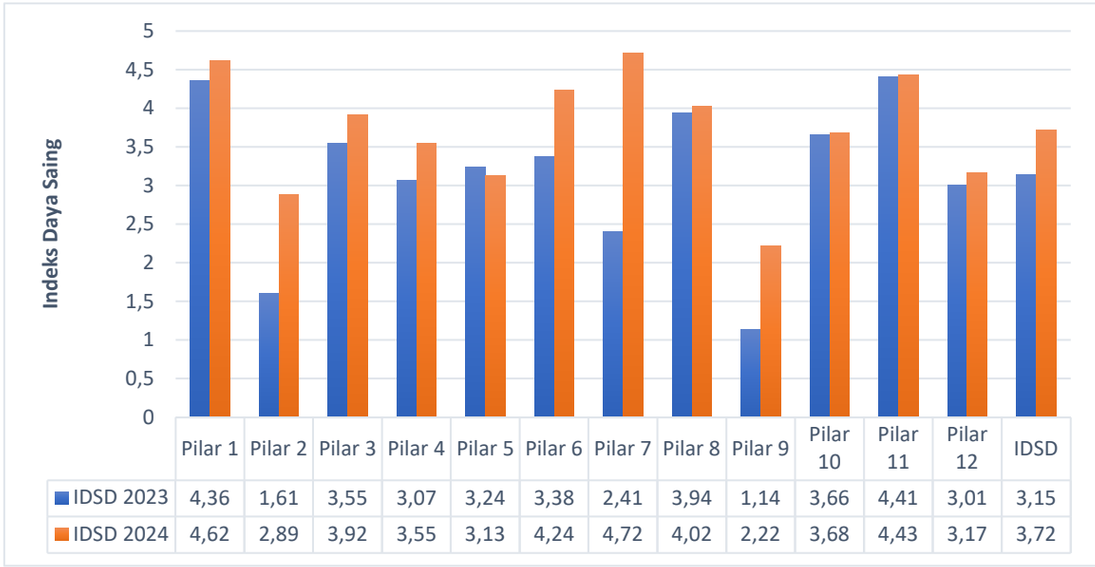

	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	IDSD
IDSD 2023	4,36	1,61	3,55	3,07	3,24	3,38	2,41	3,94	1,14	3,66	4,41	3,01	3,15
IDSD 2024	4,62	2,89	3,92	3,55	3,13	4,24	4,72	4,02	2,22	3,68	4,43	3,17	3,72

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2025.

Keterangan :
Pilar 1 : Instansi
Pilar 2 : Infrastruktur
Pilar 3 : Adopsi TIK
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
Pilar 5 : Kesehatan
Pilar 6 : Keterampilan
Pilar 7 : Pasar Produk
Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 10 : Ukuran Pasar
Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, nilai IDSD Kabupaten Majene tergolong baik. Pada tahun 2024, nilai IDSD Kabupaten Majene tercatat sebesar 3,72, menempatkannya di posisi empat diatas Kabupaten Mamuju (3,60) urutan pertama, Kabupaten Polewali Mandar (3,53) urutan kedua dan Kabupaten Mamasa (3,34) urutan ketiga. Untuk nilai IDSD di bawah Kabupaten Majene adalah Kabupaten Mamuju Tengah (3,18) dan Kabupaten Pasangkayu (3,10). Sementara itu, Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai IDSD sebesar 3,24, sehingga hanya empat kabupaten yang memiliki nilai IDSD lebih tinggi dibandingkan provinsi (Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa dan Majene).

Gambar 2.67.
Perbandingan Nilai Capaian IDSD Se Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

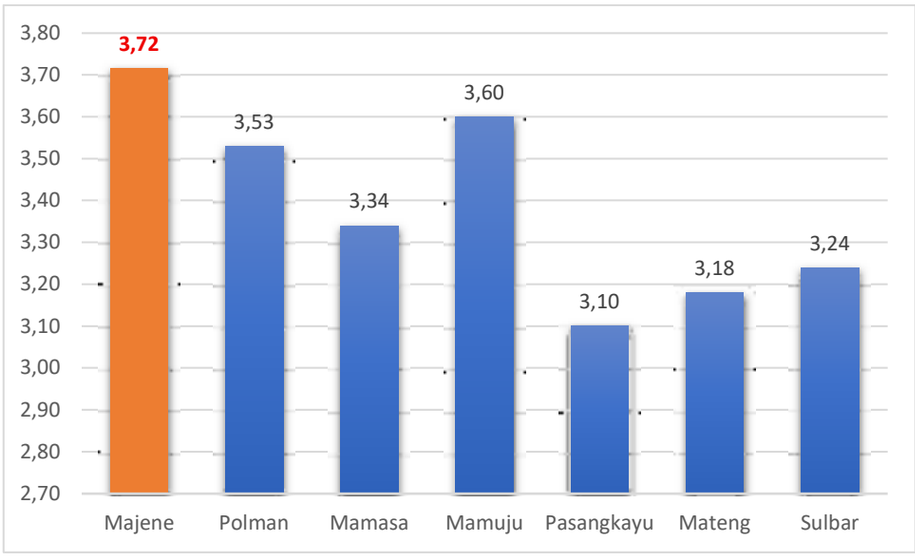

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2025.

B. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kontribusi sektor ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Pada tahun 2024, sektor ini menyumbang 504,9 miliar rupiah atau setara dengan 7,77 persen terhadap total PDRB Majene. Jumlah ini naik sebanyak 6,41 miliar rupiah dari tahun 2023. Adapun nilai kontribusi tersebut masih menjadikan sektor ini sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian Majene.

Gambar 2.68.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kab. Majene Tahun 2020-2024

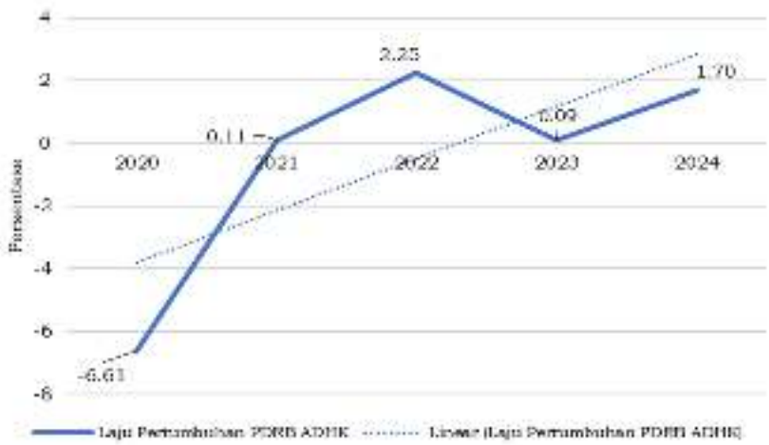

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

Sementara itu, laju pertumbuhan sektor ini mengalami percepatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Percepatan pertumbuhan ini terjadi dari posisi 0.09 persen menjadi 1,70 persen pada tahun 2024. Percepatan pertumbuhan sektor ini dipengaruhi oleh kenaikan pagu anggaran pemerintah daerah dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain itu, juga terdapat penambahan jumlah pegawai PPPK yang cukup banyak di Kabupaten Majene serta kenaikan gaji pokok pegawai di awal tahun 2024, menyebabkan kenaikan laju pertumbuhan pada sektor ini.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap Urusan Pemerintah Daerah, terkait penjelasan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

1. Urusan Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintahan Kabupaten Majene selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut;

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Secara umum, dari jenjang PAUD sampai SMA sederajat (Kemendikbud dan Kemenag) Angka Partisipasi Kasar di Kab. Majene mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024 walaupun tidak mengalami pergeseran angka yang cukup besar. Untuk PAUD dari angka 58,61 di tahun 2020 menjadi 59,12 di tahun 2021 (Angka untuk tahun 2022-2024 (tidak tersedia). Jenjang SD/MI dari 103,91 di tahun 2020 menjadi 100,86 di tahun 2024. Pada jenjang SMP/MTS dari 84,25 di tahun 2020 menjadi 86,87 di tahun 2024 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA dari 82,70 di tahun 2020 menjadi 83,76 di tahun 2024. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Angka Partisipasi Kasar SD – SMA Sederajat
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	58,61	59,12	*	*	*
2	SD/MI	103,91	102,75	104,42	103,68	100,86
3	SMP/MTs	84,25	86,21	84,57	87,15	86,87
4	SMA/SMK/MA	82,70	83,64	83,54	87,33	83,76

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".
*Keterangan = * Data Belum Tersedia*

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Secara umum, dari jenjang SD sampai SMA Angka Partisipasi Murni di Kab. Majene mengalami fluktuasi. Untuk jenjang SD dari 96,86 di tahun 2020 terus menurun menjadi 96,28 di tahun 2024. Pada jenjang SMP trendnya meningkat walaupun sedikit dari 71,81 di tahun 2020 terus meningkat di angka 72,19 di tahun 2021 lalu kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 73,64. Pada tahun 2023 kembali meningkat di angka 76,94 dan mengalami penurunan di tahun 2024 dengan angka 74,29. Untuk jenjang SMA dari 71,36 di tahun 2020 menurun menjadi 56,74 di tahun 2021. Pada tahun 2022-2023 kembali meningkat menjadi 60,07 dan 69,52, kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 63,50. Untuk lebih jelasnya Angka Partisipasi Murni SD s/d SMA di Kab. Majene tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.51.
Angka Partisipasi Murni SD – SMA Sederajat
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	96,86	96,71	94,81	94,92	96,28
2	SMP/MTs	71,81	72,19	73,64	76,94	74,29
3	SMA/SMK/MA	71,36	56,74	60,07	69,52	63,50

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

c. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar s/d Menengah

Secara umum, dari jenjang SD sampai SMA sederajat, Angka Partisipasi Sekolah di Kab. Majene juga masih menunjukkan angka fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk jenjang SD dari 96,86 di tahun 2020 meningkat menjadi 99,14 di tahun 2024. Pada jenjang SMP dari

92,72 ditahun 2020 menurun menjadi 92,56 pada tahun 2024. Untuk jenjang SMA sederajat dari 75,67 pada tahun 2020 meningkat menjadi 76,22 tahun 2021 dan Kembali turun menjadi 75,77. Tahun 2022 dan 2023 kembali turun diangka 75,77 dan 76,03. Hingga tahun 2024 APS SMA hanya mencapai diangka 72,12. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.52.
Angka Partisipasi Sekolah SD – SMA Sederajat
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	96,86	96,71	97,16	97,27	99,14
2	SMP/MTs	92,72	93,14	92,73	93,06	92,56
3	SMA/SMK/MA	75,67	76,22	75,77	76,03	72,12

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

d. Fasilitas Pendidikan PAUD-PT

Secara umum, Fasilitas Pendidikan di Kab. Majene tidak mengalami peningkatan di beberapa jenis fasilitas pendidikan. Jenjang PAUD pada tahun 2020-2024 jumlahnya tetap sebanyak 187 unit. Jenjang TK/RA pada tahun 2020-2023 terdapat 151 unit, dan berkurang 1 unit menjadi 150 unit pada tahun 2024. Untuk jenjang SD Sederajat pada tahun 2020–2023 sebanyak 191 unit dan mengalami penambahan 1 unit pada tahun 2024. Jenis fasilitas pendidikan berupa SMP Sederajat di tahun 2020 sebanyak 65 unit dan mengalami penambahan 1 unit hingga tahun 2024.

Jenjang SMA dari tahun 2020-2024 tidak mengalami penambahan atau sebanyak 7 unit, berbeda dengan SMK, tahun 2020 sebanyak 14 unit dan mengalami penambahan sebanyak 2 unit hingga tahun 2024. Sedangkan jenjang MA mengalami penambahan dari tahun 2020-2022 sebanyak 13 unit dan mengalami penambahan masing masing 1 unit di tahun 2023 dan 2024. Jenjang berikutnya adalah PTN-PTS, dimana dari tahun 2020 jumlah PT sebanyak 6 unit dan mengalami penambahan jumlah PT sebanyak 1 unit di tahun 2021 menjadi 7 unit PT dan hingga tahun 2024, PT kembali bertambah 1 unit menjadi 8 unit PT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.53.
Jumlah Fasilitas Pendidikan PAUD-PT Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PAUD	187	187	187	187	187
2	TK/RA	151	151	151	151	150
3	SD/MI	191	191	191	191	192
4	SMP/MTs	65	65	65	65	66
5	SMA/SMK/MA	7/14/13	7/16/13	7/16/13	7/16/9/14	7/16/15
6	PTN-PTS	6	7	8	8	8

Sumber : Badan Pusat Statistik "Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2025".

e. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Majene mengalami fluktuasi. Jenjang SD/MI tahun 2020 sebesar 0,15% dan megalami penigkatan di tahun 2021-2022 sebesar 0,33%, kemudian turun hingga tahun 2023 diangka 0,21% dan tahun 2024 sebesar 0,14%. Untuk jenjang SMP/MTs di tahun 2020 sebesar 0,66% dan mengalami penurunan angka putus sekolah hinga tahun 2022 dengan capaian 0,22% tahun 2021 dan 0,15 tahun 2022. Kembali bertambah 0,01% atau berada diangka 0,16% tahun 2023. Pada tahun 2024 Angka Putus Sekolah Kabupaten Majene mencapai 0,28%. Jenjang SMA sederajat angka putus sekolah hanya sampai tahun 2022, dimana tahun 2020 mencapai 0,41% dan meningkat ditahun 2021 sebesar 0,70% serta pada tahun 2022 jumlah APS mencapai 7,85%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Angka Putus Sekolah Jenjang SD-SMA Sederajat
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	APS SD Sederajat	0,15	0,33	0,33	0,21	0,14
2	APS SMP Sederajat	0,66	0,22	0,15	0,16	0,28
3	APS SMA Sederajat	0,41	0,70	7,85	*	*

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Majene, Tahun 2025.
*Keterangan = * Data Belum Tersedia*

f. Angka Kelulusan Jenjang SD-SMA

Angka kelulusan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada tiap jenjang pendidikan pada tahun sebelumnya. Secara umum, Angka

kelulusan di Kabupaten Majene mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Terutama pada jenjang SMA sederajat. Jenjang SD dari tahun 2020 sampai 2024 berada di angka 100%. Untuk jenjang SMP dari 98,54% di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 98,80% tahun 2021 dan dari tahun 2022-2023 dengan tingkat kelulusan sempurna yaitu 100% serta pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 94,48%. Begitupun pada jenjang SMA sederajat tingkat kelulusan dari tahun ke tahun meningkat dimana di tahun 2020 sebesar 98,90% meningkat di tahun 2021 menjadi 99,27% dan kembali meningkat menjadi 100% hingga tahun 2024, ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyelesaikan pendidikan mereka dengan sukses. Untuk lebih jelasnya angka kelulusan pada jenjang SD/MI sampai jenjang SMA/SMK/MA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Angka Kelulusan Jenjang SD-SMA Sederajat
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Sederajat	100	100	100	100	100
2	SMP Sederajat	98,54	98,80	100	100	94,48
3	SMA Sederajat	98,90	99,27	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Majene, Tahun 2025.

g. Rasi Guru dan Murid

Kabupaten Majene terkenal sebagai kota pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Untuk rasio guru murid sekolah di Kabupaten Majene dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rasio guru dan murid untuk jenjang SD terjadi penurunan, Dimana pada tahun 2020 sebesar 10,36, meningkat di tahun 2021 menjadi 12,69. Tahun 2022 kembali turun diangka 10,13 dan Kembali naik hingga tahun 2024 dengan capaian rasio masing-masing sebesar 10,74 dan 10,81. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.56.
Ratio Guru dan Murid Kabupaten Majene 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD Sederajat	10,36	12,69	10,13	10,74	10,81
2	SMP Sederajat	10,17	14,91	10,68	10,78	10,82
3	SMA Sederajat	17,31	19,67	11,51	12,80	12,92

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Majene, Tahun 2025.

Pada jenjang SMP Sederajat di tahun 2020 sebesar 10,17 dan meningkat menjadi 14,91 pada tahun 2021, kembali menurun diangka 10,68 di tahun 2022. Pada tahun 2023 Ratio Guru dan Murid Sekolah Tingkat SMP kembali mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi di angka 10,78 dan tahun 2024 kembali naik sebesar 10,82. Rasio guru/murid untuk jenjang Pendidikan SMA sederajat pada tahun 2020 17,31 sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan di angka 19,67. Tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 11,51 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2023-2024 menjadi 12,80 dan 12,92.

h. Kondisi Fasilitas Pendidikan

Dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara lansung maupun tidak lansung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Gambar 2.69.
Persentase Sarana dan Prasarana Sekolah Dalam Kondisi Baik Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

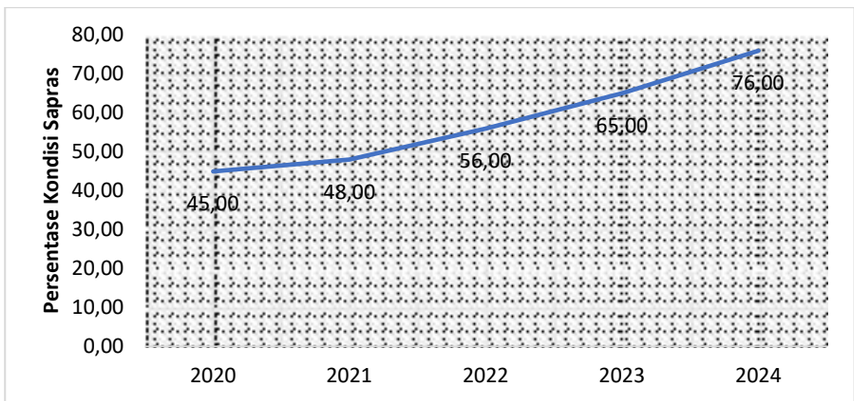

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Majene, Tahun 2025.

Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa tahun 2020 kondisi Sapras sekolah dalam kondisi baik sebesar 45% dan meningkat di tahun 2021 sebesar 3% atau berada diangka 48%. Tahun 2022-2023 kembali meningkat masing-masing diangka 56% dan 65%. Hingga tahun 2024 kondisi sapras di Kabupaten Majene dalam kondisi baik mencapai 76%.

i. Persentase Pendidikan Terakreditas

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui mutu satuan pendidikan adalah melihat status akreditasinya. Cara itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi (PT). Mutu pendidikan nonformal (PNF), lembaga kursus, dan pelatihan juga dapat dinilai dari status akreditasinya. Semakin baik status akreditasi suatu pendidikan berarti proses penjaminan mutunya semakin terjaga. Proporsi satuan pendidikan yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditas Nasional di Kabupaten Majene hanya pada jenjang SD dan SMP, mengingat jenjang SMA sudah berada di naungan pemerintah provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.70.
Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi
Kewenangan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

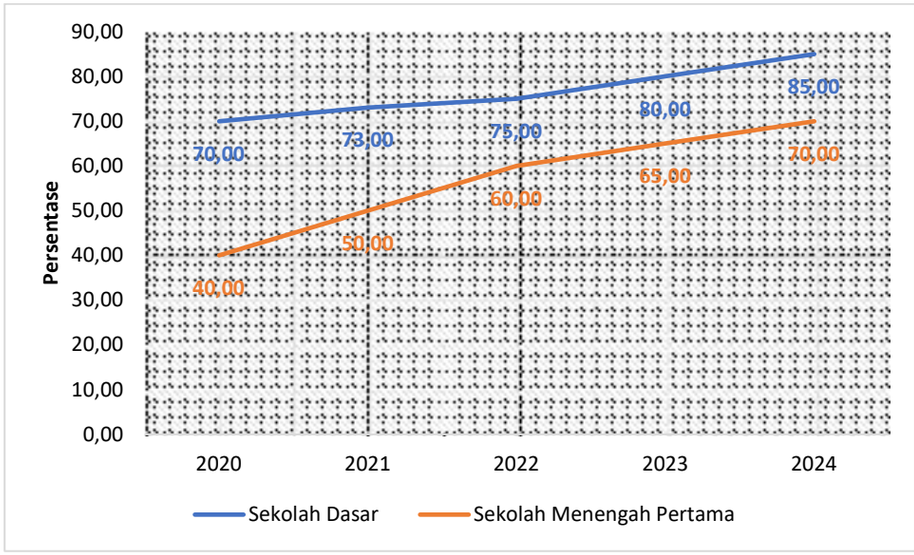

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Majene, Tahun 2025.

Berdasarkan kondisi persentase satuan Pendidikan terakreditasi (Akreditas B) untuk jenjang Pendidikan SD dan SMP menunjukkan angka capaian persentase yang baik, Dimana setiap tahunnya jumlah satuan Pendidikan yang terakreditasi di Kabupaten Majene mengalami peningkatan. Sehingga kedepan kualitas mutu pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan (*continous improvement*). Hal itu penting agar penjaminan mutu menjadi gerakan hingga membentuk budaya semua ekosistem Pendidikan, mengingat Kabupaten Majene merupakan Pusat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.

2. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat dan produktivitas daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, memastikan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mencegah dan mengendalikan penyakit melalui kebijakan yang efektif. Investasi dalam sektor kesehatan, seperti pembangunan fasilitas medis, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta program promotif dan preventif, pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Keberadaan posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan balita. Melalui posyandu diperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan dasar ibu, bayi dan balita. Berikut disajikan tabel rasio posyandu terhadap per satuan balita di Kabupaten Majene sebagai berikut.

Tabel 2.57.
Rasio Posyandu Terhadap Per Satuan Balita
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu	326	328	330	330	334
2	Jumlah Balita	16.690	17.388	19.690	19.720	15.648
3	Rasio Perbandingan	1 : 60	1 : 50	1 : 59	1 : 59	1 : 47
4	Rasio Per 1000 Balita	16,56	18,86	16,75	16,73	21,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

Kabupaten Majene rasio posyandu persatuan balita menunjukkan trend yang fluktuatif, dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 tercatat rasio posyandu per satuan balita sebesar 16,56, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 meningkat menjadi 18,86 dan tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami penurunan diangka 16,75 dan 16,73. Tahun 2024 kembali meningkat diangka 21,34. Trend perkembangan rasio tersebut memperlihatkan penurunan dan hanya di tahun 2020-2021 serta tahun 2023-2024 mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar sehingga ditakutkan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah dan kurang diseimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, sehingga dapat menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Majene. Hal ini guna mewujudkan lebih terhadap wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

b. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Selain bermanfaat, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58.
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Per Satuan Penduduk di Kab. Majene 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas	11	11	11	11	11
2	Jumlah Pustu	39	38	38	38	41
3	Jumlah Penduduk	174.407	175.788	177.390	181.360	188.780
4	Rasio Puskesmas Per 1000 Penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Rasio Pustu Per 1000 Penduduk	0,22	0,20	0,20	0,20	0,22

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa Rasio puskesmas persatuan penduduk tahun 2020 adalah 0,06 bergerak konstan pada angka rasio sebesar 0,06 sampai tahun 2024, meskipun tidak terjadi penambahan sarana puskesmas. Untuk puskesmas pembantu rasio per satuan penduduk tahun 2020 adalah sebesar 0,22 dan tetap berada diangka 0,22 di tahun 2024 atau sebesar 0,22, meskipun terjadi penambahan sarana puskesmas pembantu sebanyak 3 unit. Melihat dari perkembangan tersebut diharapkan kedepan agar fasilitas kesehatan dapat melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat di Kabupaten Majene.

c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, hingga tahun 2024 terjadi penambahan jumlah rumah sakit sebanyak 1 unit. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan 2023 terlihat konstan di angka 0,005-0,006, dan tahun 2024 mengalami peningkatan diangka 0,011. Hal ini terjadi karena jumlah rumah sakit tidak bertambah selama kurun waktu 4 tahun terakhir dan bertambah

1 unit tahun 2024 sedangkan jumlah pertumubuhan penduduk cenderung sangat meningkat. Berikut adalah tabel jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Majene.

Tabel 2.59.
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	2
2	Jumlah Penduduk	174.407	175.788	177.390	181.360	188.780
3	Rasio Rumah Sakit Per 1000 Penduduk	0,005	0,006	0,006	0,005	0,011

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter terus meningkat hingga tahun 2024 di Kabupaten Majene sehingga rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Majene terus meningkat. Berbeda di tahun 2021 jumlah dokter berkurang yang disebabkan oleh adanya dokter yang melanjutkan pendidikan spesialis dan pada tahun 2022-2024 jumlah dokter kembali meningkat yang disebabkan oleh adanya beberapa dokter yang kembali bertugas sehabis menjalankan pendidikan spesialis serta adanya penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap tahunnya sehingga mempengaruhi jumlah keberadaan dokter Kabupaten Majene.

Pada tahun 2020 jumlah dokter sebanyak 31 dengan rasio tercatat 0,19 serta rasio perbandingan sebesar 1:5.609, tahun 2021 turun menjadi 0,16 dengan jumlah dokter sebanyak 28 orang sehingga perbandingannya sebesar 1:6.223, dan pada tahun 2022 rasio dokter per satuan penduduk meningkat menjadi 0,26 dengan jumlah dokter sebanyak 45 sehingga perbandingannya sebesar 1:6.223. Pada tahun 2023 jumlah dokter mengalami peningkatan yang cukup signifikan di angka 66 dokter dengan rasio persatuan penduduk diangka 0,37 atau

perbandingan sekitar 1:4.668, dan kembali meningkat tahun 2024 dengan jumlah dokter sebanyak 73 dengan rasio persatuan penduduk berada diangka 0,39 dengan perbandingan rasio dokter terhadap jumlah penduduk sebesar 1:2.586. Lebih jelasnya terkait rasio dokter per satuan penduduk dan jumlah penduduk di Kabupaten Majene tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter	31	28	45	66	73
2	Jumlah Penduduk	173.884	174.407	177.390	181.360	188.780
3	Rasio Dokter Persatuan Penduduk 1000	0,19	0,16	0,26	0,37	0,39
4	Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk	1:5.609	1:6.223	1:6.223	1:4.668	1:2.586

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

e. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk di Kabupaten Majene pada tahun 2020 adalah 1,63 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 284 orang serta rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:612, mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 1,94 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 338 orang serta rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:516.

Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 3,77 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 663 orang serta rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:265, kembali meningkat di tahun 2023-2024 yang masing-masing berada di angka rasio 4,81 dan 4,82 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 872 dan 909 orang serta rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:208. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.61.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Kesehatan	284	338	663	872	909
2	Jumlah Penduduk	173.884	174.407	177.390	181.360	188.780
3	Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk 1000	1.63	1,94	3,77	4,81	4,82
4	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	1:612	1:516	1:265	1:208	1:208

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

f. Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan

Secara umum, jumlah kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Majene mengalami fluktuasi dilihat dari data tahun 2020 sebesar 96,47%, mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 99,5% dan turun di tahun 2022 sebesar 73,79%. Tahun 2023-2024 kembali meningkat diangka 81,30% dan 82,30%. Hal ini terkait dengan kinerja petugas dalam mencakup sasarannya secara keseluruhan. Sementara itu, jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Majene berada diangka 100% dari tahun 2020–2024 dengan artian bahwa semua balita yang menderita gizi buruk telah tertangani di semua fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Majene. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.62.
Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan
Kab. Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kunjungan Bayi	96,47	99,5	73,79	81,3	82,30
2	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	56,10	51,20	52,44	53,7	58,50
4	Persentase Balita Gizi Buruk	26,40	23,4	1,45	1,00	1,00
5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	0.87	0.87	6,15	6,21	6,22
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	3,40	12,23	6,15	10,5	11,7
7	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	12,50	0,54	6,99	10,7	14,0

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Angka kematian ibu	267,7	163,1	335,57	393,0	175,0
9	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	70,50	60,37	75,63	41,01	66,81
10	Cakupan Pelayanan Anak Balita	80,10	73,95	52,75	70,4	64,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

Adapun terkait Universal Child Immunization (UCI) berdasarkan jumlah Desa/Kelurahan UCI di Kab. Majene mengalami peningkatan dilihat dari data tahun 2020-2024 sebesar 56,10% dan tahun 2020 turun menjadi 51,20%. Pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan di angka 52,44% dan kembali mengalami penurunan ditahun 2022-2023 masing-masing di angka 53,7% dan 58,50%. Hal ini terjadi karena cakupan sasaran imunisasi dasar lengkap yang mencapai target.

Secara umum, persentase balita gizi buruk di Kab. Majene mengalami penurunan setiap tahunnya, dilihat dari data tahun 2020 sebesar 26,40% turun menjadi 23,4% pada tahun 2021 lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 1,45. Di tahun 2023 dan 2024 berada diangka 1,00%. Sedangkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Majene mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2020–2024 dengan angka kelangsungan hidup bayi sebesar 6,22% dibandingkan kondisi tahun 2020 di angka 0,87%. Berbeda dengan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup bayi, dimana tahun 2020 angka kematian bayi sebesar 3,40% dan peningkatan di tahun 2021 sebesar 12,23% dan hingga di akhir tahun 2022-2024 angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup mengalami peningkatan yang masing-masing berada di angka 10,5%, dan 11,7%.

g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Secara umum, jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Majene setiap tahunnya berada pada posisi stagnasi/tetap, ini dilihat dari data tahun 2020 sampai pada tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa perubahan status kepesertaan dari Askeskin menjadi PBI (Penerima

Bantuan Iuran) JKN yang dikelola oleh BPJS serta adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Stagnasi data terjadi dari tahun 2020 sampai 2024. Sedangkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <24 jam menunjukkan angka yang sama pada tahun 2020 hingga 2023 berada diangka 100 %.

Tabel 2.63.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien MBR/Miskin	100	100	100	100	100
2	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat	100	100	88	95	81
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100
4	Cakupan Desa /Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 Jam	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

h. Pelayanan, Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular

Secara umum, jumlah penderita DBD di Kabupaten Majene sudah 100% ditangani sesuai SOP dengan jumlah penanganan di tahun 2024 sebanyak 315 dimana tahun sebelumnya masih terdapat yaitu 202 pasien. Secara umum, jumlah penderita penyakit TBC BTA yang ditemukan dan diobati di Kabupaten Majene mengalami fluktuasi setiap tahunnya, ini dilihat dari data tahun 2020 sebesar 492 kemudian menurun menjadi 440 di tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 518 dan di tahun 2023 terjadi penurunan yang besar dengan jumlah pasien sebesar 332 orang. Tahun 2024 kembali meningkat diangka 584 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.64.
Jumlah Pelayanan Penyakit Menular
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Diare	3.045	1.499	2.415	2.647	2.947
2	Malaria	104	57	156	192	163
3	Diduga Rabies	43	38	54	70	81
4	Cacingan	*	18	*	*	*
5	Campak	1	*	3	10	1
6	DBD	57	16	62	202	315
7	TBC Paru-Paru	492	440	518	332	584
8	Kusta	26	19	24	39	46
9	Typus	272	14	87	44	240

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.
*Keterangan : * Data Belum Tersedia atau Tidak Ada*

i. Cakupan Pelayanan Kebidanan

Berkompetensi kebidanan di Kabupaten Majene mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini terlihat dari data tahun 2020 sebesar 87,1%, menurun di angka 80,3% di tahun 2021 dan 75,3% di tahun 2022. Berbeda di tahun 2023-2024 kembali meningkat masing-masing diangka 91,50% dan 95,80%. Penurunan cakupan tersebut dikarenakan berkurangnya minat ibu hamil untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65.
Cakupan Pelayanan Kebidanan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	87,1	80,3	75,3	91,50	95,80
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	90.6	94,7	116,8	2.016,8	2.520,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

Secara umum, jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di Kabupaten Majene juga mengalami peningkatan, ini dilihat dari tahun 2020 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 90,6% dengan arti bahwa komplikasi kebidanan tertangani dengan baik. Sedangkan data tahun 2021-2022 menunjukkan adanya kembali peningkatan dari tahun sebelumnya atau berada di angka 94,7% dan 116,8%. Selanjutnya

tahun 2023-2024 kembali meningkat sebesar 2.016,8 – 2.520,8. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua komplikasi kebidanan yang ditemukan dapat ditangani dengan segera oleh karena keterlambatan penanganan medis terhadap ibu hamil dan melahirkan resiko tinggi.

j. Jumlah Tenaga Medis

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Untuk lebih jelasnya cakupan pelayanan kebidanan Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66.
Cakupan Pelayanan Kebidanan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter Umum	17	19	36	32	35
2	Dokter Spesialis	11	14	16	15	23
3	Dokter Gigi	14	11	15	14	15
4	Perawat	114	120	346	346	293
5	Bidan	154	131	461	461	428
6	Tenaga Kefarmasian	23	15	27	37	26
7	Tenaga KesMas	29	25	66	66	60
8	Tenaga Gizi	14	11	23	26	21
9	Tenaga Kesling	28	18	30	28	28
10	Tenaga Keterapian	1	1	1	1	1
11	Tenaga Keteknisan Medis	7	7	10	10	17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Majene, Tahun 2025.

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Majene dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tenaga medis keperawatan, bidan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, dan tenaga gizi, dimana pada tahun 2024 jumlah dokter umum sebanyak 35 orang dari 17 orang di tahun 2020, dokter spesialis sebanyak 23 orang dari 11 orang di tahun 2020, dan dokter gigi sebanyak 15 orang dari 14 orang di tahun 2020. Kemudian tenaga kesehatan berupa perawat di tahun 2024 sebanyak 293 orang atau berkurang sebanyak 179 orang dari tahun 2020, tenaga bidan sebanyak 428 orang atau bertambah sebanyak 274 orang dari tahun 2020, tenaga kefarmasian sebanyak 26 orang atau bertambah sebanyak 3 orang dari tahun 2020, tenaga

kesehatan masyarakat sebanyak 60 orang atau bertambah sebanyak 31 orang dari tahun 2020, tenaga gizi sebanyak 21 orang atau bertambah sebanyak 7 orang dari tahun 2020, tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 28 orang dan tidak mengalami penambahan dari tahun 2020, tenaga keterapian tetap 1 orang dari tahun 2020-2024 dan tenaga keteknisan medis sebanyak 17 orang atau bertambah sebanyak 10 orang dari tahun 2020.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat daerah mencakup berbagai aspek perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan infrastruktur dan tata ruang yang sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dalam bidang pekerjaan umum, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan serta pemeliharaan jalan kabupaten/kota, sistem drainase, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sanitasi lingkungan. Sementara dalam penataan ruang, kewenangan daerah meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) guna memastikan pemanfaatan lahan yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan peruntukannya.

a. Rasio Jenis dan Kondisi Permukaan Jalan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah bagaimana kondisi infrastruktur termasuk didalamnya adalah jalan. Panjang jalan di Kabupaten Majene tahun 2020 adalah 621,20 Km dan mengalami penambahan Panjang jalan pada tahun 2023 sepanjang 4,01 Km. Panjang jalan tersebut dibagi kedalam 4 jenis permukaan jalan (Aspal, Kerikil, Tanah dan Lainnya) dan 4 jenis kondisi jalan (Baik, Sedang, Rusak dan Rusak Berat).

Berdasarkan pada tabel dibawah, menunjukkan bahwa Panjang jalan berdasarkan jenis permukaan Kabupaten Majene pada tahun 2020, berupa jenis aspal sepanjang 215,60 Km dan berkurang sepanjang 87,22 Km pada tahun 2024 atau sepanjang 142,62 km. Selanjutnya kondisi jalan kerikil pada tahun 2020 sepanjang 109,10 Km mengalami pengurangan sepanjang 49,48 km atau sepanjang 59,62 km pada tahun 2024. Jenis permukaan jalan tanah pada tahun

2020 sepanjang 64,97 km mengalami penambahan sepanjang 157,88 km atau berada diangka 222,85 km sedangkan jenis lainnya pada tahun 2020 sepanjang 231,53 km mengalami pengurangan pada tahun 2020 sepanjang 17,17 km atau sepanjang 214,36 km. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Km)
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Permukaan Jalan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal	215,60	226,34	229,64	126,81	128,38
2	Kerikil	109,10	76,23	69,64	60,43	59,62
3	Tanah	64,97	84,60	86,00	221,20	222,85
4	Lainnya	231,53	234,03	235,91	216,78	214,36
Jumlah		**621,20**	**621,20**	**621,20**	**625,21**	**625,21**
No	**Jenis Kondisi Jalan**	**Tahun**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Baik	275,26	261,86	257,07	161,96	142,62
2	Sedang	79,62	74,27	67,64	113,38	121,19
3	Rusak	170,90	158,45	168,07	103,71	72,25
4	Rusak Berat	95,41	126,62	128,71	246,16	289,16
Jumlah		**621,20**	**621,20**	**621,20**	**625,21**	**625,21**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

Untuk jenis kondisi jalan, panjang jalan dalam kondisi baik setiap tahunya mengalami penurunan kondisi hingga tahun 2024, dimana tahun 2020 kondisi jalan baik sepanjang 275,26 km dan kondisi tersebut menurun di tahun 2021 menjadi 261,86 km. Sampai pada tahun 2022 menjadi 257,07 km dan tahun 2023 menurun secara signifikan menjadi 161,96 km serta tahun 2024 kondisi jalan baik sepanjang 142,62 km. Sementara kondisi jalan sedang, rusak dan rusak berat memperlihatkan makin membaik, ini disebabkan karena adanya kegiatan rehabilitasi kondisi jalan di setiap tahunnya.

Indikator kemantapan jalan merupakan salah satu indikator utama dalam bidang kebinamargaan urusan Pekerjaan Umum, dimana kondisi jalan yang mantap diartikan sebagai jalan yang dalam kondisi baik dan sedang, sementara kondisi jalan yang tidak mantap adalah jalan yang dalam kondisi rusak ringan atau rusak berat. Rasio jalan mantap dan jalan tidak mantap Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja yang kurang baik, Dimana kondisi

jalan mantap setiap tahunnya mengalami penurunan kondisi, begitupun sebaliknya kondisi jalan tidak mantap setiap tahunya mengalami peningkatan kondisi. Ini menunjukkan perlu adanya perhatian khusus pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.71.
Persentase Rasio Kemantapan Jalan
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

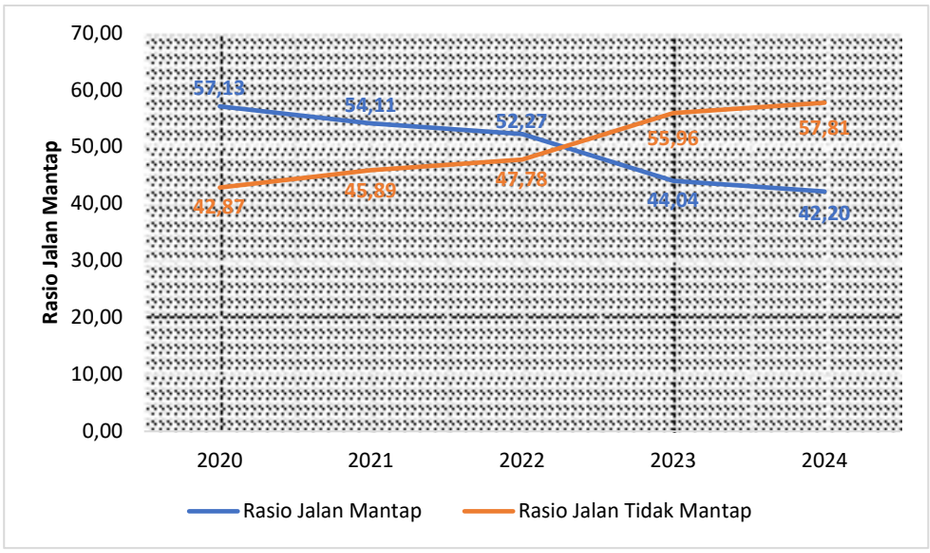

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

b. Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal sanitasi yang layak. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa akses penduduk terhadap sanitai yang layak di Kabupaten Majene dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan angka yang fluktuasi, ini disebabkan karna dalam kurung waktu tertentu terjadi bencana alam yang merusak kondisi sanitasi bagi penduduk.

Pada tabel dan gambar di bawah dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir, dimana dari tahun 2020 hingga tahun 2021 meningkat dari angka 71,00% atau sebanyak 123.829 jiwa menjadi 71,63% atau sebanyak 125.920 yang disebabkan oleh adanya beberapa bantuan pembangunan sanitasi yang masuk di daerah pasca bencana gempa bumi. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar

70,61% atau sebanyak 125.255 jiwa yang disebabkan oleh adanya bencana banjir bandang yang menimpa wilayah Kecamatan Malunda dan sekitarnya yang menyebabkan kerusakan beberapa sarana sanitasi pada wilayah tersebut maupun wilayah sekitarnya. Hingga tahun 2023-2024 akses penduduk bersanitasi layak kembali meningkat diangka 71,15% dan 71,40%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar grafik berikut.

Tabel 2.68.
Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	174.407	175.788	177.390	181.360	188.780
2	Penduduk Berakses Sanitasi	123.829	125.920	125.255	129.038	134.789
3	Akses Sanitasi	71,00	71,63	70,61	71,15	71,40
4	Penduduk Tidak Berakses Sanitasi	50.578	49.868	52.135	52.322	53.991
5	Tidak Berkases Sanitasi	29,00	28,37	29,39	28,85	28,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

Gambar 2.72.
Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

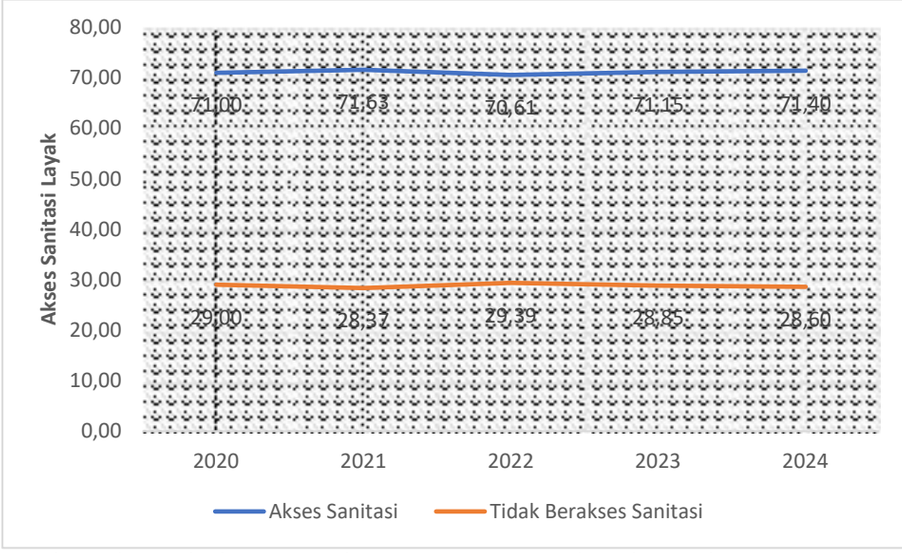

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

c. Drainase Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air sejalan dengan panjang jalan keseluruhan yang ada di Kabupaten Majene. Panjang jalan yang memiliki drainase mengalami trend yang cukup baik dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini

terlihat di tahun 2020 Panjang jalan yang memiliki drainase sebesar 21,35% atau sepanjang 132,65 km, meningkat di tahun 2021-2022 sebesar 21,62% atau sepanjang 134,38 km. Pada tahun 2023-2024 kembali meningkat diangka 21,96% atau sepanjang 137,29 km. Hal ini ditandai dengan trend peningkatan dan pembangunan saluran drainase yang ada dilingkungan masyarakat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan pada tahun 2022 dan 2024 tidak terlihat peningkatan akibat kurangnya pembangunan di tahun tersebut yang diakibatkan oleh alokasi anggaran pembangunan dialihkan untuk utang pekerjaan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya panjang jalan memiliki drainase/ saluran pembuangan air dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.
Panjang Jalan Memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Kabupaten (km)	621,20	621,20	621,20	625,21	625,21
2	Panjang Seluruh Drainase (km)	132,65	134,38	134,38	137,29	137,29
3	Panjang Jalan Berdrainase (%)	21,35	21,62	21,62	21,96	21,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi genangan dan kelebihan air adalah membuat drainase. Pemerintah Kabupaten Majene selalu mengupayakan drainase dalam kondisi baik, hal ini ditandai dengan adanya trend peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020 panjang drainase dalam kondisi baik adalah 91,47% atau sepanjang 121,33 km dan meningkat di tahun 2021 menjadi 92,24% atau sepanjang 123,95 km. Pada tahun 2022 kembali meningkat dan bertambah menjadi 92,24% atau sepanjang 124,60 km. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat berada di angka 94,40% dengan panjang drainase 129,60 km. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.70.
Panjang Drainase/Saluran Pembuangan Air Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Seluruh Drainase (km)	132,65	134,38	134,38	137,29	137,29
2	Drainase Kondisi Baik (km)	121,33	123,95	124,09	129,60	129,60
3	Drainase Kondisi Baik (%)	91,47	92,24	92,34	94,40	94,40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

Gambar 2.73.
Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

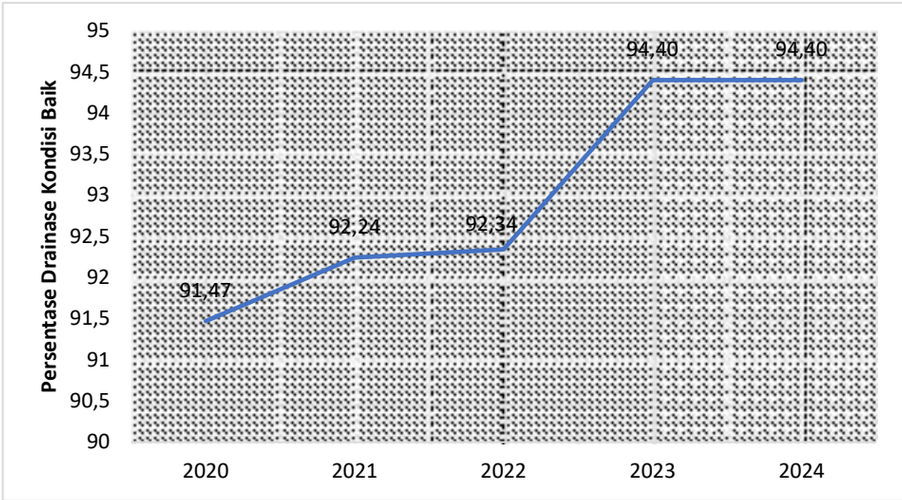

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

d. Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Seyogianya kondisi jaringan irigasi harus dalam kondisi baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat jaringan irigasi berfungsi secara baik. Panjang jaringan irigasi Kabupaten Majene tidak mengalami penambahan selama 5 tahun terakhir, dimana panjang keseluruhan jaringan irigasi sepanjang 101.230 meter yang terbagi kedalam 3 jenis jaringan yaitu jaringan irigasi primer sepanjang 29.400,84 meter, sekunder sepanjang 34.821,37 meter dan jaringan tersier sepanjang 37.007,87 meter. Upaya terus dilakukan oleh Kabupaten Majene sehingga selama 5 tahun terakhir adanya trend fluktuatif persentase jumlah irigasi dalam kondisi baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.71.
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Seluruh Jaringan Irigasi (m)	101.230	101.230	101.230	101.230	101.230
2	Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (m)	76.530	34.773	46.394	47.679	41.229
3	Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi Rusak (m)	24.700	66.457	54.836	53.551	60.002
4	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi Baik (%)	75,60	34,35	45,83	47,10	40,73
5	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi Rusak (%)	24,40	65,17	54,17	52,90	59,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

Gambar 2.74.
Perkembangan Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik dan Rusak Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

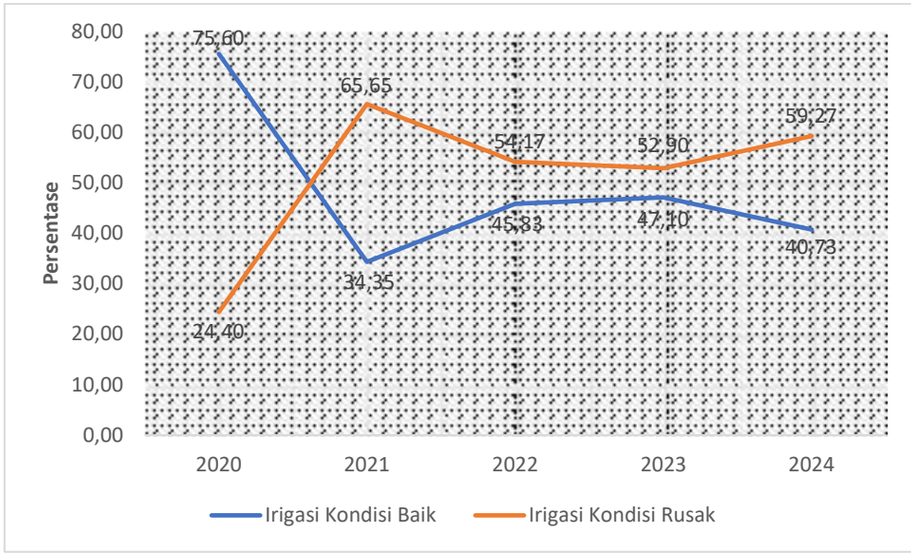

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

Pada tahun 2020 persentase panjang irigasi dalam kondisi baik berada pada kisaran 75,60% atau sepanjang 76.530 meter, sedangkan kondisi rusak sebesar 24,40% atau sepanjang 24.700 meter. Mengalami penurunan kondisi baik menjadi 34,35% atau sepanjang 34.773 meter dan terjadi peningkatan kondisi rusak menjadi 65,17% atau sepanjang 66.456 meter pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan oleh adanya bencana gempa bumi yang melanda wilayah Kecamatan Malunda dan Ulumanda yang merupakan pusat jaringan irigasi di Kabupaten Majene sehingga mengakibatkan banyaknya kerusakan system jaringan irigasi yang ada.

Tahun 2022 jaringan irigasi kondisi baik mengalami peningkatan diangka 45,83% atau sepanjang 46.394 meter dan

jaringan irigasi kondisi rusak mengalami penurunan menjadi 54,17% atau sepanjang 54.836 meter. Kondisi ini disebabkan oleh adanya beberapa bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi pada system jaringan irigasi di wilayah Kecamatan Malunda dan Ulumanda dan Tubo Sendana. Tahun 2023 kondisi jaringan irigasi semakin membaik dengan capaian 47,10% atau sepanjang 47.679 meter jaringan irigasi kondisi baik dan penurunan jaringan irigasi kondisi rusak diangka 52,90% atau sepanjang 53.551 meter.

Berbeda pada tahun 2024, Dimana kondisi jaringan irigasi baik Kembali berkurang diangka 40,73% atau sepanjang 41.229 meter dan terjadi peningkatan kondisi rusak diangka 59,27% atau sepanjang 60.002 meter. Kondisi ini dipengaruhi tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kecamatan Malunda sehingga terjadi bencana banjir yang berdampak pada kerusakan di beberapa system jaringan irigasi, baik irigasi primer, sekunder maupun tersier.

Gambar 2.75.
Kondisi Jaringan Irigasi Berdasarkan Jenis Irigasi
Kabupaten Majene Tahun 2024

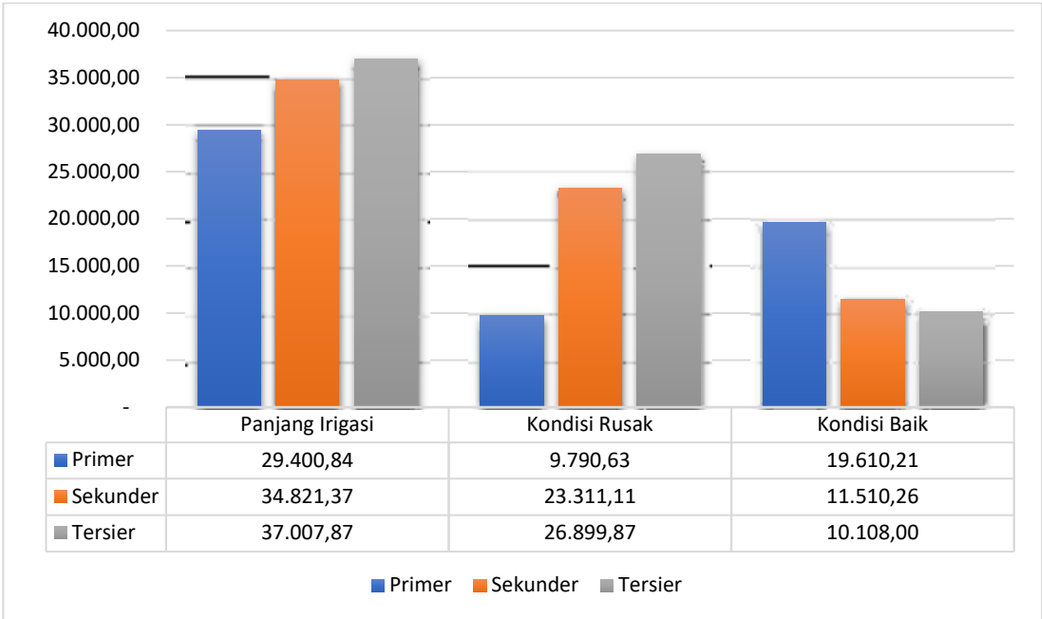

	Panjang Irigasi	Kondisi Rusak	Kondisi Baik
Primer	29.400,84	9.790,63	19.610,21
Sekunder	34.821,37	23.311,11	11.510,26
Tersier	37.007,87	26.899,87	10.108,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

e. Akses Penduduk Terhadap Air Minum Layak

Akses aman adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (*premises*), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum. Untuk konsumsi air minum, syarat-syaratnya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat maupun sedang dan ringan. Akses Penduduk Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72.
Akses Penduduk Terhadap Air Minum Layak
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	174.407	175.788	177.390	181.360	188.780
2	Penduduk Berakses Air Minum Layak	120.899	122.225	126.532	123.960	135.393
3	Akses Air Minum	69,32	69,53	71,33	68,35	71,72
4	Penduduk Tidak Berakses Air Minum	53.508	53.568	50.858	57.400	53.387
5	Tidak Berkases Air Minum	30,68	30,47	28,67	31,65	28,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa akses penduduk terhadap air minum layak setiap tahunnya (2020-2024) mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah akses yang disebabkan oleh salah satu Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM Galung Lombok) yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Majene mengalami kerusakan akibat adanya banjir bandang pada tahun 2022 sehingga tidak berfungsi secara total di wilayah Kota Majene utamanya di Kecamatan Banggae Timur.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk berakses air minum layak sebesar 69,32% atau sebanyak 120.899 jiwa sedangkan tidak berakses sebesar 30,68% atau sebanyak 53.508 jiwa. Tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah akses menjadi 69,53% atau sebanyak 122.225 jiwa sedangkan tidak berakses mengalami penurunan di angka 30,47% atau sebanyak 53.568 jiwa. Tahun 2022 kembali meningkat di angka 71,33% atau sebesar 126.532 jiwa sedangkan tidak berakses sebesar 28,67% atau sebesar 50.858 jiwa. Kembali mengalami penurunan tahun 2023 dengan capaian berakses sebesar 68,38% atau

sebanyak 123,960 jiwa sedangkan tidak berakses bertambah sebesar 31,65% atau sebanyak 57.400 jiwa. Kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 71,72% atau sebanyak 135.393 jiwa sedangkan tidak berakses sebesar 28,28% atau sebanyak 53.387 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut.

Gambar 2.76.
Akses Penduduk Terhadap Air Minum Layak
Kabupaten Majene Tahun 2024

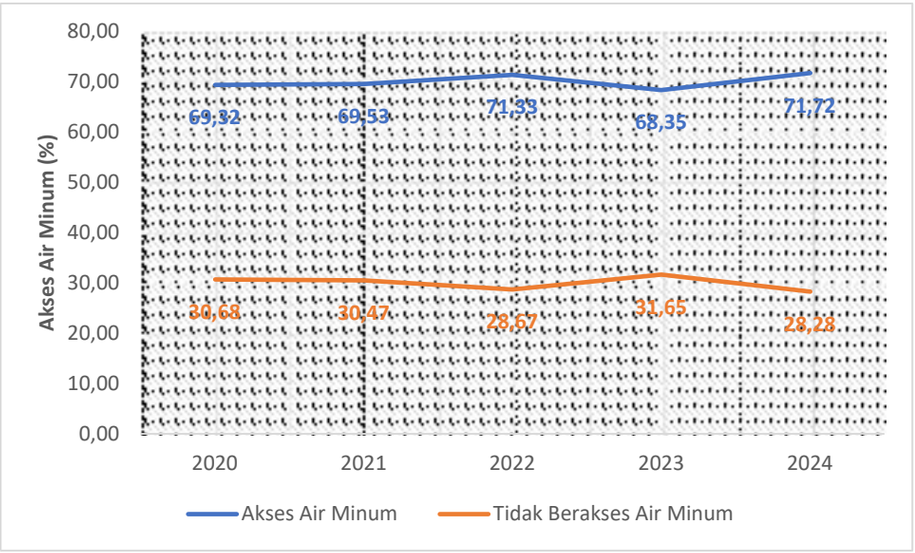

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene, Tahun 2025.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah berperan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengelolaan kawasan permukiman agar sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Selain itu, upaya penataan kawasan permukiman juga mencakup peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, serta pengelolaan kawasan kumuh agar lebih layak huni. Melalui program seperti bantuan rumah subsidi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pengembangan perumahan berbasis komunitas, pemerintah daerah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

a. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak

Air bersih adalah kebutuhan utama untuk setiap manusia dalam beraktifitas terutama dalam kebutuhan rumah tangga, baik itu untuk minum, mencuci dan sebagainya. Namun kualitas air menjadi hal yang harus diperhatikan, karena berhubungan dengan kesehatan. Pada wilayah Kabupaten Majene persentase Jumlah Rumah tangga Pengguna air minum layak mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 bergerak pada kisaran 24.180 rumah tangga pengguna air minum layak sedangkan sebanyak 10.702 rumah tangga tidak berakses air minum layak, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 24.445 rumah tangga pengguna air minum layak dan sebanyak 10.713 rumah tangga tidak berakses air minum layak. Pada tahun 2022 data yang diperoleh kembali meningkat sebanyak 25.306 rumah tangga dan 10.172 rumah tangga tidak berakses air minum layak, sedangkan tahun 2023 jumlah rumah tangga berakses air minum menurun menjadi 24.792 rumah tangga dan rumah tangga tidak berakses air minum layak meningkat diangka 11.480 rumah tangga. akhir tahun 2024 rumah tangga pengguna air minum layak sebanyak 27.079 rumah tangga dan tidak berakses air minum layak menurun diangka 10.677 rumah tangga. Lebih jelsnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73.
Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	174.407	175.788	177.390	181.360	188.780
2	Jumlah Rumah Tangga	34.881	35.158	35.478	36.272	37.756
3	RT Berakses Air Minum Layak	24.180	24.445	25.306	24.792	27.079
4	RT Tidak Berakses Air Minum	10.702	10.713	10.172	11.480	10.677

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene, Tahun 2025.

b. Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi layak cenderung berfluktuasi. Hal ini ditandai dengan akses sanitasi tahun 2020 sebanyak 24.766 rumah tangga dan rumah tangga tidak berakses sanitasi layak sebanyak 10.116 rumah tangga kemudian bergerak meningkat pada tahun 2021 kisaran 25.183 rumah tangga berakses dan sebanyak 9.974 rumah tangga

tidak berakses sanitasi layak. Tahun 2022 kembali turun diangka 25.051 rumah tangga berakses sanitasi layak dan sebanyak 10.427 rumah tangga tidak berkses. Tahun 2023, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak sebanyak 25.808 rumah tangga sedangkan tidak berakses sebesar 10.464 rumah tangga. Pada tahun 2020 rumah tangga yang bersanitasi layak kembali meningkat atau sebesar 26.958 rumah tangga dan sebesar 10.798 rumah tangga belum berakses sanitasi layak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74.
Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak
Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	174.407	175.788	177.390	181.360	188.780
2	Jumlah Rumah Tangga	34.881	35.158	35.478	36.272	37.756
3	RT Berakses Sanitasi Layak	24.766	25.183	25.051	25.808	26.958
4	RT Tidak Berakses Sanitasi Layak	10.116	9.974	10.427	10.464	10.798

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene, Tahun 2025.

c. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

Seluruh luas wilayah Kabupaten Majene terbagi menjadi beberapa kawasan penggunaan lahan, diantaranya adalah lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman masih terbagi atas beberapa kawasan salah satunya adalah kawasan permukiman kumuh yang perlu ditata melalui peningkatan kualitas kawasan. Penataan kawasan permukiman kumuh sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang sehat, serta mencegah dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas. Permukiman kumuh sering kali memiliki infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk, serta sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik, yang dapat meningkatkan risiko penyakit dan bencana, seperti banjir dan kebakaran. Dengan melakukan penataan yang terencana, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan rumah layak huni, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi warganya.

Tabel 2.75.

Jumlah RLH, RTLH dan Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga (Unit)	34.881	35.158	35.478	36.272	37.756
2	Jumlah Rumah Layak Huni RLH (Unit)	18.899	21.843	23.813	24.346	26.493
3	Persentase RLH (%)	54,18	62,13	67,12	67,12	70,17
4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni RTLH (Unit)	15.983	13.314	11.665	11.926	11.263
5	Persentase RTLH (%)	45,82	37,87	32,88	32,88	29,83
6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	176,59	176,59	170,61	170,61	184,13

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene, Tahun 2025.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah hunian yang tidak memenuhi standar keselamatan, kecukupan luas, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. RTLH umumnya memiliki kondisi fisik yang buruk, seperti struktur bangunan yang rapuh, ventilasi yang tidak memadai, serta lingkungan yang kurang sehat, sehingga tidak layak untuk ditempati dalam jangka panjang. Pada indikator berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Majene, perolehan persentase menurun sehingga capaian kinerja yang diperoleh cenderung meningkat. Selengkapnya dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 2.76.
Perkembangan RLH dan RTLH Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

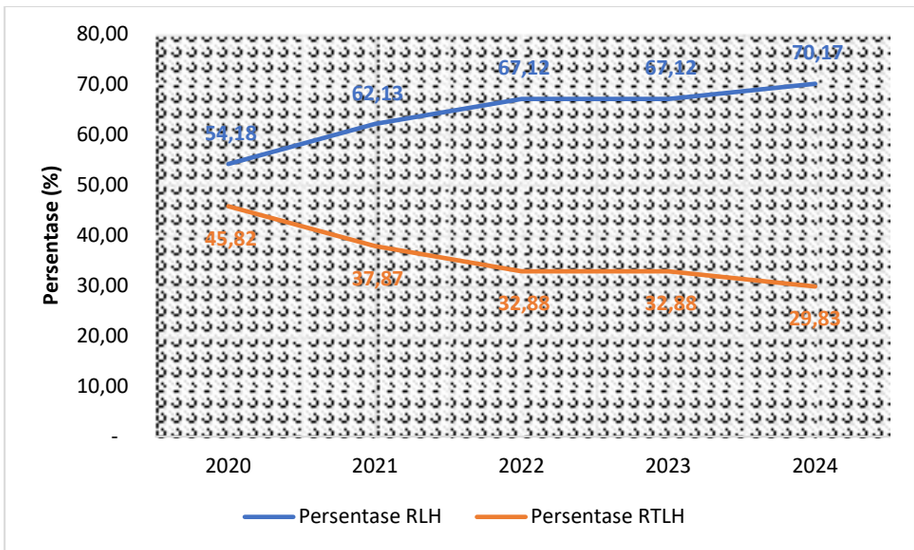

Sumber : Dinas PKPP Kab. Majene, Tahun 2025.

Dari tabel diatas, menunjukkan kinerja baik dalam menangani RTLH di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024, dimana RLH mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan RTLH setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, tahun 2020 jumlah RLH sebanyak 18.899 unit atau sebesar 54,18% menurun hingga tahun 2024 dengan capaian 70,17% atau sebanyak 26.493 unit sedangkan banyaknya RTLH tahun 2020 yaitu 15.983 unit atau sebesar 45,82% menurun sebesar 16% pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 29,83% atau sebesar 11.263 unit. Semakin kecil perolehan persentase capaian kinerja pada indikator ini, maka semakin sedikit jumlah unit rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Majene.

Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani di Kabupaten Majene terdiri dari 3 kewenangan yaitu 0-10 Ha kewenangan kabupaten, 10-15 Ha kewenangan provinsi dan diatas 15 Ha merupakan kewenangan pusat atau nasional. Capaian kinerja yang diperoleh pada periode 2020 hingga 2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020-2021, luas Kawasan kumuh yang ada seluas 176,59 Ha dan terus menurun hingga tahun 2023 dengan perolehan capaian hanya sebesar 3,39% atau seluas 5,98 Ha sehingga total luasan Kawasan kumuh mencapai 170,61 Ha, sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020-2024 tersebut adalah sebesar 3,39% dan merupakan capaian terendah dalam periode tersebut.

Gambar 2.78.
Perkembangan Kawasan Kumuh Kabupaten Majene
Tahun 2020-2024

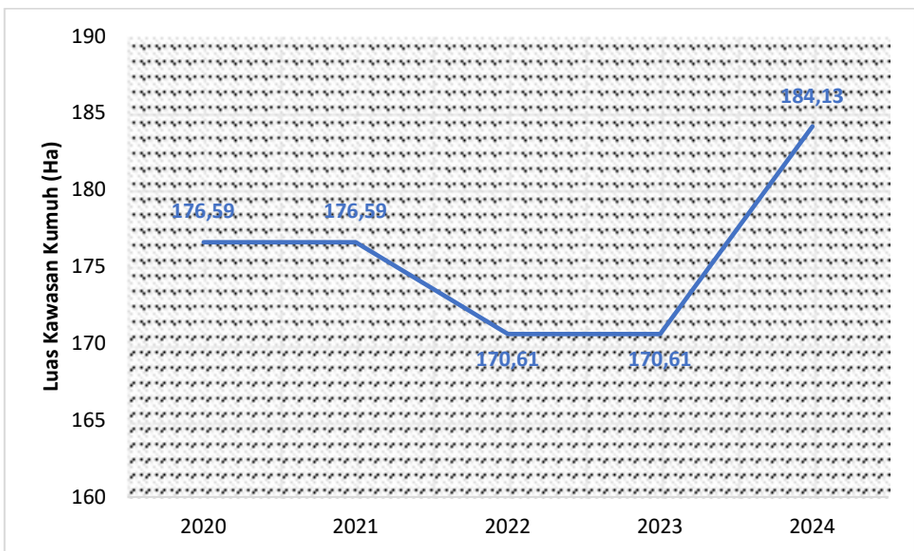

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene, Tahun 2025.

Pada tahun 2024 luasan Kawasan kumuh di Kabupaten Majene bertambah akibat adanya verifikasi ulang luas kawasn kumuh di masing-masing kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian Pekerjaan Umum, Dimana Kabupaten Majene luas Kawasan kumuh bertambah 13,52 Ha atau secara keseluruhan seluas 184,13 Ha yang meliputi sejumlah 14 lokasi kawasan, di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene yang meliputi sebagai berikut.

Tabel 2.76.
Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Nama Kawasan/ Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi		
			RT/RW/Lingk.	Kelurahan	Kecamatan
Kewenangan Kabupaten					
1	Lembang Dhua	1,45	Lembang Dhua	Lembang Dhua	Banggae Timur
2	Leppe Barat	1,64	Leppe Barat	Leppe Barat	Banggae Timur
3	Sirindu	4,23	Sirindu	Sirindu	Pamboang
4	Banua	5,80	Banua	Banua	Malunda
5	Pangali Ali	8,79	Pa'leo Pa'leo Tobandaq	Pangali Ali	Banggae
Kewenangan Provinsi					
6	Totoli	13,36	Deteng-Deteng Passarang Moloku	Totoli	Banggae
7	Baru	14,32	Camba Utara Teppo Teppo Barat	Baru	Banggae
8	Baurung	11,77	Tamo Tamo Dhua Pangale	Baurung	Banggae Timur
Kewenangan Pusat/Nasional					
9	Rangas	25,20	Rangas Pabesoang, Tammalassu, Rangas Timur	Rangas	Banggae
10	Galung	16,46	Galung Selatan Galung Tengah Galung Utara	Galung	Banggae
11	Labuang	16,70	Binanga Labuang Tg. Batu Timur Tg. Batu Barat Tangnga Tangnga Parappe	Labuang	Banggae Timur
12	Bonde	25,41	Kampung Baru Rea-Rea Butungan Bonde-Bonde Tappa Banua Soppeng Jawa Alle-Alle Luaor	Bonde Utara Bonde Utara Bonde Utara Bonde Utara Bonde Bonde Bonde Bonde	Pamboang

No	Nama Kawasan/ Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi		
			RT/RW/Lingk.	Kelurahan	Kecamatan
13	Somba	16,00	Somba Utara Somba Selatan Somba Tenggara	Mosso	Sendana
14	Malunda	23,00	Kalorang Barat Kalorang Kalorang Selatan Sesende Dhua Sesende Malunda Dhua Malunda Karewaca Tammaende	Lamungan Batu	
Total Luas		**184,13**			

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene, Tahun 2025.

d. Backlog Perumahan

Kementerian PUPR menyebutkan, pengertian backlog merujuk pada jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Dalam istilah properti, backlog pada perumahan merupakan kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk angka rumah yang tidak laik huni. Hal ini mencakup unit-unit perumahan yang harus dibangun untuk mengatasi defisit perumahan yang telah terakumulasi selama beberapa waktu. Backlog perumahan dapat terdiri dari berbagai jenis perumahan, termasuk perumahan sosial, perumahan terjangkau, dan perumahan untuk berbagai tingkat pendapatan.

Berdasarkan data backlog perumahan Kabupaten Majene tahun 2024 yang dirilis oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majene, berjumlah sebanyak 866 unit rumah yang tersebar di 6 kecamatan (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana dan Tubo Sendana). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77.
Rekapitulasi Data Backlog Perumahan
Kabupaten Majene Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah (Unit Rumah)
1	Banggae	Kelurahan Banggae	18
		Kelurahan Galung	7
		Kelurahan Pangali Ali	56
		Kelurahan Baru	34

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah (Unit Rumah)
		Kelurahan Totoli	22
		Kelurahan Rangas	1
		Desa Pamboborang	12
		Desa Palipi Soreang	8
		Jumlah	**158**
2	Banggae Timur	Kelurahan Baruga	13
		Kelurahan Baruga Dhua	9
		Kelurahan Baurung	0
		Kelurahan Labuang	56
		Kelurahan Labuang Utara	4
		Kelurahan Lembang	3
		Kelurahan Tande	1
		Kelurahan Tande Timur	2
		Desa Buttu Baruga	9
		Jumlah	**97**
3	Pamboang	Kelurahan Lalampanua	26
		Kelurahan Sirindu	32
		Desa Pesuloang	8
		Desa Betteng	23
		Desa Tinambung	14
		Desa Adolang Dhua	18
		Desa Adolang	31
		Desa Bababulo Utara	18
		Desa Simbang	17
		Desa Bonde	9
		Desa Buttu Pamboang	20
		Desa Banua Adolang	5
		Desa Balombong	8
		Desa Bonde Utara	21
		Desa Bababulo	9
		Jumlah	**259**
4	Sendana	Kelurahan Mosso	16
		Kelurahan Mosso Dhua	1
		Desa Banua Sendana	7
		Desa Binanga	8
		Desa Bukit Samang	28
		Desa Lalatedzong	10
		Desa Leppangan	1
		Desa Limboro Rambu Rambu	7
		Desa Limbua	6
		Desa Pamenggalan	23
		Desa Pundau	3
		Desa Puttada	37
		Desa Sendana	2
		Desa Tallubanua	2
		Desa Totolisi Sendana	33
		Jumlah	**184**
5	Tammerodo Sendana	Desa Awo	2
		Desa Manyamba	4
		Desa Seppong	7
		Desa Tallambalao	26
		Desa Tammerodo	40
		Desa Tammerodo Utara	6
		Desa Ulidang	6
		Jumlah	**91**
6	Tubo Sendana	Desa Bonde-Bonde	3
		Desa Onang	17
		Desa Onang Utara	8
		Desa Tubo	12

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah (Unit Rumah)
		Desa Tubo Poang	0
		Desa Tubo Selatan	8
		Desa Tubo Tengah	29
		Jumlah	**77**
		Jumlah Total Backlog Perumahan	**866**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene, Tahun 2025.

e. Perkembangan Infrastruktur Perumahan

Dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, pemerintah Kabupaten Majene memandang perlu adanya suatu perkembangan infrastruktur di bidang perumahan. Perkembangan Infrastruktur Perumahan di Kab. Majene Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78.
Perkembangan Infrastruktur Perumahan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	8,00	10,00	11,00	12,00	12,70
2	Persentase Sarana dan Prasarana Umum	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00
3	Persentase Lampu Penerangan Jalan	75,00	85,00	85,00	85,00	85,00
4	Persentase Sarana dan Prasarana Pemakaman	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene, Tahun 2025.

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU tahun 2020 sebesar 8% dan terus meningkat hingga 12,70% pada tahun 2024, ini mengindikasikan bahwa rata-rata perumahan yang ada di Kabupaten Majene sangat belum lengkap PSU yang salah satu paling tinggi penyumbang angka adalah indikator jaringan jalan perumahan yang masih jalan pengerasan/jalan tanah. Berikutnya persentase sarana dan prasarana umum di Kabupaten Majene tahun 2020 sebesar 75% dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 10% atau berada diangka 85%. Begitupun persentase Lampu penerangan jalan umum yang terbangun tahun 2020 sebesar 75% dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 10% atau berada diangka 85%. Berikutnya terkait persentase Sarana dan prasarana pemakaman tahun 2020 sebesar 80% dan pada tahun 2024

tetap berada diangka 80%. Ini disebabkan karena makin kurangnya lahan pemakaman yang ada di Kabupaten Majene khususnya di kawasan perkotaan (Kecamatan Banggae dan Banggae Timur) sehingga kedepan perlu adanya suatu lokasi baru atau pengembangan kawasan pemakaman untuk bisa di manfaatkan seluruh lapisan masyarakat.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Persentase penegakan Perda dan Perkada dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berada diangka 100%. Sedangkan Persentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat (Trantibum) yang dapat diselesaikan serta Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Majene sudah mencapai 100% selama tahun 2020-2024. Gangguan Trantibum merupakan segala bentuk tindakan atau kondisi yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan Trantibum dapat berasal dari berbagai faktor, seperti aktivitas kriminal, konflik sosial, penyalahgunaan narkoba, tawuran, hingga pelanggaran peraturan daerah seperti penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya atau kegiatan usaha ilegal di ruang publik.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka

pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3). Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3 di Kabupaten Majene, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, PKL, dan Perda lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	100	100	100	100	100
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100
4	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	80	90	100	100	100
5	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	80	90	100	100	100
6	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	80	90	100	100	100
7	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	80	90	100	100	100
8	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	60	65	65	70	75

Sumber : BPBD dan Satpol PP Kab. Majene, Tahun 2025.

Perlindungan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, melalui sistem respons cepat terhadap keadaan darurat seperti bencana, salah satunya diindikasikan melalui indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Capaian kinerja Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana dan Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran di Kabupaten Majene sudah sangat baik. Pada tahun 2020 capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 80%. Kemudian terjadi peningkatan sebesar 10% pada tahun 2021, sehingga capaian pada tahun tersebut adalah sebesar 90%. Perolehan capaian ini Kembali meningkat sebesar 10% atau berada diangka 100% hingga tahun 2024. Hal ini

menunjukkan bahwa pasca benca gempa bumi yang melanda Kabupaten Majene membuat OPD penanggungjawab meningkatkan kapasitasnya terhadap penanganan tanggap darurat maupun pasca bencana.

Sementara cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Majene dalam kurung waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) sebesar 75% dan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajmen kebakaran yang ada di Kabupaten Majene berada dikisaran 40-60%, ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana mobil pemadam kebakaran serta tidak berfungsinya secara maksimal mobil tersebut diakibatkan oleh usia kendaraan yang sudah tua serta keberadaan kendaraan tersebut hanya terdapat di pusat kota dan secara kondisi geografis dari Pusat Kota Majene kewilayah kecamatan cukup jauh sehingga jangkauan mobil pemadam kebakaran memerlukan waktu yang cukup jika bergerak kewilayah-wilayah kecamatan di luar Kota Majene.

6. Urusan Sosial

Bidang sosial dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan masyarakat miskin. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sosial yang mencakup perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penanganan masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, dan kesejahteraan anak. Program-program seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi kelompok marginal menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, organisasi sosial, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah.

Dalam konteks pelayanan social di Kabupaten Majene, Keluarga Anak Terlantar (KAT) merujuk pada anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental maupun social, serta berasal dari keluarga yang tidak mampu atau tidak berfungsi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Capaian persentase KAT yang ditangani di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 masih mencapai 60% sehingga bisa menjadi dasar bagi pemerintah dan Lembaga social dalam mengidentifikasi, mendata dan meningkatkan penanganan KAT melalui intervensi atau bantuan yang diperlukan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan kesejahteraan mereka terjamin. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel capaian kinerja urusan social sebagai berikut.

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase KAT yang Ditangani (%)	50	50	50	60	60
2	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Orang)	6	6	6	7	7
3	Persentase PMKS yang tertangani (%)	30	30	40	50	50
4	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	80	80	80	85	85
5	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh pelindungan dan Jaminan Sosial (%)	70	70	70	71	72
6	Persentase Kampung Siaga yang terbentuk	30	35	35	35	40
7	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat (%)	75	75	76	76	76
8	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (%)	75	75	76	77	78

Sumber : Dinas Sosial Kab. Majene, Tahun 2025.

Cakupan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan meliputi berbagai aspek, mulai dari penerimaan dan identifikasi korban, penampungan sementara, pemulangan ke daerah asal, hingga pemulihan trauma dan reintegrasi sosial. Selain itu, penanganan juga mencakup fasilitasi pemulangan dari titik debarkasi ke daerah asal, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tahun 2020-2022 cakupan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan sebanyak 6 orang dan hanya bertambah 1 orang hingga tahun 2024.

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sudah ditangani dengan total jumlah PMKS yang ada. Ini mengindikasikan sejauh mana upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial telah berhasil dilakukan. Kabupaten Majene dari tahun 2020-2021 baru mencapai 30% kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar 40%. Hingga

tahun 2023-2024 capaian kinerja berada pada angka 50%, ini membuktikan bahwa efektivitas program dan kebijakan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Majene belum maksimal sehingga perlu melibatkan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan dan dukungan kepada PMKS agar mereka dapat pulih dan berfungsi sosial secara optimal.

Capaian kinerja terkait Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majene hingga tahun 2024 baru mencapai 85% sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala untuk memastikan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial selalu akurat dan sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data ini menghadapi tantangan karena luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya yang ada. Selanjutnya terkait Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh pelindungan dan Jaminan Sosial di Kabupaten Majene hingga tahun 2024 baru mencapai 72% dari tahun 2020 yang hanya berada diangka 70%, ini munjukkan bahwa rentang tahun 2020-2024 kenaikan capaian indikator ini hanya sebesar 2% sehingga perlu menjadi perhatian kedepan dalam merumuskan program kegiatan dalam perlindungan dan jaminan social di Kabupaten Majene.

Persentase Kampung Siaga yang terbentuk di Kabupaten Majene hingga tahun 2024 sebesar 40%. Jika merujuk jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Majene adalah sebanyak 82 desa/kelurahan sehingga Kampung Siaga yang sudah terbentuk diKabupaten Majene sebanyak 33 desa/kelurahan dan yang belum terbentuk sebagai desa siaga sebanyak 49 desa/kelurahan. Diharapkan desa/kelurahan yang sudah terbentuk menjadi desa/kelurahan siaga aktif. Selanjutnya Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat di Kabupaten Majene hingga tahun 2024 sebesar 76%. Ini disebabkan karena beberapa wilayah yang terjadi bencana sulit diakses akibat kondisi prsarana jalan sehingga memerlukan waktu untuk bisa mencapai wilayah yang sulit diakses di Kabupaten Majene.

Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) meliputi pembangunan, pemugaran, perawatan, dan peningkatan fungsi TMP. Selain itu, pengelolaan TMP juga mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penghargaan dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan, pelestarian nilai kepahlawanan, serta sebagai sarana studi dan ziarah. Jumlah Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Majene sebanyak 1 lokasi yang berada di Kecamatan Banggae. Capaian kinerja indikator ini hingga tahun 2024 sebesar 78% sehingga kedepan perlu dilakukan peningkatan atau perbaikan pada fasilitas dan infrastruktur TMP, termasuk makam, tugu, jalan, bangunan, serta fasilitas pendukung lainnya serta melakukan pemeliharaan rutin dan berkala, termasuk kebersihan, keindahan taman, perbaikan kerusakan, dan lain-lain.

7. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksanaan program kerja urusan tenaga kerja sebagian besar masih terfokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan pada kegiatan *On The Job Training* dan pelatihan kerja berbasis kompetensi PBK.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Majene menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 TPAK berada diangka 68,13% dan menurun di tahun 2024 dengan capaian 63,66, meskipun tahun 2022 sempat meningkat tetapi tahun berikutnya kembali turun. Angka ini menunjukkan bahwa diantara 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 64 orang yang merupakan Angkatan kerja, Ini disebabkan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka yang tidak menunjukkan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2024 diangka 4,19% atau hanya turun sebesar 0,07% dari tahun 2020 atau berada diangka 4,26%. Berdasarkan TPT tersebutdi Kabupaten Majene yang cenderung menurun dari tahun 2020 hingga 2024 yang berarti Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Majene meningkat selama periode tersebut. Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Majene dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2020 capaian sebesar 95,74% meningkat menjadi 96,98% di tahun 2024. Selengkapnya indikator capaian pembangunan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Majene tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81.
Indikator Capaian Pembangunan Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,13	65,35	68,05	64,03	63,66
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,74	96,72	96,89	96,96	96,98
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,26	2,85	2,19	2,64	4,19

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Majene, Tahun 2025.

Jadi dapat dimaknai bahwa tren negatif TPAK merupakan investasi angkatan kerja dalam rangka *re-training* untuk semakin meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja di Kabupaten Majene. Selain itu, patut diperhatikan pula bahwa dalam periode 2020–2024 angka TPT berkurang menjadi sebesar 4,19% dibanding tahun 2020 yang berada di angka 4,26% dan TKK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam membuka kesempatan yang luas untuk bekerja di Kabupaten Majene. Sementara itu kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Majene pada tahun 2020-2024 dan data kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82.
Kinerja Indikator Kunci Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	120.456	122.167	124.014	126.903	135.689
2	Angkatan Kerja (Jiwa)	84.085	81.802	86.354	81.485	82.469
3	Bekerja (Jiwa)	80.506	79.474	84.464	79.335	79.011
4	Pencari Kerja (Jiwa)	234	264	475	494	483
5	Pengangguran Terbuka	3.579	2.328	1.890	2.150	3.458

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Majene, Tahun 2025.

Sedangkan kegiatan Pembinaan Latihan dan Penyuluhan Ketenagakerjaan di Kabupaten Majene periode tahun 2020-2024, berupa On The Job Training (OJT) yang dilaksanakan oleh BLK Kabupaten Majene menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020, Jumlah Peserta Pembinaan Latihan dan Penyuluhan sebanyak 96 orang yang terdiri dari 6 jenis Latihan, meningkat menjadi 160 orang yang terdiri dari 8 jenis Latihan di tahun 2021. Tahun 2022-2023 kembali meningkat diangka masing-masing peserta sebanyak 224 orang dan 352 orang dengan jumlah

jenis Latihan sebanyak 9 jenis dan 14 jenis Latihan. Meskipun tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi jika dilihat perkembangan selama periode 2020-2024 adalah meningkat, Dimana tahun 2024 jumlah peserta sebanyak 224 orang dengan 11 jenis latihan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83.
Kinerja Indikator Kunci Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pekerja pada Perusahaan					
	a. Jumlah Perusahaan	556	567	751	815	816
	b. Jumlah Tenaga Kerja	1.606	1.762	3.455	3.482	3.496
2	Jumlah Peserta Pembinaan Latihan dan Penyuluhan					
	a. Jumlah Jenis Latihan	6	8	9	14	11
	b. Jumlah Peserta	96	160	224	352	224

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Majene, Tahun 2025.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan layanan terpadu bagi anak korban kekerasan, seperti pusat rehabilitasi dan pendampingan hukum, serta bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan masyarakat. Indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota mengukur sejauh mana anak korban kekerasan mendapatkan penanganan dari instansi terkait di suatu kota.

Terdapat 10 indikator capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang harus menjadi strategi seluruh Unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Inklusi Pembangunan harus dilakukan dengan adil dan setara, memberikan peran kepada semua masyaratkat dalam melakukan akses, control, partisipasi dan manfaat. Persentase Lembaga PUG yang Aktif di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang statis Dimana capaian sebesar 60% dari tahun 2020-2024, sehingga perlu peningkatan dan pelaksanaan strategi untuk meyakinkan bahwa isu gender diperhatikan dan diimplementasikan dalam program dan perencanaan jangka menengah untuk 5 tahun kedepan.

Partisipasi perempuan memiliki efek positif pada kualitas pemerintahan daerah. Ruang yang sah dalam lembaga politik telah diperoleh meskipun mereka memiliki status politik yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mengangkat posisi mereka yang terpinggirkan, meskipun mereka masih minoritas. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan, Dimana tahun 2020 sebesar 22,50% meningkat sebesar 15% selama 5 tahun atau sebesar 37,50% pada tahun 2024. Peningkatan secara signifikan juga terjadi di indikator Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender, Dimana tahun 2020 capaian sebesar 13,58% meningkat sebesar 30,36% atau sebesar 43,94% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Majene tetap konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.

Terdapat 5 Indikator dengan capain maksimal 100% dari tahun 2020-2024, berupa Indikator Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Persentase Keluarga dan Anak yang Terlayani, Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar dan Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang di tangani. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2024, seluruh Perempuan dan Anak korban kekerasan yang ada di Kabupaten Majene telah mendapatkan penanganan dari instansi terkait Kabupaten Majene. Penanganan mencakup layanan medis, psikologis, hukum, serta rehabilitasi sosial guna memastikan pemulihan dan perlindungan bagi Perempuan dan anak. Semakin tinggi persentase penanganan, semakin efektif sistem perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Anak merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak-hak khusus sebagai warga negara. Hak-hak ini harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara serta masyarakat. Pemenuhan hak anak sangat penting untuk menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Persentase Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 meninjukkan peningkatan, Dimana pada tahun 2020 capaian

sebesar 15% meningkat sangat signifikan di tahun 2021 menjadi 56,50%, kemudian Kembali meningkat ditahun 2022 sebesar 58,50% dan pada tahun 2023 dan 2024 Persentase Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Majene mencapai 63% dan 71,05%. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Majene sangat serius dalam memperhatikan hak anak sehingga dapat berkontribusi positif, membantu sesama, dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Lembaga PUG yang Aktif (%)	60	60	60	60	60
2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	22,5	25	25	27,5	37,5
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender (%)	13,58	10,33	49,57	43,70	43,94
4	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Keluarga dan Anak yang Terlayani (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100	100	100	100	100
7	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100
8	Persentase Pemenuhan Hak Anak (%)	15,00	56,50	58,50	63,00	71,05
9	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	19,51	19,51	19,51	26,83	32,93
10	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang di tangani (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Majene, Tahun 2025.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pada Tingkat desa/kelurahan terdapat Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak, Dimana capaian dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 19,51% atau sebanyak 16 desa/kelurahan dari 82 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Majene. Kemudian meningkat sebanyak 6 desa/kelurahan atau menjadi 22 desa/kelurahan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 26,83%. Tahun 2024 kembali meningkat diangka 32,93% atau sebanyak 27 desa/kelurahan, Kembali terjadi meningkat

sebanyak 5 desa/kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, wilayah Pemerintah Kabupaten Majene yang belum menjadi wilayah layak anak sebanyak 55 desa/kelurahan, sehingga pada perencanaan jangka menengah kedepan diharapkan akan terjadi Kembali peningkatan wilayah desa/kelurahan layak anak yang akan menggambarkan lingkungan serta keadaan yang nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas.

9. Urusan Pangan

Ketersediaan pangan lumayan besar untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk Kabupaten Majene. Pangan yang dibutuhkan bukan hanya berasal dari sumber daya alam Kabupaten Majene, karena komoditi yang selalu tersedia yaitu kacang hijau dan ubi kayu, sementara untuk komoditi lain banyak didatangkan juga dari daerah tetangga seperti : Polewali Mandar, Mamuju, Pinrang, Sidrap dan dari daerah lain. Oleh karena itu dibutuhkan lagi peran pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan tersebut dengan program-program baru yang pro kepada rakyat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85.
Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Majene
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun (Ton)	71.761	31.134	36.902	28.103	28.832
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	174.407	175.788	177.390	181.360	188.780
3	Persentase Ketersediaan Pangan (Ton/1000 Pddk)	411,45	177,11	208,03	154,96	152,73

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Majene, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama Kabupaten Majene dalam setahun adalah 71.761 ton pada tahun 2020 dan ini merupakan ketersediaan tertinggi untuk periode tahun 2020-2024. Tahun 2021 ketersediaan pangan mengalami penurunan yang cukup tinggi diangka 31.134 ton dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 36.902 ton. Tahun 2023-2024 ketersediaan pangan utama kembali menurun diangka 28.103 dan sempat kembali naik dikisaran 28.832 ton pada tahun 2024. Untuk persentase ketersediaan pangan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.79.
Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten Majene
Tahun 2020-2024

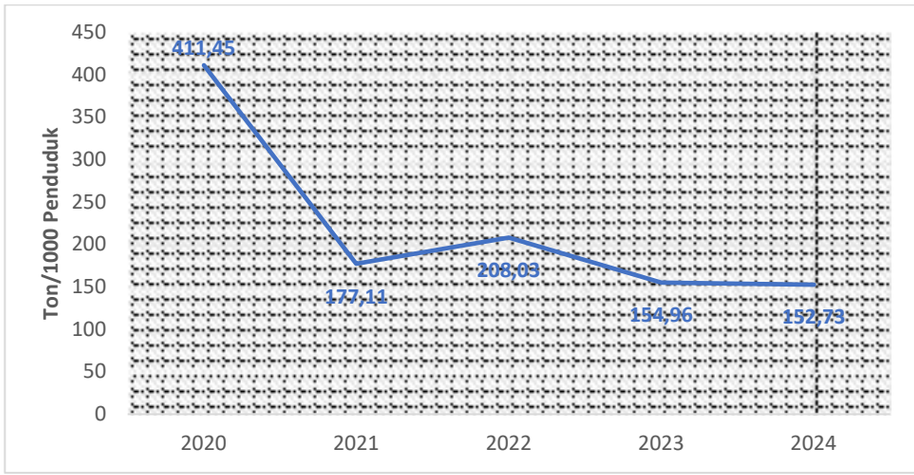

Sumber : Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Majene, Tahun 2025.

Berdasarkan gambar grafik diatas memperlihatkan bahwa persentase ketersediaan pangan dalam 1000 penduduk di tahun 2020 sebesar 411,45 ton per 1000 penduduk pertahun dan menurun hingga mencapai 177,11 ton per 1000 penduduk pertahun. Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan diangka 208,03 ton per 1000 penduduk pertahun dan hingga tahun 2024 kembali turun masing-masing angka 154,96 ton per 1000 penduduk pertahun dan 152,73 ton per 1000 penduduk pertahun. Semakin tinggi persentase cadangan pangan, semakin baik kesiapan daerah dalam menghadapi situasi darurat, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi sepanjang tahun. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan pangan yang efektif menjadi indikator utama dalam menciptakan system pangan yang aman dan berkelanjutan.

10. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan program kerja urusan pertanahan sebagian besar masih terfokus untuk mengidentifikasi dan mensertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Majene guna memastikan kepastian hukum tanah tersebut. Selain itu, program kerja urusan pertanahan juga bertujuan untuk menyediakan tanah/lahan, baik untuk kebutuhan umum ataupun untuk kebutuhan pelayanan publik/pemerintahan. Tujuan lain dari penyelenggaraan urusan pertanahan adalah memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi ditengah masyarakat melalui fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Capaian kinerja pada indikator Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu, Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi dan Persentase Penyelesaian Izin Lokasi adalah sebesar 100% dari tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh luas tanah yang diberikan telah sesuai dengan peruntukannya. Indikator Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tanah garapan secara damai melalui mediasi. Sengketa sering terjadi antara masyarakat, pemilik lahan, dan pihak swasta, sehingga penyelesaian yang adil dan transparan sangat diperlukan. Selengkapnya capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100	100	100	100	100
3	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100	100	100	100	100
4	Jumlah Kasus Tanah Negara	6	6	5	3	3
5	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	6	6	5	3	3
6	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene, Tahun 2025.

Terkait jumlah kasus tanah negara pada tahun 2020-2021 sebanyak 6 kasus, berkurang di tahun 2022 menjadi sebanyak 5 kasus. Untuk tahun 2023 hingga 2024 jumlah kasus tanah negara sebanyak 3 kasus. Adanya kasus tanah negara tersebut membuat pemerintah daerah bergerak untuk menyelesaikan kasus tanah tersebut, Dimana pada setia tahunnya kasus tanah negara yang disengketakan dapat diselesaikan dengan baik melalui mediasi. Pada proses penanganan sengketa melalui mediasi, pemerintah memfasilitasi dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang berlandaskan hukum. Keberhasilan mediasi menunjukkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas, kepastian hukum, serta pemanfaatan lahan yang produktif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan dan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Secara umum, urusan ini ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene. Dinas tersebut, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan-urusan di tingkat daerah. Hal ini termasuk dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	0	0	100	100
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,99	72,83	72,20	75,08	78,76
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	60.33	61,43	61,11	66,00	70,00
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	81.74	88,16	86,90	88,95	92,76
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	58.90	64,04	64,04	65,03	65,63
3	Persentase RTH Terhadap Kawasan Perkotaan Majene	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
4	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Terhadap Izin Lingkungan	100	100	100	100	100
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PPLH	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyelesaian Senketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100
7	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	63,59	67,67	40,92	46,36	28,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Majene, Tahun 2025.

a. Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup

Kajian Lingkungan Hidup (KLH) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana, atau program, serta mencari solusi untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat lingkungan. KLH juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dari periode 2020-2024 adalah berupa dokumen

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang biasa disebut KLHS. KLHS merupakan bagian penting dari KLH yang berfokus pada dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program (KRP) berskala luas dan strategis.

Salah satu capaian yang dihasilkan hanya berada di tahun 2020, 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 100%. Tahun 2020, telah disusun dan diintegrasikan dokumen KLHS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026, selanjutnya pada Tahun 2023 telah disusun dan diintegrasikan dokumen KLHS dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode 2025-2045 dan tahun 2024 kembali disusun dan diintegrasikan dokumen KLHS dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Periode 2025-2029.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan tolak ukur penting dalam menilai kondisi lingkungan suatu daerah. IKLH mencerminkan kualitas udara, air, dan lahan yang menjadi faktor utama dalam mendukung kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah daerah menggunakan IKLH sebagai indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan lingkungan dan menentukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Majene, capaian kinerja yang diperoleh cenderung meningkat. Pada tahun 2020, capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 66,99%, kemudian mengalami peningkatan sebesar 5,84% atau berada diangka 72,83% pada tahun 2021 yang kemudian mengalami penurunan yang tidak terlalu tinggi sebesar 0,63% di tahun 2022, penurunan ini disebabkan oleh variable penilaian berupa Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan capaian. Pada tahun 2023, capaian kinerja yang diperoleh kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka 75,08% dan meningkat kembali di tahun 2024 dengan perolehan capaian kinerja sebesar 78,76% yang merupakan perolehan tertinggi

pada periode tahun 2020-2024. Dengan meningkatkan IKLH, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan alam untuk generasi mendatang.

c. Kondisi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) adalah area terbuka di perkotaan yang ditumbuhi vegetasi seperti taman, hutan kota, dan kebun, yang dirancang untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika bagi masyarakat. RTHP berfungsi sebagai "paru-paru kota", menjaga keseimbangan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup perkotaan.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Majene yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 3 Tahun 2020-2040, menjelaskan bahwa luas Kawasan perkotaan seluas 5.173,09 Ha yang terdiri atas wilayah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur. Dalam Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Majene, luas Kawasan Ruang Terbuka Hijau mencapai 919,51 Ha atau sebesar 21,47% dari total luas wilayah Kawasan perkotaan. Dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, pengembangan RTHP dapat diwujudkan untuk menciptakan kota yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan, sehingga diharapkan Kawasan RTH tersebut tetap dipertahankan sesuai amanat peraturan yang berlaku.

d. Izin Lingkungan

Berdasarkan tabel atas menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator yaitu Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan adalah kepatuhan mereka dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan yang diberikan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan, pencegahan pencemaran, dan pemenuhan standar lingkungan, dengan capaian sebesar 100% dari tahun 2020-2024. Ketaatan ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, mencegah

pencemaran, dan memastikan keberlanjutan usaha. Pemerintah Kabupaten Majene memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait izin lingkungan.

Penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua jalur utama: jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (non-litigasi). Pilihan jalur penyelesaian ini diserahkan pada para pihak yang bersengketa. Berdasarkan penyelesaian sengketa atau kasus tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Majene dari periode tahun 2020-2024 sebesar 100% dalam artian semua kasus tindak pidana lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan baik.

e. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting. Masyarakat memiliki peran dalam pengawasan, pelaporan, dan penyampaian aspirasi terkait isu-isu lingkungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indikator capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PPLH dari tahun 2020-2024 sebesar 100%. Berdasarkan capaian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat di Kabupaten Majene sangat peduli terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran Masyarakat di Kabupaten Majene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada pihak berwenang, memberikan saran, pendapat, dan usulan terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada lingkungan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan kegiatan edukasi lingkungan.

f. Timbulan Sampah

Timbulan sampah di Kabupaten Majene setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sampah yang tertangani setiap tahunnya mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2020 timbulan sampah di Kabupaten Majene mencapai 25.006 ton per tahun dan

mampu ditangani sebesar 15.902 ton per tahun atau sekitar 63,59 %, mengalami penurunan di tahun 2021 dimana timbulan sampah berkurang menjadi 24.294 ton per tahun dan mengalami penurunan sampah yang tertangani sebesar 16.440 ton per tahun atau sekitar 63,44 %. Tahun 2022, timbulan sampah Kembali meningkat di angka 25.463 ton dan hanya mampu ditangani sebanyak 10.419 ton atau sekitar 38,00 %. Hingga tahun 2023 dan 2024 jumlah timbulan sampah Kembali bertambah sebesar 25.899 ton dan tertangani di tahun 2023 sebanyak 12.006 ton atau sebesar 43,40 % sedangkan pada tahun 2024 hanya mampu ditangani sebesar 7.467 ton atau sekitar 28,83%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam periode lima tahun, kinerja pengelolaan sampah mengalami penurunan.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Ini mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan bidang strategis dalam pemerintahan daerah yang berperan penting dalam pencatatan identitas penduduk serta penyediaan data yang akurat untuk keperluan perencanaan pembangunan. Capaian kinerja Urusan Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil meliputi 8 indikator kinerja kunci yang seluruhnya mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Tujuan utama Adminduk adalah memastikan data kependudukan yang akurat dan tertib, seperti akta kelahiran, KTP, KK dan lainnya. Capaian kinerja Urusan Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.88.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kepemilikan KTP	86,48	90,00	100	100	100
2	Persentase Kepemilikan KK	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Kepemilikan KIA	10	15	20	25	30
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	92	85	98	100	100
5	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	91,78	93	95,20	97	100
6	Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	n/a	100	100	100	100
7	Persentase OPD/Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data (MOU) Kependudukan	n/a	10	20	35	50
8	Persentase Ketersediaan Database Kependudukan	n/a	10	20	35	50
9	Persentasi Jenis Informasi yang dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majene, Tahun 2025.

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Pada wilayah Kabupaten Majene tren kepemilikan KTP mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 jumlah kepemilikan berada pada kisaran 86,48% dan meningkat menjadi 90,00% ditahun 2021. Pada tahun 2022 hingga 2024 kembali meningkat dan mencapai angka 100%. Dengan melihat hasil capaian tersebut bahwa di Kabupaten Majene hingga tahun 2024, semua penduduk yang memenuhi syarat di wilayah tersebut telah memiliki KTP elektronik. Ini menunjukkan cakupan kepemilikan KTP elektronik yang ideal, di mana tidak ada lagi penduduk yang belum memiliki KTP elektronik.

Sementara indikator kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte Kelahiran, Dokumen Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak dan Persentasi Jenis Informasi yang dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan yang masing-masing meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Kepemilikan dokumen kependudukan tersebut berarti bahwa seluruh penduduk yang berhak di Kabupaten Majene, dalam suatu wilayah atau kelompok tertentu, telah memiliki dokumen kependudukan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Sementara itu Persentase OPD atau Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data (MoU) Kependudukan dan Persentase Ketersediaan Database Kependudukan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Dimana pendataan di kedua indikator ini dimulai pada tahun 2021 dengan capaian 10%, masing-masing meningkat pada tahun 2022 dengan capaian 20%. Pada tahun 2023 capaian ke dua indikator tersebut mencapai 35% dan akhir tahun 2024 sudah mencapai 50%. Hal ini disebabkan oleh upaya pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan kualitas data kependudukan melalui pembaruan data secara berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data, selain itu peningkatan ini sangat penting karena data kependudukan yang akurat dan terpercaya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai pelayanan publik lainnya di Kabupaten Majene.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu prioritas utama dalam pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Melalui upaya pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada. Dengan desa yang kuat dan berdaya, pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, anggaran, dan kebijakan daerah. Namun, beberapa indikator umum yang digunakan untuk mengukur pemenuhan sarana prasarana perkantoran desa meliputi ketersediaan dan kondisi gedung kantor, perabotan kantor, peralatan kantor, serta fasilitas pendukung lainnya. Capaian di sektor ini hingga tahun 2024 mencapai 95%, Penting untuk dicatat bahwa persentase ini hanyalah salah satu indikator. Kualitas dan keberfungsian sarana prasarana juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, idealnya, persentase yang baik harus disertai dengan kondisi sarana prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan operasional pemerintahan desa.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	95	95	95	95	95
2	Persentase Jumlah Kerja Sama Desa	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	90	90	90	90	90
4	Persentase Desa Berkembang	67,70	67,70	70,90	70,90	70,90
5	Persentasi BUMDesa yang Aktif	30	30	30	25	15
6	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina	100	100	100	100	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	90	90	90	90	90

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Majene, Tahun 2025.

Terdapat dua indikator dari tahun 2020 hingga akhir 2024 mencapai angka persentase 100% yaitu Persentase Jumlah Kerja Sama Desa dan Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina. Jumlah Kerja Sama Desa ini untuk mengukur tingkat kolaborasi antar desa dalam berbagai aspek Pembangunan dan Merujuk pada kesepakatan antara dua desa atau lebih untuk melaksanakan kegiatan bersama, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pemerintahan. Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina di wilayah Kabupaten Majene tersebut telah mendapatkan pembinaan dengan tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan peran LPM dalam pembangunan.

Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi sudah mencapai 90% hingga tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan administrasi tingkat desa di Kabupaten Majene. Ini berarti sebagian besar desa telah berhasil menerapkan sistem administrasi yang baik, meliputi berbagai aspek seperti aspek administrasi umum, aspek kependudukan, aspek keuangan, dan aspek pembangunan. Sedangkan Persentase desa berkembang di Kabupaten Majene telah mencapai angka 70,90% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pembangunan desa di berbagai aspek. Untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif di Kabupaten Majene hingga tahun 2024 adalah sebesar 90% sehingga hamper semua Lembaga desa yang ada di Kabupaten Majene aktif, Ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kegiatan yang tinggi dalam lembaga-lembaga tersebut di tingkat desa.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah urusan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menyelenggarakan program keluarga berencana. Secara keseluruhan, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan upaya terpadu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan capaian kinerja utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2.68	2.69	2.65	2.61	2.55
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	36.3	36.3	36.3	34.1	38.2
3	Angka Pravelensi Kontrasepsi Moderen (mCPR)	68,83	63,27	68,65	61,60	58,72
4	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Moderen	28.96	29.13	30.71	24.77	25.75
5	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed)	9,49	13,09	12,01	13,86	10,87
6	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	71.77	72.14	68.65	61.60	59.88
7	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	77,57	81,32	72,90	76,99	82,33
8	Jumlah PIK Remaja Aktif	59	59	75	77	77

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Majene, Tahun 2025

a. Angka Kelahiran

Secara umum, Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Gambar 2.80.
Perkembangan Angka Kelahiran Total (TFR)
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

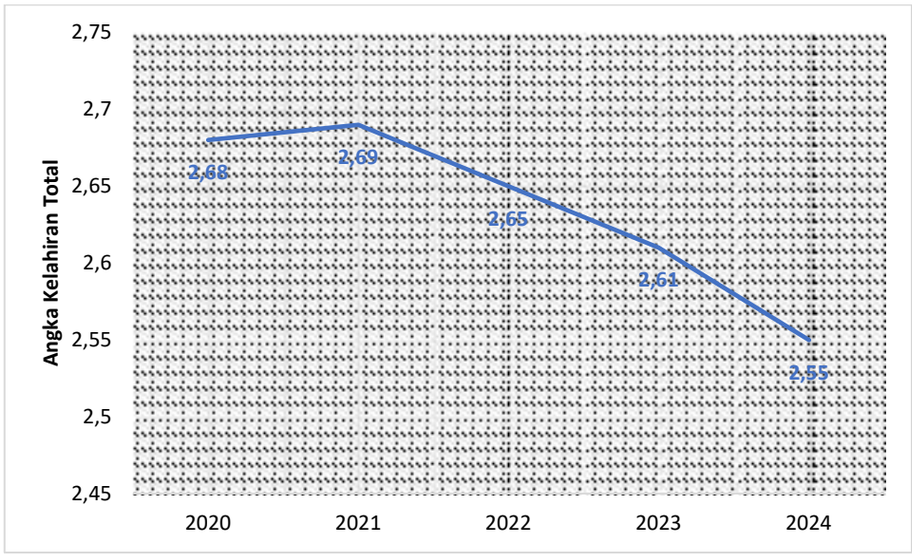

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Majene, Tahun 2025
Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2024
Keterangan : 2024 Data Bersifat Sementara.*

Berdasarkan grafik diatas memperlihatkan bahwa tingkat penurunan TFR Kabupaten Majene dalam kurung waktu 5 tahun terakhir cukup memuaskan. Pada tahun 2020 menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh Wanita yang dalam masa reproduksinya sebanyak 2,68 atau 3 anak sedangkan tahun 2021 turun berada di angka 2,64 atau 3 anak, dan kembali turun di tahun 2022-2023 yang masing-masing berada diangka 2,58 dan 2,53 atau sebanyak 3 anak sadangkan tahun 2024 berada pada angka 2,44 atau sebanyak 3 anak.

Angka Kelahiran Remaja (ASFR) adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu, biasanya usia 15-19 tahun. ASFR 15-19 tahun adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesuburan remaja dan membantu dalam pemantauan serta perencanaan program kesehatan reproduksi remaja. Capaian ASFR Kabupaten Majene tahun 2020-2022 sebesar 36,30 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 2,2 atau berada di angka 34,10. Tahun 2024 kembali menurun diangka 29,48. Ini berarti ada 29 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun di Kabupaten Majene dalam satu tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.81.
Perkembangan Angka Kelahiran Remaja (ASFR)
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

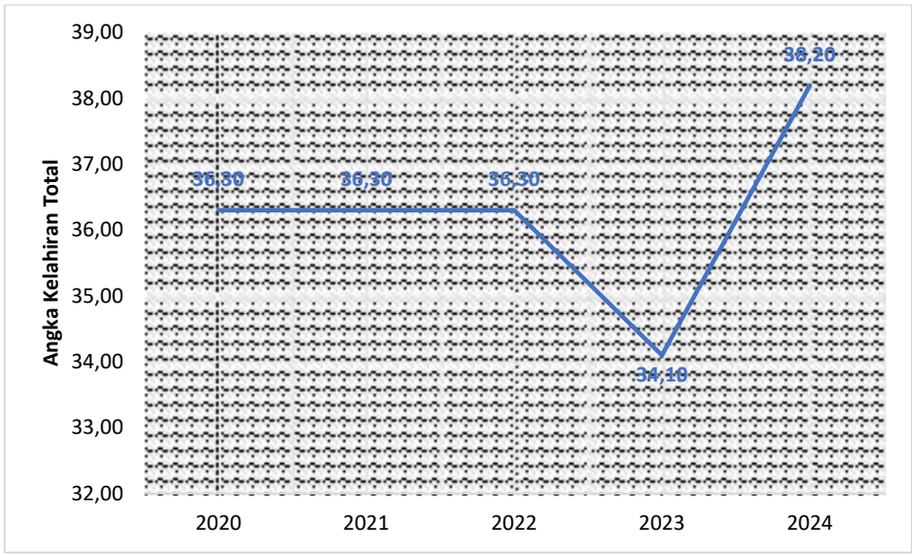

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Majene, Tahun 2025

b. Penggunaan Metode Kontrasepsi

Penggunaan kontrasepsi merupakan cara untuk mencegah kehamilan, baik dengan menunda, menjarangkan, atau menghentikan kehamilan. Kontrasepsi melibatkan penggunaan berbagai metode dan alat yang bekerja dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari menghalangi pertemuan sel telur dan sperma, hingga memengaruhi hormon tubuh.

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) adalah persentase wanita usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada suatu waktu tertentu. mCPR digunakan untuk mengukur penggunaan kontrasepsi modern dalam suatu populasi. Perkembangan mCPR Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2022 sempat mengalami peningkatan. Capaian tahun 2024 sebesar 58.72%.

Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dari total PUS. MKJP adalah metode kontrasepsi yang efektifitasnya jangka panjang, seperti IUD (spiral), implan, MOW (sterilisasi wanita), dan MOP (sterilisasi pria). Angka MKJP Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan Dimana tahun 2020 capaian sebesar 28,96% menurun di angka 25,75% tahun 2024.

Gambar 2.82.
Perkembangan Angka mCPR dan MKJP
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

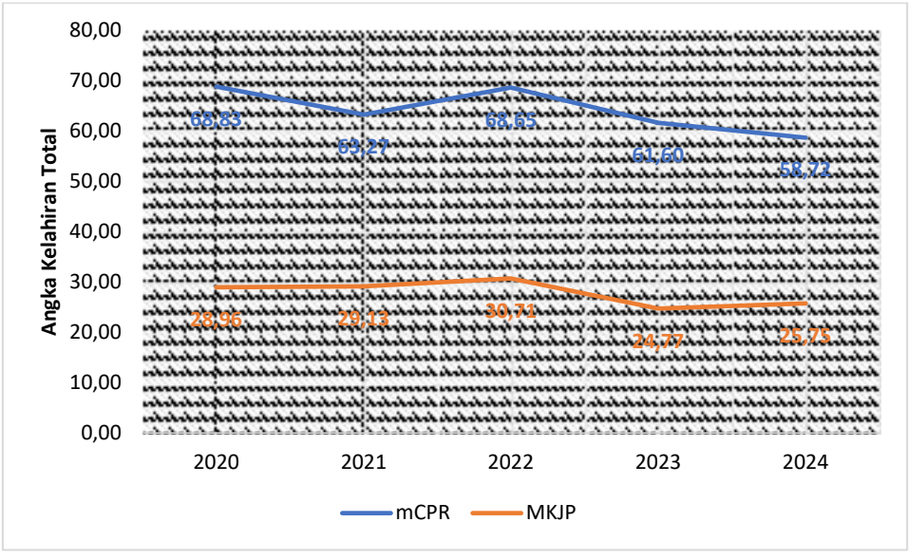

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Majene, Tahun 2025

c. Kebutuhan ber-KB

Kebutuhan ber-KB mengacu pada keinginan pasangan usia subur untuk mengatur kehamilan, baik untuk menunda atau menghentikan kehamilan, namun tidak menggunakan metode kontrasepsi yang tersedia. Ini sering disebut sebagai "unmet need" dalam konteks keluarga berencana. Capaian Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (unmet need) di Kabupaten Majene menunjukkan angka yang fluktuatif, Dimana tahun 2020 capaian sebesar 9,49% dan sempat mengalami peningkatan ditahun 2021 dan 2023 diangka 13% dan kembali mengalami penurunan diangka 10,87% pada tahun 2024. Sedangkan Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 71,77% menjadi 59,88% tahun 2024.

d. Kegiatan Pendampingan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Majene memiliki berbagai kegiatan pendampingan, termasuk pendampingan keluarga, pendampingan remaja, dan pendampingan dalam penanganan kasus anak dan perempuan. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta memberikan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga dan individu.

Salah satu kegiatan pendampingan yang diukur adalah persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 77,57% dan meningkat hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 82,33%. Kegiatan lainnya berupa Jumlah PIK Remaja Aktif yang dibina, Dimana capaian pada tahun 2020-2021 sebanyak 59 remaja dan meningkat di tahun 2022 menjadi 75 remaja. Hingga tahun 2023-2024 jumlah PIK Remaja Aktif mencapai 77 PIK.

15. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, serta berbagai aspek terkait seperti keselamatan, kelancaran, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Secara umum, urusan perhubungan bertujuan untuk memastikan kelancaran mobilitas orang dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat paa tabel berikut.

Tabel 2.91.
Capaian Kinerja Utama Urusan Perhubungan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Layanan Angkutan Darat	82	82	83	85	88
2	Persentase Penurunan Kecelakaan dan Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan (Skor 1-5)	4	4	4	4	3
3	Persentase Jumlah Perijinan (Ijin Trayek, KIR)	75	74	76	77	79
4	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perhubungan	75	78	78	79	81

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Majene, Tahun 2025

Berdasarkan penjabaran tabel diatas, menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Majene dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih bertahan dengan 2 (dua) unit terminal dengan persentase layanan angkutan darat dari tahun ketahun meningkat, dimana pada tahun 2020-2021 persentase layanan angkutan darat sebesar 82% dan meningkat di tahun 2022 atau sebesar 83%, kemudian kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing berada diangka 85% dan 88%. Sedangkan jumlah pelabuhan yang ada di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2040 juga masih bertahan sebanyak 3 (dua)

pelabuhan yaitu Pelabuhan Majene yang terletak di Kel. Banggae, Pelabuhan Passarang yang terletak di Kel. Totoli yang masing-masing terletak di Kecamatan Banggae dan Pelabuhan Palipi yang terletak di Kecamatan Sendana yang kedua pelabuhan tersebut melayani penyebrangan antara pulau Sulawesi ke Kalimantan (Majene-Batu Licin) dengan Tol Laut.

Persentase Penurunan Kecelakaan dan Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan yang memakai indikator penilaian Skor 1-5. Tahun 2020-2023 Persentase Penurunan berada diangka 4 dalam arti masih sering terjadi pelanggaran angkutan umum dan kecelakaan. Tahun 2024, persentase capaian sebesar 3 dalam terjadi pelanggaran lalulintas dan kecelakaan sesekali. Sementara Persentase Jumlah Perijinan (Ijin Trayek, KIR) pada tahun 2020 sebesar 75% dan meningkat sampai tahun 2024 dengan capaian sebesar 79%. Untuk Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Majene pada tahun 2020 sebesar 75% dan meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 81%.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan Kominfo kabupaten/kota dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti Persentase PPID yang aktif, Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi, Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi, Jumlah layanan yang sudah berbasis digital, indeks SPBE dan Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet. Evaluasi terhadap indikator ini membantu pemerintah daerah meningkatkan layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat.

Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Utama Urusan Perhubungan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PPID yang Aktif	0	0	0	30	30
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	40	76	76	83	83
3	Jumlah Sistem Informasi yang sudah Terintegrasi	8	13	15	15	15

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Layanan yang sudah Berbasis Digital	11	16	33	35	35
5	Indeks SPBE	1,00	1,52	2,58	2,56	3,04
6	Persentase Perangkat Daerah sudah tersambung Jaringan Internet	75	76	79	82	82

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Majene, Tahun 2025

Persentase PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang aktif dapat bervariasi tergantung pada badan publik dan periode waktu yang ditinjau. PPID dikatakan aktif jika memenuhi tugas dan fungsinya dalam menyediakan informasi kepada publik, termasuk pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Persentase PPID yang aktif di Kabupaten Majene dimulai dari tahun 2023-2024 dengan capaian 30%, sedangkan tahun sebelumnya PPID masih dinyatakan belum aktif.

Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mengacu pada penyediaan layanan publik melalui platform digital, di mana prosesnya saling terhubung dan menyatu dalam satu alur kerja layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Ini berarti bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dari satu tempat, dan prosesnya dipermudah serta terhubung satu sama lain. Capaian di sektor ini pada tahun 2020 sebesar 40% dan terus meningkat hingga mencapai angka 83% di tahun 2024. Ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Majene sistem pelayanan publik digital yang terintegrasi, semakin berkualitas, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Sistem informasi yang terintegrasi adalah suatu sistem yang menggabungkan berbagai komponen atau subsistem menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan saling terhubung untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks teknologi informasi ini berarti menghubungkan berbagai aplikasi, perangkat, atau proses yang sebelumnya berjalan terpisah, sehingga dapat bekerja dalam satu alur yang teratur. System informasi yang sudah terintegrasi di Kabupaten Majene setiap tahunnya mengalami peningkatan, Dimana tahun 2020 sebanyak 8 sistem informasi dan kemudian meningkat sebanyak 7 sistem informasi atau mencapai 15 sistem pada tahun 2023-2024.

Selanjutnya layanan yang sudah berbasis digital mengacu pada penyediaan berbagai layanan, baik publik maupun privat, melalui platform digital seperti internet dan aplikasi seluler. Capaian di indikator ini pada tahun 2020 sebanyak 11 layanan, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 16 layanan. Tahun 2022 kembali meningkat secara signifikan sebanyak 33 layanan dan tahun 2023-2024 jumlah layanan berbasis digital sebanyak 35 layanan. Digitalisasi layanan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam upaya transformasi digital di Kabupaten Majene. Dengan adopsi teknologi digital yang tepat, diharapkan layanan publik dan privat dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Majene.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa Indeks SPBE Kabupaten Majene dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan peningkatan, Dimana tahun 2024 capaian sebesar 3.04 dengan predikat baik. Hasil tersebut membuat sistem pemerintahan di Kabupaten Majene yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik semakin lebih baik, efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang sudah tersambung dengan jaringan internet adalah rasio antara jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan total jumlah PD. Hasil Kabupaten Majene menunjukkan dari angka persentase 75% pada tahun 2020 OPD yang terhubung meningkat menjadi 82% pada tahun 2024 OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Persentase ini merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat konektivitas perangkat daerah dan ketersediaan layanan publik secara online di wilayah pemerintahan Kabupaten Majene.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) mencakup berbagai aspek pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan pelaku usaha, meningkatkan produktivitas, serta

memperkuat peran koperasi dalam perekonomian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Secara makro koperasi diperlukan, untuk perkoperasian di Kabupaten Majene akan tetap memiliki posisi yang menarik dalam dinamika perekonomian di Kabupaten Majene. Selengkapnya capaian indikator kunci urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	14,56	15,00	16,07	16,96	13,60
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14,56	15,00	16,07	16,96	13,60
3	Persentase Koperasi Aktif	14,56	15,00	16,07	16,96	13,60
4	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	13,39	17,86	22,32	0	0
5	Persentase meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	100	100	100	100	100
6	Pertumbuhan Wirausaha	0,63	0,50	0,65	0,65	1,98
7	Persentase Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kab. Majene, Tahun 2025

Pada Tahun 2020-2024 jumlah persentase pertumbuhan volume usaha koperasi mengalami peningkatan setiap Tahunnya, tetapi Tahun 2024 persentase pertumbuhannya menurun sampai pada 13,60%. Koperasi yang masih aktif dari 5 (lima) Tahun terakhir (2020-2024) datanya sama dengan jumlah persentase pertumbuhan koperasi, begitupun persentase koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan. Koperasi yang memiliki kualitas dari Tahun 2020-2024 adalah 100% dari persentase koperasi yang aktif. Untuk koperasi yang diberikan dukungan dan fasilitas pelatihan hanya 3 (tiga) Tahun yaitu dari Tahun 2020-2022, selanjutnya Tahun 2023 dan 2024 sudah tidak ada lagi yang diberikan dukungan tersebut. Sedanglan persentase pertumbuhan wirausaha mengalami pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2024 yaitu 1,98 % dari 0,63% pada tahun 2020. Sementara UKM yang bermitra untuk ekspor belum ada sampai saat ini.

18. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal merupakan upaya strategis untuk menggairahkan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Penanaman modal mencakup fasilitasi perizinan usaha, promosi potensi daerah seperti sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuannya adalah meningkatkan daya tarik Kabupaten Majene sebagai destinasi investasi yang kompetitif, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, pelaksanaan urusan penanaman modal dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur penunjang investasi, misalnya akses jalan dan utilitas dasar di kawasan strategis. Selain itu, promosi potensi investasi masih kurang gencar di tingkat regional dan nasional, sehingga minat investor dari luar daerah relatif rendah. Proses perizinan yang belum sepenuhnya efisien juga menjadi hambatan, ditambah dengan terbatasnya koordinasi antar instansi dan kurangnya tenaga ahli yang mampu melakukan analisis investasi secara mendalam, yang semuanya memperlambat realisasi investasi.

Meski belum optimal, Kabupaten Majene telah melakukan langkah perbaikan seperti penerapan sistem OSS (*Online Single Submission*) untuk mempermudah perizinan, meskipun masih perlu peningkatan agar lebih ramah pengguna. Pelatihan kapasitas SDM untuk petugas DPMPTSP juga telah digelar guna meningkatkan profesionalisme pelayanan, walaupun hasilnya belum merata. Upaya promosi investasi mulai diperkuat melalui kemitraan dengan sektor swasta, dan perbaikan infrastruktur seperti jalan di beberapa kawasan potensial telah diinisiasi, meski terkendala anggaran. Dengan pengelolaan yang terus diperbaiki, urusan penanaman modal diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PAD, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan), sehingga memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat Majene di masa depan. Adapaun capaian indikator penanaman modal dapat dilihat tabel di bawah:

Tabel 2.94.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Juta)	82.347	61.047	79.801	198.602	549.587
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	27	22	40	46	57
3	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	2.107	1.210	4.545	4.448	5.463
4	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	3	3	1	1	3
5	Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	30	30	21	33	54
6	Prosentase Penerapan Pelayanan Satu Pintu (%)	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyelesaian Izin Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100
8	Persentase Penyelesaian Aduan Masyarakat (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Majene, Tahun 2025

Target Nilai Investasi Rp. 450.000.000.000,- merupakan Target dari Provinsi berdasarkan Berdasarkan surat Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor : 47/A.10/B.5/2025 Tanggal 12 Februari 2025 Perihal Penyampaian Target Realisasi Investasi dan Data Short List Inpeksi Lapangan Tahun 2025. Dimana realisasi investasi Provinsi Sulawesi Barat ditargetkan sebesar Rp. 3.340.000.000.000. dan Surat Dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat No. 000/146/2025 Perihal : Penyampaian Target Realisasi Investasi Kabupaten Tahun 2025 dan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2024 Tanggal 14 Maret 2025.

Izin terbit tahun 2024 sebanyak 5.463 yang terdiri dari : Perizinan Usaha Mikro Kecil sebanyak 3.868, Perizinan Tertentu sebanyak 828, dan Non Perizinan sebanyak 767. Izin terbit tahun ini meningkat sebanyak 1.015 izin dari tahun 2023 sebanyak 4.448 atau sekitar 2,09%. Persentase capaian izin terbit tahun ini mencapai 364,20% dari target izin terbit tahun 2024 sebanyak 1.500 izin. Jumlah PMA selama kurung waktu 5 tahun 2020-2021 sebanyak 3 PMA, dimana di tahun 2022-2023 sebanyak 1 PMA, dan 2024 sebanyak 3 PMA dengan jumlah investasi penanaman modal dalam negeri hingga tahun 2024 sebanyak 54 investor. Sementara persentase penerapan pelayanan, penyelesaian izin dan penyelesaian aduan masyarakat berada di angka 100% sampai tahun 2024.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Peran strategis urusan pemuda dan olahraga mencakup pemberdayaan pemuda, pengembangan olahraga, peningkatan daya saing, serta penguatan karakter dan kepemimpinan. Fungsi utamanya meliputi perumusan kebijakan, pembinaan pemuda dan atlet, penyediaan sarana olahraga, pemberdayaan pemuda, serta pengembangan industri olahraga. Tujuannya adalah menciptakan generasi unggul dan meningkatkan prestasi olahraga daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengembangan pemuda dan olahraga melalui perumusan kebijakan, pemberdayaan pemuda, pembinaan atlet, penyediaan sarana olahraga, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan dorongan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam olahraga dan kegiatan kepemudaan guna menciptakan generasi berkualitas dan meningkatkan prestasi daerah.

Tabel 2.95.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	50	65	68	70	72
3	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Majene, Tahun 2025

Capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga pada 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya untuk satu indikator dan dua diantaranya berada diangka 100%. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peluang dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga daerah di Kabupaten Majene. Indikator-infikator tersebut meliputi Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan dan Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi aktif dalam berbagai

sektor, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan olahraga. Hal ini juga mencakup penyediaan fasilitas dan dukungan bagi pemuda untuk mengembangkan potensi mereka. Capaian indikator ini dari tahun 2020 sampai 2024 sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut menandakan di Kabupaten Majene telah terjadi Peningkatan jumlah wirausaha muda, Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga, Peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai sektor, dan ersedianya ruang terbuka untuk berolahraga.

Pengembangan kapasitas keolahragaan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang olahraga, serta infrastruktur dan sistem pendukungnya. Cakupan ini meliputi pembinaan dan pengembangan atlet, pelatih, serta sumber daya manusia lainnya, termasuk pemandu bakat, tenaga medis olahraga, dan pengelola olahraga. Selain itu, pengembangan kapasitas juga mencakup pembangunan dan perbaikan fasilitas olahraga, serta penerapan sistem manajemen olahraga yang baik. Capaian tahun 2020 mencapai 50% dan meningkat sebesar 65% di tahun 2021. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 68% dan kemudian menjadi 70% di tahun 2023. Akhir tahun 2024 capaian ini sebesar 72%. Dengan melihat capaian tersebut, Kabupaten Majene dari periode 2020-2024 telah mengembangkan kapasitas keolahragaan yang komprhensif, diharapkan dapat tercipta ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan, yang mampu menghasilkan atlet berprestasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Pengembangan kapasitas kepramukaan mencakup pembinaan dan peningkatan kualitas anggota, serta pengelolaan organisasi gerakan pramuka. Ini meliputi pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan anggota, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi pada berbagai tingkatan, mulai dari Kwartir Daerah (Kwarda) hingga Kwartir Cabang (Kwarcab). Capaian indikator ini dari tahun 2020-2024 sebesar 100%. Dengan demikian, pengembangan kapasitas kepramukaan di Kabupaten Majene bahwa gerakan pramuka terus relevan, berkualitas, dan mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan karakter generasi muda dan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam pemberdayaan ekonomi pemuda dan fluktuasi prestasi olahraga, peningkatan keterlibatan pemuda dalam organisasi menunjukkan potensi besar dalam menciptakan generasi muda yang aktif, inovatif, dan berdaya saing. Diperlukan strategi berkelanjutan dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan akses pelatihan kewirausahaan, penguatan komunitas kepemudaan, serta optimalisasi pembinaan olahraga untuk memastikan pertumbuhan yang lebih stabil dan berdampak jangka panjang.

20. Urusan Statistik

Urusan statistik dalam pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Statistik berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data statistik guna mendukung pembangunan di berbagai sektor. Untuk mengukur efektivitas pengelolaan data statistik, terdapat beberapa indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi tolak ukur pencapaian di antaranya adalah persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.

Capaian indikator kinerja kunci Urusan Statistik di Kabupaten Majene menunjukkan hasil yang konstan dan optimal, dengan 100% capaian pada dua indikator utama dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan penggunaan data statistik dalam berbagai aspek perencanaan dan evaluasi pembangunan. Seluruh perangkat daerah telah menggunakan data statistik sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran efektivitas program-program pembangunan. Dengan data yang akurat dan terstruktur, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Keberlanjutan capaian ini juga menegaskan bahwa Kabupaten Majene telah membangun sistem tata kelola statistik yang kuat, memungkinkan penyajian data yang lebih berkualitas dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Ke depan, pemanfaatan teknologi

digital dalam pengelolaan statistik akan semakin penting untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keterbukaan informasi, guna mendukung pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Capaian kinerja Urusan Statistik tahun 2020-2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.96.
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	0	0	0	1,04	2,76
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun perencanaan Pembangunan daerah	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Majene, Tahun 2025

Selanjutnya capaian terkait Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang merupakan ukuran atau gambaran tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral. IPS bertujuan untuk mengukur pencapaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di berbagai tingkatan, mulai dari Kementerian/ Lembaga hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. IPS menggunakan skala tingkat kematangan dari angka 1 hingga 5, dengan setiap angka merepresentasikan poin tingkat kematangan yang berbeda. Indeks Pembangunan Statistik di Kabupaten Majene mulai diukur pada tahun 2023 dengan Tingkat capaian sebesar 1,04 dan meningkat di tahun 2024 dengan nilai peningkatan sebesar 1,72 atau berada diangka 2,76 dengan skala Tingkat kematangan yang lebih baik.

21. Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengamanan informasi, khususnya informasi milik pemerintah daerah, dari segi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya. Urusan ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengelolaan sistem persandian, pengamanan informasi, dan penerapan teknologi keamanan informasi.

Capaian indikator kinerja kunci pada Urusan Persandian meliputi satu indikator yaitu Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah atau tingkat keamanan informasi pemerintah. Tingkat keamanan informasi pemerintah merupakan indikator utama dalam menilai keandalan sistem perlindungan data dan informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta mencegah ancaman siber yang dapat mengganggu pelayanan publik. Keamanan informasi dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Majene mulai diukur pada tahun 2023-2024, Dimana capaian tahun 2023 sebesar 87,5% yang berhasil dipertahankan hingga 2024. Keberhasilan ini mencerminkan penguatan sistem keamanan digital, yang meminimalisir risiko kebocoran data, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	0	0	0	87,50	87,50

Sumber : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Majene, Tahun 2025

22. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan mencakup berbagai aspek pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok masyarakat, hingga pemerintah, dengan tujuan menjaga dan memajukan kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa. Adapun perkembangan indikator kebudayaan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelaksanaan Event, Kegiatan/pertunjukan Budaya	10	3	8	3	3
2	Jumlah Sanggar Kesenian	37	37	45	50	50
3	Jumlah Gedung Kesenian	3	3	3	3	3
4	Jumlah Museum	1	1	1	1	1
5	Jumlah Pusat Kebudayaan/ Taman Budaya	1	1	1	1	1
6	Jumlah Benda Cagar Budaya	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
7	Jumlah Bangunan Cagar Budaya	91	91	91	91	91

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Majene, Tahun 2025

Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin di Kabupaten Majene serta pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan upaya pemerintah Kabupaten Majene untuk mengajak masyarakatnya mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan khususnya kebudayaan asli Mandar. Pada tahun 2020 jumlah pelaksanaan event kegiatan kebudayaan sebanyak 10 kegiatan dan meningkat di tahun 2021 menjadi 10 kegiatan kebudayaan. Berbeda di tahun 2022 hanya menyisahkan 3 kegiatan budaya dan di tahun 2023 kembali meningkat sebanyak 8 kegiatan serta di tahun 2024 turun kembali menjadi 3 kegiatan budaya.

Sementara jumlah sanggar seni dan gedung kesenian dari tahun 2020 sebanyak 36 unit dan 3 unit dan mengalami peningkatan di tahun 2023 yang masing-masing sebanyak 45 unit dan 3 unit dan meningkat kembali di tahun 2024 sebanyak 50 unit dan 3 unit. Sementara untuk jumlah museum dan pusat kebudayaan/taman budaya dari tahun 2020–2024 hanya terdapat 1 unit. Sementara jumlah benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya tahun 2020 sebanyak 1.396 unit dan 91 unit meningkat di tahun 2020-2024 masing-masing sebanyak 1.420 unit dan 91 unit.

23. Urusan Perpustakaan

Untuk membangun layanan yang berbasis inklusi sosial, maka peran perpustakaan harus memiliki suatu informasi dan teknologi untuk membantu memberikan informasi orang di wilayah kabupaten,

kecamatan maupun di wilayah pedasaan yang kurang gemar dalam membaca buku. Secara umum indikator kunci urusan perpusataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	0	0	2,73	6,55	14,20
2	Persentase Perpustakaan yang dibina	5,46	13,67	20,49	21,85	23,22
3	Persentase kelompok Literasi yang dibina	100	100	100	100	100
4	Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar dalam wilayahnya	0	0	0	4	4

Sumber : Dinas Perpusataan dan Kearsipan Kab. Majene, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa persentase perpusatakaan sesuai standar nasional perpustakaan mulai diukur dari tahun 2022 dengan nilai capaian sebesar 2,73% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 6,55% dan kembali meningkatan secara signifikan di tahun 2024 sebesar 14,20%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kualitas baik sarana dan prasarana perpustakaan yang ada di Kabupaten Majene setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup baik. Sementara Persentase Naskah Kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar dalam wilayah Kabupaten Majene, dilaksanaan pada tahun 2023-2024 dengan nilai persentase capaian sebesar 4%.

Selanjutnya di Kabupaten Majene terdapat kegiatan pembinaan perpusataan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (2020-2024), dimana pada tahun 2020 persentase perpustakaan yang dibina berada diangka 5,46%, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 13,67%. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 20,49% dan terus meningkat pada tahun 2023 diangka 21,85%. Tahun 2024 capaian perpustakaan yang dibina berada diangka 23,22%. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan peningkat jumlah perpustakaan yang dibina setiap tahunnya di Kabupaten Majene sehingga pada perencanaan jangka menengah kedepan diharapkan perpusatakaan yang dibina semakin bertambah.

Persentase kelompok Literasi yang dibina di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 mencapai angka 100%. Ini memperlihatkan bahwa semua kelompok literasi yang ada di Kabupaten Majene sudah mendapatkan pembinaan dari Dinas Perpusatakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Majene. Diharapkan kedepan dalam RPJMD, kelompok literasi yang ada masih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas bagi para literasi yang ada dan juga memberikan peluang di masyarakat akan adanya pembinaan kelompok literasi yang baru terbentuk.

24. Urusan Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Secara umum, menurut data capaian yang tersedia berupa persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari tahun 2020-2024 sebesar 100% sedangkan indikator persentase arsip yang didokumentasikan (scan) dari tahun 2020-2024 sebesar 100%, dengan arti bahwa semua dokumen kearsipan telah didokumentasikan dan semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Majene sudah mengelola arsip secara baku.

Untuk persentase penggunaan arsip bersifat tertutup yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 berada diangka 12%. Selengkapnya Capaian urusan kearsipan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Arsip yang didokumentasikan (scan)	100	100	100	100	100
3	Persentase Penggunaan Arsip bersifat tertutup yang dikelola	12	12	12	12	12
4	Jumlah pengelola Arsip yang terlatih	4	4	2	1	1

Sumber : Dinas Perpusataan dan Kearsipan Kab. Majene, Tahun 2025

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut dan perairan, serta pemanfaatan potensi ekonomi di bidang perikanan. Ini termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Di tingkat daerah, urusan ini juga mencakup pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, serta pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil.

Kabupaten Majene berada di daerah pesisir dengan luas perairan mencapai 925,7 Kilometer, menjadikan sektor Perikanan sebagai sektor unggulan didaerah ini. Kriteria Kawasan peruntukan perikanan yang ditetapkan adalah Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya,dan industry pengolahan hasil perikanan; dan/atau Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Majene,terdapat di Kecamatan Banggae timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan tammerodo, Kecamatan Tubo sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda dengan luasan kurang lebih 125 km^2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten Majene, terdapat di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda luas kurang lebih 487,0 Ha untuk budidaya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Perikanan, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB (%)	37,92	37,74	38,35	39,40	40,05
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7,830.0	8,887.5	8,920.6	9,435.9	9.715,1
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	983.7	731.3	634.8	625,9	657,65
4	Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun					
	a. Ikan Selar	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
	b. Ikan Cakalang	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
	c. Ikan Tongkol	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene Tahun 2025.

Sektor perikanan, kehutanan, dan pertanian secara keseluruhan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik secara nasional, regional maupun daerah. Sektor ini berperan dalam penyediaan pangan, perolehan devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Di tingkat nasional, sektor perikanan menyumbang sekitar 2,66% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, di tingkat regional, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Sementara Kabupaten Majene selama periode 2020-2024 kenaikan kontribusi sektor ini sebesar 2,13%. Melihat terjadinya peningkatan di sektor perikanan, kehutanan dan pertanian di Kabupaten Majene membuat sektor ini tetap menjadi bagian penting dari perekonomian daerah di Kabupaten Majene.

Selain itu capaian kinerja terkait urusan kelautan dan perikanan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir (2020–2024) memperlihatkan bahwa jumlah beberapa produksi perikanan tangkap tersebut terus meningkat, terlihat pada tahun 2023–2024 masing masing sejumlah 9.435,9 ton dan 9.715,1 ton. Sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 983,7 ton dan menurun menjadi 731,3 ton di tahun 2021, 634,8 ton tahun 2022 dan 625,9 ton tahun 2023 dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 657,65 ton. Selain dari capaian indikator jumlah produksi tersebut indikator untuk konsumsi ikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2020-2024, dari 42,11 kg/orang/pertahun pada tahun 2020 naik menjadi 43,80 kg/orang/pertahun pada tahun 2024.

Angka konsumsi ikan di Kabupaten Majene pada periode 2020-2024 didominasi oleh ikan tongkol, cakalang, dan selar. Secara spesifik, konsumsi tertinggi adalah ikan selar dengan angka 8,20 Kg/Kapita/Tahun, diikuti oleh cakalang (7,87 Kg) dan tongkol (7,53 Kg), menurut rilis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Data ini menunjukkan preferensi masyarakat Majene terhadap jenis-jenis ikan tersebut dalam konsumsi sehari-hari.

26. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata adalah berbagai kegiatan dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan, pengelolaan, dan promosi sektor pariwisata. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan destinasi wisata, pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, hingga pengaturan usaha pariwisata. Tingkat nasional, urusan pariwisata menjadi tanggung jawab oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat Kabupaten Majene. Berikut capaian kinerja utama urusan pariwisata di Kabupaten Majene.

Tabel 2.102.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Majene
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisata	110.773	133.838	93.065	38.019	34.650
2	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	19	19	23	24	25
3	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi, memiliki TDUP	19	19	225	255	255
4	Daya Tarik Obyek Wisaya	80	80	83	83	83
5	Kawasan Strategis Pariwisata	5	5	8	8	8
6	Destinasi Pariwisata Unggulan	30	30	32	32	32
7	Kelompok Sadar Wisata	21	21	21	24	25
8	Desa Wisata	8	8	6	6	6

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Majene, Tahun 2025

Data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara (wisman) maupun domestik (wisnus) di Kabupaten Majene, mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali tahun 2021 mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 110.773 jiwa dan mengalami peningkatan tahun

2021 menjadi 133.838 jiwa dan merupakan kunjungan wisatawan terbanyak dalam periode 5 tahun. Tahun 2022 kembali menurun di angka kunjungan sebanyak 93.065 jiwa dan tahun 2023 terjadi penurunan kunjungan yang cukup tinggi dengan jumlah kunjungan sebanyak 38.019 jiwa. Akhir tahun 2024 kembali turun diangka jumlah kunjungan sebanyak 34.650 jiwa. Penurunan kunjungan wisatawan dapat berdampak negatif pada ekonomi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor pariwisata. Meskipun mengalami penurunan, sektor pariwisata terus berupaya untuk pulih dengan mengembangkan destinasi wisata baru, meningkatkan promosi wisata dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi indikator positif bagi perkembangan ekonomi kreatif. Hal ini menunjukkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan hukum atas karya dan inovasi mereka, serta potensi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari HKI. Dimana capaian tahun 2020 sebanyak 19 pelaku ekonomi kreatif dan meningkat menjadi 25 pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2024. Sementara Peningkatan jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan terverifikasi merupakan tren positif yang perlu didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Dengan adanya upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas SDM, validasi pelaku usaha, serta dukungan kebijakan yang tepat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Daya tarik objek wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang menjadi alasan wisatawan mengunjungi suatu tempat. Ini bisa berupa keindahan alam, kekayaan budaya, atau hasil buatan manusia yang menarik minat wisatawan. Daya tarik ini menjadi modal utama dalam upaya pengembangan pariwisata. Jumlah daya Tarik wisata di Kabupaten Majene tahun 2020 sebanyak 80 obyek dan hanya meningkat menjadi 83 obyek daya Tarik wisata hingga tahun 2024.

Jumlah Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Majene sebanyak 5 kawasan tahun 2020 dan meningkat menjadi 8 kawasan hingga tahun 2024. Dengan demikian penambahan Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Majene berperan penting dalam pengembangan potensi wisata suatu daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Sedangkan Peningkatan destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Majene dari tahun 2020 sebanyak 30 destinasi unggulan dan meningkat menjadi 32 destinasi unggulan. Peningkatan destinasi pariwisata tersebut mencakup pengembangan infrastruktur, promosi pariwisata, peningkatan kualitas layanan, dan pemberdayaan komunitas lokal. Selain itu, pemerintah juga berupaya mempromosikan daerah-daerah wisata lain dan baru untuk dijadikan sebagai destinasi wisata unggulan yang baru di Kabupaten Majene.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten Majene mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Pokdarwis merupakan kelompok masyarakat yang peduli dan aktif dalam pengembangan pariwisata di Lokasi obyek wisata. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memiliki kesadaran akan pentingnya pariwisata dalam pembangunan daerah. Sementara Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Majene mengalami penurunan Dimana tahun 2020-2021 sebanyak 8 desa, kemudian menurun di tahun 2022-2024 menjadi 6 desa sadar wisata. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan signifikan dalam jumlah kunjungan ke desa wisata, terutama yang memiliki daya Tarik wisata, sehingga kedepan perlu adanya peningkatan kelompok sadar wisata untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk menggali potensi desa atau wilayah mereka dan menjadikannya sebagai ikon ekonomi desa atau wilayah tertentu.

27. Urusan Pertanian

Urusan pertanian mencakup berbagai kegiatan terkait pengelolaan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan komoditas pertanian. Ini melibatkan berbagai subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Urusan pertanian juga mencakup usaha jasa pertanian dan berbagai aspek terkait teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Berikut beberapa indikator capaian dalam urusan pertanian sebagai berikut.

a. Produksi Hasil Tanaman Pangan

Peningkatan produksi tanaman pangan dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta penerapan teknologi modern. Intensifikasi melibatkan peningkatan hasil panen dari lahan yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi memperluas area lahan pertanian. Selain itu, penggunaan teknologi seperti mesin pertanian, pupuk yang tepat, dan pengendalian hama terpadu juga berperan penting. Capaian indikator tanaman pangan sebagai berikut.

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Tanaman Pangan (Ton)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah	13.117	5.376	10.588	8.034	6.552
2	Padi Ladang	15.253	12.158	7.218	6.284	6.907
3	Ubi Kayu	7.713	8.199	7.512	6.695	6.645
4	Ubi Jalar	1.876	1.958	1.086	1.306	1.238
5	Jagung	33.422	3.227	10.280	5.529	7.238
6	Kacang Hijau	180	158	140	157	94
7	Kedelai	90	0	0	0	0
8	Kacang Tanah	110	106	78	98	70

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Majene Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hamper semua jenis tanaman pangan yang ada di Kabupaten Majene mengalami penurunan jumlah produksi selama periode 2020-2024. Penurunan jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Majene dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, serta masalah dalam sistem pertanian itu sendiri. Dampak dari penurunan produksi ini bisa sangat serius, mengancam ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Majene.

b. Produksi Hasil Perkebunan

Produksi hasil perkebunan merujuk pada semua barang dan jasa yang dihasilkan dari usaha perkebunan, termasuk produk utama, turunan, sampingan, dan ikutan. Hasil perkebunan ini dapat berupa produk primer (yang dipanen langsung dari kebun) seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa, serta produk olahan yang dihasilkan dari pengolahan lebih lanjut. Selengkapnya jumlah hasil produksi Perkebunan di Kabupaten Majene sebagai berikut.

Tabel 2.104.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Produksi Perkebunan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Hasil Perkebunan (Ton)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa	8.113	8.495	8.350	7.786	7.748
2	Kopi	177	202	201	160	163
3	Kakao	8.555	8.685	8.679	5.727	5.692
4	Jambu Mete	57	47	31	27	21
5	Pala	7	7	10	9	9
6	Lada	5	5	5	6	7
7	Nilam	0,63	0,63	0,55	1,60	548,01

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Majene Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, juga memperlihatkan terjadinya penurunan produksi hasil-hasil Perkebunan yang ada di Kabupaten Majene, Dimana hasil Perkebunan berupa kelapa tahun 2020 mencapai 8.113 ton dan menurun pada tahun 2024 menjadi 7.748 ton. Diikuti hasil Perkebunan kakao pada tahun 2020 sebesar 8.555 ton menurun menjadi 5.692 ton tahun 2024. Selanjutnya hasil produksi kopi tahun 2020 sebesar 177 ton menurun menjadi 163 ton tahun 2024. Untuk jenis hasil Perkebunan lainnya yang hanya mengalami peningkatan adalah pala, lada dan nilam.

c. Produksi Hasil Tanaman Hortikultura

Produksi hasil tanaman hortikultura merujuk pada hasil panen dari berbagai jenis tanaman yang termasuk dalam kelompok hortikultura, seperti sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan biofarmaka. Produksi ini dihitung berdasarkan luas lahan yang dipanen dan produktivitas tanaman per hektar. Penjabaran hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Majene merupakan hasil tanaman andalan buat hortikultura yang hanya menggambarkan hasil berupa sayuran dan beberapa buah-buahan. Jenis produksi hortikultura tersebut di Kabupaten Majene sebanyak 16 jenis yang menunjukkan hasil produksi yang bervariasi pada 2020-2024.

Tabel 2.105.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Produksi Hortikultura
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Tanaman Hortikultura	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Daun	0	170	0	0	273,22
2	Bawang Merah	2.237	2.363,1	4.732,2	6.168	5.732,5
3	Bawang Putih	7.410	0	0	0	0
4	Bayam	312	563,3	676,4	319	489,6
5	Buncis	0	0	0	22	0
6	Cabai Rawit	1.219	3.473,4	11.449	7.490,3	7.704,3
7	Kacang Panjang	350	918,2	1.197	721,5	389
8	Kangkung	244	564,9	494,5	472	435
9	Ketimun	312	294,5	449,5	305	278,8
10	Melon	49	16	628	62	49
11	Petsai/Sawi	15	38	223	70	54
12	Semangka	12	18,2	361	154	335
13	Terong	215	712,5	1.132	763,5	478,1
14	Tomat	521	1.019,2	4.463,5	2.415	1.461,8
15	Cabai Besar,TW/Teropong	*	1.239,9	9.358,3	7.447,8	4.869,9
16	Cabai Keriting	*	721,3	2.905,2	4.763,8	2.652,4

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Majene Tahun 2025.
*Keterangan : * Data Tidak Tersedia.*

Dari 16 jenis tanaman hortikultura yang di atas, rata-rata menunjukkan angka hasil peningkatan jumlah produksi setiap tahunnya di Kabupaten Majene. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti peningkatan permintaan pasar, pengembangan teknologi pertanian, dan upaya pemerintah dalam mendukung sektor ini. Meskipun ada peningkatan produksi, tantangan seperti fluktuasi harga, perubahan iklim, dan masalah pasca panen tetap perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan sektor hortikultura.

d. Produksi Hasil Peternakan

Secara umum indikator pada komoditi peternakan di Kabupaten Majene terdiri atas sapi, kerbau, kuda, kambing, itik, itik manila, ayam buras, ayam potong, dan ayam petelur. Secara umum indikator pada komoditi peternakan di Kabupaten Majene mengalami tren penurunan selama 5 tahun terakhir (2020–2024), Tren populasi pada semua jenis hewan ternak mengalami penurunan jumlah produksi, meskipun semua jenis peternakan sempat mengalami peningkatan di tahun 2021-2023 akan tetapi Kembali mengalami penurunan jumlah populasi di akhir tahun 2024.

Tabel 2.106.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Produksi Peternakan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Populasi Ternak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	18.508	19.015	19.296	9.637	10.102
2	Kerbau	175	185	192	10	20
3	Kuda	197	203	205	9	9
4	Kambing	72.513	74.004	75.570	19.783	21.738
5	Ayam Buras	194.927	198.823	202.799	31.892	33.956
6	Ayam Potong	608.546	623.758	985.261	355.741	470.000
7	Ayam Petelur	44.780	46.125	46.817	7.788	11.400
8	Itik	14.751	14.750	15.435	760	768
9	Itik Manila	2.744	15.542	2.871	451	456

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Majene Tahun 2025.

Selama periode 2020–2024 ternak yang populasinya terbanyak setiap tahunnya dibandingkan ternak lainnya yaitu kambing, ayam potong dan ayam buras/kampung. Populasi ternak kambing sebanyak 21.738 ekor, ayam potong/ayam pedaging sebanyak 470.000 ekor, ayam buras sebanyak 33.956 ekor. Sedangkan, jenis ternak yang populasinya paling sedikit setiap tahunnya yaitu kerbau dengan jumlah populasi hanya 20 ekor di tahun 2024, disusul jenis ternak kuda yang populasinya sebesar 9 ekor, sedangkan itik manila populasinya sebanyak 456 ekor.

Terjadinya penurunan jumlah populasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pasca pandemi COVID-19 yang berdampak pada permodalan peternak kecil dan posisi tawar mereka, serta faktor lain seperti fluktuasi harga pakan dan permintaan pasar sehingga berdampak pada ketahanan pangan, khususnya pasokan protein hewani, serta mata pencaharian peternak. Meskipun ada tantangan, sektor peternakan tetap menawarkan peluang usaha yang menjanjikan, seperti peternakan kambing, ayam, sapi, dan lainnya di Kabupaten Majene.

28. Urusan Kehutanan

Urusan kehutanan di Indonesia mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Ini termasuk konservasi sumber daya alam, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang

kehutanan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran masing-masing dalam mengelola urusan kehutanan, dengan kewenangan yang terbagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan kehutanan, berdasarkan peraturan perundang undangan, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan terbatas, terutama dalam pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) dan pengelolaan hutan di Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan hal tersebut capaian urusan ini hanya menampilkan kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Sektor ini mencakup Sub-sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Sub-sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub-sektor Perikanan. Sub-sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan Semusim, Tanaman Hortikultura Tahunan, Perkebunan Tahunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Selengkapnya dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 2.83.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

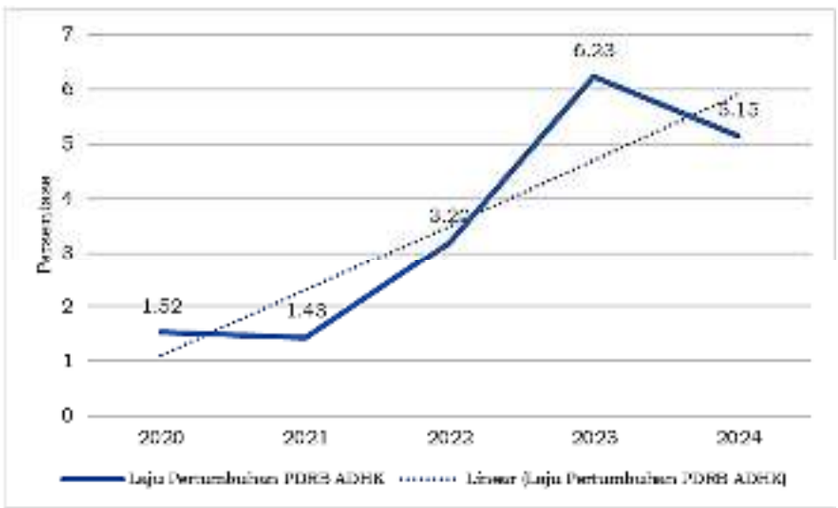

Sumber : BPS "PDRB Kab. Majene Tahun 2020-2024.

Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Majene tahun 2024 secara nominal mencapai 2,60 triliun rupiah. Kontribusi sektor ini terus meningkat dalam lima tahun

terakhir dari 37,92 persen pada 2020 menjadi 40,05 persen di tahun 2024. Seperti periode sebelumnya, Sub-sektor Perikanan masih menjadi kontributor utama dari nilai PDRB sektor ini pada lima tahun terakhir, dengan kontribusi senilai 20,82 persen di tahun 2024. Namun, kontribusi Sub-sektor Perikanan di tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023 karena kenaikan persen kontribusi pada sub-sektor Perkebunan Tahunan dari 8,72 persen menjadi 10,11 persen. Kenaikan kontribusi ini disebabkan karena terdapat kenaikan jumlah produksi pada komoditas kakao di tahun 2024.

Pada tahun 2024, terjadi pelambatan laju pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya, dari 6,23 persen di tahun 2023 menjadi 5,15 persen. Meskipun terjadi perlambatan, angka pertumbuhan ini masih terhitung cukup tinggi dibandingkan angka pertumbuhan di sektor ini selama 2020-2024. Kondisi ini disokong oleh tingginya pertumbuhan pada sub-sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Perkebunan Semusim yang mengalami percepatan pertumbuhan masing-masing sebesar 15,46 dan 22,33 persen. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya produksi hail pertanian dan Perkebunan berupa kakao, cengkeh, dan kelapa dalam serta pembukaan lahan baru untuk produksi nilam selama periode tahun 2024. Secara keseluruhan, pertumbuhan dan nilai PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada di kondisi yang stabil meskipun fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sama halnya dengan urusan kehutanan bahwa urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan kewenangan Tingkat pusat dan provinsi. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah bidang pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Di Indonesia, urusan ini ditangani oleh Kementerian ESDM dan Dinas ESDM di tingkat provinsi. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di sektor energi dan pertambangan.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral didalam kontribusi PDRB Kabupaten Majene terdapat sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan sumbangsi pada laju pertumbuhan PDRB setiap tahunnya. Sektor Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 sub-sektor, antara lain sub-sektor Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, sub-sektor Pertambangan Batubara dan Lignit, sub lapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, dan sub-sektor Pertambangan dan Penggalian lainnya. Pada sektor ini, hanya sub-sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya yang ada di Kabupaten Majene.

Gambar 2.84.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
Sektor Pertambangan dan Penggalian
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

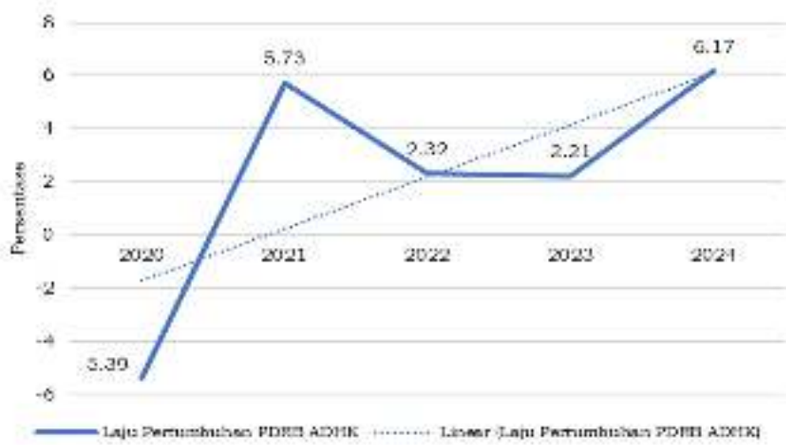

Sumber : BPS "PDRB Kab. Majene Tahun 2020-2024.

Kontribusi pada sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Majene masih mengalami penurunan relative seperti selama lima tahun terakhir. Namun, penurunan kontribusi ini disebabkan karena tinggi kontribusi sektor lain, karena nilai sektor Pertambangan dan Penggalian masih mengalami kenaikan secara rill dalam lima tahun terakhir, dari 89,88 miliar rupiah menjadi 105,53 miliar di tahun 2024. Selain itu, sektor ini kembali mengalami percepatan pertumbuhan dengan nilai sebesar 6,17 persen di tahun 2024. Kenaikan ini terhitung cukup tinggi mengingat terjadinya perlambatan pertumbuhan di tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi seiring dengan tingginya permintaan untuk barang galian pasti kerikil untuk menunjang proyek pembangunan konstruksi di Kabupaten Majene selama tahun 2024. Sektor pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan kesejahteraan.

30. Urusan Perdagangan

Untuk menggambarkan aspek pelayanan urusan pemerintahan pada urusan perdagangan, maka dapat ditunjukkan oleh indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari pendistribusian barang dagangan serta mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam distribusi barang dagangan. Sektor ini juga mencakup perbaikan mobil dan sepeda motor.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi dikisaran 11 persen selama lima tahun terakhir, dengan kontribusi sebesar 730,09 miliar rupiah di tahun 2024. Angka ini masih menjadikan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor terbesar kedua setelah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Gambar 2.85.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

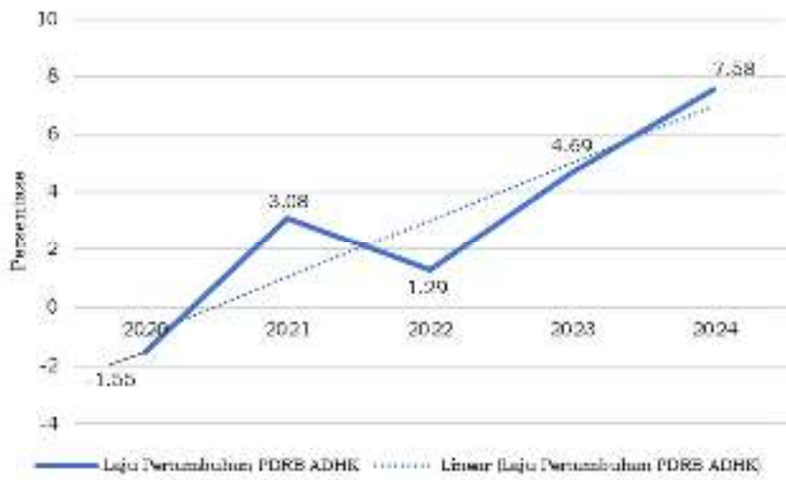

Sumber : BPS "PDRB Kab. Majene Tahun 2020-2024.

Secara umum, terdapat tren positif pada laju pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020,

pertumbuhan sektor ini relatif mengalami kenaikan sampai dengan 2024, sehingga mengalami percepatan pertumbuhan senilai 7,58 persen di tahun 2024. Percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan pada sektor ini didukung oleh pertumbuhan pada sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan adanya peningkatan pada aktivitas perdagangan secara umum. Peningkatan aktivitas ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan juga peningkatan aktivitas ekonomi di tahun 2024. Sub-sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor, dan Reparasinya juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan ini didukung dengan peningkatan jumlah sepeda motor yang terjual, sehingga meningkatkan aktivitas reparasi kendaraan.

Sementara jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Sarana perdagangan itu meliputi pasar, took, kios dan warung. Jumlah pasar dari tahun 2020-2024 sebanyak 27 pasar, sedangkan took dari tahun yang sama sebanyak 17 toko. Untuk jenis kios dari tahun 2020 sebanyak 1.043 toko dan mengalami peningkatan sebanyak 1.053 toko di tahun 2024. Sedangkan jumlah warung dari periode 2020-2024 sebanyak 88 warung. Sementara capaianlain di kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Majene mencakup indikator utama yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin meningkat dari 97,17% pada 2020 menjadi 100% pada 2021 dan bertahan hingga 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas regulasi serta kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perizinan, yang berkontribusi pada tertib administrasi dan kepastian hukum dalam sektor perdagangan.

31. Urusan Perindustrian

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 263,432 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 373,128 miliar rupiah atau sekitar 5,74 persen terhadap PDRB Majene pada tahun 2024. Kontribusinya bertambah sebesar 0,46 persen selama lima tahun terakhir berdasarkan harga berlaku. Sedangkan laju pertumbuhan sub-sektor ini cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Setelah mengalami percepatan pertumbuhan yang cenderung tinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 11,66 persen, laju per tumbuhan industri ini sedikit melambat pada angka 6,04 persen di tahun 2024.

Selama lima tahun terakhir, pergerakan laku pertumbuhan Industri Pengolahan cenderung fluktuatif, namun tetap dalam tren percepatan pertumbuhan. Terjadi percepatan pertumbuhan di tahun 2021 selepas Covid-19, kemudian laju pertumbuhan Kembali melambat dan kembali naik di tahun 2023. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan sektor ini didukung oleh sub-sektor Industri Makanan dan Minuman; Industri Tekstil; Industri Furnitur; dan Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional dengan masing-masing pertumbuhan subsektor bernilai 9 persen, 7 persen, 8 persen, dan 18 persen. Kenaikan yang tinggi pada sub-sektor ndustri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional terjadi karena meningkatknya produksi minyak asiri sebagai efek dari melimpahnya produksi nilam di tahun 2024.

Gambar 2.86.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Majene 2020-2024

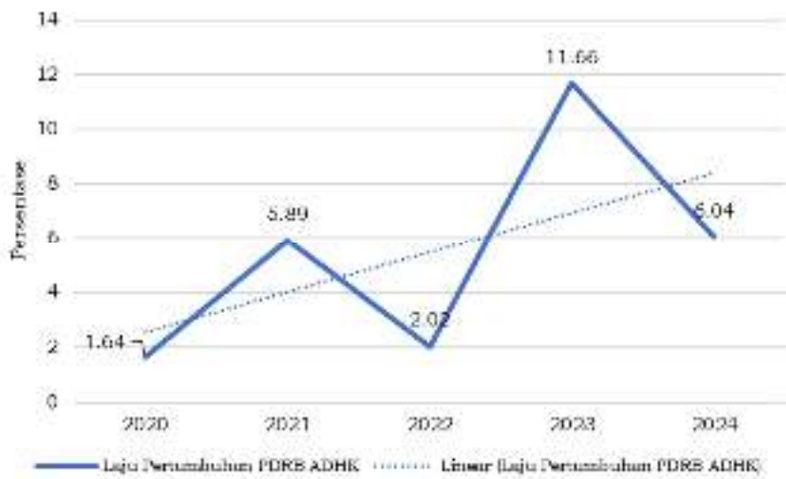

Sumber : BPS "PDRB Kab. Majene Tahun 2020-2024.

32. Urusan Transmigrasi

Urusan transmigrasi di Kabupaten Majene, seperti halnya di daerah lain, melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program transmigrasi. Ini termasuk penataan pemukiman transmigrasi, penyediaan lahan dan infrastruktur, serta pembinaan dan pendampingan transmigran. Dinas yang menangani urusan transmigrasi di tingkat kabupaten adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Kawasan transmigrasi di Kabupaten Majene, khususnya yang direncanakan, adalah Kawasan Transmigrasi Maulta (Malunda, Ulumanda, Tameroddo). Rencana ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Majene, yang menempatkan ketiga kecamatan tersebut sebagai pusat kawasan transmigrasi. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru dan pioner bagi wilayah lain di Majene, dengan potensi sumber daya lahan yang cocok untuk pengembangan. Capaian kinerja indikator kunci urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	30	40	60	30	70
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	40	40	40	40	40
3	Persentase Transmigrasi yang Dibina dan Diberdayakan	30	50	20	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Majene Tahun 2025.

Program transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Majene adalah program pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil program nasional yang memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah lain yang kurang padat, dengan tujuan pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk. Capaian kinerja utama Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan pada tahun 2020 sebesar 30% kemudian meningkat menjadi 40% tahun 2021 dan 60% pada tahun 2022. Meskipun tahun 2023 program transmigrasi Kembali menurun diangka 30%, tetapi tahun 2024 program transmigrasi mencapai 70%. Melihat hasil capaian ini, menandakan program pemerintah Kabupaten Majene sudah memenuhi target sesuai peraturan yang berlaku.

Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang di Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 baru mencapai angka 40%, sehingga kedepan, demi mendukung program nasional pemerintah daerah harus focus kepada revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada untuk menjadikannya sebagai daerah pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Majene. Sementara, Persentase Transmigrasi yang

dibina dan diberdayakan di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Majene tahun 2020 sebesar 30% dan meningkat menjadi 50% di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 dinas terkait Kembali mengadakan pembinaan dan pemberdayaan sebesar 20% dari total masyarakat transmigrasi yang ada. Sementara tahun 2023-2024, Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak mengalokasikan anggaran terhadap pembinaan dan pemerdayaan, karena disebabkan oleh adanya kegiatan refocusing di hamper seluruh OPD Kabupaten Majene.

33. Unsur Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah (Setda) merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana. Setda juga memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) adalah pimpinan di Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kunci yang termuat dalam unsur secretariat daerah, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108.
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kematangan Organisasi	n/a	n/a	65,69	62,16	61,19
2	Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	100	100	100	100	100
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	100	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitasi layanan Kesra	82	85	80	80	90
5	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan/diterbitkan	91	96	96	97	98
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	93	93	93	96	97
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
8	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	82	85	80	80	90

Sumber : Sekretaris Daerah Kab. Majene Tahun 2025.

Indeks kematangan organisasi merupakan alat untuk mengukur tingkat kematangan (*maturity*) suatu organisasi dalam menjalankan berbagai proses dan fungsi. Ini membantu organisasi memahami sejauh mana mereka telah berkembang dalam hal efisiensi, efektivitas, dan

kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Indeks ini sering digunakan sebagai peta jalan atau kerangka kerja untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Indeks ini mulai dihitung pada tahun 2022-2024, sehingga capaian tahun 2020-2021 tidak tersedia.

Tahun 2022 capaian indeks kematangan organisasi berada diangka 65,69% dan menurun ditahun 2023 sebesar 3,53% atau dengan capaian sebesar 62,16%. Tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 0,97% atau berada diangka capaian sebesar 61,19%. Penurunan Indeks Kematangan Organisasi menunjukkan bahwa organisasi mengalami penurunan dalam kesiapan dan kemampuannya. Ini bisa berarti bahwa organisasi menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, proses, atau teknologi, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerjanya.

Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan ukuran seberapa lengkap data yang disajikan dalam LPPD dibandingkan dengan indikator-indikator yang ditetapkan. Ini menunjukkan sejauh mana data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah telah terpenuhi. Berdasarkan data capaian bahwa dari periode tahun 2020-2024 capaian berada diangka 100%. Ini berarti bahwa semua data indikator yang diperlukan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) telah terpenuhi, dengan persentase 100%. Ini menunjukkan bahwa semua aspek kinerja dan informasi yang relevan dalam LPPD telah terisi dengan lengkap dan akurat.

Persentase fasilitasi kerjasama daerah mengacu pada ukuran seberapa efektif suatu daerah memfasilitasi atau mendorong terjalinnya kerjasama dengan pihak lain, baik itu dengan daerah lain, instansi pemerintah, maupun pihak swasta. Persentase ini bisa dihitung dari jumlah kerjasama yang berhasil difasilitasi dibagi dengan total potensi kerjasama yang ada, atau dengan indikator lain yang relevan. Seperti halnya indikator sebelumnya bahwa capaian indikator ini dari tahun 2020-2024 mencapai 100%. Berarti bahwa seluruh target fasilitasi kerjasama daerah telah tercapai di Pemerintahan Kabupaten Majene. Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam memfasilitasi kerjasama antar daerah telah berhasil mencapai hasil yang diinginkan.

Persentase fasilitasi layanan Kesra (Kesejahteraan Rakyat) adalah ukuran seberapa efektif layanan kesejahteraan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ini mengindikasikan sejauh mana program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat telah berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Untuk capaian selama 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif, Dimana tahun 2020 capaian sebesar 82% dan meningkat di tahun 2021 sebesar 85%. Tahun 2022-2023 capaian Kembali menurun diangka 80% dan Kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 dengan capaian sebesar 90%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi baik dari sisi penyediaan layanan maupun penerimaan layanan oleh masyarakat sehingga capaian berfluktuasi terhadap persentase fasilitasi layanan Kesra merupakan hal yang wajar dan dapat dipahami. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi program Kesra secara berkala untuk memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Persentase produk hukum yang ditetapkan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah (Setda) sangat bergantung pada kebijakan internal dan tidak ada angka pasti yang berlaku secara umum. Namun, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja bagian hukum Setda biasanya terkait dengan jumlah dan jenis produk hukum yang dihasilkan, serta kualitas produk hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut bahwa capaian indikator ini pada tahun 2020 sebesar 91% dan meningkat hingga mencapai 98% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa 98% dari target atau rencana yang ditetapkan dalam produk hukum tersebut telah berhasil dicapai atau dilaksanakan.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan mengacu pada sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut tercapai. Efektivitas ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, Dimana tahun 2020-2022 capaian sebesar 93% kemudian meningkat menjadi 96% pada tahun 2023 dan 97% pada tahun 2024. Capaian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mencapai tujuannya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar target atau tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan telah berhasil dicapai.

Tingkat kematangan UKPBJ mengacu pada penilaian kapabilitas UKPBJ dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, diukur melalui beberapa level. Level kematangan ini menunjukkan sejauh mana UKPBJ telah mengelola proses pengadaan, mulai dari inisiasi hingga terintegrasi. Pada tahun 2020-2021 capaian berada di level 2 (Terkelola) dengan arti bahwa UKPBJ mulai memiliki proses yang terkelola, namun belum terukur dan terkendali. Tahun 2022-2024 mengalami peningkatan 1 level atau berada di level 3 (Terkelola dan Terukur) dengan artian bahwa UKPBJ memiliki proses yang terkelola dan terukur, namun belum terintegrasi.

Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan mengacu pada seberapa baik kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks pembangunan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Efektivitas administrasi pembangunan juga berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul selama implementasi. Capaian ini mengalami peningkatan jika dilihat dalam periode 2020-2024, Dimana capaian tahun 2020 sebesar 82%. meskipun pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan diangka 80%, akan tetapi pada tahun 2024 kembali meningkat secara signifikan diangka 90%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan tersebut dianggap sangat efektif, dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%. Ini berarti bahwa mayoritas tujuan dan target yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut telah tercapai.

34. Unsur Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandate oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dengan fungsi mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD.

Tabel 2.109.
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat DPRD
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tidak Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda	0	73,68	50,00	8,33	57,14
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Majene Tahun 2025.

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikatakan tepat waktu jika telah disahkan sebelum tahun anggaran dimulai, yaitu paling lambat tanggal 30 November. Berdasarkan capaian indikator kunci pada secretariat DPRD menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2023 capaian berada dilevel tepat waktu sedangkan pada tahun 2024 capaian berada dilevel tidak tepat waktu. Capaian level tidak tepat waktu tersebut disebabkan oleh APBD tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati sehingga tidak melalui penetapan peraturan daerah.

Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) biasanya mengacu pada jumlah Ranperda yang berhasil disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam suatu periode tertentu, seringkali satu tahun anggaran. Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda, dengan penambahan paling banyak 25% dari jumlah Ranperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, tidak ada perda yang ditetapkan, ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Tahun 2021 capaian berada diangka 73,68% atau sebanyak Propemperda 19 dan ditetapkan 14 perda, kemudian menurun diangka 50% tahun 2022 atau sebanyak Propemperda 16 dan ditetapkan 8 perda dan 8,33% tahun 2023 atau sebanyak Propemperda 12 dan ditetapkan 1 perda. Untuk tahun 2024 mencapai 57,14% atau sebanyak Propemperda 7 dan ditetapkan 3 perda dan 1 perda diluar propemperda.

Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk angka. Namun, DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup berbagai aspek seperti

pelaksanaan Perda, APBD, kinerja pemerintahan, dan pelayanan publik. Pada periode 2020-2024 capaian ini berada diangka 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa DPRD telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap semua aspek penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini berarti tidak ada satupun aspek penyelenggaraan pemerintahan yang luput dari pengawasan DPRD. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa DPRD telah berhasil menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

35. Unsur Perencanaan

Unsur perencanaan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana pembangunan di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Terdapat 5 (lima) indikator urusan perencanaan diantaranya Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD dari tahun 2020-2024 sebesar 100%, berarti bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD maupun Renstra PD telah sesuai dan selaras dengan RPJMD yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan baik dan terarah sesuai dengan visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan.

Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian dan SDA masing-masing mencapai sebesar 100%, sehingga seluruh indikator sasaran pada RKPD untuk semua bidang pada Bapeda Kabupaten Majene telah selaras dengan Renja PD. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan atau ketidakselarasan antara rencana pembangunan daerah dan rencana kerja masing-masing bidang tersebut. Lebih jelasnya, capaian indikator kunci unsur perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.110.
Capaian Kinerja Unsur Perencanaan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	90	87,38	90	95	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	n/a	89,38	90	95	100

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang PPM	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Tahun 2025.

36. Unsur Keuangan

Unsur keuangan daerah mencakup semua aspek pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Indikator kinerja pada unsur keuangan sebanyak 8 (Delapan) indikator yang dapat dilihat pada tabel capaian berikut ini.

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Unsur Keuangan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Juta)	326.675	325.970	348.775	305.886	336.888
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	0	0	88,38	86,72	68,38
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	106,24	94,01	90,98	94,31	95,96
4	Persentase Penurunan SILPA	-49,09	384,06	-78,25	4,30	-42,95
5	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0,72	-1,71	-1,37	5,91	-2,66
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,41	9,35	8,47	9,90	10,27
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (%)	n/a	n/a	n/a	67,76	65,32

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene Tahun 2025.

Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Dana Transfer Umum (TKD) memiliki batasan maksimal 30% dari total belanja APBD. Ini berarti pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai selain tunjangan guru melalui TKD, dengan batasan tersebut. Capaian pada tahun 2020 sebesar Rp. 326.675.379.480,50 dan

mengalami penurunan tahun 2021 menjadi Rp. 325.970.108.405,00. Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan diangka Rp. 348.775.283.690. hingga tahun 2024 capaian disektor indikator ini mencapai diangka Rp. 336.888.439.524,00.

Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik di daerah wajib mencapai minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah/desa. Ini adalah ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024. Tahun 2020-2021 capian sebesar 0%, kemudian pada tahun 2022 capaian mencapai sebesar 88,38% kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 68,38%.

Persentase realisasi anggaran belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (UWPD) merupakan ukuran seberapa banyak anggaran yang telah terserap untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman, dan sosial. Angka ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan dasar di suatu daerah. Capaian tahun 2020 sebesar 106,24% dan mengalami penurunan hingga tahun 2022 dengan capaian sebesar 90,98%. Tahun 2023-2024 kembali mengalami peningkatan masing-masing berada diangka 94,31% dan 95,96%.

Berdasarkan pada penjabaran tabel diatas bahwa Persentase penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) bisa bernilai positif atau negatif. Penurunan SILPA positif menunjukkan bahwa SILPA tahun ini lebih kecil dari SILPA tahun sebelumnya, mengindikasikan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan SILPA negatif menunjukkan bahwa SILPA tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya, bisa jadi karena adanya peningkatan defisit anggaran atau pembiayaan yang belum optimal.

Persentase laporan keuangan tepat waktu adalah indikator yang mengukur seberapa sering laporan keuangan sebuah entitas (misalnya, perusahaan atau instansi) diserahkan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Indikator ini penting karena laporan keuangan yang tepat waktu memberikan informasi yang relevan dan akurat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Data capaian dari tahun 2020-2024

mencapai 100%. Persentase laporan keuangan yang tepat waktu 100% berarti semua laporan keuangan telah diserahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tersebut memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya dalam penyampaian laporan tepat waktu.

Persentase penambahan nilai aset tetap merupakan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan nilai aset tetap suatu entitas dalam periode tertentu. Ini dihitung dengan membagi kenaikan nilai aset tetap dengan nilai aset tetap awal, kemudian dikalikan 100%. Untuk capaian dari tahun 2020-2024 menunjukkan angka capaian yang positif dan negative. Persentase penambahan nilai aset tetap yang negatif menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap, bukan penambahan. Pada nilai positif atau penambahan, adanya kondisi dimana nilai aset tetap menurun dan juga meningkat pada waktu yang sama, yang secara umum tidak mungkin terjadi.

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Secara sederhana, ini adalah perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah, dinyatakan dalam persentase. Capaian pada indikator ini di tahun 2020 sebesar 8,41% dan meningkat menjadi 9,35% di tahun 2021. Kemudian Kembali menurun diangka 8,47% pada tahun 2022 dan Kembali mengalami peningkatan sebesar 9,90% tahun 2023 dan 10,27% pada tahun 2024. Terjadinya peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Terakhir, Indikator Capaian Kinerja Unsur Keuangan berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Majene. IPKD merupakan instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk mengukur seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran serta sumber daya keuangannya. Berdasarkan data bahwa tahun 2020-2022 data tersebut belum tersedia sehingga hanya menyajikan capaian data pada tahun 2023-2024. Capaian tahun 2023 sebesar 67,76% mengalami penurunan capaian sebesar 2,44%

pada tahun 2024 atau berada di angka 65,32%. Penurunan nilai IPKD menunjukkan bahwa ada aspek-aspek dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak berjalan seoptimal tahun sebelumnya. Ini bisa mengindikasikan beberapa hal, di antaranya adalah efisiensi dan efektivitas anggaran berkurang sehingga mempengaruhi capaian tujuan Pembangunan daerah.

37. Unsur Kepegawaian

Urusan kepegawaian daerah adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah. Ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan pengadaan, pengembangan, pengelolaan kinerja, serta pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah instansi yang bertanggung jawab dalam menjalankan urusan kepegawaian di tingkat daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112.
Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	0	100	98,88	86,49	98,60
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	1,30	2,90	2,07	1,81	0,46
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	99,43	98,30	100,00	95,27	44,25
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Balk	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Majene Tahun 2025.

Perencanaan kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sesuai dengan formasi merupakan proses sistematis untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan ASN yang dibutuhkan oleh suatu instansi, dengan mempertimbangkan beban kerja, analisis jabatan, dan peta jabatan, serta memastikan kesesuaian antara kebutuhan dengan formasi yang tersedia. Hingga tahun 2024 capaian Perencanaan kebutuhan ASN yang sesuai dengan formasi berada diangka 98,60%. Ini mengindikasikan bahwa perencanaan kebutuhan ASN telah dilakukan dengan baik, dengan tingkat kesesuaian sesuai antara kebutuhan yang direncanakan dengan formasi yang tersedia. Ini menunjukkan efektivitas perencanaan dalam memenuhi kebutuhan SDM di Kabupaten Majene.

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditingkatkan kompetensinya hingga saat ini masih belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan data dari Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Majene, pemenuhan kompetensi ASN yang ditingkatkan selama periode 2020-2024 baru mencapai 8,54% hingga akhir tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa masih banyak ASN yang perlu ditingkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi standar profesionalitas yang diharapkan di Pemerintahan Kabupaten Majene. Sementara persentase ASN dengan nilai SKP Baik dari tahun 2020-2024 mencapai 100%.

Pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan kompetensinya adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan. Tujuan utama pengembangan karir ini adalah untuk memastikan ASN memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tahun 2020 capaian ini berada diangka 99,43%, menurun pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 98,30%. Kemudian Kembali meningkat diangka 100% di tahun 2022. Periode tahun 2023-2024 capaian Kembali menurun diangka 95,27% tahun 2023 dan 44,25% hingga akhir tahun 2024.

38. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Majene mencakup upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan formal yang merata, pendidikan nonformal, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Saat ini, Majene memiliki sejumlah sekolah dasar dan menengah, tetapi banyak sekolah di wilayah perdesaan masih kekurangan fasilitas, seperti laboratorium dan akses internet, sementara tingkat putus sekolah tetap menjadi tantangan akibat faktor ekonomi. Program beasiswa dan pelatihan keterampilan bagi pemuda telah diluncurkan oleh pemerintah daerah, namun cakupan dan efektivitasnya masih terbatas oleh anggaran dan kurangnya tenaga pengajar berkualitas.

Dalam RPJMD, Majene menargetkan sistem pendidikan dan pelatihan yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal, dengan harapan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kesiapan tenaga kerja. Program prioritas meliputi pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah di desa-desa terpencil, penyediaan akses internet untuk pembelajaran digital, serta pelatihan vokasi berbasis potensi lokal, seperti pengolahan ikan dan agribisnis. Kolaborasi dengan sektor swasta dan perguruan tinggi untuk menyediakan beasiswa dan magang juga akan diperkuat. Dengan pendekatan ini, Majene berupaya menciptakan generasi yang terdidik dan terampil, mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kompetitif. Selengkapnya capaian kinerja unsur kepegawaian, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113.
Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural	63,15	63,15	66,16	66,16	68,00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3,44	1,20	2,20	6,92	5.93

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Majene Tahun 2025.

39. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Ada 3 (tiga) indikator utama pada unsur penelitian dan pengembangan yaitu Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi, Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan, Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Ditindaklanjuti. Dari semua indikator tersebut pada tahun 2020 sampai 2024 tingkat capaian berada diangka 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.114.
Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	50	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	100	100	100	100
3	Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Inovasi yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penelitian dan Riset Daerah Kab. Majene Tahun 2025.

40. Unsur Pengawasan

Urusan pengawasan merujuk pada kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan, baik di sektor publik maupun swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan peraturan yang berlaku, serta mencapai hasil yang diharapkan. Berikut disajikan capaian kinerja kunci unsur pengawasan sebagai berikut.

Tabel 2.115.
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklajuti	95	95	95	95	98
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Kantor Inspektorat Daerah Kab. Majene Tahun 2025.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Inspektorat Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dilaksanakan dengan baik oleh entitas yang diperiksa, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam memantau dan memastikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut. Berdasarkan data yang ada, dari tahun 2020 hingga 2024 persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan, ini dilihat capaian pada tahun 2020-2023 mencapai sebesar 95%, kemudian meningkat menjadi 98% hingga akhir tahun 2024. Capaian tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) mencapai 98% merupakan angka yang tinggi dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggapi temuan pemeriksaan BPK. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti.

Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tingkat kematangan atau keberhasilan penerapan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang meliputi efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan. Penilaian maturitas SPIP dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah, yang terdiri dari lima unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Instansi Pemerintah Kabupaten Majene yang berhasil mencapai Level 3 dalam maturitas SPIP dari tahun 2020-2024, berarti instansi tersebut telah berhasil menerapkan SPIP dengan baik, mencapai tujuan pengendalian secara efektif, dan mampu menjaga keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan.

Untuk capaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Majene dari tahun 2020-2024 berada pada Level-3. Ini menunjukkan bahwa APIP Pemerintah Kabupaten Majene berada pada level "Terintegrasi". Ini berarti APIP tersebut sudah mampu melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dari suatu kegiatan, serta memberikan konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada semua OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Reformasi birokrasi baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sasaran pelaksanaan program kerja urusan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan persentase aparatur pengawasan yang ditingkatkan kompetensinya serta meningkatnya persentase objek pengawasan yang dimonitoring dan dievaluasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Kinerja rutin pengawasan, Pengawasan prioritas nasional, Pengawawalan reformasi birokrasi, Penegakan integritas dan Peningkatan kapabilitas APIP.

41. Unsur Pemerintahan Umum

Pemerintahan umum mencakup penyelenggaraan administrasi publik yang memperkuat persatuan sosial, menjaga stabilitas politik lokal, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi untuk mendukung pembangunan daerah. Saat ini, Majene memiliki keberagaman budaya dan agama yang menjadi kekuatan dalam menjaga harmoni sosial, namun tantangan seperti potensi konflik berbasis isu politik lokal dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan masih ada. Pemerintah daerah telah meluncurkan dialog antar agama, musyawarah desa, dan sosialisasi pendidikan politik, tetapi keterbatasan sumber daya dan minimnya literasi politik di kalangan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, menghambat efektivitas program tersebut.

Dalam RPJMD, Majene menargetkan pemerintahan yang inklusif dan stabil, mampu memperkuat kesatuan bangsa melalui tata kelola yang transparan dan proses politik yang demokratis. Program prioritas meliputi penguatan forum komunikasi lintas komunitas untuk mencegah konflik sosial, pelatihan literasi politik bagi pemuda dan kelompok perempuan, serta pengembangan platform digital untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebijakan daerah. Pemerintah juga akan memperluas pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dan desa untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Dengan langkah ini, Majene berupaya menciptakan pemerintahan yang mendukung harmoni sosial, stabilitas politik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang berlandaskan kesatuan bangsa. Berikut disajikan capaian kinerja utama unsur pemerintahan umum di Kabupaten Majene sebagai berikut.

Tabel 2.116.
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Majene Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Konflik Sara yang ditangani	95	97	97	100	100
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	0	0	0	0	87
3	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Serta Budaya Politik	85	85	89	83	90

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80	70	85	89	90
5	Persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penigkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	95	95	95	100	95

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Majene Tahun 2025.

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan fondasi penting bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengelolaan yang efektif dan efisien tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga memastikan optimalisasi pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peran sentral dalam mengelola keuangan untuk mencapai kemandirian dan kemajuan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Hak pemerintah Daerah, salah satunya antara lain kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola beberapa jenis Pajak. Bila Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengelolaan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai maka Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola bebepa jenis pajak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022. Misalnya Pemerintah Provinsi mengelola Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan lainnya sedangkan Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan mengelola PBB-P2, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame dan lainnya.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Sebagai contoh Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terkait dengan jalan: untuk Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat, Penyelenggaraan jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan Jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Kab./Kota. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan Daerah
4. Pengeluaran Daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Keuangan daerah sebagai komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan menganalisis gambaran pengelolaan keuangan daerah akan menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa mendatang. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan/stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Majene. Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

2.5.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran. APBD merupakan instrumen penting untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai denga tanggal 31 Desember yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dengan memperhatikan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. APBD mencakup tiga komponen utama:

1. Pendapatan Daerah: Sumber pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan pendapatan lainnya.
2. Belanja Daerah: Digunakan untuk pembiayaan operasional, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik.
3. Pembiayaan Daerah: Berfungsi untuk menutup defisit atau mengelola surplus anggaran.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan komponen utama beserta rincian masing-masing kurun waktu tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.117.
Realisasi APBD Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	77.635.559.065,86	85.125.586.865,16	70.563.315.736,67	87.794.782.521,37	92.468.261.209,07
	B. Pendapatan Transfer	746.334.344.336,00	776.740.189.291,00	761.573.409.624,00	798.281.176.782,00	808.307.617.973,00
	C. Lain-lain Pendapatan Darah Yang Sah	98.965.444.000,00	48.827.690.000,00	1.227.000.000,00	1.002.000.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**922.935.347.401,86**	**910.693.466.156,16**	**833.363.725.360,67**	**887.077.959.303,37**	**900.775.879.182,07**
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	649.634.257.499,26	674.939.454.057,13	663.261.505.807,25	667.164.512.064,80	729.988.167.952,60
	B. Belanja Modal	135.117.752.573,46	83.749.169.412,51	89.753.902.940,00	103.848.841.602,00	69.228.942.593,18
	C. Belanja Tak Terduga	27.109.843.503,00	3.329.446.706,00	2.633.036.163,00	1.977.663.278,00	1.330.046.402,00
	D. Belanja Transfer	115.322.882.706,61	115.883.420.087,00	102.225.932.872,00	112.024.733.374,00	103.764.358.365,00
	JUMLAH BELANJA	**927.184.736.282,33**	**877.901.490.262,64**	**857.874.377.782,25**	**885.015.750.318,80**	**904.311.515.312,78**
	SURPLUS/DEFISIT	**(4.249.388.880,47)**	**32.791.975.893,52**	**(24.510.652.421,58)**	**2.062.208.984,57**	**(3.535.636.130,71)**
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	15.162.636.829,89	7.689.544.823,42	37.256.712.081,94	8.138.537.864,07	8.371.132.827,40
	B. Pengeluaran Pembiayaan	3.194.722.600,00	3.119.000.000,00	4.620.000.000,00	1.725.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**11.967.914.229,89**	**4.570.544.823,42**	**32.636.712.081,94**	**6.413.537.864,07**	**8.371.132.827,40**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**7.718.525.349,42**	**37.362.520.716,94**	**8.126.059.660,36**	**8.475.746.848,64**	**4.835.496.696,69**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Berdasarkan Laporan Pertanggung jawaban APBD, perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Majene periode Tahun 2020 – 2024 dari sisi pendapatan daerah mengalami pertumbuhan fluktuatif, dimana realisasi pendapatan pada tahun 2020 mencapai 922,93 Miliar rupiah terus menurun hingga pada tahun 2022 tercatat sebesar 883,36 Miliar rupiah selanjutnya naik kembali pada tahun 2023 sebesar 887,08 Miliar rupiah hingga tahun 2024 tercatat sebesar 900,78 Miliar rupiah. Sama halnya realisasi belanja daerah dalam 5 tahun terakhir juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 realisasi belanja daerah mencapai 927,18 Miliar rupiah, hingga pada tahun 2022 tercatat menurun sebesar 857,87 Miliar rupiah. dan kembali naik pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencatat realiasi belanja sebesar 904,31 Miliar rupiah.

Dari sisi pembiayaan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Realisasi pembiayaan pada tahun 2020 sebesar 11,96 Miliar rupiah, kemudian menurun pada tahun 2021 dengan nilai realisasi sebesar 4,57 Miliar rupiah, dan kembali meningkat pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 32,64 Miliar rupiah dan kembali menurun pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 6,41 Miliar rupiah. Pada tahun 2024 pembiayaan daerah kembali meningkat menjadi 8,37 Miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Majene kurun waktu tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.87.
Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

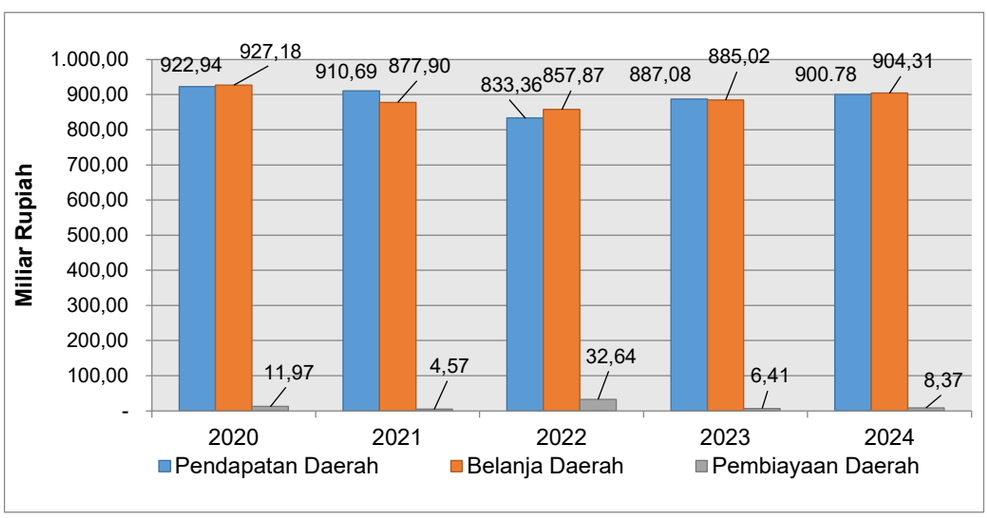

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

A. Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan. potensi daerah. aspek keadilan dan kepatutan. serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer:

   Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari dana yang dialokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan sumber pendapatan pada periode 2020-2024 dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.88.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024 Berdasarkan Sumber Pendapatan

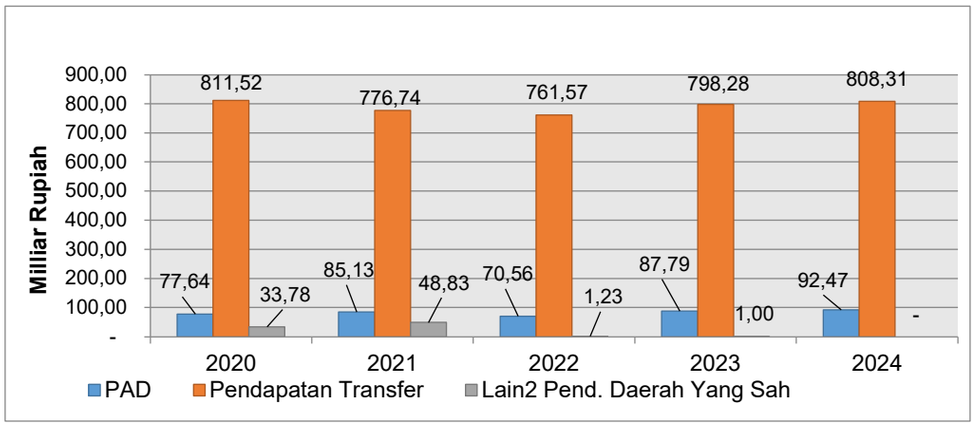

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan realisasi pendapatan di Kabupaten Majene periode Tahun 2020 – 2024 berdasarkan sumber pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan fluktuatif cenderung meningkat, dimana realisasi pendapatan pada tahun 2020 mencapai 77,64 Miliar rupiah meningkat tahun 2021 dengan realisasi sebesar 85,13 Miliar rupiah, pada tahun 2022 tercatat menurun dengan nilai realisasi sebesar 70,56 Miliar rupiah selanjutnya terus naik tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar 87,79 Miliar rupiah dan tahun 2024 tercatat realisasi sebesar 92,47 Miliar rupiah.

Sama halnya dengan realisasi pendapatan yang bersumber dari pendapatan Transfer dalam 5 tahun terakhir juga mengalami fluaktuatif. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan transfer mencapai nilai sebesar 811,52 Miliar rupiah yang juga merupakan pendapatan transfer yang paling tinggi dalam kurun lima tahun terakhir. pada tahun 2021 tercatat menurun dengan realisasi sebesar 776,74 Miliar rupiah. dan kembali turun pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 761,57 Miliar rupiah, di tahun 2023 naik dengan mencatat realisasi sebesar 798,28 Miliar rupiah dan di tahun 2024 kembali naik dengan mencatat realiasi sebesar 808,31 Miliyar rupiah.

Dari sisi pendapatan bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami pertumbuhan fluktuatif namun cenderung menurun. Realisasi pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 mencatat realiasi sebesar 33,78 Miliar rupiah, kemudian naik pada tahun 2021 dengan nilai realisasi sebesar 48,83 Miliar rupiah, dan terus menurun pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 1,23 Miliar rupiah, tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar 1,00 Miliar rupiah. Pada tahun 2024 dengan realiasi nihil.

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan dalam APBD digunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian. semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Sulawesi Barat dan pinjaman daerah.

Tabel 2.118.
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	**>25-50**	**Konsultatif**
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	**>75-100**	**Delegatif**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

1. Pola hubungan instruktif. dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif. yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif. peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif. yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Untuk melihat tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer pada APBD Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119.
Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Majene Periode 2020-2024

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Daerah
1	2020	77.635.559.065,86	746.334.344.336,00	10,40%
2	**2021**	**85.125.586.865,16**	**776.740.189.291,00**	**10,96%**
3	2022	70.563.315.736,67	761.573.409.624,00	9,27%
4	**2023**	**87.794.782.521,37**	**798.281.176.782,00**	**11,00%**
5	2024	92.468.261.209,07	808.307.617.973,00	11,44%

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Berikut dapat kami gambarkan tren rasio kemandirian Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.89.
Tren Rasio Kemandirian Kabupaten Majene 2020-2024

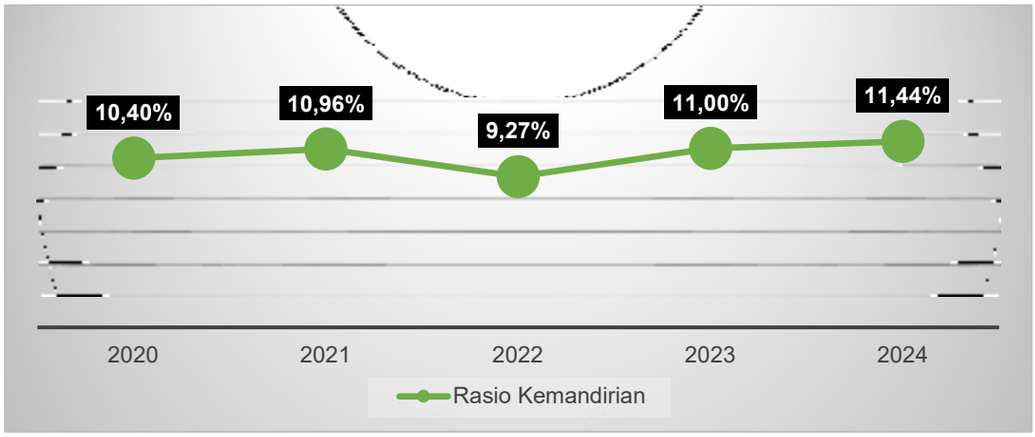

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene berada di persentase 11,00 persen tergolong ke kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian berkisar di antara 9 persen-12 persen. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Majene dengan Pemerintah Pusat dalam hubungan keuangannya memiliki pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dan kecenderungan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan karakteristik lokal daerah termasuk rendah. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2024. sedangkan rasio kemandirian terendah terjadi di tahun 2022.

B. Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas. yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance-Based Budgeting*) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Berikut perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 2.90.
Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan belanja di Kabupaten Majene periode Tahun 2020 – 2024 berdasarkan pertumbuhan fluktuatif, dimana realisasi Belanja pada tahun 2020 mencapai nilai realisasi sebesar 812,57 Miliar rupiah, selanjutnya menurun drastis pada tahun 2021 ke angka realisasi sebesar 762,02 Miliar rupiah dan kembali tercatat penurunan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 755,75 Miliar rupiah, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan mencatat belanja dengan realisasi sebesar 772,99 Miliar rupiah dan tahun 2024 tercatat realisasi sebesar 800,55 Miliar rupiah.

Sama halnya dengan realisasi transfer dalam 5 tahun terakhir juga mengalami fluaktuatif. Pada tahun 2020 realisasi belanja transfer mencapai 115,16 Miliar rupiah, naik menjadi sebesar 115,88 Miliar rupiah pada tahun 2021 dan mencatat penurunan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 102,23 Miliar rupiah dan tahun 2023 mengalami kenaikan dengan mencatat realisasi sebesar 112,02 Miliar rupiah dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan dengan mencatat realisasi sebesar 103,76 Miliar rupiah.

C. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah mencakup berbagai jenis transaksi keuangan, termasuk:

1. Penerimaan Pembiayaan:

   Semua penerimaan dari kas umum daerah, Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran pembiayaan dilakukan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang misalnya, penerimaan dari pinjaman, penjualan obligasi daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, dan penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan.

2. Pengeluaran Pembiayaan:

   Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah misalnya, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran, sementara pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memanfaatkan surplus atau untuk tujuan lainnya yang ditetapkan dalam APBD.

Realisasi pembiayaan daerah di Kabupaten Majene pada 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif, seperti yang terlihat pada grafik berikut.

Gambar 2.91.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Pemerintah
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

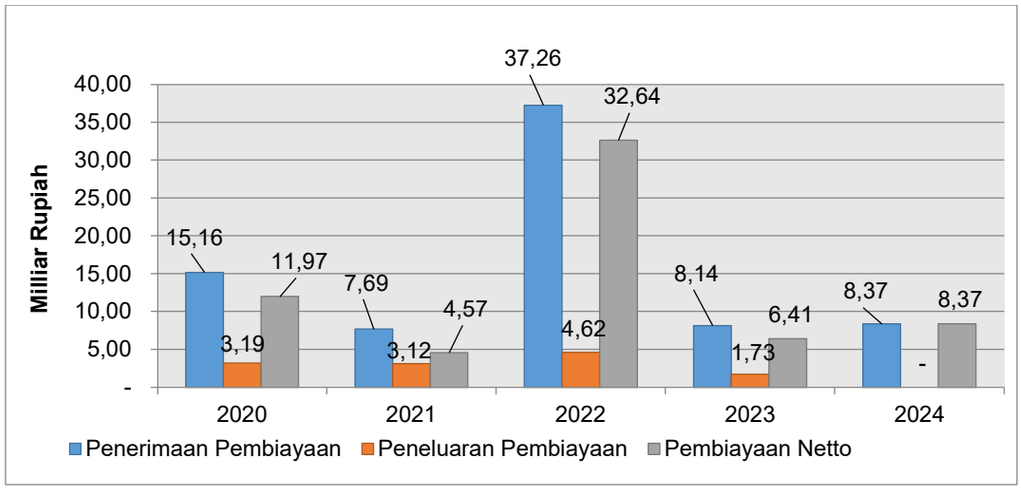

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Majene periode Tahun 2020 – 2024 berdasarkan sumber Penerimaan pembiayaan mengalami pertumbuhan fluktuatif, dimana realisasi pendapatan pada tahun 2020 mencapai realisasi sebesar 15,16 Miliar rupiah menurun di tahun 2021 dengan realisasi sebesar 7,69 Miliar rupiah, pada tahun 2022 tercatat meningkat ke angka realisasi sebesar 37,26 Miliar rupiah yang merupakan penerimaan pembiayaan terbesar sejak lima tahun terakhir, selanjutnya kembali turun di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 8,14 Miliar dan tahun 2024 tercatat realisasi sebesar 8,37 Miliar.

Sama halnya dengan realisasi pembiayaan yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan dalam 5 tahun terakhir juga mengalami fluktuatif cenderung turun. Pada tahun 2020 realisasi pengeluaran pembiayaan mencatat realisasi sebesar 3,19 Miliar rupiah, pada tahun 2021 tercatat menurun dengan realisasi sebesar 3,12 Miliar rupiah. dan kembali meningkat pada tahun 2022 realisasi sebesar 4,62 Miliar rupiah, dan tahun 2023 kembali mencatat penurunan dengan realisasi sebesar 1,73 Miliar rupiah dan di tahun 2024 tidak mencatat 0,00 rupiah yang artinya di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten tidak melakukan penyertaan modal baik Ke Perumda Air Minum Tirta Mandar, Perusda Aneka Usaha Maupun ke Bank Sulselbar.

Dari sisi pembiayaan netto yang merupakan selisih besarnya penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran disimpulkan juga mengalami fluktuatif di tahun 2020 mencatat realisasi sebesar 11,97 Miliar rupiah, di tahun 2021 menurun mencatat realisasi sebesar 4,57 Miliar rupiah, kembali meningkat di tahun 2022 dengan realisasi sebesar 32,64 Miliar rupiah selanjutnya menurun di tahun 2023 mencatat realisasi sebesar 6,41 Miliar rupiah dan di tahun 2024 mengalami kenaikan dengan mencatat realisasi sebesar 8,37 miliar rupiah. Tujuan Pembiayaan Daerah:

1. Menutup Defisit Anggaran:

   Jika anggaran pendapatan daerah (APBD) lebih kecil dari anggaran belanja daerah, maka pembiayaan daerah (terutama penerimaan pembiayaan) digunakan untuk menutup selisih tersebut.

2. Memanfaatkan Surplus Anggaran:

   Jika APBD memiliki sisa lebih (surplus), maka pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembayaran utang, investasi, atau pembangunan infrastruktur.

3. Mengelola Kas Daerah:

   Pembiayaan daerah juga berperan dalam pengelolaan kas daerah, misalnya melalui pinjaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan kas sementara.

2.5.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah sebagai entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset. kewajiban. dan ekuitas.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat. serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan Neraca daerah memuat data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah.

1. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa

datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Pada tahun 2020 nilai total aset daerah Kabupaten Majene mencapai 1,58 Trilyun rupiah dan mengalami perubahan secara fluktuatif setiap tahun hingga mencapai nilai total aset daerah sebesar 1,65 Trilyun rupiah pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,96%.

2. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

   Nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren fluktuatif, yaitu pada tahun 2020 sebesar 14,39 Miliar rupiah, tahun 2020 tercatat 15,63 Miliar rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 19,40 Miliar rupiah, pada tahun 2022 sebesar 57.41 Miliar rupiah. Tahun 2023 kewajiban terus meningkat dengan nilai 57,14 Miliar rupiah dan Tahun 2024 dengan nilai sebesar 56,11 Miliar rupiah dan rata-rata pertumbuhan nilai kewajiban dari tahun 2020 hingga 2024 adalah 20,82%.

3. Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

   Nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2020-2024 menunjukkan nilai kekayaan secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,31%. Pada tahun 2020 tercatat nilai ekuitas sebesar 1,56 Trilyun rupiah, dan meningkat di tahun 2021 sebesar 1,59 Trilyun rupiah, di tahun 2022 menurun dengan mencatat ekuitas sebesar 1,50 Trilyun rupiah, dan kembali meningkat di tahun 2023 dengan nilai ekuitas sebesar 1,62 Trilyun rupiah, pada tahun 2024 kembali turun dengan nilai ekuitas sebesar 1,59 Trilyun rupiah.

Untuk lebih jelasnya terkait neraca daerah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 2.120.
Neraca Daerah Kabupaten Majene Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	16.828.154.461,27	60.526.959.908,91	23.337.047.195,39	30.627.497.984,64	44.471.142.447,85
	B. Investasi Jangka Panjang	10.056.818.696,78	22.582.488.637,83	26.404.489.818,83	58.711.566.210,83	68.784.992.281,67
	C. Aset Tetap	1.548.927.641.329,17	1.522.367.507.310,27	1.501.443.030.038,47	1.590.166.201.673,40	1.547.906.920.646,29
	D. Aset Lainnya	6.961.373.903,34	5.745.240.568,86	7.036.503.759,16	6.312.594.785,16	10.595.796.785,87
2	**JUMLAH ASET**	**1.582.773.988.390,56**	**1.611.222.196.425,87**	**1.558.221.070.811,85**	**1.685.817.860.654,03**	**1.671.758.852.161,68**
	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	15.637.663.582,99	19.331.177.833,82	57.338.342.773,33	57.608.887.592,45	69.521.069.677,33
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	77.469.976,00	77.469.976,00	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	**15.637.663.582,99**	**19.408.647.809,82**	**57.415.812.749,33**	**57.608.887.592,45**	**69.521.069.677,33**
	EKUITAS					
	Ekuitas	1.567.136.324.807,57	1.591.813.548.616,05	1.500.805.258.062,52	1.628.208.973.061,58	1.602.237.782.484,35
3	**JUMLAH EKUITAS**	**1.567.136.324.807,57**	**1.591.813.548.616,05**	**1.500.805.258.062,52**	**1.628.208.973.061,58**	**1.602.237.782.484,35**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.582.773.988.390,56**	**1.611.222.196.425,87**	**1.558.221.070.811,85**	**1.685.817.860.654,03**	**1.671.758.852.161,68**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Perkembangan nilai Aset. Kewajiban. Dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.92.
Grafik Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

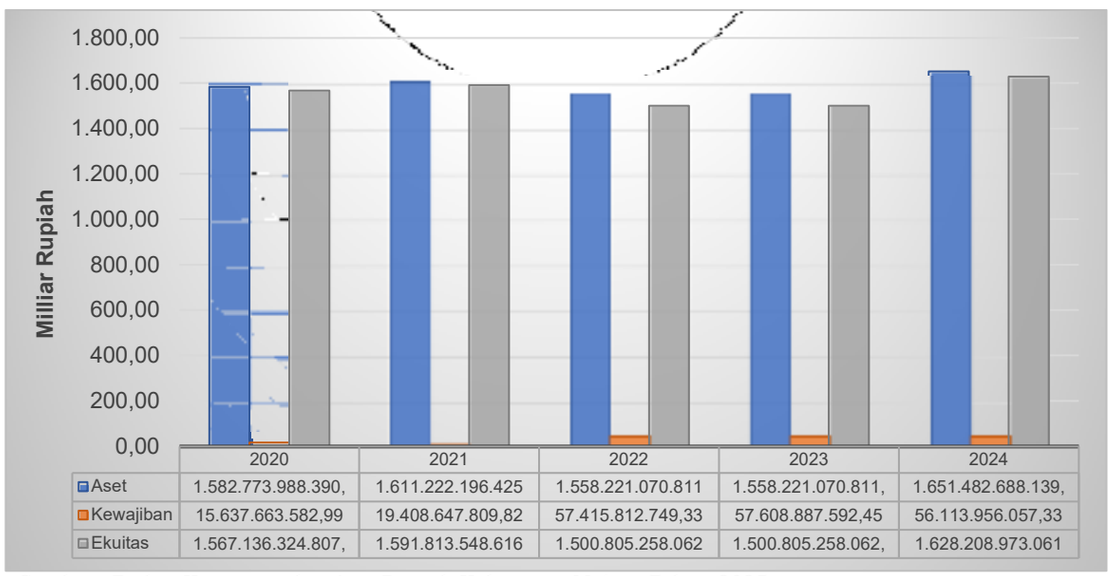

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

A. Aset Lancar

Aset lancar merupakan indikator likuiditas pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang menyebabkan beban atas pengeluaran APBD. Dengan kata lain, indikator likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Adapun tujuan dan manfaat rasio likuiditas secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo.
2. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar (tanpa memperhitungkan, persediaan barang dagang dan asset lancar lainnya.
4. Untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas pemerintah daerah dalam membayar utang jangka pendek.
5. Sebagai alat perencanaan keuangan dimasa mendatang terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka panjang.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan, berikut ini kami uraikan analisis rasio likuiditas Pemerintah Daerah dengan pendekatan rasio lancar (current ratio), rasio cepat (*quick ratio*) dan rasio kas (*cash ratio*).

1. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas. Tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas. Analisis likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi

untuk melunasi utangnya. Rasio ini membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar. Rasio Likuiditas Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir berdasarkan perkembangan aset lancar dan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar. Rasio tersebut dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.121.
Perkembangan Rasio Likuiditas dengan Pendekatan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene 2020-2024

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Lancar (%)
1	2020	16.828.154.461,27	15.637.663.582,99	107,61
2	2021	60.526.959.908,91	19.331.177.833,82	313,11
3	2022	23.337.047.195,39	57.338.342.773,33	40,70
4	2023	30.627.497.984,64	57.608.887.592,45	53,16
5	2024	44.471.142.477,85	69.521.069.677,33	63,97

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2020 berada diposisi 107,61 persen, dan naik menjadi 313,11 persen dan selanjutnta turun drastis di tahun 2022 diposisi 40,70 persen dan Tahun 2024 berada pada 63,97 persen. Rasio ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dimana hanya 53,16 persen, untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.93.
Perkembangan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene 2020-2024

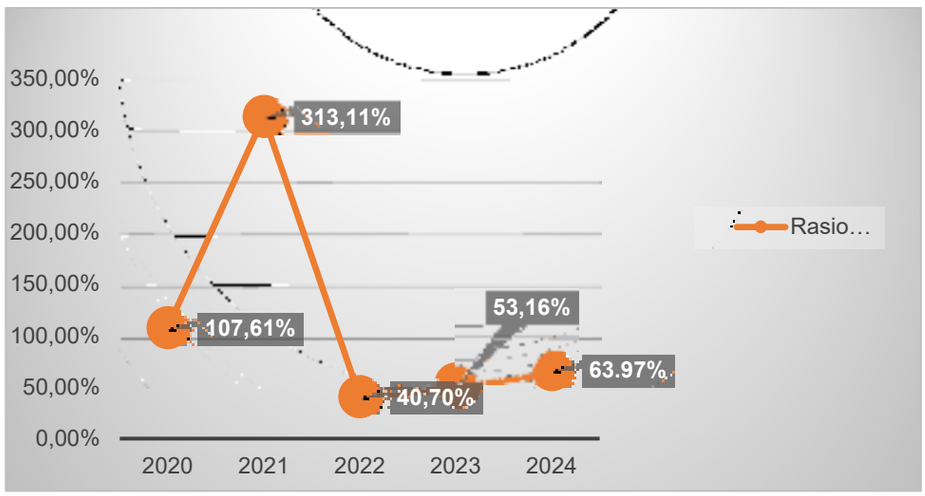

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

2. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan penjelasan lebih lanjut dari Rasio Lancar (*Current Ratio*). Penghitungan Rasio Cepat hanya menggunakan aktiva yang paling likuid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan tidak dapat ditukar dengan kas. Rasio Cepat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang lebih ketat. Rasio Cepat (Quick Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar dikurang persediaan dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.122.
Perkembangan Rasio Likuiditas dengan Pendekatan Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Cepat (%)
1	2020	16.828.154.461,27	7.299.208.487,51	15.637.663.582,99	60,94%
2	2021	60.526.959.908,91	11.919.427.724,40	19.331.177.833,82	251,45%
3	2022	23.337.047.195,39	18.934.770.927,78	57.338.342.773,33	7,68%
4	2023	30.627.497.984,64	18.934.770.927,78	57.608.887.592,45	20,30%
5	2024	44.471.142.477,85	32.108.669.768,82	69.521.069.677,33	17,78%

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan Rasio cepat Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2020 berada diposisi 60,94 persen, dan naik menjadi 251,45 persen dan selanjutnya turun drastis di tahun 2022 diposisi 7,68 persen, tahun 2023 berada pada 20,30 persen dan mengalami penurunan tahun 2024 menjadi 17,78 persen, untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.94.
Grafik Perkembangan Rasio Cepat (Quick Ratio)
Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

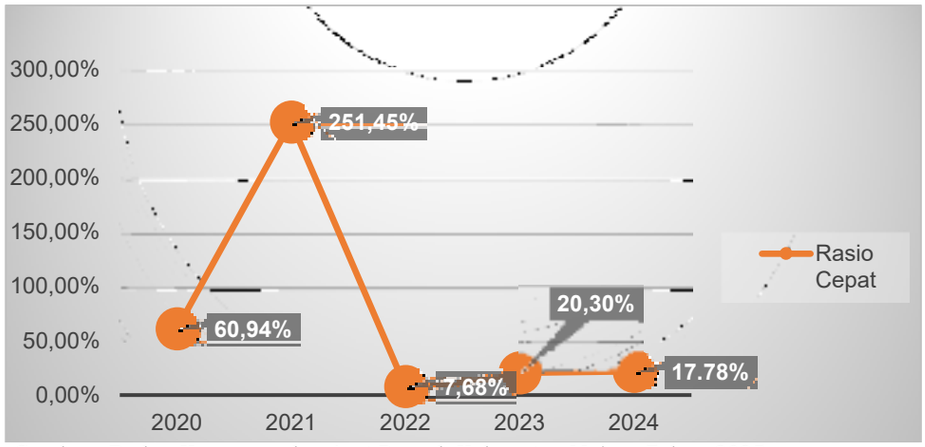

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Berdasarkan grafik tersebut di atas terlihat bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) pada Tahun Anggaran 2024 berada pada 17,78 persen. Sebagaimana pada analisis Rasio Lancar, analisis Rasio Cepat juga menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Majene untuk dapat menyelesaikan kewajiban dengan aset lancar yang dimiliki dan dapat secara cepat dikonversi menjadi kas tergolong sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan analisis Rasio Cepat, maka perhitungan kemampuan penyelesaian kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten Majene cenderung semakin rendah.

Berdasarkan data pada grafik juga dapat disimpulkan bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene tertinggi terjadi pada Tahun anggaran 2021. Sebelumnya pada pendekatan Rasio Lancar (Current Ratio) juga menunjukkan rasio likuiditas tertinggi terjadi pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perhitungan Rasio Likuiditas melalui pendekatan rasio cepat yang lebih ketat. Likuiditas tertinggi tetap tercatat di Tahun 2021.

3. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) adalah cara menghitung likuiditas Pemerintah Daerah yang melibatkan posisi saldo kas Pemerintah Daerah. Penghitungan Rasio Kas hanya menggunakan kas sebagai acuan untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Piutang

pendapatan dan persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan sulit ditukar dengan kas. Rasio Kas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang paling realistis dan efisien. Rasio Kas (*Cash Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar berupa kas dan setara kas dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.123.
Perkembangan Rasio Likuiditas dengan Pendekatan Rasio Kas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020 -2024

No	Tahun	Kas dan Setara Kas (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio Lancar (%)
1	2020	7.718.525.349,42	15.637.663.582,99	49,36%
2	2021	37.371.777.636,94	19.331.177.833,82	193,32%
3	2022	8.301.733.138,52	57.338.342.773,33	14,48%
4	2023	8.480.304.393,60	57.608.887.592,45	14,72%
5	2024	4.849.337.935,69	69.521.069.677,33	6,98%

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan Rasio Kas Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2020 berada diposisi 49,36 persen, dan naik menjadi 193,32 persen dan selanjutnya turun drastis di tahun 2022 diposisi 14,48 persen, tahun 2023 berada pada 14,72 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 6,98 persen, untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.95.
Perkembangan Rasio Kas (Cash Ratio) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

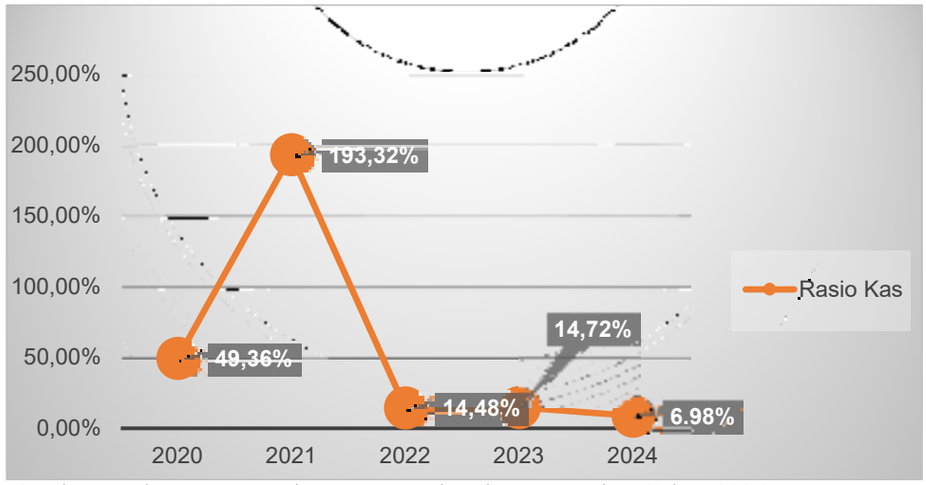

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

B. Kewajiban

Tren Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) Tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam gambar grafik berikut ini.

Gambar 2.96.
Grafik Komposisi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020-2024

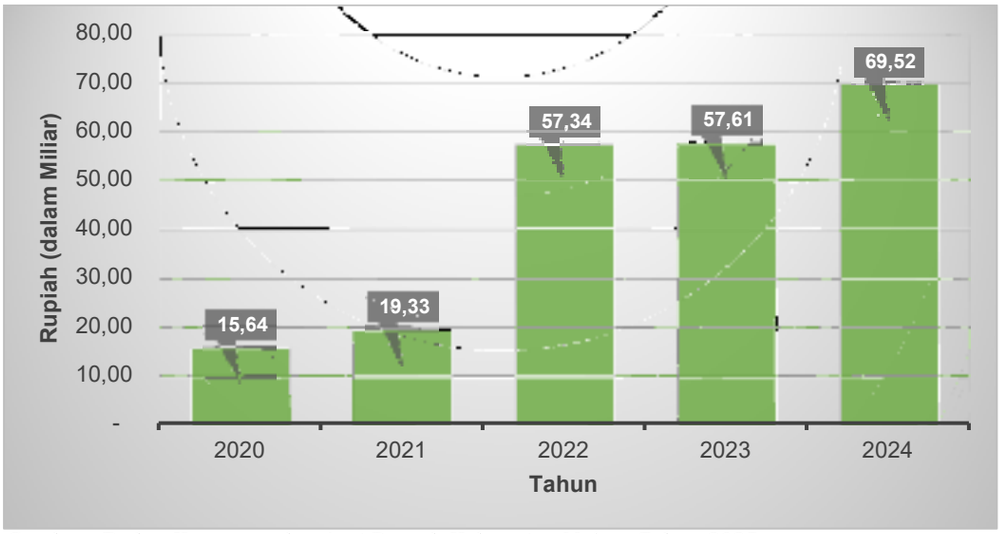

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar. Dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman dalam negeri (obligasi). Pinjaman lembaga internasional. Pinjaman dari pemerintah lain. Atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Karakteristik kewajiban jangka pendek yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang relatif cepat. Maka kewajiban jangka pendek menjadi salah satu indikator dalam analisis laporan keuangan pada aspek solvabilitas.

1. Analisis Rasio Solvabilitas – *Debt to Equity*

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki

pemerintah. Baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva pemerintah dibiayai dengan utang. Artinya. Berapa besar beban utang yang ditanggung pemerintah dibandingkan dengan aktivanya. Rasio solvabilitas – *Debt to Equity* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio Solvabilitas – *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene selama lima Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124.
Tren Rasio Solvabilitas – Debt to Equity
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Tahun	Utang (Rp)	Ekuitas (Rp)	*Debt to Equity Ratio*
1	2020	15.637.663.582,99	1.567.136.324.807,57	0,0100
2	2021	19.331.177.833,82	1.591.813.548.616,05	0,0121
3	2022	57.415.812.749,33	1.500.805.258.062,52	0,0382
4	2023	57.608.887.592,45	1.628.208.973.061,58	0,0354
5	2024	69.521.069.677,33	1,602,237,782,484,35	0,0434

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Rasio solvabilitas Debt to Equity Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun anggaran 2024 adalah sebesar 0,0352 dan jika dibandingkan dengan rasio Tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,0354 maka diketahui bahwa terdapat penurunan rasio solvabilitas *Debt to Equity* sebesar 0,0080. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan utang Tahun 2024 yang bersumber dari pembayaran kewajiban jangka pendek Tahun 2024. Adapun rasio solvabilitas *Debt to Equity* paling rendah terjadi pada Tahun anggaran 2020. Namun secara umum rasio solvabilitas Debt to Equity Pemerintah Kabupaten Majene masih relatif sangat kecil atau dapat dikatakan dalam batas aman.

2. Analisis Rasio Solvabilitas – *Debt to Assets*

Rasio Solvabilitas *Debt to Assets* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total aset pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap pembiayaan dari aset. Semakin tinggi rasio ini semakin besar risiko yang dihadapi. Sehingga dengan demikian. Rasio ini merupakan indikator sejauh mana utang Pemerintah Daerah dapat ditutupi

dengan aset yang dimilikinya. Tabel di bawah ini merupakan daftar Rasio Solvabilitas – Debt to Assets Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024.

Tabel 2.125.
Tren Rasio Solvabilitas – Debt to Assets
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Tahun	Utang (Rp)	Aset (Rp)	*Debt to Assets Ratio*
1	2020	15.637.663.582,99	1.582.773.988.390,56	0,0099
2	2021	19.331.177.833,82	1.611.222.196.425,87	0,0120
3	2022	57.415.812.749,33	1.558.221.070.811,85	0,0368
4	2023	57.608.887.592,45	1.685.817.860.654,03	0,0342
5	2024	69.521.069.677,33	1.671.758.852.161,68	0,0415

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Dalam kurun waktu lima Tahun, rasio solvabilitas Debt to Assets Pemerintah Kabupaten Majene mengalami peningkatan secara berturut-turut sejak Tahun 2020 hingga 2022 karena adanya peningkatan jumlah utang yang cukup signifikan. Antara Tahun 2022 hingga 2024 terjadi penurunan sebesar 0,0029. Penurunan rasio solvabilitas Debt to Asets pada Tahun 2024 ini terjadi karena adanya penurunan utang Tahun 2024 yang bersumber dari pembayaran kewajiban jangka pendek Tahun 2024. Adapun rasio paling rendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 0,0099 dan tertinggi Tahun 2022 yaitu sebesar 0,0368. Berdasarkan rasio tersebut diketahui bahwa aset Pemerintah Kabupaten Majene dapat menjamin utang yang dimiliki.

C. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal laporan. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.126.
Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

No	Tahun	Ekuitas (Rp)
1	2020	1.567.136.324.807,57
2	2021	1.591.813.548.616,05
3	2022	1.500.805.258.062,52
4	2023	1.628.208.973.061,58
5	2024	1,602,237,782,484,35

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Ekuitas adalah indikator penting tentang kesehatan keuangan perusahaan. Nilai ekuitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekayaan bersih yang kuat dan dapat menutupi kewajibannya. Nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene pada 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif, seperti yang terlihat pada grafik dibawah.

Posisi ekuitas Pemerintah Daerah pada setiap periodenya dapat dijadikan indikator penilaian kinerja keuangan maupun operasional Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2020 tercatat sebesar 1.567,14 Miliar Rupiah, di tahun 2021 meningkat tercatat sebesar 1.591,81 Miliar Rupiah, selanjutnya di tahun 2022 menurun menjadi 1.500,81 meningkat dan selanjutnya meningkat di tahun 2023 tercatat 1.628,21 meningkat dan di tahun 2024 kembali turun tercatat sebesar Rp1.602.24 Miliar Rupiah.

Gambar 2.97.
Pertumbuhan Ekuitas Pemerintah
Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

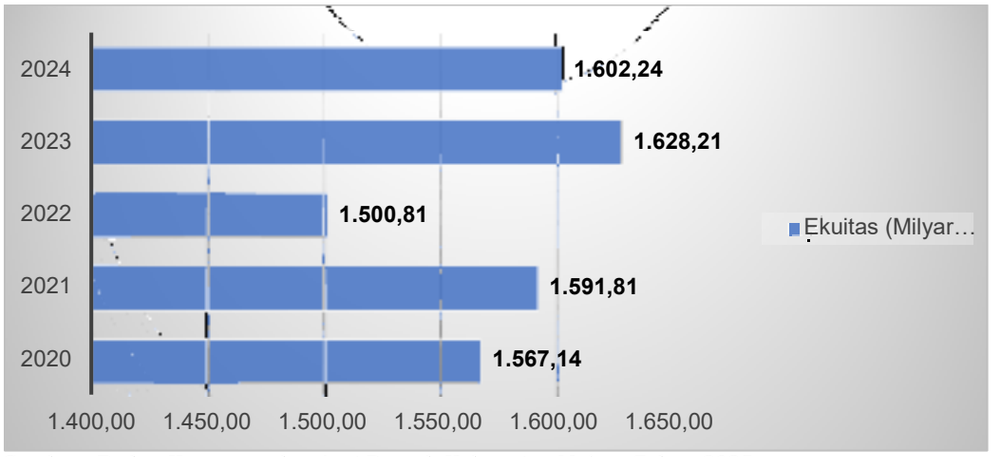

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

2.5.3. Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

A. Pengertian Kerangka Pendanaan

Proyeksi kerangka pendanaan adalah proses estimasi atau prediksi mengenai sumber dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu proyek, program, atau kegiatan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah bagian penting dari perencanaan keuangan, terutama untuk pemerintah yang ingin memastikan ketersediaan dana untuk berbagai program pembangunan daerah.

Proyeksi kerangka pendanaan bertujuan untuk menentukan kapasitas keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam jangka waktu tertentu (biasanya 5 tahun). Ini melibatkan analisis pendapatan dan belanja daerah atau lebih dikenal dengan analisis pengelolaan keuangan daerah

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 125 ayat 3 bahwa kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah hal ini menjadi dasar agar daerah mampu lebih baik lagi me-manage keuangan yang dimiliki melalui perencanaan yang matang.

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah dalam menentukan kebijakan. Dengan adanya otonomi daerah ini secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan lainnya dari masyarakat atau swasta.

B. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi

daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Memperkirakan keadaan yang akan terjadi dimasa yang akan datang maka dapat digunakan suatu metode yang disebut dengan peramalan atau biasa disebutkan dalam keuangan pemerintah dengan istilah proyeksi, dengan adanya metode ini maka pemerintah daerah harus sedia lebih awal untuk menyambut kejadian mendatang Untuk menghitung proyeksi Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene menggunakan 2 (dua) metode:

1. Metode *Trend*

Metode trend adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan suatu data pada masa depan dengan memperhatikan data historis. Metode ini sangat berguna dalam membantu kita memprediksi dan meramalkan arah pergerakan suatu data, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam dunia bisnis, analisis tren digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan keuangan perusahaan, seperti pendapatan, biaya, dan laba. Dalam bidang ekonomi, analisis tren digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan ekonomi suatu negara atau wilayah.

Adapun pengertian analisis tren dalam laporan keuangan merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan data keuangan pemerintah daerah pada masa depan dengan melihat data historis yang terdapat dalam laporan keuangan.

Analisis tren dalam laporan keuangan merupakan salah satu metode penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu pemerintah daerah. Metode ini digunakan untuk menganalisis data keuangan historis pemerintah daerah dan memprediksi arah pergerakan data keuangan di masa depan.

2. Metode *Moving Average*

Moving Average adalah indikator yang mengukur nilai rata-rata suatu instrumen keuangan selama periode waktu tertentu. Metode

moving average digunakan untuk menghitung pendapatan dengan merata-ratakan data pendapatan dalam periode tertentu. Ini membantu mengurangi fluktuasi jangka pendek dan mempermudah identifikasi tren pendapatan. Dengan rata-rata bergerak, pemerintah daerah dapat mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kinerja pendapatan mereka tanpa terlalu dipengaruhi oleh variasi bulanan atau mingguan. Sebagai *baseline* menghitung proyeksi pendapatan maka digunakan data realisasi pendapatan 5 (lima tahun) terakhir untuk masing-masing objek pendapatan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127.
Realisasi Pendapatan Masing-Masing Objek Pendapatan
Kabupaten Majene Periode 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN**	**922.935.347.401,86**	**910.693.466.156,16**	**833.363.725.360,67**	**887.077.959.303,37**	**900.769.191.854,07**
A	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**77.635.559.065,86**	**85.125.586.865,16**	**70.563.315.736,67**	**87.794.782.521,37**	**92.461.573.881,07**
I	**PAJAK DAERAH**	**8.213.515.391,39**	**8.890.315.383,50**	**9.461.193.553,39**	**10.740.841.614,61**	**11.784.183.207,00**
1	Pajak Hotel	162.978.938,33	146.141.064,00	213.007.920,00	214.517.545,00	199.269.933,00
2	Pajak Restoran	823.046.356,70	1.018.727.418,00	1.511.655.978,00	1.465.826.729,00	1.850.591.569,00
3	Pajak Hiburan	54.166.250,00	34.898.750,00	78.512.250,00	93.441.500,00	102.257.000,00
4	Pajak Reklame	186.449.000,00	193.700.000,00	179.894.875,00	172.779.250,00	229.072.250,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.381.031.063,00	4.454.816.956,00	5.179.560.351,00	5.744.021.642,00	6.343.360.258,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	15.728.000,00	15.072.000,00	15.130.000,00	2.120.000,00	3.080.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	382.592.836,36	402.491.946,50	345.788.000,00	310.636.105,00	192.802.275,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	564.513.227,00	1.122.534.214,00	946.269.171,00	1.162.824.602,00	1.117.911.819,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.643.009.720,00	1.501.933.035,00	991.375.008,39	1.574.674.241,61	1.745.838.103,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Retribusi Daerah**	**5.736.844.741,95**	**4.830.882.493,00**	**5.803.175.060,00**	**3.559.947.334,00**	**75.254.820.161,00**
14	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.392.693.500,00	1.596.656.933,00	1.994.881.900,00	0,00	71.833.922.198,00
15	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	373.414.000,00	341.169.000,00	399.195.700,00	376.801.000,00	361.698.000,00
16	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.730.000,00	161.773.000,00	170.048.000,00	246.953.500,00	538.710.000,00
17	Retribusi Pelayanan Pasar	899.548.000,00	831.274.000,00	994.136.000,00	907.113.000,00	817.707.000,00
18	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	3.875.000,00	2.225.000,00	8.850.000,00
19	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.100.000,00	7.406.000,00	9.000.000,00	3.225.000,00	0,00
20	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	242.017.500,00	174.742.500,00	175.691.250,00	224.508.750,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
21	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tanah dan bangunan, Pemakian Ruangan dan Kendaraan Bermotor)	443.918.200,00	506.459.500,00	691.043.113,00	370.744.000,00	398.630.000,00
22	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	100.107.000,00	71.178.900,00	106.293.100,00	103.020.000,00	95.160.000,00
23	Retribusi Terminal	46.734.000,00	35.856.000,00	39.578.000,00	32.144.000,00	-
24	Retribusi Tempat Khusus Parkir	257.681.000,00	305.061.000,00	382.683.000,00	371.317.500,00	209.477.100,00
25	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.745.000,00	439.214.000,00	518.652.000,00	269.065.400,00	221.871.000,00
26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	21.000.000,00	46.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.008.000,00
27	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	481.256.541,95	310.441.660,00	289.947.997,00	626.730.184,00	0,00
29	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.900.000,00	3.150.000,00	7.150.000,00	5.100.000,00	0,00
30	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	749.786.863,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**2.920.152.972,00**	**2.895.153.594,00**	**3.333.308.081,00**	**3.298.690.028,00**	**3.327.191.183,00**
31	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	2.895.153.594,00	3.333.308.081,00	3.298.690.028,00	3.327.191.183,00
32	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.920.152.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Lain-lain PAD yang Sah**	**60.765.045.960,52**	**68.509.235.394,66**	**51.965.639.042,28**	**70.195.303.544,76**	**2.095.379.330,07**
34	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	189.301.200,00	5.342.700,00	0,00	11.505.500,00	0,00
35	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dan Hasil Penjualan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	16.136.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Hasil Penjualan Aset Lain-lain dan Lainnya	0,00	131.959.100,00	122.319.500,00	9.150.000,00	5.925.000,00
38	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.745.678.809,70	1.449.598.675,00	1.230.628.218,33	1.078.241.558,25	939.132.230,00
40	Jasa Giro Bendahara	25.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		137.995,00	0,00	0,00	0,00
42	Pendapatan Bunga	577.421.686,00	532.191.780,00	305.753.427,00	243.973.457,00	328.386.862,00
43	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.029.747.091,82	2.655.038.476,46	411.905.414,55	1.862.349.475,73	806.537.889,07
44	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	242.276.287,00	7.219.524,40	32.926.473,78	0,00
45	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	593.185,00	2.132.710,00
46	Pendapatan Denda Pajak Restoran	600,00	2.000.000,00	2.430.748,00	2.331.627,00	4.537.185,00
47	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	1.268.640,00	0,00
48	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00	214.220,00	6.727.454,00

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
49	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	6.428,00	0,00
50	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	26.002,00	15.502,00	0,00	0,00	0,00
54	Pendapatan dari Pengembalian	192.141.170,00	178.726.946,00	208.928.263,00	150.903.356,00	0,00
55	Pendapatan BLUD	48.167.321.591,00	55.702.795.740,00	42.321.979.336,00	66.801.839.624,00	0,00
56	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.839.893.550,00	7.586.759.897,00	7.354.474.611,00	0,00	0,00
57	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	7.352.293,00	22.392.296,20	0,00	0,00	0,00
II	**PENDAPATAN TRANSFER**	**746.334.344.336,00**	**776.740.189.291,00**	**761.573.409.624,00**	**798.281.176.782,00**	**808.307.617.973,00**
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	7.701.796.752,00	12.938.722.775,00	10.784.967.445,00	8.064.980.017,00	6.639.074.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	492.454.281.000,00	486.320.121.000,00	485.848.952.931,00	508.603.740.400,00	548.935.022.195,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	212.707.239.588,00	69.122.017.373,00	74.119.888.581,00	78.097.585.458,00	41.802.623.094,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	95.084.108.573,00	109.054.956.339,00	123.320.564.365,00	130.583.017.821,00
5	Dana Insentif Daerah	11.289.245.000,00	24.920.508.000,00	2.301.731.000,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.181.781.996,00	20.923.179.970,00	23.814.548.328,00	24.379.027.542,00	24.527.029.863,00
7	Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	1.650.000.000,00	63.550.000,00	0,00	0,00
8	Dana Desa (Pindah Akun)	0,00	65.781.531.600,00	55.584.815.000,00	55.815.279.000,00	55.820.851.000,00
III	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**98.965.444.000,00**	**48.827.690.000,00**	**1.227.000.000,00**	**1.002.000.000,00**	**0,00**
1	Pendapatan Hibah Pusat	33.777.470.000,00	20.598.000.000,00	1.227.000.000,00	1.002.000.000,00	0,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	28.229.690.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Desa	65.187.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Dari analisis olah data untuk mengetahui suatu nilai proyeksi atau peramalan pendapatan daerah di masa akan datang, cenderung menggunakan metode *Trend* tetapi untuk hasil yang menunjukkan data yang anomali, maka digunakan metode *Moving Average*. Dari beberapa objek pendapatan asli daerah periode 2020 sampai dengan 2024 terdapat objek pendapatan baik pajak maupun retribusi yang tidak lagi ditarik pasca keluarnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2026-2030 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.128.

Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene
Per Objek Pendapatan Periode 2026-2030

SUMBER DANA	RINGKASAN					
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**142.079.838.768,00**	**196.257.094.354,00**	**204.794.272.000,00**	**213.764.263.800,00**	**223.127.134.400,00**	**232.893.749.900,00**
Pajak Hotel	674.076.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Motel	170.610.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Losmen	104.484.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Restoran dan Sejenisnya	390.000.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.153.002.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	209.600.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Kantin dan Sejenisnya	7.200.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Warung dan Sejenisnya	340.200.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	262.800.000,00	-	-	-	-	-
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.350.687.500,00	1.350.687.500,00	1.409.442.400,00	1.471.176.000,00	1.535.613.500,00	1.602.829.600,00
Pajak Reklame Kain	149.343.750,00	149.343.750,00	155.840.200,00	162.666.000,00	169.790.800,00	177.222.800,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.370.000,00	1.370.000,00	1.429.600,00	1.492.200,00	1.557.600,00	1.625.800,00
Pajak Reklame Selebaran	1.800.000,00	1.800.000,00	1.878.300,00	1.960.600,00	2.046.500,00	2.136.100,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	9.000.043.488,00	-	-	-	-	-
Pajak Sarang Burung Walet	130.000.000,00	130.000.000,00	135.655.000,00	141.596.700,00	147.798.600,00	154.268.000,00

SUMBER DANA	RINGKASAN					
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Pajak Pasir dan Kerikil	900.000.000,00	900.000.000,00	939.150.000,00	980.284.800,00	1.023.221.300,00	1.068.009.200,00
Pajak Tanah Liat	352.030.000,00	352.030.000,00	367.343.300,00	383.432.900,00	400.227.300,00	417.745.800,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.215.913.262,00	2.215.913.262,00	2.312.305.500,00	2.413.584.500,00	2.519.299.500,00	2.629.573.000,00
PBBP2	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.608.750.000,00	2.723.013.300,00	2.842.281.300,00	2.966.692.200,00
BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.174.000.000,00	4.356.821.200,00	4.547.650.000,00	4.746.707.400,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	1.756.381.000,00	1.832.783.600,00	1.913.059.500,00	1.996.851.500,00	2.084.256.700,00
PBJT-Tenaga Listrik	-	8.816.267.420,00	9.199.775.100,00	9.602.725.200,00	10.023.324.600,00	10.462.060.400,00
PBJT-Jasa Perhotelan	-	700.008.000,00	730.458.300,00	762.452.400,00	795.847.800,00	830.683.200,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	113.580.803,00	118.521.600,00	123.712.800,00	129.131.400,00	134.783.700,00
Opsen PKB	-	9.774.827.500,00	10.200.032.500,00	10.646.793.900,00	11.113.123.500,00	11.599.561.500,00
Opsen BBNKB	-	5.064.112.400,00	5.284.401.300,00	5.515.858.100,00	5.757.452.700,00	6.009.465.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	73.672.618.988,00	93.672.618.988,00	97.747.377.900,00	102.028.713.100,00	106.497.570.700,00	111.159.127.900,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	575.000.000,00	575.000.000,00	600.012.500,00	626.293.000,00	653.724.600,00	682.339.100,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.302.862.000,00	2.302.862.000,00	2.403.030.000,00	2.508.289.500,00	2.618.152.600,00	2.732.753.700,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.430.880.000,00	1.430.880.000,00	1.493.124.300,00	1.558.522.100,00	1.626.770.400,00	1.697.992.200,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	50.000.000,00	52.175.000,00	54.460.300,00	56.845.700,00	59.333.900,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.924.164.000,00	3.924.164.569,00	4.094.865.100,00	4.274.220.200,00	4.461.438.500,00	4.656.714.500,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	75.990.000,00	75.990.000,00	79.295.600,00	82.768.700,00	86.394.000,00	90.175.600,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	697.320.000,00	697.320.000,00	727.653.400,00	759.524.600,00	792.791.800,00	827.493.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.043.500.000,00	1.089.205.300,00	1.136.912.500,00	1.186.676.900,00

SUMBER DANA	RINGKASAN					
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.252.200.000,00	1.307.046.400,00	1.364.295.000,00	1.424.012.200,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.333.308.081,00	3.333.308.081,00	3.478.307.000,00	3.630.656.800,00	3.789.679.600,00	3.955.559.500,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	9.867.953.309,00	20.000.000.000,00	20.870.000.000,00	21.784.106.000,00	22.738.249.800,00	23.733.536.900,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	104.350.000,00	108.920.500,00	113.691.200,00	118.667.600,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.043.500.000,00	1.089.205.300,00	1.136.912.500,00	1.186.676.900,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	104.350.000,00	108.920.500,00	113.691.200,00	118.667.600,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.043.500.000,00	1.089.202.300,00	1.136.912.500,00	1.186.676.900,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	50.000.000,00	52.175.000,00	54.460.300,00	56.845.700,00	59.333.900,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.585.321.000,00	4.585.321.000,00	4.784.782.500,00	4.994.356.000,00	5.213.108.800,00	5.441.294.300,00
PENDAPATAN TRANSFER	816.160.136.716,00	1.176.293.867.000,00	1.228.430.075.000,00	1.281.147.710.000,00	1.337.218.183.000,00	1.395.750.206.500,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	791.190.758.000,00	1.105.949.326.000,00	1.155.025.546.000,00	1.204.528.063.000,00	1.257.242.595.000,00	1.312.273.968.500,00
Dana Desa	54.134.831.000,00	64.134.831.000,00	66.924.696.000,00	69.855.997.000,00	72.915.691.000,00	76.107.318.800,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	6.007.129.000,00	9.801.895.000,00	10.228.277.000,00	10.676.275.000,00	11.143.897.000,00	11.631.681.700,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	6.007.129.000,00	8.007.129.000,00	8.355.439.000,00	8.721.407.000,00	9.103.405.000,00	9.501.874.500,00
DBH Sawit	-	1.794.766.000,00	1.872.838.000,00	1.954.868.000,00	2.040.492.000,00	2.129.807.200,00
Dana Alokasi Umum	555.420.836.000,00	690.957.518.000,00	721.981.589.000,00	752.516.781.000,00	785.433.217.000,00	819.812.802.000,00
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	400.260.555.000,00	483.294.260.000,00	505.545.979.000,00	526.864.092.000,00	548.159.739.000,00	572.503.684.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	23.106.789.000,00	30.106.789.000,00	31.416.434.000,00	32.792.474.000,00	34.228.785.000,00	35.727.029.000,00

SUMBER DANA	RINGKASAN					
	2024	2026	2027	2028	2029	2030
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	69.278.048.000,00	73.784.932.000,00	76.994.577.000,00	80.366.939.000,00	83.887.011.000,00	87.558.870.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	40.517.642.000,00	64.130.902.000,00	66.920.596.000,00	69.851.718.000,00	72.911.224.000,00	76.102.656.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.257.802.000,00	33.640.635.000,00	35.104.003.000,00	36.641.558.000,00	38.246.458.000,00	39.920.563.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	175.627.962.000,00	341.055.082.000,00	355.890.984.000,00	371.479.010.000,00	387.749.790.000,00	404.722.166.000,00
DAK Fisik	42.377.088.000,00	165.379.226.000,00	172.573.226.000,00	180.131.936.000,00	188.021.714.000,00	196.251.695.000,00
DAK Non Fisik	133.250.874.000,00	175.675.856.000,00	183.317.758.000,00	191.347.074.000,00	199.728.076.000,00	208.470.471.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.969.378.716,00	70.344.541.000,00	73.404.529.000,00	76.619.647.000,00	79.975.588.000,00	83.476.238.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.057.570.716,00	8.134.354.000,00	8.488.199.000,00	8.859.982.000,00	9.248.049.000,00	9.652.850.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.911.808.000,00	12.210.187.000,00	12.741.330.000,00	13.299.400.000,00	13.881.914.000,00	14.489.546.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	50.000.000.000,00	52.175.000.000,00	54.460.265.000,00	56.845.625.000,00	59.333.842.000,00
Pendapatan Hibah	-	2.160.000.000,00	2.253.960.000,00	2.352.683.000,00	2.455.731.000,00	2.563.221.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	2.160.000.000,00	2.253.960.000,00	2.352.683.000,00	2.455.731.000,00	2.563.221.000,00
Jumlah Pendapatan	**958.239.975.484,00**	**1.351.377.653.273,00**	**1.411.130.000.000,00**	**1.471.849.894.000,00**	**1.536.273.119.000,00**	**1.603.518.081.000,00**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

Dari hasil perhitungan proyeksi pendapatan per objek pendapatan, maka Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene Periode 2026 sampai dengan 2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129.

Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene Periode 2026-2030

NO	SUMBER DANA	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.351.377.653.273,00	1.411.130.000.000,00	1.471.849.894.000,00	1.536.273.119.000,00	1.603.518.081.000,00
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.923.786.273,00	180.445.965.000,00	188.349.501.000,00	196.599.205.000,00	205.204.653.500,00
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.176.293.867.000,00	1.228.430.075.000,00	1.281.147.710.000,00	1.337.218.183.000,00	1.395.750.206.500,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.160.000.000,00	2.261.933.000,00	2.360.000.000,00	2.500.000.000,00	2.729.922.000,00

C. Proyeksi Pendanaan Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi belanja dan pembiayaan keuangan daerah adalah proses memperkirakan jumlah anggaran yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dan sumber-sumber yang akan digunakan untuk membiayai anggaran tersebut. Proyeksi ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efisien dan efektif, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebijakan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan perlu memperhatikan, antara lain sebagai berikut :

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut;
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;

4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat;

Selanjutnya prioritas belanja dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II ,dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene periode 2025-2030, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Program tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, serta pada tahun 2030 prioritas III didalamnya termasuk dana hibah yang disediakan untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah 2030.

Pemerintah Daerah pada umumnya di Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi ketentuan mandatory spending yang mengatur belanja pegawai maksimal 30% dan belanja modal minimal 40% dari APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat block grant, menyulitkan pemerintah kabupaten untuk mematuhi batas belanja pegawai. Kebijakan DAU *block grant* memberikan fleksibilitas penggunaan dana, tetapi sering kali tidak cukup untuk menutup kebutuhan pegawai seperti gaji dan tunjangan, sehingga porsi belanja pegawai kerap melebihi 30%, mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

Selain itu, pemerintah Daerah pada umumnya juga kesulitan mengalokasikan minimal 40% APBD untuk belanja modal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang terhambat karena DAU *block grant* cenderung tidak memberikan alokasi spesifik yang memadai untuk belanja modal, ditambah dengan terbatasnya pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan pada transfer pusat tanpa dukungan alokasi yang cukup untuk investasi pembangunan membuat pemerintah kabupaten sulit memenuhi target belanja modal, sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proyeksi Kerangka Pendanaan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2026-2030 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.130.
Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Majene
(Miliar Rupiah) Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	142,08	172,92	180,45	188,35	196,60	205,20
	B. Pendapatan Transfer	816,16	1176,29	1228,43	1281,15	1337,22	1395,75
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	2,16	2,26	2,36	2,50	2,73
	JUMLAH PENDAPATAN	**958,24**	**1351,38**	**1411,13**	**1471,85**	**1536,27**	**1603,52**
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	757,87	1026,17	1071,04	1116,50	1164,77	1215,21
	B. Belanja Modal	80,38	181,27	189,01	197,03	205,55	214,45
	C. Belanja Tak Terduga	1,51	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
	D. Belanja Transfer	112,55	138,94	145,08	151,33	157,95	164,86
	JUMLAH BELANJA	**952,31**	**1350,38**	**1410,13**	**1470,85**	**1535,27**	**1602,52**
	SURPLUS/DEFISIT	**-7,27**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	7,27	-	-	-	-	-
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**7,27**	**(1,00)**	**(1,00)**	**(1,00)**	**(1,00)**	**(1,00)**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Terdapat beberapa masalah pokok pembangunan daerah di Kabupaten Majene, sebagai berikut:

A. Angka Kemiskinan yang Tinggi

Kabupaten Majene belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan, dengan persentase penduduk miskin mencapai 13,64% pada tahun 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan angka provinsi Sulawesi Barat sebesar 11,21% dan nasional sebesar 9,03%. Jumlah penduduk miskin sebanyak 24,41 ribu jiwa, dengan garis kemiskinan Rp482.173 per kapita per bulan, mencerminkan ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang,

dan papan. Kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,82% dan keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,41% menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Majene tidak hanya meluas tetapi juga cukup parah dibandingkan standar provinsi dan nasional. Fluktuasi penurunan angka kemiskinan pada periode 2006-2019, yang sempat mencapai 23,50% dengan garis kemiskinan Rp130.648, tidak berlanjut, dengan kenaikan sebesar 1,16% pada 2020-2023. Kenaikan ini menunjukkan ketidakstabilan upaya pengentasan kemiskinan, yang diperparah oleh inflasi dan rendahnya daya beli masyarakat. Tingginya angka kemiskinan ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan pertama (tanpa kemiskinan), dan menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan di antara masyarakat. Akar Masalahnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Majene, yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang minim, menyebabkan masyarakat sulit mengakses pekerjaan yang layak, sehingga peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan sangat terbatas. Minimnya investasi di sektor-sektor produktif yang dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin, seperti industri pengolahan atau pariwisata, memperparah keterbatasan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu, akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perumahan layak, dan perlindungan sosial masih sangat terbatas, dengan banyak keluarga miskin tidak terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional (JKN) atau bantuan sosial lainnya, sehingga mereka tetap rentan terhadap risiko ekonomi dan kesehatan.

B. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Optimal dan Kurang Beragam

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene tidak cukup kuat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, hanya mencapai rata-rata 5,6% dari tahun 2017 hingga 2024, jauh di bawah potensi yang diharapkan untuk sebuah daerah dengan sumber daya alam melimpah. Dominasi sektor primer, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tidak mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional. Struktur ekonomi yang tidak beragam ini menghambat kemajuan jangka panjang, dengan produktivitas sektor primer yang rendah semakin memperburuk kondisi ekonomi. Penurunan kontribusi

sektor primer, seperti pertanian (3,82%) dan pertambangan (3,92%) pada 2020-2024, menunjukkan ketidakmampuan daerah untuk memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal. Ketergantungan pada sektor primer juga membuat Majene rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim, yang berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Akar Masalahnya adalah Sektor pengolahan dan jasa konstruksi di Kabupaten Majene belum berkembang secara memadai, dengan kontribusi industri pengolahan hanya mencapai 5,92% terhadap PDRB pada 2020-2024, lebih rendah dibandingkan sektor primer seperti pertanian dan pertambangan, sementara sektor jasa konstruksi mengalami penurunan signifikan dari 8,79% pada 2020 menjadi 7,09% pada 2024. Pengelolaan sektor primer yang masih bersifat subsisten, dengan penggunaan teknologi yang tertinggal dan rendahnya tingkat pendidikan SDM, menyebabkan rendahnya produktivitas dan nilai tambah. Minimnya minat generasi muda untuk terlibat di sektor primer, ditambah dengan kurangnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, semakin menghambat diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada dana transfer umum dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur juga membatasi kemampuan daerah untuk mengembangkan sektor-sektor sekunder dan tersier yang lebih produktif.

C. Rendahnya Pertumbuhan Industri Pengolahan yang Stagnan

Industri pengolahan di Kabupaten Majene tidak berkembang secara signifikan, dengan kontribusi yang fluktuatif dan cenderung melambat, gagal memanfaatkan potensi produk unggulan seperti kelapa dalam dan ikan tuing-tuing untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan nelayan. Rendahnya inovasi dalam proses pengolahan dan distribusi menyebabkan produk lokal tidak memiliki daya saing di pasar, sehingga tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Data dari Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 2023 menunjukkan tidak adanya investasi dalam negeri maupun asing di sektor pengolahan, mencerminkan ketidakatraktifan sektor ini bagi investor. Ketidakmampuan ini menghambat transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder, yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akar masalahnya adalah skala industri pengolahan yang kecil dan stagnan di Kabupaten Majene, ditambah

dengan kurangnya inovasi dalam pengolahan produk unggulan seperti kelapa dalam dan ikan tuing-tuing, menyebabkan rendahnya daya saing produk di pasar, sehingga gagal meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketidakminatan investor untuk menanamkan modal di sektor pengolahan, akibat rendahnya nilai harapan (expected value) dari investasi dan kurangnya bahan baku olahan bermutu tinggi, memperparah keterbatasan pengembangan industri. Pengelolaan sentra industri yang belum optimal, ditandai dengan SDM yang kurang berkualitas, minimnya pemanfaatan teknologi modern, dan lemahnya promosi pemasaran, semakin menghambat pertumbuhan sektor ini. Ketiadaan infrastruktur dasar yang memadai, seperti air bersih untuk produksi, manajemen limbah yang baik, dan sistem transportasi yang efisien, menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas dan distribusi produk olahan, sehingga sektor ini tetap tidak berkembang.

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum memadai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majene pada 2024 hanya mencapai 73,25, tertinggal jauh di bawah IPM nasional sebesar 75,02, meskipun menjadi yang tertinggi di Sulawesi Barat. Rendahnya angka harapan hidup (AHH) sebesar 62,89 tahun pada 2024, jauh di bawah AHH provinsi (71,03 tahun), mencerminkan ketertinggalan signifikan dalam pembangunan sektor kesehatan. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta tingginya angka stunting menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat belum memadai. Keterbatasan ini menghambat pencapaian tujuan TPB/SDGs, khususnya tujuan ketiga (kehidupan sehat dan sejahtera), dan menunjukkan ketimpangan dalam akses layanan kesehatan. Akar Masalahnya adalah fasilitas kesehatan di wilayah terpencil Kabupaten Majene tidak memadai, dengan kondisi jalan dan transportasi yang buruk, menyebabkan masyarakat di daerah terpencil harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga lebih memilih pengobatan tradisional yang kurang efektif. Kualitas alat kesehatan dan peralatan medis di puskesmas serta pustu yang rusak atau tidak memadai semakin mengurangi minat masyarakat untuk berobat, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan, akibat

kurangnya tenaga dokter spesialis, perawat bersertifikat, dan pelatihan yang sesuai kebutuhan, memperburuk pelayanan kesehatan di tingkat lokal. Pemerataan tenaga kesehatan yang tidak merata, dengan konsentrasi dokter umum di puskesmas dekat ibu kota kabupaten dan kekurangan tenaga medis di daerah terpencil, menyebabkan pelayanan kesehatan tidak merata, sehingga masyarakat di wilayah terisolasi sulit mendapatkan perawatan yang memadai.

E. Kualitas Lingkungan Hidup yang Tidak Optimal

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Majene tidak cukup baik, dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2021-2022 menunjukkan kualitas air (61,11-61,43) dan tutupan lahan (64,04) dalam kategori tercemar ringan. Penurunan debit air bersih setiap tahun, terutama akibat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan luasnya lahan kritis seluas 20.110 Ha pada 2016-2020, mengancam keberlanjutan pembangunan, terutama di sektor penyediaan air bersih dan pertanian. Sebanyak 42% wilayah memiliki kelas penyediaan air rendah hingga sangat rendah, yang tersebar di seluruh kecamatan, termasuk pusat pertumbuhan seperti Banggae dan Banggae Timur. Kondisi ini menghambat pencapaian tujuan TPB/SDGs, khususnya tujuan keenam (air bersih dan sanitasi layak) dan tujuan kelima belas (ekosistem daratan). Akar Masalahnya adalah Pencemaran air dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat aktivitas manusia, seperti pembuangan limbah dan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan, ditambah dengan penggunaan air tanah yang berlebihan melebihi daya pulih tanah, menyebabkan penurunan debit air bersih yang signifikan di Kabupaten Majene. Penanggulangan lahan kritis yang belum optimal, terutama di kecamatan seperti Banggae Timur, Pamboang, dan Malunda, memperburuk kondisi tutupan lahan, dengan lahan kritis seluas 16.238 Ha di dalam kawasan hutan dan 3.872 Ha di luar kawasan hutan. Rendahnya jasa lingkungan penyediaan air, yang ditunjukkan oleh 42% wilayah dengan kelas penyediaan air rendah hingga sangat rendah, menambah tekanan pada keberlanjutan lingkungan dan menghambat pembangunan sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya air, seperti pertanian dan industri.

F. Memudarnya Kebudayaan Daerah akibat Globalisasi

Kebudayaan Mandar di Kabupaten Majene semakin tergerus akibat pengaruh globalisasi, dengan minimnya minat generasi muda untuk mempelajari dan mewarisi budaya lokal, seperti seni tradisional, bahasa, dan kearifan lokal. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya lokal sangat rendah, ditunjukkan oleh kecenderungan mengadopsi budaya asing yang dianggap lebih praktis dan modern, seperti gaya hidup barat yang diidentikkan dengan modernitas. Hal ini mengancam identitas budaya daerah dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Kurangnya upaya pelestarian budaya Mandar juga berdampak pada sektor pariwisata, yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi berbasis budaya. Akar Masalahnya adalah Kurangnya pembelajaran budaya lokal sejak dini, baik melalui sistem pendidikan formal di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat, menyebabkan generasi muda tidak memiliki keterikatan emosional dan pengetahuan yang memadai tentang kebudayaan Mandar, sehingga mereka lebih tertarik pada budaya asing yang dianggap lebih relevan dengan perkembangan zaman. Alokasi anggaran untuk pengembangan kebudayaan yang sangat minim dalam rencana pembangunan daerah menghambat upaya pelestarian, promosi, dan pengembangan objek kemajuan kebudayaan, seperti festival budaya atau dokumentasi warisan budaya. Ketidakoptimalan pengelolaan kelembagaan kebudayaan, ditambah dengan kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, memperparah memudarnya identitas budaya Mandar di tengah arus globalisasi yang kian masif.

G. Tata Kelola Pemerintahan yang belum Efektif dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Majene belum berjalan optimal, dengan capaian reformasi birokrasi hanya mencapai predikat CC dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sebesar 76,44% pada 2023, jauh dari harapan untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien. Ketiadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan terpadu, serta lemahnya pengawasan internal, memperburuk kualitas pelayanan publik, dengan masyarakat sering mengeluhkan lambatnya proses administrasi dan kurangnya transparansi. Meskipun opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap

pengelolaan keuangan mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut, capaian lain seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat B dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan nilai 3,43 menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan masih jauh dari optimal. Akar Masalahnya adalah Reformasi birokrasi yang tidak berjalan maksimal, ditandai dengan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur yang belum efektif, menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pelayanan publik tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Ketiadaan pusat pelayanan publik terpadu seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), dengan fasilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang masih terbatas dalam hal sarana, prasarana, dan jenis layanan, menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terjangkau, dan nyaman. Sistem pengawasan internal yang lemah, tanpa dukungan aplikasi seperti *Whistleblowing System* untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran secara efektif, memperburuk integritas pemerintahan dan meningkatkan risiko penyimpangan. Kompetensi dan kesejahteraan aparatur yang tidak optimal, akibat kurangnya pelatihan yang relevan dan rendahnya insentif, menyebabkan rendahnya produktivitas dan motivasi kerja pegawai, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tabel 2.131.
Rumusan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Majene

No.	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
1	Angka Kemiskinan	Tingginya angka kemiskinan (13,64% pada 2024) dibandingkan provinsi (11,21%) dan nasional (9,03%)	Rendahnya kualitas SDM, minimnya investasi untuk lapangan kerja, rendahnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan)	Sosial, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan
2	Pertumbuhan Ekonomi	Melambatnya pertumbuhan ekonomi (rata-rata 5,6% dari 2017-2024)	Dominasi sektor primer, belum berkembangnya sektor pengolahan dan jasa konstruksi, rendahnya produktivitas sektor primer	Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Industri
3	Rendahnya Pertumbuhan Industri Pengolahan	Kontribusi industri pengolahan yang fluktuatif dan melambat	Skala industri kecil, minimnya investasi, pengelolaan sentra industri belum optimal, kurangnya infrastruktur dasar	Industri, Investasi, Infrastruktur

No.	Pokok Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah	Urusan
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM Kabupaten Majene (73,25 pada 2024) masih di bawah nasional (75,02)	Rendahnya angka harapan hidup (AHH), kurangnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil, rendahnya kualitas SDM kesehatan	Kesehatan, Pendidikan
5	Kualitas Lingkungan Hidup	Rendahnya kualitas air dan tutupan lahan (IKLH 2021-2022: air 61,11-61,43, tutupan lahan 64,04)	Pencemaran air, kerusakan DAS, penggunaan air tanah berlebihan, lahan kritis seluas 20.110 Ha	Lingkungan Hidup, Kehutanan
6	Kebudayaan Daerah	Memudarnya budaya Mandar akibat globalisasi	Kurangnya minat generasi muda, minimnya pembelajaran budaya lokal, alokasi anggaran untuk kebudayaan yang rendah	Kebudayaan, Pariwisata
7	Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi belum maksimal (predikat CC), ketiadaan Mal Pelayanan Publik (MPP), pengawasan internal lemah	Pemerintahan, Pelayanan Publik

2.6.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Adapun isu strategis Kabupaten Majene selama periode 2025 sampai dengan 2045 adalah sebagai berikut:

A. Isu Global

Isu strategis adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Adapun isu strategis Kabupaten Majene selama periode 2025 sampai dengan 2045 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karenanya, TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, tentunya memerlukan sinergi kebijakan perencanaan, baik pada level nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs pada level nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan.

Untuk Kabupaten Majene, tentunya isu TPB/SDGs menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam penyusunan perencanaan jangka Panjang. Oleh karenanya, penyelarasan perencanaan terhadap isu ini mesti dilakukan agar menjadi terintegrasi untuk membantu percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, isu strategis sekaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat disajikan sebagai sebagai berikut:

a. Belum memadainya akses jaminan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan
b. Menurunnya akses infrastruktur sanitasi, air minum layak dan kualitas sumber air dan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana
c. Menurunnya ketahanan pangan dan rendahnya pemenuhan gizi masyarakat
d. Belum optimalnya akses ke layanan kesehatan, pencegahan penyakit menular, dan penanganan kesehatan reproduksi
e. Meningkatnya kerusakan dan penurunan kualitas ekosistem alam
f. Penurunan investasi keuangan yang memengaruhi ketersediaan layanan perbankan, pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan terbatasnya lapangan pekerjaan terutama terkait dengan sektor pertanian, pariwisata dan industri.
g. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan pelayanan publik dan ketidaksetaraan gender.

2. Perubahan Iklim Global

Isu perubahan iklim global sebenarnya telah termuat dalam tujuan ke 13 (tiga belas) TPB/SDGs. Isu ini menarik dicermati mengingat dampak pemanasan global terhadap keberlangsungan kehidupan. Tantangan perubahan iklim mesti dihadapi dengan melibatkan penduduk dunia secara global. Hal ini dikarenakan perubahan iklim global berpotensi memberikan ancaman kepunahan ekosistem, penurunan ketersediaan pangan, tingginya permukaan air laut yang mengancam dataran rendah, ketersediaan sumber air tawar, ancaman terhadap industri, pemukiman masyarakat, serta ancaman terhadap Kesehatan.

Kabupaten Majene menjadikan isu perubahan iklim sebagai muatan penting dalam perencanaan jangka panjangnya, mengingat bahwa penduduk Kabupaten Majene sebagian besar mendiami wilayah pesisir. Demikian juga angka kemiskinan yang cukup rawan untuk dipengaruhi perubahan iklim, dikarenakan sebagian besar penduduk Kabupaten Majene bekerja pada sektor pertanian dan perikanan.

3. Society 5.0

Society 5.0 adalah konsep yang dikembangkan oleh pemerintah Jepang untuk mendefinisikan visi masyarakat masa depan yang mengintegrasikan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan big data, dengan kebutuhan manusia secara holistik.

Society 5.0 berfokus pada menciptakan masyarakat yang "berpusat pada manusia" (human-centered) di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, menyelesaikan masalah sosial (seperti penuaan populasi, polusi, dan kesenjangan ekonomi), dan mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan.

Penerapan Society 5.0 di Kabupaten Majene dapat mengatasi masalah lokal seperti keterbatasan infrastruktur digital, pendidikan, kesehatan, ekonomi, risiko bencana, dan pelestarian budaya Mandar dengan memanfaatkan teknologi canggih (AI, IoT, big data) secara berpusat pada manusia. Strategi utama meliputi pembangunan jaringan internet di wilayah terpencil seperti Kecamatan Ulumanda, pengembangan *e-learning* berbasis AI di SMK dan Unsulbar, serta *telemedicine* untuk akses kesehatan di Kecamatan Pamboang. Ekonomi lokal dapat ditingkatkan melalui *smart fisheries* untuk nelayan dan *e-commerce* untuk UMKM, sementara sistem peringatan dini gempa berbasis IoT dapat meminimalkan dampak bencana. Digitalisasi budaya Mandar melalui AR juga mendukung pelestarian identitas lokal.

Implementasi dimulai dengan proyek percontohan, seperti desa pintar di Kecamatan Banggae, didukung kolaborasi pemerintah, universitas, dan swasta. Tantangan seperti kesenjangan digital dan biaya tinggi dapat diatasi dengan pelatihan literasi digital dan pendanaan dari pemerintah pusat atau swasta. Dengan pendekatan ini, Majene dapat menjadi kabupaten cerdas, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjaga warisan budaya Mandar.

4. Pengarustamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai **kesetaraan dan keadilan** gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Menurut World Economic Forum (WEF) dalam *Global Gender Gap Report 2022,* Indonesia mendapat skor Indeks Ketimpangan Gender 0,697 (meningkat 0,009 dari 0,688 pada tahun sebelumnya) dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara (meningkat dari posisi 101 pada tahun sebelumnya). Indeks ketimpangan gender WEF memiliki sistem skor dengan rentang skala 0-1. Skor "0" menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar, dan skor "1" menunjukkan tercapainya kesetaraan penuh.

Walaupun terus menunjukkan tren perbaikan, Indeks Ketimpangan Gender Indonesia masih belum memuaskan. Untuk terus mendorong upaya perbaikan ini, agenda pengarusutamaan gender menjadi muatan utama dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Majene yang strategisnya akan diwujudkan dalam program

pengarusutamaan gender dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Majene tidak hanya bertumpu pada upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tetap memberikan akses pembangunan yang adil dan merata.

5. Globalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya. Karakteristik globalisasi meliputi adanya perubahan jarak dan waktu, ketergantungan di bidang ekonomi dan perdagangan, interkasi kultural meningkat, serta meningkatnya permasalahan berupa kejahatan dan kasus Kesehatan

Karakteristik tersebut muncul oleh karena perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk saling berkomunikasi, kerjasama internasional dalam bentuk perdagangan antara negara, kemudahan transportasi yang memberi akses untuk dapat saling berpindah, serta adanya pola ekonomi terbuka yang memunculkan pertukaran barang dan jasa. Globalisasi lalu muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi di bidang ekonomi, globalisasi di bidang komunikasi, globalisasi di bidang transportasi, dan globalisasi di bidang budaya.

Menjadi tantangan bagi Kabupaten Majene untuk menghadapi globalisasi, sehingga perlu untuk membuat arah kebijakan yang berkaitan dengan kesiapan agar tidak tergerus oleh efek negatif globalisasi. Globalisasi mesti direspon secara positif melalui tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan perbaikan kemakmuran. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, membangun infrastruktur teknologi dan komunikasi, menciptakan pola hubungan yang inklusif, dapat menjadi tindakan alternatif untuk dapat menunjukkan eksistensi dan survive dalam tantangan globalisasi.

B. Isu Nasional

Berdasarakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

1. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas indonesia yang tecermin dari *Local Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang tejangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

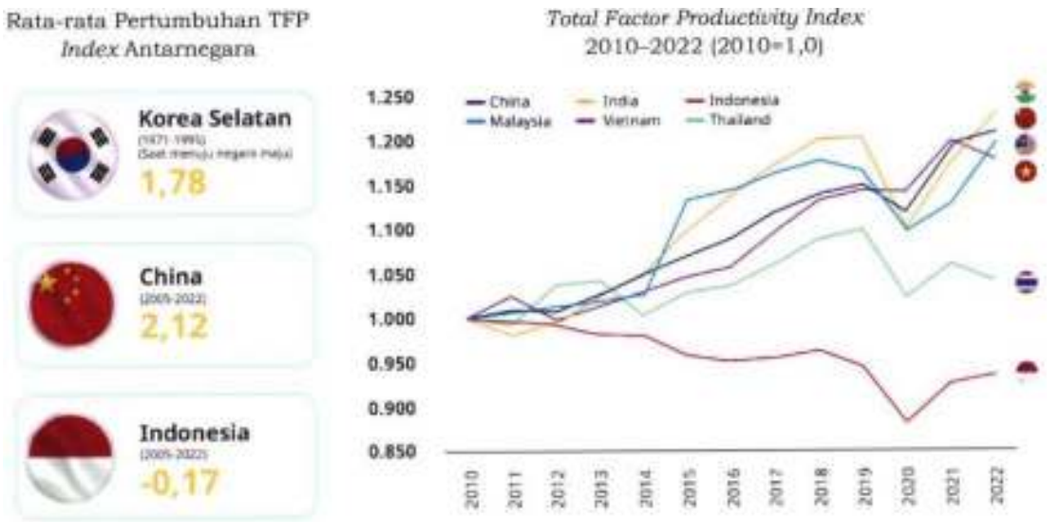

Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan *Asian Productivity Organization* (2024|, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan *Association of Southeast Asian Nations* sebesar US$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for Intemational Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinqgal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke

bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2O19-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan,2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada

Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4. Kebutuhan Hidup Tinggi Pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalem upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022*). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019*). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change,*

2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate mater 2,5 (*World Health organization, 2021*). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi *Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia*, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme*, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya dam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko *Triple Planteary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

6. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara

adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (*International Monetary Fund*, 2024). Sementara itu, inovasi global diprakirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (lnternational Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian lndonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti *Bank of England* dan *The Federal Reserve*. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G2O, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Battic Dry Index Level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 202l dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan

kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ *Coruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

C. Isu Strategis Regional Sulawesi Barat

1. Wilayah Penyanggah Ibu Kota Negara (IKN)

Pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang mempersiapkan perpindahan pusat pemerintahan sekaligus Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur yang tepatnya berlokasi di dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perwujudan pemindahan Ibu Kota Negara telah ditetapkan dalam Undang–Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan pada tanggal 15 Februari 2022.

Pemindahan ibu kota telah direncakan dari era Presiden Soekarno menjabat, pada awalnya pemindahan direncakana berpindah dari wilayah Jakarta ke Palangkaraya yang telah disiapkan untuk menjadi ibu kota baru, namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya polemik yang terjadi pada masa saat itu.

Pada akhirnya rencana pemindahan ini dapat terlaksanakan pada masa periode kedua Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memasukkan pemindahan ibu kota negara kedalam pelaksanaan proyek strategi nasional, hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Proses pemindahan IKN memakan waktu kurang lebih 25 tahun sejak penetapan rencana pemindahan mulai dari 2020 hingga 2045, dimana tahap awal pada 2020 – 2024 dimulainya pembangunan infrastruktur utama, infrastruktur dasar, pemindahan ASN dari beberapa kementerian dan lembaga, dan diharapkan Presiden Republik Indonesia telah menempati KIKN sehari sebelum memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (Bappenas, 2021). Perpindahan Ibu Kota Negara memiliki keuntungan bagi wilayah – wilayah yang berada di Indonesia bagian Timur, hal ini didasari hasil dari pemindahan ini terhadap dampak ekonomi salah satu yang diharapkan adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selama proses pemindahan, tentu didalamnya ada perpindahan penduduk yang menduduki wilayah IKN baru, dimana pada proses pertama, dimulai dengan pemindahan ASN dari beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan. Selain pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan aktifitas di dalam IKN baru, pemerintah perlu memperhatikan adanya kesiapan dalam memfasilitasi kebutuhan semua penduduk. Dalam pemenuhan kebutuhan yang dikonsumsi tidak terlepas dari tiga kebutuhan utama yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang dikelompokkan dalam benda baku seperti makanan dan minuman, hal ini selaras dengan kebutuhan pokok yang selalu menempati urutan teratas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan pangan bersamaan dengan kebutuhan sandang dan kebutuhan papan yang termasuk dalam kebutuhan pokok utama.

Pangan adalah kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pemenuhan pangan sudah termasuk dalam bagian hak asasi bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pangan, mulai dari pemantauan, persediaan, hingga menyiapkan jalur distribusi pangan yang dapat pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemindahan IKN baru ini tentu menjadi keuntungan yang sangat baik bagi Pemerintah Sulawesi Barat Utamanya Kabupaten Majene, tantangan dalam pemenuhan kebutuhan bagi calon penduduk IKN terutama kebutuhan pangan akan menjadi peluang peningkatan ekonomi bagi wilayah Kabupaten Majene. Kabupaten Majene Bersama beberapa kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah yang posisi berseberangan langsung dengan IKN baru.

Jarak antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dimana jika ditarik titik antar kedua wilayah tersebut adalah sejauh 299,56 km. Jarak ini lebih jauh dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah yang berada dibagian Utara dari Provinsi Sulawesi Barat. (Tangkapan Gambar Jarak Antara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat melalui Google Maps, 2025).

Pemerintah Majene sadar bahwa menyiapkan kebutuhan pangan tersebut diperlukan rencana yang tepat dalam proses penyediaan pangan hingga proses distribusi pangan. Kabupaten Majene dapat menjadi kawasan penghubung dalam pemenuhan dan pemasok kebutuhan pangan ke wilayah IKN baru. Keunggulan lainnya bahwa Kabupaten Majene berhadapan langsung dengan IKN Nusantara yang dipisahkan oleh Selat Makassar. Hal ini dapat menjadikan wilaya Kabupaten Majene sebagai sentra logistik pangan guna menyokong kebutuhan ibu kota negara baru. Jalur distribusi inilah yang dapat menjadi jembatan penghubung wilayah melalui jalur

laut sebaga penyambung wilayah Kalimtantan Timur dan Kabupaten Majene, serta pembangunan infrastruktur untuk jalur darat dalam proses distribusi kesiapan pangan.

Kabupaten Majene termasuk dalam 41 kabupaten/kota sebagai penyangga kebutuhan IKN melalui penandatanganan Pakta Komitmen pada tanggal 20 Juni 2022 terkait Dukungan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Nusantara. Pasca ditandatanganinya pakta tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene harus mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga yang berpotensi maju dengan keberadaan ibu kota tersebut, melihat dari letak geografis Kabupaten Majene yang akan menjadi pintu gerbang dari arah Selatan pulau Sulawesi memungkinkan untuk dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru, baik sektor perdagangan, jasa maupun industry serta sektor Pendidikan yang akan menopang disekitar IKN.

Dalam konteks kebijakan spasial dan sektoral daerah jika dilihat dari perspektif provinsi dan nasional, maka Kabupaten Majene memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai penyangga IKN. Dalam perspektif struktur ruang, Kabupaten Majene khususnya Kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang merupakan ibu kota kabupaten ditetapkan oleh Provinsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta ditetapkan menjadi pengembangan Ibu Kota Pendidikan di Sulawesi Barat. Selain itu, berdasarkan pada potensi geografis, system jaringan penyebrangan pelabuhan sudah melayani system jaringan penyebrangan antara Kabupaten Majene ke Batulicin yang merupakan ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sektor perindustrian dan perikanan Kawasan industri perikanan direncanakan pengembangannya di Plipi Desa Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

Dengan keberadaan IKN, maka tidak menutup kemungkinan rencana pengembangan kepelabuhanan bisa segera dieksekusi sebagai percepatan pengembangan wilayah untuk mencapai konektivitas antar wilayah Kalimantan dan Sulawesi agar dapat memberikan alternatif moda transportasi yang lebih efisien dalam distribusi logistik dan juga mobilitas manusia.

Sebagai penopang energi, rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Banggae akan menjadi penjaga stabilitas energi sesuai kebutuhan di masa depan.

Selain itu Kabupaten Majene juga sedang berproses dalam penguatan infrastruktur dasar pendukung, infrastruktur pertanian dan juga penyediaan suplai air baku. Untuk kelayakan sebagai sebuah kota yang menopang IKN, maka perlu daya dukung lahan sehingga mampu memenuhi penyediaan pangan yang memadai. Kekuatan penopang utama ekonomi di Kabupaten Majene hingga saat ini adalah di sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Pada masa yang akan datang basis unggulan daerah tetap dipertahankan di sektor utama tersebut. Sehingga bisa dikatakan Kabupaten Majene akan memberikan kontribusi utama terhadap IKN dari sisi ketercukupan suplai pangan. Selain itu, sektor lainnya juga tetap bisa berkembang seiring dengan hadirnya IKN nantinya.

2. Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam (SDA) karena sejumlah faktor kunci: (i)Keanekaragaman Sumber Daya Alam: Sulawesi kaya akan sumber daya alam seperti tambang mineral (nikel, emas, tembaga), kehutanan yang melimpah, serta potensi pertanian yang subur. Keanekaragaman ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan industri berbasis SDA di pulau tersebut. (ii) Kawasan Logistik dan Transportasi: Sulawesi memiliki posisi geografis yang strategis di antara kepulauan Indonesia. Dengan infrastruktur transportasi yang berkembang, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, Sulawesi dapat menjadi pusat logistik yang penting untuk distribusi barang dan jasa di kawasan Nusantara. (iii) Potensi Industri Pengolahan: SDA yang melimpah memberikan peluang besar untuk pengembangan industri pengolahan di Sulawesi. Misalnya, nikel dan tembaga dapat diolah menjadi logam, kayu dapat dijadikan bahan bangunan dan furniture, sementara hasil pertanian seperti kakao dan kelapa dapat diolah menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi. (iv) Investasi dan Pengembangan Infrastruktur: Untuk

mendukung peran Sulawesi sebagai superhub ekonomi dan pusat industri berbasis SDA, diperlukan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur. Ini termasuk pembangunan jaringan jalan dan rel, perluasan pelabuhan dan bandara, serta penyediaan energi dan air bersih yang memadai. (v) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inisiatif Pemerintah: Pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan industri berbasis SDA di Sulawesi melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK menyediakan insentif pajak, fasilitas infrastruktur, dan kemudahan investasi untuk menarik investor domestik dan asing ke daerah tersebut. (vi) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Sulawesi. Tenaga kerja yang terampil dan terdidik akan mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing regional.

Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong investasi serta pengembangan industri berbasis SDA, Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

3. Potensi Kebencanaan

Bencana merupakan suatu kejadian yang menimbulkan kerusakan yanag akan menyebabkan kerugian pada kehidupan, baik itu secara individu ataupun publik. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 mendefenisikan bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor alam, non alam, dan manusai atau secara sosial. Bencana pun akan mengakibatkan beberapa hal seperti timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana alam merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh fenomena alam yang tidak bisa cegah, namun dapat dikendalikan oleh manusia. Wilayah Indonesia secara geografis berada daerah iklim

tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Daerah beriklim tropis sangat ditandai dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang pada kondisi tidak terduga cukup ekstrim. Kondisi ekstrim tersebut menimbulkan beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Beberapa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana yang bersifat hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan kekeringan maupun bencana geologi seperi gempa bumi, dan tsunami.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah meluncurkan kajian risiko bencana pada wilayah Kabupaten Majene. Kajian resiko bencana tersebut dianalisis dengan banyak pendekatan dan sejarah dan/atau history kebencanaan. Berdasarkan data tersebut, bencana alam dapat diidentifikasi. Terdapat beberapa jenis bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Majene yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, gelombang tinggi, tsunami, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data yang tersaji pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Majene rawan terjadi bencana gempa bumi, hal tersebut terlihat kejadian Bencana Gempa Bumi pada 15-16 Januari 2021.

Selain bencana gempa bumi, bencana yang cukup luas rawan terjadi di Kabupaten Majene adalah bencana cuaca ekstrim, tanah longsor, dan kebakaran hutan lahan. Saat kejadian gempa pada bulan Januari 2021, banyak disusul terjadinya bencana longsor. Hal tersebut pun memperlihatkan bahwa kejadian bencana satu dan lainnya saling berkaitan. Secara luasan, terdapat beberapa bencana tidak terlalu nampak tapi sangat memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat seperti bencana banjir, banjir bandang, tsunami, dan abrasi. Bencana banjir bandang cukup luas yang sebagaian besar di Sungai Mandar, dan sungai Malunda. Adapun rawan bencana tsunamai dan abrasi cukup luas terjadi disepanjang pesisir atau pantai Kabupaten Majene.

4. Majene Sebagai Kota Pendidikan

Berdasarkan dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, wilayah Kabupaten Majene ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk Pusat pendidikan di wilayah Kabupaten Majene. Sejalan dengan itu dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032 juga menyebutkan bahwa salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Majene adalah Kawasan Strategis Pusat Pendidikan Sulawesi Barat yang dipusatkan di Kabupaten Majene yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Majene sebagai Pusat pendidikan merupakan cita-cita dan harapan besar dari para tokoh pejuang pembentukan Sulawesi Barat asal Majene pada saat perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan. Kini harapan itu secara perlahan tapi pasti mulai terwujud, ditandai dengan berdirinya Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Majene. Sebagai Kawasan strategis pusat Pendidikan di Sulawesi barat, Kabupaten Majene diharapkan akan menjadi terdepan dalam menciptakan insan-insan akademis, manusia intelektual, ataupun kelompok cerdik pandai yang nantinya akan berkontribusi dalam menentukan arah dan tujuan daerah maupun bangsa.

Kawasan pendidikan, umumnya sangat berpengaruh pada struktur ruang kota. Sebagai pusat kegiatan, kawasan pendidikan perlu didukung dengan aksesibilitas dan transportasi umum yang memadai sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kondisi ini kerap ditemukan di kota besar lainnya, terutama dengan berkembangnya kawasan pendidikan di tengah permukiman tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai, dan ke depannya dapat menjadi pemicu bagi tumbuh kembangnya sektor perekonomian khususnya pelaku ekonomi lokal, kemudahan akses pendidikan yang lebih tinggi atas penduduk lokal, serta menjadi momentum bagi gerakan giat literasi di Kabupaten Majene.

Kawasan strategis Pusat pendidikan mempunyai peran yang sangat penting sebagai penggerak kegiatan sosial ekonomi perkotaan,

sehingga diperlukan penguatan infrastruktur seperti penyediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas dalam mendukung Kabupaten Majene sebagai pusat Pendidikan di Provinsi sulwesi barat selaku kota Pendidikan. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawei Barat Selalu memperhatikan dan mendukung Kabupaten Majene sebagai Pusat Pendidikan di Sulawesi Barat.

5. Konektifitas Antar Wilayah di Sulawesi Barat

Konektivitas merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. Di Sulawesi Barat, isu konektivitas menjadi sangat krusial mengingat karakteristik wilayahnya yang berbukit-bukit, adanya jalur Trans Sulawesi, potensi maritim, dan kebutuhan untuk menghubungkan daerah-daerah produksi dengan pasar. Permasalahan utama terkait dengan kualitas Infrastruktur jalan adalah kondisi jalan masih banyak dalam kondisi rusak berat baik ruas jalan provinsi maupun ruas jalan kabupaten kondisi ini menghambat laju transportasi barang dan orang. Permasalahan lain dalam hal konektifitas adalah aksesibilitas daerah terpencil, masih banyak desa atau kecamatan di daerah pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang buruk atau bahkan belum teraspal, sehingga mengisolasi masyarakat dari pusat ekonomi dan layanan dasar.

Sedangkan permasalahan utama terkait dengan belum optimalnya pelabuhan dan konektifitas maritim, dimana fungsi pelabuhan yang belum maksimal sebagai gerbang utama perdagangan regional maupun inter pulau, belum banyaknya rute pelayaran reguler yang menghubungkan selawesi barat dengan dengan kota-kota besar lain yang ada di Indonesia.

Berbagai isu tersebut tergambarkan dalam tabel Isu Strategis Global, Nasional dan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.132.
Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber daya alam (pertanian, perikanan, kelautan)	Dominasi sektor primer, rendahnya produktivitas, minimnya investasi	Integrasi TPB/SDGs dalam pengelolaan SDA	Perubahan iklim, krisis pangan global	Rendahnya produktivitas, ketahanan pangan	Potensi sebagai penyangga IKN, lahan kritis	Pengembangan industri pengolahan berbasis SDA untuk mendukung IKN
Pariwisata dan budaya Mandar	Memudarnya budaya lokal, kurangnya infrastruktur pariwisata	Pelestarian budaya lokal dalam pembangunan berkelanjutan	Pengaruh globalisasi budaya	Peningkatan pariwisata nasional	Persaingan destinasi wisata regional	Digitalisasi budaya Mandar dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal
Pusat pendidikan (UNSULBAR, STAIN)	Keterbatasan infrastruktur pendidikan, aksesibilitas terbatas	Peningkatan akses pendidikan berkualitas (TPB 4)	Kebutuhan SDM terampil global	Peningkatan kualitas SDM nasional	Majene sebagai kota pendidikan Sulbar	Penguatan infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan tinggi
Konektivitas maritim dan darat	Kualitas jalan buruk, pelabuhan belum optimal	Infrastruktur berkelanjutan (TPB 9)	Ketergantungan logistik global	Konektivitas antarwilayah nasional	Konektivitas Sulbar sebagai penyangga IKN	Pengembangan pelabuhan dan jalan untuk mendukung logistik IKN
Potensi energi (PLTB Banggae)	Keterbatasan infrastruktur energi	Energi bersih dan terjangkau (TPB 7)	Transisi energi global	Kebijakan energi bersih nasional	Kebutuhan energi Sulbar	Pengembangan PLTB untuk stabilitas energi daerah
SDM kesehatan dan pendidikan	Rendahnya kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Kesehatan dan kesejahteraan (TPB 3)	Krisis kesehatan global	Peningkatan UHC dan SDGs	Keterbatasan tenaga kesehatan di Sulbar	Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan melalui pelatihan

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A. Visi dan Misi

Bab ini berisikan Visi dan Misi Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 beserta penjelasannya. Visi dan misi ini merupakan perwujudan dari Visi dan Misi pasangan Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, S.E.MM – Dr. Hj. Andi Rita Mariani Basharu, M.Pd. sebagai pasangan terpilih pada Pilkada Serentak 27 November 2024. RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran narasi politis dan operasionalisasi janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dimuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Pada periode 2020-2025, Visi Majene adalah “Majene Unggul, Mandiri, dan Religius”, namun untuk periode 2025-2029 dilakukan penyesuaian visi yang diperlukan karena visi yang sama antar periode menunjukkan stagnasi pembangunan, sehingga dapat menghambat kemajuan daerah dalam merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan dinamika ekonomi, serta menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat akan inovasi dan peningkatan kualitas hidup pada arahan visi sebelumnya.

Berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, pembaruan visi dapat dilakukan untuk menyesuaikan arah

pembangunan dengan kebijakan nasional yang baru, memperkuat koordinasi antar level pemerintahan, memastikan relevansi dengan isu strategis lokal, serta mendorong integrasi program lintas sektoral yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Perubahan tersebut dibatasi pada perubahan yang tidak mengubah makna pokok visi yang dilaporkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada masa Pemilu. Diksi Visi pembangunan daerah diperbaharui dengan menggunakan kata yang lebih progresif (menunjukkan perubahan yang lebih baik dari Visi sebelumnya) untuk mencerminkan semangat kemajuan dan inklusivitas. Pada visi ini diharapkan capaian pembangunan sebelumnya dapat terus ditingkatkan dan dapat memberi dampak yang lebih luas ke masyarakat. Pembaharuan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih aktif, strategis untuk menghadapi perubahan kebijakan nasional dan menguatkan kapasitas pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Majene Tahun 2025-2029, yaitu:

Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Majene Maju:

Bermakna bahwa Pemerintah Daerah akan menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan ASN yang profesional dan akuntabel.

Majene Mandiri :

Bermakna bahwa Pemerintah Daerah akan mewujudkan kemandirian ekonomi Kabupaten Majene melalui hilirisasi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif.

Majene Berbudaya :
Bermakna bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen membangun budaya masyarakat dan menjadikan nilai religi sebagai dasar perilaku, didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal untuk mewujudkan harmoni sosial.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Maju, Mandiri dan Berbudaya bermakna layanan dasar yang maju dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, dan pelayanan publik. Kemudian memfasilitasi transformasi ekonomi dengan dukungan infrastruktur mantap dan berwawasan lingkungan menuju hilirasi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudaya sebagai perwujudan nilai-nilai religi dan kearifan lokal yang mencerminkan kepatuhan terhadap perintah agama, norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang tertib, tentram dan damai.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Awalnya misi atau janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah disusun berdasarkan pada akronim inisial nama pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni AST-RITA, dengan rumusan sebagai berikut:

Aman Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan ketentraman serta melestarikan budaya masyarakat yang malaqbi'.

Sejahtera Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan investasi yang bertumpu pada potensi lokal dan regional, ramah lingkungan dan berkesinambungan

Terarah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien melalui peningkatan mutu birokrasi dengan menerapkan e-government yang holistik dan terintegrasi disegala sektor pelayanan publik.
Responsif	Mewujudkan akselerasi perbaikan taraf hidup masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam mendukung kemandirian masyarakat.
Inovatif	Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan serta peningkatan keterampilan dan kewirausahaan untuk menopang perekonomian daerah.
Terintegrasi	Mewujudkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi melalui perencanaan wilayah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Agromarine	Mewujudkan pengembangan wilayah yang berbasis industri melalui pengelolaan sumber daya pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata.

Penjelasan 7 Misi diatas merupakan penjabaran dari janji politis yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat Kabupaten Majene pada saat mengikuti tahapan Pilkada yang lalu. Dalam rangka penyempurnaan rangkaian redaksi misi di atas, maka dilakukan proses transformasi menjadi bahasa misi dan *adaptable* terhadap kaidah-kaidah perencanaan yang harus patuh pada regulasi dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Upaya Transformasi misi pada akronim AST-RITA menjadi bahasa teknokratis, ditempuh dengan sangat hati-hati, cermat dan seksama, agar seluruh misi politik yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dipastikan terakomodir didalam dokumen RPJMD periode 2025 - 2029. Proses transformasi dimaksud merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk menemukan standar-standar dalam menentukan indikator-indikator yang dapat diukur.

Setelah mengalami transformasi dan penyesuaian bahasa Misi, maka misi sebagai panduan langkah taktis untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Majene Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
2. Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal;
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.

Untuk lebih memperjelas gambaran transformasi dan penyesuaian misi, dapat dilihat pada persandingan berikut:

Tabel 3.1
Penyelarasan Misi AST-RITA dengan
Misi RPJMD Kab. Majene Periode 2025 – 2029

Misi AST-RITA	Hasil Transformasi Misi
2. **Sejahtera**: Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan investasi yang bertumpu pada potensi lokal dan regional, ramah lingkungan dan berkesinambungan	1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan
4. **Inovatif**: Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan serta peningkatan keterampilan dan kewirausahaan untuk menopang perekonomian daerah	
6. **Terintegrasi**: Mewujudkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi melalui perencanaan wilayah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan	
7. **Agromarine**: Mewujudkan pengembangan wilayah yang berbasis industri melalui pengelolaan sumber daya pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata	
1. **Aman**: Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan ketentraman serta melestarikan budaya masyarakat yang malaqbi'	2. Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2. **Sejahtera**: Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan investasi yang bertumpu pada potensi lokal dan regional, ramah lingkungan dan berkesinambungan	
3. **Responsif**: Mewujudkan akselerasi perbaikan taraf hidup masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam mendukung kemandirian masyarakat	
1. **Aman**: Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan ketentraman serta melestarikan budaya masyarakat yang malaqbi'	3. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal
3. **Terarah**: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien melalui peningkatan mutu birokrasi dengan menerapkan e-government yang holistik dan terintegrasi disegala sektor pelayanan publik	4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas
6. **Terintegrasi**: Mewujudkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi melalui perencanaan wilayah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan	

Untuk memperjelas uraian misi, maka dibutuhkan penjelasan atas misi yang merupakan gambaran dari kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan misi berikut relevansinya atas tiap pokok visi Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan antara Visi dan Misi pada
Penjelasan Misi RPJMD Kab Majene 2025 – 2029

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Penjelasan Keterkaitan Misi dengan Visi
Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya	Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	• Pengelolaan SDA dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk menciptakan peluang kerja bagi penduduk lokal, sehingga masyarakat Majene lebih terampil dan berdaya saing. **(Maju)** • Optimalisasi SDA melalui hilirisasi dan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi daerah. **(Mandiri)**
	Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	• Akses pendidikan merata baik formal maupun non-formal, serta layanan kesehatan berkualitas untuk menciptakan individu yang kompetitif dan produktif. **(Mandiri)** • Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai religius untuk membentuk karakter yang beriman dengan melestarikan budaya yang didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal dalam kehidupan sosial untuk menciptakan kesejahteraan. **(Berbudaya)**
	Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	• Perekonomian daerah yang mendukung pemberdayaan wirausaha berbasis kearifan lokal. **(Mandiri)** • Identitas budaya daerah yang terjaga melalui revitalisasi situs-situs bersejarah dan tradisi lokal. **(Berbudaya)**
	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	• Pemerintahan yang profesional dan transparan dengan meningkatkan kapasitas aparatur untuk menghasilkan pelayanan publik yang kompeten dan responsif bagi masyarakat Majene. **(Maju)** • Tata kelola yang berintegritas untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung pengembangan ekonomi lokal sehingga sumber daya daerah dapat dikelola secara mandiri dan efisien. **(Mandiri)** • Perwujudan pemerintahan yang bersih dengan mencerminkan karakter religius diperkuat dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal demi terciptanya pelayanan publik yang berintegritas. **(Berbudaya)**

Kemudian untuk mencapai kualitas perencanaan yang baik, patuh pada kaidah perencanaan harus memiliki benang merah pada semua tingkatan perencanaan mulai dari Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN) dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat, maka RPJMD Kabupaten Majene harus terkoneksi langsung dengan dua dokumen tersebut dan selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Majene. Sehingga keselarasan perencanaan dan keterpaduan dalam penyusunan program kerja mengarah pada cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Keselarasan hubungan antara Visi dan Misi RPJPD Kab. Majene 2025 - 2045 dengan Visi dan Misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Matriks Keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD Kab. Majene Periode 2025 – 2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kab. Majene Periode 2025 – 2045

<table>
<tr><th>Visi RPJMD 2025 – 2029</th><th>Visi RPJPD 2025 - 2045</th></tr>
<tr><td>Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya</td><td>Majene Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan</td></tr>
<tr><td>Pokok Visi
Majene Maju

Menjadikan Kab. Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan ASN yang profesional dan akuntabel.</td><td rowspan="2">Pokok Visi
Majene Maju

Terwujudnya kabupaten Majene yang Maju dari aspek kependudukan, tata kelola Pemerintahan, Aspek Ekonomi, Aspek Pembangunan Infrastruktur dan aspek Budaya. Aspek kependudukan yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, unggul serta mampu adaptif dengan perkembangan IPTEK agar mampu melakukan inovasi-inovasi di sektor produktif</td></tr>
<tr><td>Pokok Visi
Majene Berbudaya

Membangun budaya masyarakat dan menjadikan nilai religi sebagai dasar perilaku, didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal untuk mewujudkan harmoni sosial</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pokok Visi
Majene Mandiri

Mewujudkan kemandirian ekonomi Kab. Majene melalui hilirisasi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif</td><td>Pokok Visi
Majene Sejahtera

Merupakan kondisi dimana Masyarakat Kabupaten Majene terpenuhi segala kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan; terpenuhinya layanan pendidikan, kesehatan dan sosial; tersedianya lapangan pekerjaan; meningkatnya pendapatan masyarakat; memperoleh kehidupan yang aman dan tentram</td></tr>
<tr><td>Pokok Visi
Majene Berkelanjutan

Pembangunan di Kabupaten Majene mengedepankan prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan memperhatikan peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan tujuan Pembangunan yang telah tertuang dalam SDGs (Sustainable Development Goals).</td></tr>
</table>

Misi RPJMD 2025 – 2029	Misi RPJPD 2025 - 2045
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing
	4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan
	7. Membangun Infrastruktur Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
2. Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Mewujudkan Transformasi Sosial
	4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Mewujudkan Transformasi Sosial
	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas
	8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah

Demikian pula dengan keterkaitan antara Dokumen RPJMD harus terkoneksi langsung dengan dokumen perencanaan nasional sebagai wujud kesatuan pandang dan misi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 3.4
Matriks Keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD Kab. Majene Periode 2025 – 2029 dengan Visi dan Misi RPJMN Periode 2025 – 2029

Visi RPJMD 2025 – 2029	Visi RPJMN 2025 - 2029
Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya	**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**
Pokok Visi **Majene Maju** Menjadikan Kab. Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan ASN yang profesional dan akuntabel	Pokok Visi **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045** Pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045
Pokok Visi **Majene Mandiri** Mewujudkan kemandirian ekonomi Kab. Majene melalui hilirisasi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif	
Pokok Visi **Majene Berbudaya** Membangun budaya masyarakat dan menjadikan nilai religi sebagai dasar perilaku, didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal untuk mewujudkan harmoni sosial	

Misi RPJMD 2025 – 2029	Misi RPJMN 2025 - 2029
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
2. Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia
	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
3. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia
	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

Terakhir akan disajikan keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, hal ini menjadi salah satu prasyarat mutlak dalam perencanaan daerah sebagai bagian dari region Sulawesi Barat, dalam rangka melahirkan perencanaan yang terkoneksi langsung, selaras dengan harapan melahirkan keterpaduan dan harmoni dalam proses-proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene maupun dalam Wilayah Pemerintahan Sulawesi Barat secara luas.

Tabel 3.5

Matriks Keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD Kab. Majene Periode 2025 – 2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Prov. Sulawesi Barat Periode 2025 – 2029

Visi RPJMD 2025 – 2029	Visi RPJMD Sulbar 2025 – 2029
Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya	**Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera**
Pokok Visi **Majene Maju** Menjadikan Kab. Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan ASN yang profesional dan akuntabel	Pokok Visi **Sulawesi Barat Maju** Maju dimaknakan sebagai kondisi dimana Sulawesi Barat mencapai kemajuan dalam berbagai aspek, yang mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Maju juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, inovatif dalam berbagai sektor, dan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan
Pokok Visi **Majene Mandiri** Mewujudkan kemandirian ekonomi Kab. Majene melalui hilirisasi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif	Pokok Visi **Sulawesi Barat Sejahtera** Sejahtera dimaknakan sebagai kondisi dimana masyarakat Sulawesi Barat hidup dalam kesejahteraan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta berkurangnya kesenjangan distribusi pendapatan secara signifikan antar kelompok masyarakat secara keseluruhan. Sejahtera juga dimaknakan sebagai kondisi dimana sumberdaya manusia Sulawesi Barat benar-benar berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mengangkat taraf hidup
Pokok Visi **Majene Berbudaya** Membangun budaya masyarakat dan menjadikan nilai religi sebagai dasar perilaku, didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal untuk mewujudkan harmoni sosial	

Misi RPJMD 2025 – 2029	Misi RPJMD Sulbar 2025 – 2029
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
	4. Membangun Infrastruktur, Konektivitas dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
	3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berkarakter
3. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berkarakter
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	5. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan

daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025–2029 dapat dilihat dalam matriks berikut:

Tabel 3.6

Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran,
Visi: "Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya"

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Indeks Daya Saing Daerah
			Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	Laju Inflasi
			Terserapnya tenaga kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka
			Optimalnya hilirisasi pengelolaan SDA	Persentase Kontribusi SDA Unggulan & Industri Pengolahan terhadap Total PDRB
	Meningkatkan kualitas infrastuktur pendukung perekonomian daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Terselenggaranya konektivitas antar kawasan strategis	Indeks Konektivitas Wilayah
			Optimalnya pemanfaatan infrastruktur digital dan teknologi	Rasio Digitalisasi UMKM
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Penurunan emisi GRK kumulatif
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah
				Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup
				Tingkat Prevalensi Stunting
			Menguatnya sumber daya ekonomi masyarakat	Pendapatan Per Kapita
	Meningkatkan taraf hidup masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Menurunnya kesenjangan sosial	Indeks Gini
			Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
			Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas
			Optimalnya pengelolaan dana sosial syariah	Indeks Zakat
Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	Menguatkan identitas kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terintegrasinya nilai budaya, religi dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Meningkatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya Daerah	Persentase Usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang di daftrakan
			Meningkatnya Perlindungan, Pelestarian, dan Akses Publik terhadap Cagar Budaya Daerah	Persentase Benda, Situs Cagar Budaya yang di Lestarikan & Dikembangkan
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penetapan indikator tujuan dan sasaran menjadi elemen kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. RPJMD menyajikan kerangka indikator yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap tujuan strategis dapat diukur secara jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Indikator-indikator ini disusun berdasarkan metode pengumpulan data yang valid dan andal, dengan memanfaatkan capaian data 5 tahun sebelumnya sebagai dasar untuk memproyeksikan target 5 tahun ke depan. Proyeksi ini memungkinkan perencanaan yang realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan tren

perkembangan, tantangan, serta potensi daerah, sehingga setiap indikator dapat mencerminkan dampak pembangunan yang signifikan.

Tujuan dalam RPJMD mencerminkan arah pembangunan jangka menengah, sementara sasaran merupakan langkah-langkah konkret yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Indikator tujuan dan sasaran disusun dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan berfokus pada indikator dampak (*impact indicators*) yang memiliki pengaruh luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dirancang agar keberhasilannya bergantung pada pencapaian indikator pendukung di level perangkat daerah, yang diolah dari data yang dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya divalidasi serta diolah oleh lembaga vertikal, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau instansi terkait lainnya. Sumber data dari OPD daerah ini diolah untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keselarasan dengan standar nasional, sehingga menghasilkan indikator yang kredibel dan representatif.

Penyusunan indikator tujuan dan sasaran juga mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah, tantangan global, serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Data historis dari 5 tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi pola capaian dan memproyeksikan target yang realistis namun ambisius untuk 5 tahun ke depan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode yang terstandar, seperti survei, laporan rutin OPD, dan integrasi data lintas sektor, yang kemudian diolah oleh lembaga vertikal untuk menjamin objektivitas. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, indikator dampak ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan daerah berorientasi pada hasil yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.

Tabel 3.7

Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Visi : "Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya"

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir 2030
Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh		**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5.30**	**5.61**	**5.78**	**5.94**	**6.11**	**6.28**	**6.36**
		Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3.72	3.81	3.89	3.96	4.02	4.08	4.12
		Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	Laju Inflasi	Persen	1.94	1.88	1.76	1.69	1.63	1.57	1.51
		Terserapnya tenaga kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.19	3.12	3.09	3.05	3.02	2.98	2.94
		Optimalnya hilirisasi pengelolaan SDA	Persentase Kontribusi SDA Unggulan & Industri Pengolahan terhadap Total PDRB	%	45.79	46.37	47.07	47.77	48.47	49.17	49.87
	Meningkatkan kualitas infrastuktur pendukung perekonomian daerah		**Indeks Infrastruktur Daerah**	**Indeks**	**58.32**	**62.01**	**65.17**	**68.32**	**71.48**	**74.63**	**78.02**
		Terselenggaranya konektivitas antar kawasan strategis	Indeks Konektivitas Daerah	Poin	54.23	61.26	68.95	75.34	81.43	86.34	91.25
		Optimalnya pemanfaatan infrastruktur digital dan teknologi	Rasio Digitalisasi UMKM	Persen	52.11	53.34	54.55	55.75	56.96	58.16	59.33
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**78.26**	**80.33**	**80.46**	**80.59**	**80.72**	**80.85**	**80.98**
		Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO_2e	91.381	91.381	103.331	117.358	133.641	150.162	168.781
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	21.10	29.00	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00
Meningkatkan Upaya Pengembangan	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**73.25**	**74.90**	**76.68**	**78.46**	**80.24**	**82.03**	**84.09**
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.64	9.82	10.06	10.29	10.53	10.76	11.00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir 2030
SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.72	13.75	13.78	13.81	13.84	13.88	13.91
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.39	70.73	71.08	71.43	71.78	72.13	72.48
			Tingkat Prevalensi Stunting (e-PPGBM)	Persen	36.42	32,68	31,94	31,20	30,46	29,72	28,98
		Menguatnya sumber daya ekonomi masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	34.41	35.67	37.00	38.27	39.51	40.70	41.85
	Meningkatkan taraf hidup masyarakat		**Persentase Penduduk Miskin**	**Persen**	**13,64**	**12,54**	**11,16**	**11,07**	**10,43**	**9,79**	**9,15**
		Menurunnya kesenjangan sosial	Indeks Gini	Poin	0,348	0,340	0,333	0,325	0,318	0,310	0,302
		Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Persen	76.21	76.27	77.04	77.81	78.58	79.35	80.27
		Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	Kasus	185	179	175	171	167	163	161
		Optimalnya pengelolaan dana sosial syariah	Indeks Zakat	Poin	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,46
Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	Menguatkan identitas kebudayaan daerah		**Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Poin**	**50,47**	**52,57**	**55,66**	**60,76**	**63,85**	**66,95**	**72,85**
		Terintegrasinya nilai budaya, religi dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	74	75	76	77	78	79	80
		Meningkatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya Daerah	Persentase Usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang di daftrakan	%		5.65 %	7.34 %	8.47 %	10.17	11.30 %	12.43 %
		Meningkatnya Perlindungan, Pelestarian, dan Akses Publik terhadap Cagar Budaya Daerah	Persentase Benda, Situs Cagar Budaya yang di Lestarikan & Dikembangkan	%	7.91 %	8.2 %	8.47 %	9.03 %	10.16 %	10.72%	11.29 %

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir 2030
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		**Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah**	**Poin**	**3.15**	**3.23**	**3.30**	**3.36**	**3.41**	**3.45**	**3.50**
		Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	54.21	61.10	65.54	69.98	74.42	78.86	81.50
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	3.10	3.18	3.25	3.31	3.36	3.40	3.45
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	76,20	77,16	80,60	84,04	87,48	90,92	94,36

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

A. Strategi

Strategi pembangunan daerah merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, strategi didefinisikan sebagai rencana tindakan komprehensif yang mencakup langkah-langkah strategis, optimalisasi sumber daya, tahapan pelaksanaan, fokus, lokus, serta penentuan program prioritas. Pendekatan ini dirancang untuk menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah, memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan pembangunan yang telah dirumuskan.

Penyusunan strategi pembangunan daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan guna mencapai hasil yang maksimal. Dengan mengedepankan optimalisasi sumber daya, strategi ini menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal, baik sumber daya manusia, alam, maupun finansial, secara efektif dan efisien. Tahapan yang terstruktur dan penentuan fokus serta lokus pembangunan menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan sumber daya pada program-program prioritas yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks lingkungan yang dinamis, strategi pembangunan daerah harus bersifat adaptif dan inovatif. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat menuntut fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada pencapaian target jangka menengah, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, strategi ini menjadi landasan kokoh untuk mewujudkan Majene yang Maju, Mandiri dan Berbudaya.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, dirumuskan Strategi dan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada subbab sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.8
Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Rumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh	Meningkatnya daya saing pereknomian daerah	Pengelolaan SDA difokuskan pada peningkatan daya saing ekonomi daerah dengan pendekatan berkelanjutan. Prioritas utama ditujukan untuk mengangkat nilai tambah dari potensi unggulan daerah. Pelaksanaan bertahap mulai dari identifikasi potensi; modernisasi sarana prasarana, metode produksi, distribusi dan pemasaran dalam pengelolaan SDA; peningkatan dukungan infrtastruktur, pengembangan destinasi wisata, hingga evaluasi & optimalisasi setiap sektor unggulan. Pada akhirnya, ekonomi daerah dapat bertransformasi menjadi lebih kompetitif, membawa manfaat bagi taraf hidup semua lapisan masyarakat.
	Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	Pengelolaan SDA diarahkan untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah melalui diversifikasi pendapatan. Penekanan utama diberikan pada pengendalian harga bahan pokok. Proses pelaksanaan mencakup stabilisasi harga bahan pokok, penguatan cadangan pangan daerah, dukungan infrastruktur, implementasi kebijakan ramah konsumen hingga evaluasi keberlanjutan. Dengan ini stabilitas ekonomi yang kokoh dapat terwujud dan turut mendukung ketahanan sosial masyarakat.
	Terserapnya tenaga kerja lokal	Pengelolaan potensi lokal difokuskan pada penyerapan tenaga kerja lokal dengan pendekatan berbasis SDA, di mana prioritas utama diberikan pada pelatihan keterampilan dan penyesuaian dengan kebutuhan industri. Pelaksanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan diikuti pembinaan intensif, penguatan hubungan industrial, pengembangan kompetensi tenaga kerja dan kerjasama antar daerah hingga evaluasi dan optimalisasi. Di akhir proses, tenaga kerja lokal dapat terserap optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
	Optimalnya hilirisasi pengelolaan SDA	Pengelolaan SDA diarahkan pada penguatan hilirisasi dengan pendekatan inovatif, dengan fokus utama ditempatkan pada peningkatan nilai tambah ekonomi produk lokal. Langkah pelaksanaan dimulai dengan identifikasi potensi yang dilanjutkan dengan revitalisasi pusat perdagangan, revitalisasi sentra industri, peningkatan akses permodalan pelaku UMKM dan penguatan operasional serta pemasaran Di ujung proses, hilirisasi SDA ditingkatkan efisiensinya hingga mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas infrastuktur pendukung perekonomian daerah	Terselenggaranya konektivitas antar kawasan strategis	Pengelolaan infrastruktur difokuskan pada penguatan konektivitas antar kawasan melalui pembangunan sarana transportasi. Sasaran utama adalah memperluas jangkauan ke wilayah terisolasi. Penahapan diselaraskan dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada tiap pembangunan kawasan yang mencakup, kawasan pengembangan pertanian, kawasan pengembangan kelautan dan perikanan, kawasan transmigrasi, kawasan pariwisata, dan kawasan budaya. Pada akhir periode, konektivitas yang lebih baik dapat terbentuk, memperlancar akses pasar dan meningkatkan kesejahteraan warga.
	Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur digital dan teknologi	Pengelolaan teknologi digital difokuskan pada pemanfaatan ekonomi melalui pengembangan platform promosi lokal. Tujuan utama adalah memperluas jangkauan promosi produk daerah. Langkah pelaksanaan mencakup pembinaan UMKM, perluasan pengguna, pengembangan kapabilitas digital UMKM, dukungan infrastruktur dan akses permodalan hingga evaluasi berkelanjutan dan evaluasi implementasi kebijakan. Di ujung proses, daya jual produk lokal dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Pengelolaan lingkungan difokuskan pada pengendalian pencemaran dengan reboisasi, pengawasan limbah dan pengelolaan sampah. Perhatian utama diberikan pada pelestarian ekosistem setempat. Proses dilaksanakan secara bertahap yang mencakup peningkatan pengelolaan persampahan, reboisasi, penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, evaluasi serta optimasi upaya pelestarian lingkunan. Di akhir upaya, lingkungan yang lebih sehat dapat diwujudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan	Pengelolaan fasilitas dan pelatihan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Titik tekan utama adalah peningkatan literasi dan keterampilan warga. Pelaksanaan bertahap dimulai dari rekrutmen dan pemberdayaan tenaga kependidikan, peningkatan ketersediaan dan kualitas sekolah, edukasi masyarakat untuk pengentasan Anak Putus Sekolah, peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana sekolah hingga evaluasi berkala dan optimalisasi layanan. Di akhir program, akses pendidikan yang merata dapat disediakan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan layanan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas dengan penyediaan fasilitas dan tenaga medis. Penekanan utama ditempatkan pada layanan yang merata. Penahapan strategi ini mencakup rekrutmen dan pemberdayaan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, penanggulangan stunting, penguatan layanan operasional, hingga evaluasi berkala dan optimasi cakupan pelayanan. Di akhir periode, layanan kesehatan yang lebih baik dapat disediakan dan mampu mengangkat derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Menguatnya sumberdaya ekonomi masyarakat	Pengelolaan sumberdaya masyarakat difokuskan pada penguatan ekonomi dengan pembinaan dan penyediaan modal, di mana penekanan utama diberikan pada peningkatan kemandirian ekonomi lokal. Proses dimulai dengan pendampingan awal diikuti dengan pengembangan usaha hingga evaluasi berkala dan penguatan pemasaran produk ekonomi masyarakat. Di akhir tahap, sumberdaya ekonomi masyarakat menguat dan mendukung stabilitas sosial ekonomi daerah.
Meningkatkan taraf hidup masyarakat	Menurunnya kesenjangan sosial	Pengelolaan program inklusi difokuskan pada penurunan kesenjangan sosial dengan pendekatan terpadu, dengan sasaran utama adalah pemerataan akses ekonomi dan sosial. Pelaksanaan dirancang dimulai dengan identifikasi kelompok rentan yang diikuti intervensi berbagai program bantuan, penguatan koordinasi dengan instansi vertikal hingga peningkatan upaya pemerataan hasil pembangunan. Di akhir upaya, kesenjangan sosial dapat diturunkan demi menciptakan harmoni masyarakat yang lebih baik.
	Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Pengelolaan layanan dasar difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur terjangkau, di mana prioritas utama diberikan pada pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan strategi dimulai dengan perampungan rencana induk penuntasan pencapaian SPM, yang ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan SDM pelaksana dalam kerangka peningkatan upaya pencapaian SPM pada tiap urusan terkait, evaluasi berkala dan optimalisasi pencapaian tahunan. Di akhir periode kebutuhan pelayanan dasar dapat dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
	Terjaganya ketertaraman dan ketertiban umum	Pengelolaan keamanan difokuskan pada pemeliharaan ketertaman dan ketertiban dengan patroli dan edukasi. Tujuan utama adalah mencegah gangguan sosial. Langkah-langkah pelaksanaan meliputi penguatan regulasi pengawasan dan penguatan implementasi, penguatan SDM aparatur, hingga edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan seiring dengan evaluasi pencapaian tahunan. Di akhir proses, ketertiban yang terjaga terwujud dan menciptakan rasa aman bagi warga.
	Optimalnya pengelolaan data sosial syariah	Pengelolaan dana syariah difokuskan pada peningkatan efisiensi melalui sistem terpadu, dengan fokus utama diberikan pada transparansi dan pemanfaatan optimal. Tahapan pelaksanaan dirancang dimulai dengan penyusunan kerangka kerjasama dengan lembaga pengelola dana sosial syariah, diikuti implementasi kebijakan pendukung, perluasan basis penyumbang dan penerima dana sosial syariah, penguatan distribusi, hingga evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan. Di akhir proses, pengelolaan dana sosial syariah terlaksana dengan baik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat utamanya dari golongan rentan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Menguatkan identitas kebudayaan daerah	Terintegrasinya Nilai budaya, religi dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Pengelolaan nilai budaya difokuskan pada integrasi nilai religi dan kearifan lokal dalam pembangunan daerah melalui festival budaya. Fokus utama adalah mempromosikan nilai budaya, religi dan kearifan lokal dalam keseharian masyarakat. Jadwal pelaksanaan mencakup perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait, penguatan lembaga keagamaan dan kebudayaan, inventarisasi warisan budaya daerah, penguatan promosi budaya dan evaluasi serta optimalisasi pelaksanaan. Di akhir proses, integrasi budaya yang kuat dalam masyarakat dapat terbentuk dan mampu menjaga stabilitas sosial masyarakat.
	Meningkatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya Daerah	Penguatan tata kelola fokus Perlindungan Hukum dan Institusi, dengan mengintensifkan penetapan dan register Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) serta cagar budaya, meningkatkan nilai edukasi dan akses fokus pada pemanfaatan publik. Penguatan ekonomi kreatif berbasi budaya fokus pada pemanfaatan warisan Budaya untuk menumbuhkan ekonomi
	Meningkatnya Perlindungan, Pelestarian, dan Akses Publik terhadap Cagar Budaya Daerah	Penguatan perlindungan hukum dan konservasi fisik dengan mengintensifkan proses inventarisasi, penetapan, dan sertifikasi Cagar Budaya sesuai undang-undang. Merivitalisasi situs Cagar Budaya menjadi ruang publik yang edukatif dan inklusif.Mengintegrasikan situs Cagar Budaya sebagai sumber pembelajaran utama dalam program edukasi dan muatan lokal daerah. menerapkan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana terpadu untuk melindungi Cagar budaya.
kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas tata Kelola pemerintahan	Pengelolaan sistem pemerintahan difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dengan reformasi birokrasi, di mana sasaran utama adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan dimulai dengan penguatan sumber daya, diikuti implementasi kebijakan & pengawasan intensif, penguatan penerapan teknologi informasi, peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pendukung hingga evaluasi & optimalisasi. Di akhir upaya, akuntabilitas tata kelola dapat ditingkatkan hingga mampu membangun kepercayaan publik.
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada peningkatan kemandirian dengan penguatan pendapatan daerah. Prioritas utama diberikan pada diversifikasi pemasukan. Tahapan pelaksanaan dimulai dari peningkatan pengelolaan pajak, investasi aset daerah, diversifikasi sumber pendapatan, digitalisasi pengelolaan, hingga evaluasi & optimalisasi pendapatan. kemandirian finansial daerah dapat dicapai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Pengelolaan sumber daya aparatur difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan penekanan utama pada peningkatan kompetensi dan motivasi pegawai. Pelaksanaan bertahap dimulai dengan penguatan regulasi, implementasi program pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat hingga evaluasi dan optimalisasi pencapaian. Di akhir periode, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat meningkat dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

1. Penahapan Pembangunan

Prioritas pembangunan dibuat dengan penahapan yang jelas dan selaras dengan strategi yang telah ditetapkan untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran kepala daerah secara bertahap tanpa mengorbankan aspek penting lainnya. Perencanaan yang terstruktur juga membantu menyelaraskan visi jangka panjang dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Kerangka logis penahapan pembangunan Kabupaten Majene dalam konteks RPJMD dirancang untuk mewujudkan visi "Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya" melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan tahap awal yang fokus pada penguatan fondasi pembangunan, diikuti oleh upaya revitalisasi dan modernisasi untuk meningkatkan efisiensi serta kemandirian ekonomi. Selanjutnya, pembangunan berlanjut dengan penguatan kapasitas lokal dan sektor ekonomi kreatif, guna menciptakan stabilitas dan kemandirian yang lebih luas. Pada tahap akhir, fokus beralih ke pengembangan infrastruktur pendukung dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan masyarakat. Tahun akhir digunakan untuk mengoptimalkan hasil dari tahapan sebelumnya, dengan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek fisik, ekonomi, dan budaya, sehingga visi Majene dapat terwujud secara holistik.

Pada implementasinya, Penahapan Pembangunan ini merupakan operasionalisasi dari Strategi yang dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun maupun lebih dari satu tahun (*multi-years*) pada periode pembangunan daerah. Secara fungsi, penahapan pembangunan ini menjadi landasan dalam menentukan fokus pembangunan tahunan sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta ditunjang pertimbangan kemampuan atau kapasitas fiskal pemerintah daerah, penentuan penahapan pembangunan menempati posisi yang krusial dalam rangka pencapaian tujuan dan misi pembangunan daerah. Adapun penahapan pembangunan untuk Kab. Majene adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Penahapan Pembangunan Daerah

2026	2027	2028	2029	2030
Identifikasi dan penetapan komoditas unggulan daerah	Modernisasi sarana prasarana dan metode produksi	Pengembangan distribusi dan pemasaran	Peningkatan dukungan infrastruktur dan destinasi wisata	Evaluasi dan optimalisasi sektor unggulan
Stabilisasi harga bahan pokok	Penguatan cadangan pangan daerah	Dukungan infrastruktur pangan	Implementasi kebijakan ramah konsumen	Evaluasi dan optimalisasi keberlanjutan stabilitas harga
Pembinaan intensif keterampilan tenaga kerja	Penguatan hubungan industrial	Penguatan kerjasama antar daerah	Pengembangan kompetensi tenaga kerja	Evaluasi dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja
Revitalisasi pusat perdagangan	Revitalisasi sentra industri	Peningkatan akses permodalan UMKM	Penguatan operasional dan pemasaran	Evaluasi dan optimalisasi hilirasasi pengelolaan SDA
Pengembangan kawasan transmigrasi	Pengembangan kawasan pertanian, kelautan dan perikanan	Pengembangan kawasan pariwisata	Pengembangan kawasan budaya	Evaluasi dan optimalisasi konektivitas antar kawasan
Integrasi teknologi informasi pada UMKM	Perluasan pengguna platform digital	Dukungan infrastruktur teknologi digital	Pengembangan kapabilitas digital UMKM	Evaluasi dan optimalisasi kebijakan promosi digital
Peningkatan pengelolaan persampahan	Reboisasi dan pengawasan limbah	Penguatan regulasi lingkungan	Pemberdayaan masyarakat untuk pelestarian	Evaluasi dan optimalisasi upaya pelestarian lingkungan
Rekrutmen dan pemberdayaan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sekolah	Edukasi masyarakat untuk pengentasan anak putus sekolah	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasana sekolah	Evaluasi dan optimalisasi akses dan kualitas pendidikan
Peningkatan upaya penanggulangan stunting	Pemberdayaan tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan	Penguatan layanan operasional kesehatan	Evaluasi dan optimalisasi cakupan pelayanan kesehatan
Pengembangan kewirausahaan	Pengembangan usaha ekonomi lokal	Peningkatan akses permodalan	Penguatan pemasaran produk masyarakat	Evaluasi dan optimalisasi kemandirian ekonomi lokal
Penguatan identifikasi, verifikasi dan validasi kelompok rentan	Intervensi program bantuan	Penguatan koordinasi instansi vertikal	Peningkatan pemerataan hasil pembangunan	Evaluasi dan optimalisasi penurunan kesenjangan sosial

2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarpras pendukung pencapaian SPM	Peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM pendukung pencapaian SPM	Penguatan regulasi pendukung pencapaian SPM	Perluasan aksesibilitas masyarakat	Evaluasi dan optimalisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
Penguatan regulasi pendukung trantibumlinmas	Penguatan implementasi regulasi	Edukasi masyarakat berkelanjutan	Penguatan SDM Aparatur trantibumlinmas	Evaluasi dan optimalisasi ketertiban dan keamanan
Penyusunan kerangka kerja sama dengan lembaga pengelola dana sosial syariah	Implementasi kebijakan pendukung	Perluasan basis penyumbang dan penerima dana sosial syariah	Penguatan distribusi dana sosial syariah	Evaluasi dan optimalisasi pemanfaatan dana sosial syariah
Penguatan lembaga keagamaan dan kebudayaan	Perencanaan dan koordinasi acara keagamaan dan kebudayaan	Inventarisasi warisan budaya	Penguatan promosi budaya daerah	Evaluasi dan optimalisasi integrasi budaya
Penguatan sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap kebudayaan daerah	Pelaksanaan kegiatan budaya	Peningkatan kapasitas SDM sektor budaya dan keagamaan	Penguatan promosi budaya	Evaluasi dan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan & kebudayaan
Pengembangan kapabilitas ASN	Penguatan regulasi pendukung reformasi birokrasi	Penguatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan	Evaluasi dan optimalisasi tata kelola pemerintahan
Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah	Investasi aset daerah	Diversifikasi sumber pendapatan daerah	Digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah	Evaluasi dan optimalisasi kemandirian finansial daerah
Penguatan regulasi dan infrastruktur pelayanan publik	Peningkatan kapasitas kelembagaan instansi pelayanan publik	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik	Peningkatan kompetensi pegawai	Evaluasi dan optimalisasi kepuasan pelayanan publik

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene periode 2026–2029 merupakan panduan strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pentahapan ini dirancang secara bertahap dengan prioritas tahunan yang saling terhubung untuk mencapai visi daerah. Dimulai dari pembangunan fondasi, pengembangan kapasitas, hingga optimalisasi hasil, RPJMD ini bertujuan menjadikan Kabupaten Majene yang Maju, Mandiri dan Berbudaya melalui peningkatan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan pelayanan publik.

Pada tahun 2026 – 2027, fokus utama adalah penyiapan fondasi pembangunan yang menekankan penguatan basis ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahun 2026 berfokus pada identifikasi potensi dan stabilisasi dasar, seperti penetapan komoditas unggulan, stabilisasi harga bahan pokok, dan penguatan kapasitas tenaga kerja serta lembaga keagamaan, karena langkah ini penting untuk memetakan dan memperkuat aset daerah sebagai landasan awal pembangunan. Tahun 2027 melanjutkan dengan modernisasi dan penguatan sistem, termasuk sarana produksi, cadangan pangan, dan regulasi birokrasi, karena penguatan ini diperlukan untuk membangun efisiensi dan ketahanan sistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tahap awal.

Pada tahun 2028 – 2030, fokus utama adalah pengembangan dan optimalisasi untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Tahun 2028 menitikberatkan pada pengembangan akses dan distribusi, seperti pemasaran UMKM, infrastruktur pangan, dan teknologi digital, karena perluasan akses ini krusial untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat setelah fondasi terbentuk. Tahun 2029 memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan, termasuk kompetensi tenaga kerja, kesehatan, dan promosi budaya, karena peningkatan kualitas ini esensial untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pelestarian identitas daerah di fase matang. Tahun 2030 berfokus pada evaluasi menyeluruh untuk mengoptimalkan semua sektor, karena evaluasi ini vital untuk memastikan keberlanjutan dan pencapaian target RPJMD secara menyeluruh di akhir periode.

2. Lokus Pembangunan Daerah

Penetapan lokus pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD Kabupaten Majene 2025-2029 menjadi elemen krusial untuk memastikan arah pembangunan yang terfokus, terukur, dan selaras dengan potensi serta kebutuhan wilayah. Lokus pembangunan berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan sumber daya, investasi, dan kebijakan ke wilayah-wilayah prioritas, baik dari aspek geografis, sektoral, maupun tematik, sehingga mampu mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Majene. Dengan mengacu pada dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan lokus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya responsif terhadap dinamika lokal, tetapi juga selaras dengan kerangka kebijakan nasional dan provinsi.

Penetapan lokus pembangunan diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Majene. Dengan memprioritaskan wilayah-wilayah strategis, seperti kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan pedesaan dengan potensi pertanian dan perikanan, serta kawasan pesisir sebagai penyangga ekosistem, pembangunan diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas layanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Lokus yang jelas juga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien, mengurangi risiko tumpang tindih program, dan memperkuat koordinasi antar-sektor serta antar-level pemerintahan, sehingga mempercepat capaian visi pembangunan daerah yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.

Kerangka logis penetapan lokus pembangunan di Kabupaten Majene didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap potensi, tantangan, dan kebutuhan wilayah, yang diintegrasikan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Proses ini melibatkan penyelarasan dengan RPJMN untuk mendukung agenda nasional seperti percepatan infrastruktur dan transformasi ekonomi, serta dengan RPJMD dan

RTRW Provinsi untuk memastikan harmonisasi dengan prioritas pembangunan Sulawesi Barat. Instrumen seperti RTRW dan RDTR Kabupaten menjadi acuan untuk menentukan zona-zona pembangunan, seperti kawasan industri, agropolitan, atau konservasi, sementara KLHS menjamin bahwa setiap lokus memperhatikan daya dukung lingkungan. Dengan pendekatan ini, lokus pembangunan tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga cerminan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Majene.

Adapun lokus pembangunan untuk Kab. Majene dalam untuk periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Lokus Pembangunan Daerah

Lokus Pembangunan	Prioritas Pembangunan
Kec. Banggae Timur	• Pengembangan destinasi wisata • Pengembangan kawasan budaya • Pengembangan pusat pendidikan • Pengembangan sentra industri meubel • Pengembangan kawasan wisata budaya • Penanganan stunting • Percepatan penanggulangan kemiskinan • Pengembangan kawasan perkebunan kelapa dalam
Kec. Banggae	• Pengembangan destinasi wisata • Pengembangan kawasan strategis minapolitan • Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan • Pengembangan kawasan budaya • Pengembangan pusat pendidikan • Pengembangan kawasan pusat pemerintahan • Pengembangan kawasan perkebunan kelapa dalam • Pengembangan sentra industri Galangan Kapal Rakyat • Pengembangan sentra industri pengolahan kelapa • Pengembangan sentra industri pengolahan logam • Pengembangan kawasan wisata budaya • Penanganan stunting • Percepatan penanggulangan kemiskinan
Kec. Pamboang	• Pengembangan kawasan strategis minapolitan • Pengembangan kawasan budaya • Pengembangan kawasan perkebunan kelapa dalam • Pengembangan sentra pembibitan kambing • Pengembangan destinasi wisata • Pengembangan wisata kuliner • Pengembangan kawasan wisata budaya • Penanganan stunting • Percepatan penanggulangan kemiskinan
Kec. Sendana	• Pengembangan pelabuhan perikanan • Pengembangan kawasan strategis minapolitan • Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Lokus Pembangunan	Prioritas Pembangunan
	• Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan • Pengembangan sentra industri pengolahan ikan • Pengembangan kawasan perkebunan kelapa dalam • Pengembangan kawasan perkebunan kakao • Pengembangan destinasi wisata • Pengembangan wisata kuliner • Pengembangan kawasan wisata budaya • Penanganan stunting • Percepatan penanggulangan kemiskinan
Kec. Tammeroddo Sendana	• Pengembangan kawasan perkebunan kelapa dalam • Pengembangan kawasan perkebunan kakao • Pengembangan kawasan perkebunan kemiri • Pengembangan wisata kuliner • Penanganan stunting • Percepatan penanggulangan kemiskinan
Kec. Tubo Sendana	• Pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Rakyat • Pengembangan kawasan perkebunan kelapa dalam • Pengembangan kawasan perkebunan kakao • Pengembangan kawasan perkebunan kemiri • Pengembangan wisata kuliner • Penanganan stunting • Percepatan penanggulangan kemiskinan
Kec. Ulumanda	• Pengembangan kawasan perkebunan kopi • Pengembangan kawasan perkebunan kakao • Pengembangan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Rakyat • Pengembangan Kawasan Transmigrasi • Penanganan stunting • Percepatan penanggulangan kemiskinan
Kec. Malunda	• Pengembangan kawasan strategis agropolitan • Pengembangan kawasan perkebunan kelapa dalam • Pengembangan kawasan perkebunan kakao • Pengembangan kawasan budaya • Penanganan stunting • Percepatan penanggulangan kemiskinan

B. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rangkaian kerja strategis yang dirancang untuk menjabarkan misi pembangunan daerah agar selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini menjadi landasan utama dalam mengarahkan setiap langkah pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara terukur, efektif, dan efisien. Dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan daerah, arah kebijakan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki fokus yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, arah kebijakan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Dengan memprioritaskan sinergi antar-sektor dan keterlibatan aktif masyarakat, arah kebijakan ini tidak hanya menjamin pencapaian target jangka menengah, tetapi juga memperkuat fondasi bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, arah kebijakan dalam RPJMD menjadi kompas yang menuntun langkah kolektif menuju kemajuan dan kesejahteraan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Kab. Majene Periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Peningkatan daya saing ekonomi daerah dengan hilirisasi pengelolaan SDA
		Pemantapan stabilitas ekonomi daerah dengan pengendalian inflasi
		Pengembangan lapangan kerja lokal melalui pemberdayaan ekonomi berbasis SDA
		Pengembangan sektor pariwisata bahari dengan fokuspada pembangunan destinasi pariwisata bahari, pemasaran pariwisata bahari, pembangunan industri pariwisata bahari, serta membangun dan memperkuat kelembagaan pariwisata, terutama pada kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir.
		Peningkatan nilai tambah SDA melalui hilirisasi terarah
		Penguatan konektivitas antar kawasan dengan pembangunan jalan dan fasilitas transportasi
		Pemanfaatan teknologi digital untuk ekonomi dengan pengembangan platform promosi lokal
		Pengendalian pencemaran lingkungan dengan reboisasi, pengawasan limbah dan pengelolaan sampah
		Penerapan rencana tata ruang secara konsisten untuk memastikan semua aktivitas pembangunan sesuai dengan tata ruang serta melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap tata ruang dan meningkatkan ketahanan bencana

No	Misi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kebijakan, perencanaan terpadu, dan pengembangan sistem mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan bencana secara terintegrasi
		Peningkatan produksi kopi pada kawasan transmigrasi
		Pengembangan ekonomi transmigrasi berbasis agroindustri dan keterampilan terpadu
		Penguatan infrastruktur ekonomi, akses pasar, jaringan transportasi dan teknologi untuk mendukung produktivitas pada kawasan transmigrasi
		Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi di bidang pertanian dan perkebunan
		Pengembangan industri padat karya terampil.
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemukiman seperti air minum, sanitasi, dan listrik secara inklusif dan terpadu serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat
		Perluasan jangkauan perlindungan dan bantuan sosial, layanan kesehatan terjangkau, dan akses pendidikan berkualitas untuk masyarakat miskin.
		Peningkatan upaya pencegahan Tuberkulosis dan pengendalian penyakit kusta
2	Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan pembangunan fasilitas dan pembinaan
		Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dengan penyediaan fasilitas dan tenaga medis
		Penguatan tata kelola dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan keterampilan dan akses modal
		Pengurangan kesenjangan sosial melalui program inklusi ekonomi
		Peningkatan kompetensi SDM sektor pertanian
		Penyediaan layanan dasar yang merata melalui pembangunan infrastruktur publik
		Pemeliharaan ketertaman dan ketertiban dengan patroli dan edukasi
		Penguatan pengelolaan dana sosial syariah dengan sistem terstruktur
3	Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	Integrasi nilai religi dan kearifan lokal dalam pembangunan daerah dengan festival budaya
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya melalui edukasi
4		Peningkatan akuntabilitas melalui reformasi birokrasi secara menyeluruh

No	Misi	Arah Kebijakan
	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan penguatan pendapatan daerah
		Optimalisasi sumber daya aparatur pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

C. Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas merupakan pilar utama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dirancang sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Melalui pendekatan cascading, program prioritas diturunkan dari visi dan misi RPJMD, memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program ini menjadi fokus utama perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai kinerja yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penyusunan program prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat, potensi daerah, serta tantangan pembangunan yang dihadapi. Program ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjawab isu strategis, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan sinergi antar-sektor dan antar-level pemerintahan. Pendekatan cascading memungkinkan penurunan indikator kinerja secara berjenjang, sehingga setiap perangkat daerah memiliki peran yang jelas dalam mendukung capaian tujuan pembangunan yang lebih besar.

Dalam implementasinya, program prioritas diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Dengan fokus pada hasil yang terukur, program ini juga menjadi landasan evaluasi dan pengendalian pembangunan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi jangka panjang daerah. Adapun uraian rinci program prioritas yang telah dirumuskan beserta indikator keberhasilannya, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Rumusan Program Prioritas RPJMD Kab. Majene Tahun 2025 – 2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
MAJENE MAJU, MANDIRI DAN BERBUDAYA						
Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	**Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh**			**Pertumbuhan Ekonomi**		
		Meningkatnya daya saing perekonomian daerah		**Indeks Daya Saing Daerah**		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disbudpar
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanakbun
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Dokumen)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Distanakbun
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Program Penyuluhan Pertanian	Distanakbun

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskopedagrin
				Pertumbuhan wirausaha		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	Program Pengembangan UMKM	Diskopedagrin
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	Program Pengembangan Ekspor	Diskopedagrin
			Meningkatnya kemudahan Berinvestasi	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPM-PTSP
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Terjaganya stabilitas pereknomian daerah		**Laju Inflasi**		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketapang
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketapang
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskopedagrin

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskopedagrin
		Terserapnya tenaga kerja lokal		**Tingkat Pengangguran Terbuka**		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnakertrans
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Daerah (%)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA
		Optimalnya hilirisasi pengelolaan SDA		**Persentase Kontribusi SDA Unggulan & Industri Pengolahan terhadap Total PDRB**		
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanakbun
				peningkatan produksi hortikultura		
				peningkatan produksi komoditas peternakan		
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	Program Perizinan Usaha Pertanian	Distanakbun

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Diskopedagrin
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Diskopedagrin
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	BRIDA
	Meningkatkan kualitas infrastuktur pendukung perekonomian daerah			**Indeks Infrastruktur Daerah**		
		Terselenggaranya konektivitas antar kawasan strategis		**Indeks Konektivitas Wilayah**		
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU PR
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU PR
			Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Pewrsentase tahapan persediaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dinas Perkimtan
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perkimtan
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perkimtan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Disnakertrans
		Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur digital dan teknologi		**Rasio Digitalisasi UMKM**		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfis
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfis
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Diskopedagrin
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskopedagrin
				Pertumbuhan wirausaha		
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		
		Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan		**Penurunan Emisi GRK Kumulatif**		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU PR
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkimtan
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK
				Indeks Kualitas Udara		
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLHK
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLHK
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Peningkatan Persentase Sampah yang Terkelola	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	DLHK
Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	**Meningkatkan kualitas SDM masyarakat**			**Indeks Pembangunan Manusia**		
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan		**Rata-Rata Lama Sekolah**		
				Harapan Lama Sekolah		
			Meningkatnya partisipasi anak usia anak sekolah	APM SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora
				APM SMP		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdikpora
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	Program Pembinaan Perpustakaan	DPAD
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan		**Angka Harapan Hidup**		
				Tingkat Prevalensi Stunting		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modem/ Modem Contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB
				Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
		Menguatnya sumberdaya ekonomi masyarakat		**Pendapatan Per Kapita**		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa (Desa)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMD

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Diskopedagrin
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Diskopedagrin
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora
	Meningkatkan taraf hidup masyarakat			**Persentase Penduduk Miskin**		
		Menurunnya kesenjangan sosial		**Indeks Gini**		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPA
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat		**Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal**		
			Meningkatnya partisipasi anak usia anak sekolah	APM SD	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora
				APM SMP		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU PR
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)		
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU PR
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PU PR
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU PR
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU PR

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkimtan
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkimtan
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Program Penanganan Bencana	Dinsos
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
		Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum		**Angka Kriminalitas**		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Pemenuhan koordinasi trantibum Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
		Optimalnya pengelolaan data sosial syariah		**Indeks Zakat**		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	**Menguatkan identitas kebudayaan daerah**			**Indeks Pembangunan Kebudayaan**		
		Terintegrasinya nilai budaya, religi dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat		**Indeks Kerukunan Umat Beragama**		
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	DPAD
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbudpar
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Program Pembinaan Sejarah	Disbudpar
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Pancasila dan karakter kebangsaan			
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
		Meningkatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya Daerah		**Persentase Usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang di daftrakan**		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	Program Pengembangan Kebudayaan	Disbudpar
		Meningkatnya Perlindungan, Pelestarian, dan Akses Publik terhadap Cagar Budaya Daerah		**Persentase Benda, Situs Cagar Budaya yang di Lestarikan & Dikembangkan**		
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disbudpar
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan		
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	**kualitas tata kelola pemerintahan**			**Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah**		
		Meningkatnya akuntabilitas tata Kelola pemerintahan		**Indeks Reformasi Birokrasi**		
			Peningkatan kualitas layanan publik	Persentase capaian program penunjang urusan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalarn penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfis

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	Program Pengelolaan Arsip	DPAD
			Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi (%)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapeda
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)		
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan APBD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapeda
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan APBD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)		
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan APBD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**		
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)		
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)		
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)		
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Manajemen Aset (Kategori)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat**		
			Peningkatan kualitas layanan publik	Persentase capaian program penunjang urusan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				Persentase Kepemilikan KK		
				Persentase Kepemilikan KIA		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akte	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase OPD/ Lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MoU) Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	Program Kepegawaian Daerah	BK-PSDM
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BK-PSDM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program	Ket
			dasar, kader, manajerial dan fungsional			
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)		
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan

Pemadanan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa program-program yang diusung selama masa kampanye dapat terintegrasi secara sistematis dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan janji-janji kampanye tersebut dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga visi pimpinan terpilih dapat diwujudkan dalam kerangka kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun program kampanye ini sejalan dengan prioritas daerah yang telah ditetapkan, pendekatannya disusun dalam kerangka yang berbeda, dengan penekanan pada strategi spesifik yang mencerminkan komitmen dan aspirasi yang diusung selama kampanye untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih terfokus.

Adapun program prioritas tersebut menggunakan terminologi dalam bahasa Mandar yaitu ***"Lima Pattuyu".*** Adapun konten dari program pada masa kampaye tersebut sebagai berikut:

1. **Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok**

   Pemenuhan Kebutuhan Primer masyarakat Kabupaten Majene menjadi salah satu prioritas utama yang wajib diperhatikan. Ketersediaan bahan pangan menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan sehingga dibutuhkan intervensi Pemerintah daerah melalui kebijakan khusus secara terintergasi dan komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kemudian akan berimplikasi kepada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat;

2. **Perluasan Lapangan Pekerjaan**

   Isu Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka masih menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Majene. Berdasarkan data Indikator Makro Pembangunan Daerah, TPT Kabupaten Majene berada pada angka 4,26%. Salah satu penyebab utamanya adalah masih terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Temuan lainnya adalah Sebagian Angkatan kerja masih memiliki mindset bahwa pekerjaan hanya bertumpu pada pekerja kantoran sehingga hal tersebut menghambat kreatifitas dan inovasinya dalam menciptakan

lapangan pekerjaan baru. berdasarkan temuan tersebut, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan dianggap menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilaksanakan.

3. **Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan**

   Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi salah satu hal yang vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah baik dari perspektif ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterbukaan akses melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur diharapkan dapat membuka jalur perekonomian sehingga dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat pelaku ekonomi. Dalam hal tujuannya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Potensi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur adalah penyesuaian terhadap *environmental ethics* atau pembangunan yang memperhatikan analisis dampak lingkungan sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan;

4. **Pembangunan Ekonomi yang bertumpu pada isu strategis dan potensi lokal**

   Pembangunan ekonomi dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi unggulan daerah menjadi salah satu program prioritas yang wajib dilaksanakan. Prinsip pengembangan ekonomi inklusif dengan konsep pemberdayaan yang dimulai identifikasi dan analisis terhadap potensi unggulan daerah yang secara berjenjang kemudian dilakukan proses intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi terhadap potensi daerah tersebut yang kemudian akan menjadi penyangga peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh yang tentunya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene

5. **Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**

   Peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan diarahkan pada Kesetaraan terhadap pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan. Pendidikan adalah hak Warga Negara tanpa kecuali baik berupa pendidikan formal maupun non formal. Peningkatan Kualitas Pendidikan menjadi program wajib yang harus dilaksanakan baik secara konseptual

pemerintahan maupun secara prosedural (mandatory) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Kualitas pendidikan di Kabupaten Majene yang tergambar dari indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah menunjukkan angka yang belum cukup baik. Sehingga diharapkan intervensi lebih lanjut dengan memaksimalkan sumber daya dan regulasi yang ada untuk meningkatkan kualitas, aksesibiltas, manajemen dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Majene. Peningkatan Layanan Kesehatan juga menjadi prioritas wajib yang harus diintervensi. Percepatan proses layanan kesehatan yang memiliki standar operasional prosedur yang memenuhi standar pelayanan minimal, aksesbilitas masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dan Opimalisasi layanan kesehatan melalui fungsi fasilitas kesehatan (Pustu, Puskesmas dan RSUD) menjadi prioritas wajib untuk dibenahi oleh pemerintah daerah kedepan sehingga hak masyarakat akan pemenuhan kesehatan yang dijamin oleh Undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik, dan tepat sasaran.

Berdasarkan pada program di atas, berikut adalah program-program pendukung dengan nomenklatur sebagaimana telah diatur di dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024:

Tabel 3.13
Penyesuaian Nomenklatur Program Bupati / Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majene ke dalam Nomenklatur Program Pendukungnya Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

Program Bupati / Wakil Bupati Terpilih	Nomenklatur Program Pendukung Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406/2024
Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Perekonomian Dan Pembangunan
Perluasan Lapangan Pekerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Pengembangan UMKM
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program Bupati / Wakil Bupati Terpilih	Nomenklatur Program Pendukung Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406/2024
Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengembangan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Pengelolaan Persampahan
Pembangunan Ekonomi yang Bertumpu pada Isu Strategis dan Potensi Lokal	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan UMKM
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

A. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Pada bagian ini menggambarkan beberapa program sesuai dengan pembagian urusan pemerintah yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, maka disusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah serta sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan dan andalan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Majene.

Berikut ini merupakan Program Perangkat Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintah yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah masing-masing:

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pengembangan Kurikulum
c. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik
d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

2. Bidang Urusan Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
f. Program Pengembangan Permukiman
g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
h. Program Penyelenggaraan Jalan
i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Program Pengembangan Rumah
b. Program Kawasan Permukiman
c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Program Penanggulangan Bencana
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

6. Bidang Urusan Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial
b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
c. Program Rehabilitasi Sosial
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
e. Program Penanganan Bencana
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

7. Bidang Urusan Tenaga Kerja

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
c. Program Penempatan Tenaga Kerja
d. Program Hubungan Industrial
e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

8. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b. Program Perlindungan Perempuan
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
e. Program Pemenuhan Hak Anak
f. Program Perlindungan Khusus Anak

9. Bidang Urusan Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

10. Bidang Urusan Pertanahan

a. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
d. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Asentee
e. Program Pengelolaan Tanah Kosong
f. Program Penatagunaan Tanah
g. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah
h. Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan
i. Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan
j. Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau
k. Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan
l. Program Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan

11. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
i. Program Pengelolaan Persampahan

12. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk
b. Program Pencatatan Sipil
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

13. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Program Penataan Desa
b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Ada

14. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

15. Bidang Urusan Perhubungan

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

16. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

17. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
g. Program Pengembangan UMKM
h. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

18. Bidang Urusan Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
b. Program Promosi Penanaman Modal

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
e. Program Kerja Sama Penanaman Modal

19. Bidang Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

20. Bidang Urusan Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

21. Bidang Urusan Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

22. Bidang Urusan Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
c. Program Pembinaan Sejarah
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
e. Program Pengelolaan Permuseuman

23. Bidang Urusan Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan
b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
c. Program Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan

24. Bidang Urusan Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip
b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
c. Program Perizinan Penggunaan Arsip
d. Program Akreditasi dan Sertifikasi

25. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
e. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

26. Bidang Urusan Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
b. Program Pemasaran Pariwisata
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

27. Bidang Urusan Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
e. Program Perizinan Usaha Pertanian
f. Program Penyuluhan Pertanian

28. Bidang Urusan Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
d. Program Pengembangan Ekspor
e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

29. Bidang Urusan Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

30. Bidang Urusan Transmigrasi

a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

31. Bidang Urusan Sekretariat Daerah

a. Program Penataan Organisasi
b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
c. Program Kesejahteraan Rakyat
d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
e. Program Perekonomian dan Pembangunan
f. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

32. Bidang Urusan Sekretariat DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

33. Bidang Urusan Perencanaan

a. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

34. Bidang Urusan Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

35. Bidang Urusan Kepegawaian

Program Kepegawaian Daerah

36. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

37. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
b. Program Riset dan Inovasi Daerah

38. Bidang Urusan Pengawasan

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

39. Bidang Urusan Pemerintahan Umum

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

B. Indikator Program, target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Penentuan pagu indikatif dalam mendukung operasionalisasi program prioritas yang telah ditentukan berdasarkan rumusan strategis dan permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya harus memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Besaran jumlah dana yang akan digunakan dalam pencapaian target sasaran pembangunan sangat erat kaitannya dengan kondisi kapasitas fiskal riil masing-masing daerah.

Berikut ini merupakan Program Perangkat Daerah yang disertai Target dan Pagu Indikatif Kabupaten Majene untuk tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				359.776.652.173		371.847.165.755		375.294.566.735		390.209.988.266		413.846.353.014	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				270.520.050.036		269.255.753.278		268.098.261.684		271.333.952.094		279.470.289.683	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase capaian program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				88.227.938.923		101.596.608.489		104.951.499.652		115.147.841.096		130.690.811.842	
Meningkatnya partisipasi anak usia anak sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				223.622.438		216.261.737		415.704.704		1.296.763.505		1.281.826.604	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				447.244.876		432.523.473		831.409.407		810.477.191		801.141.628	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	1. - 2. 100 %	1. - 2. 100 %		1. - 2. 100 %		1. - 2. 100 %		1. - 2. 100 %		1. - 2. 100 %		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				-		-		166.281.881		567.334.033		560.799.139	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				357.795.901		346.018.778		831.409.407		1.053.620.348		1.041.484.116	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				242.136.579.444		251.517.334.720		261.468.521.359		273.717.541.292		290.551.961.130	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				134.609.220.351		137.803.131.100		140.817.369.169		146.537.038.461		154.815.821.502	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				98.189.780.578		104.062.528.824		110.926.372.521		117.225.157.009		125.383.911.370	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. ((%))	0	25		24		22		20		20		Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	0	60		70		80		90		100		Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	61	40		30		20		10		5		Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	26	20		18		15		12		10		Dinas Kesehatan
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	8.57	7.7		7		6.5		5		5		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	0	2.3		1.7		1.3		1		1		Dinas Kesehatan
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0	60		70		80		90		100		Dinas Kesehatan
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	0	60		70		80		90		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	58.4	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	46		55		61		70		70		Dinas Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	10		15		20		25		25		Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	83.1	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	20	25		30		35		40		40		Dinas Kesehatan
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (Kasus)	329	252		231		211		190		65		Dinas Kesehatan
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	0	98.7		98.8		98.9		99		99		Dinas Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	0	70		80		90		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				6.027.071.945		6.129.982.174		6.001.553.748		5.962.910.056		6.011.134.914	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (Satuan Orang)	0	70		75		80		85		85		Dinas Kesehatan
	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	0	60		70		80		90		100		Dinas Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	0	78		79		80		80		80		Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				398.942.429		424.392.032		448.678.401		481.120.333		523.136.350	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	0	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				2.911.564.141		3.097.300.591		3.274.547.520		3.511.315.433		3.817.956.993	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	68		71		75		80		85		Dinas Kesehatan
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	0	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				283.182.423.017		275.895.757.991		288.760.815.183		305.917.569.238		331.400.214.969	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.428.125.048		8.789.963.478		8.943.523.753		7.785.562.096		7.934.558.987	
Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	-	75.5		75.5		80		80		80		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				45.660.333.773		68.685.190.836		69.698.399.557		71.882.053.832		76.511.465.334	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	-	82		84		86		88		90		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	-	83.5		85		86.5		88		89.5		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	-	56		57		58		59		60		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				23.280.262.485		21.140.423.352		22.123.608.836		25.161.598.762		28.724.473.856	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	-	74		76		78		80		82		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				1.520.632.577		1.470.579.808		2.078.523.518		2.269.336.134		2.243.196.558	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	-	52		54		56		58		60		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				23.197.539.963		21.489.681.885		22.417.320.109		24.281.004.292		26.571.800.483	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	-	72.5		73.5		74.5		75.5		76.5		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				9.065.953.290		9.149.966.042		9.065.241.249		9.598.959.102		10.386.211.301	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	98		98		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				-		8.584.004.949		9.065.241.249		9.598.959.102		10.386.211.301	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				7.511.104.364		8.750.929.123		9.065.241.249		10.409.436.293		11.187.352.929	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5.797.188.079		3.892.711.258		4.532.620.625		4.799.479.551		5.193.105.651	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	-	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				155.605.841.294		119.974.170.396		127.853.333.865		135.724.459.572		147.645.506.291	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	42.19	44		45.5		47		48.5		50		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				-		173.009.389		-		324.190.876		320.456.651	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	-	35		40		45		50		55		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.115.442.143		3.795.127.474		3.917.761.173		4.082.529.626		4.295.875.628	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	-	75		80		85		90		95		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				26.403.261.799		26.263.638.880		25.459.564.546		24.989.281.122		24.886.022.612	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.114.938.185		6.184.169.167		6.012.067.104		5.927.668.077		5.946.233.390	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				2.862.367.205		3.022.474.030		2.977.277.087		2.928.254.090		2.912.149.817	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	60	30		35		45		50		100		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	60	30		35		40		45		100		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				7.280.235.058		7.168.644.043		6.922.314.724		6.799.093.152		6.754.425.064	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	60	85		87		89		90		92		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				10.136.776.453		9.877.971.078		9.537.097.309		9.322.919.123		9.261.197.217	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	80	57		59		62		65		69		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8.944.898		10.380.563		10.808.322		11.346.681		12.017.124	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	53		55		57		59		60		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				18.232.761.328		18.808.772.677		18.881.257.538		23.085.633.621		22.542.198.382	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.278.274.218		16.815.305.221		16.669.006.592		19.965.770.300		19.563.950.909	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	75	77		78		79		89		81		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penaggulangan Becanan Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.066.402.493		1.324.593.915		1.283.175.091		1.508.830.604		1.592.272.457	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
					100		100		100		100		
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100		100		100		100		100		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat												
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100		100		100		100		100		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				709.186.668		668.873.541		602.771.820		1.183.296.698		1.145.632.528	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	85	87		87		90		90		95		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				178.897.950		-		326.304.035		427.736.019		240.342.488	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	-	-		-		80		85		90		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100				100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				14.152.849.819		13.705.317.312		13.176.540.109		12.846.418.136		12.603.910.668	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.649.869.784		6.449.303.528		6.202.678.002		6.048.135.461		5.980.071.689	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase capaian kualitas pelayanan	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				835.453.428		807.953.848		776.536.386		756.985.696		652.129.285	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 %	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 %		Dinas Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				44.724.488		43.252.347		41.570.470		40.523.860		40.057.081	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan 2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	1. - orang 2. 100 %	1. - orang 2. 100 %		1. - orang 2. 100 %		1. - orang 2. 100 %		1. - orang 2. 100 %		1. - orang 2. 100 %		Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.585.930.329		1.533.728.235		1.474.088.879		1.436.976.059		1.420.424.106	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas 7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 8. Indeks Peranan Sosial	1. - % 2. - % 3. - % 4. - % 5. - % 6. - 7. - 8. -	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 50 7. 65 8. 60		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 55 7. 70 8. 65		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 60 7. 75 8. 70		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 65 7. 80 8. 75		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 70 7. 85 8. 80		Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3.176.333.107		3.071.781.706		2.952.334.805		2.878.004.504		2.844.853.920	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin 4. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar 5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi 6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 100 %	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 100 % 6. 100 %		Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.047.447.499		1.012.969.974		973.580.416		949.068.790		938.136.846	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya 3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 %	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 %		1. 100 % 2. 100 % 3. 100 %		Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				813.091.184		786.327.674		755.751.151		736.723.766		728.237.740	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.001.293.701		5.150.155.031		5.024.126.036		5.068.016.392		5.048.122.873	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.683.243.076		3.611.384.612		3.529.667.627		3.513.926.379		3.492.606.260	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase capaian Penyelenggaraaan Penunjang urusan pemerintah daerah	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-		129.757.042		124.711.411		121.571.579		120.171.244	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	-	-		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				92.599.666		219.573.827		247.344.299		310.007.525		321.758.506	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				241.512.233		237.887.910		207.852.352		230.985.999		232.331.072	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				983.938.727		951.551.641		914.550.348		891.524.910		881.255.791	
Meningkatanya pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.457.101.944		6.131.150.624		6.618.871.354		7.314.832.641		8.239.398.140	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.755.106.602		1.960.173.135		1.883.951.376		2.011.609.821		2.119.340.527	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	86	88		90		92		95		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1.222.044.514		1.500.109.267		1.462.857.868		1.426.439.855		1.658.363.169	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Daerah (%)	43.94	45		46		47		48		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				540.764.684		499.170.150		521.330.280		577.292.142		603.712.265	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				197.413.659		176.103.596		210.826.240		205.518.313		203.151.030	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				19.090.712		60.553.286		58.198.658		56.733.403		56.079.914	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	-	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				305.364.257		322.197.264		359.178.983		362.466.100		358.290.998	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	54.58	55.36		55.71		55.98		56.48		56.73		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1.417.317.516		1.612.843.925		2.122.527.948		2.674.773.007		3.240.460.237	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				5.828.092.432		6.398.817.139		6.384.592.246		6.425.244.707		7.102.207.584	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.549.563.870		2.825.070.317		2.531.090.706		2.245.700.759		2.412.859.637	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	83	85		86		88		90		92		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				236.592.539		251.685.409		266.088.424		285.328.090		310.245.660	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	8.60	15.00		20.00		25.00		30.00		45.00		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.792.110.217		1.992.505.883		2.181.772.095		2.386.939.211		2.740.195.862	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	70.50	83.40		85.00		88.50		90.00		92.00		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				915.510.261		973.913.104		1.029.646.509		1.104.095.651		1.200.515.816	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				334.315.545		355.642.426		375.994.512		403.180.996		438.390.607	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	0.00	87.00		88.50		90.00		91.50		92.00		Dinas Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9.605.961.221		10.305.304.269		9.875.065.233		9.802.721.620		10.317.903.024	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				134.173.463		141.867.699		149.653.693		149.127.803		150.614.626	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	0	10		15		20		25		30		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				9.085.368.185		9.728.317.956		9.287.674.487		9.218.367.566		9.728.262.786	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	20		30		40		50		60		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				220.938.969		247.403.427		249.007.117		248.006.020		250.757.329	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	10		15		20		25		30		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				111.811.219		134.082.277		136.351.143		135.349.691		136.194.077	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	0	20		30		40		50		60		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				53.669.385		53.632.911		52.378.793		51.870.540		52.074.206	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	20		30		40		50		60		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				10.568.191.489		23.023.181.482		24.569.216.345		24.802.443.683		29.580.373.791	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.320.099.320		10.651.608.640		10.254.046.705		10.080.982.873		10.065.006.764	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase capaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				418.707.075		599.560.578		660.970.479		482.233.928		733.044.589	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				410.955.427		1.410.026.522		1.837.414.790		2.824.513.009		2.848.462.943	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	1. 60 2. 55	1. 65 2. 56		1. 70 2. 57		1. 73 2. 58		1. 75 2. 59		1. 76 2. 60		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				98.393.873		929.925.467		1.018.476.524		992.834.558		1.341.912.227	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	70	75		80		85		90		95		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				4.472.449		242.213.145		315.935.575		307.981.332		324.462.359	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	75	78		81		85		89		93		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				44.724.488		276.815.023		266.051.010		259.352.701		276.393.862	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	35,71	36		37		38		40		45		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				-		86.504.695		83.140.941		81.047.719		80.114.163	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100			100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				344.378.554		648.785.210		665.127.526		991.977.201		1.140.779.338	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-		-		-		-		-	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				8.944.898		86.504.695		91.455.035		89.152.491		152.216.909	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				2.917.515.408		8.091.237.508		9.376.597.761		8.692.367.869		12.617.980.637	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	70	70		80		85		90		95		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.420.587.684		6.380.112.661		6.420.758.103		6.466.194.995		6.583.938.941	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.676.332.669		4.669.482.325		4.651.414.958		4.624.258.942		4.675.803.345	
Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.162.836.677		1.059.682.509		1.105.774.511		1.158.982.383		1.153.643.944	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP	90	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KK	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan KIA	10	20		30		35		40		45		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				178.897.950		211.936.502		216.166.446		222.881.227		252.359.613	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akte	92	95		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				178.897.950		211.936.502		218.244.969		225.515.278		256.365.321	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase OPD/ Lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MoU) Kependudukan	10	20		35		50		55		60		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				223.622.438		227.074.823		229.157.218		234.557.164		245.766.718	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Jenis Informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				4.811.259.450		3.522.086.026		3.459.901.499		3.541.766.501		3.763.568.511	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.570.369.081		2.421.746.310		2.295.928.329		2.336.586.919		2.304.816.206	
Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				-		25.951.408		-		24.314.316		100.142.703	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	0	0		80		0		90		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				-		17.300.939		29.099.329		40.523.860		28.039.957	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya efekti vitas kerja sama desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa (Desa)	0	0		80		90		95		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				780.228.147		464.530.210		482.217.456		423.069.093		529.428.017	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				460.662.222		592.557.158		652.656.385		717.272.314		801.141.628	
Jumlah Subkegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.371.407.134		9.726.959.227		9.920.608.261		10.420.557.298		11.238.167.282	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.335.621.069		3.306.085.121		3.131.772.077		3.140.850.605		3.322.727.130	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	67	70		72		75		78		80		Dinas Pengedelian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				212.689.984		270.567.654		293.302.948		602.004.627		787.344.367	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	1. 2,09 2. -	1. 2,11 2. -		1. 2,20 2. -		1. 2,30 2. -		1. 2,40 2. -		1. 2,50 2. -		Dinas Pengedelian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.923.776.084		5.142.180.741		5.287.412.226		5.464.299.707		5.868.223.906	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modem/ Modem Contraceptive (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need}	1. 76,84 2. 10,50	1. 76,84 2. 10,85		1. 76,84 2. 10,87		1. 76,84 2. 10,89		1. 76,84 2. 10,94		1. 76,84 2. 9		Dinas Pengedelian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				899.319.996		1.008.125.711		1.208.121.009		1.213.402.360		1.259.871.879	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	80	81		82		83		84		85		Dinas Pengedelian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				4.266.225.565		4.245.370.990		4.181.333.907		4.245.035.560		4.233.135.413	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.056.975.621		4.070.631.507		4.044.151.355		4.060.798.463		3.946.006.824	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	79.13	83.50		85.50		87		89		91		Dinas Pengedelian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				205.176.437		131.487.136		54.041.611		22.141.659		207.014.425	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	85.50	87.50		88.50		89.50		90.50		91.50		Dinas Pengedelian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				4.073.506		43.252.347		83.140.941		162.095.438		80.114.163	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	90	92		93		94		95		96		Dinas Pengedelian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				3.612.967.993		7.122.796.554		6.835.848.145		6.258.504.866		6.186.415.650	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.333.847.648		4.268.141.632		4.092.197.102		3.583.930.137		3.542.648.278	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				268.346.925		908.299.293		872.979.877		851.001.050		841.198.709	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	83	85		85		86		86		87		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.010.773.419		1.946.355.629		1.870.671.166		1.823.573.679		1.802.568.662	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	82	83		85		85		86		86		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3	3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.346.200.915		8.293.252.810		8.549.013.110		9.049.099.405		9.703.787.909	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.038.825.059		5.106.419.861		5.019.264.472		5.149.893.641		5.342.573.173	
Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	80	80		85		90		95		100		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				17.889.795		20.761.127		23.279.463		25.935.270		28.841.099	
PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	10.71	39.81		48.54		58.25		67.96		77.67		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				76.031.629		82.179.460		87.297.988		93.204.877		100.142.703	
PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	10.71	48.54		58.25		67.96		77.67		87.38		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				76.031.629		82.179.460		87.297.988		93.204.877		100.142.703	
PERSENTASE KOPERASI AKTIF	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	10.71	48.54		58.25		67.96		77.67		87.38		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				223.622.438		302.766.431		374.134.233		445.762.455		520.742.058	
PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PELATIHAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	10.71	39.81		48.54		58.25		67.96		77.67		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				62.614.283		82.179.460		91.455.035		106.982.989		112.159.828	
PERSENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	10.71	39.81		48.54		58.25		67.96		77.67		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				440.536.203		627.159.036		850.116.119		1.107.922.320		1.436.246.653	
PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	13.64	13.97		14.30		14.63		14.96		15.29		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
PERTUMBUHAN WIRAUSAHA													
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				2.410.649.880		1.989.607.976		2.016.167.812		2.026.192.976		2.062.939.692	
PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	0.03		0.07		0.10		0.13		0.16		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.130.465.831		4.637.200.071		4.273.140.057		4.557.421.847		4.702.408.137	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.943.805.314		3.420.395.625		3.049.609.705		3.602.165.874		3.355.982.279	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				424.882.632		328.717.840		432.332.892		121.571.579		572.816.264	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				-		151.383.216		83.140.941		141.833.508		80.114.163	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	0.198	0.200		0.200		0.250		0.270		0.280		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				166.375.094		160.898.732		154.642.150		152.369.712		160.228.326	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				568.568.099		549.853.251		528.472.087		515.166.859		509.232.857	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				26.834.693		25.951.408		24.942.282		24.314.316		24.034.249	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2	2		2		2		2		2		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Atap
				-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.722.712.361		8.435.597.700		14.396.358.805		14.791.208.728		14.620.834.707	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				536.693.851		519.028.168		1.579.677.874		1.539.906.662		1.522.169.093	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	80	82		85		90		93		95		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7.828.222.609		7.570.550.753		12.263.288.755		12.116.633.999		11.977.067.335	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	40	42		42		45		45		50		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				357.795.901		346.018.778		553.392.176		1.134.668.067		1.121.598.279	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalarn Kepramukaan	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Pemuda Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				26.834.693		86.504.695		83.140.941		81.047.719		80.114.163	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				26.834.693		86.504.695		83.140.941		81.047.719		80.114.163	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalarn penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2	2.8		2.85		2.85		2.85		2.85		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				26.834.693		86.504.695		83.140.941		81.047.719		80.114.163	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				26.834.693		86.504.695		83.140.941		81.047.719		80.114.163	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	25	35		40		40		50		50		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.126.187.520		14.135.010.724		15.231.558.378		16.499.829.211		17.896.034.696	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.795.071.196		4.204.271.783		4.044.944.805		4.006.323.317		3.960.176.080	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3.736.941.065	4524455358		5251899558		5186899558		5086899558		5256899558		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.216.506.062		2.041.510.793		2.224.020.164		2.419.274.414		2.671.807.329	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	760.705.000	1.360.000.000		2.360.000.000		2.675.000.000		2.985.000.000		3.335.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				411.465.286		6.591.657.730		7.362.130.300		8.177.714.853		9.072.928.935	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	1.190.920.000	460.000.000		7.620.000.000		8.855.000.000		10.090.000.000		11.325.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				-		25.951.408		33.256.376		40.523.860		48.068.498	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah													Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				213.783.051		666.086.149		985.220.147		1.288.658.733		1.582.254.715	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	759.400.000	239.000.000		770.000.000		1.185.000.000		1.590.000.000		1.975.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				489.361.926		605.532.862		581.986.585		567.334.033		560.799.139	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	1.164.240.000	700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.206.354.218		5.547.764.630		5.820.104.183		6.222.700.627		6.753.589.843	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.849.971.479		4.449.886.196		4.576.158.788		4.460.945.819		4.409.561.967	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.265.144.785		1.009.643.645		1.159.141.635		1.679.086.135		2.262.311.430	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	61	72		76		80		83		88		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				91.237.955		88.234.789		84.803.760		82.668.673		81.716.446	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	4	5		5		5		5		5		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				525.959.974		560.550.421		596.951.954		581.922.623		575.219.689	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				342.589.575		391.866.267		376.628.461		367.146.167		362.917.157	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	35	45		50		55		60		65		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				183.370.399		116.781.338		170.438.928		166.147.824		164.234.034	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				-		51.902.817		49.884.564		48.628.631		48.068.498	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	20		35		45		50		55		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.622.389.958		8.533.060.458		9.180.097.688		10.092.545.358		11.296.678.913	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.157.167.520		3.085.111.097		3.068.749.330		3.027.021.371		3.029.034.513	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				2.430.006.965		2.857.141.094		3.502.808.026		4.091.140.221		4.816.790.068	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	9715	10.193		10.397		10.605		10.817		11.033		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.649.268.096		1.894.546.513		1.905.893.495		2.195.247.665		2.642.184.712	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	789	816		832		849		866		883		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.875.922		10.517.933		10.614.388		10.864.509		11.276.334	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	49.000 hektare	49.000 hektare		49.100 hektare		49.300 hektare		49.500 hektare		49.800 hektare		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				375.071.455		685.743.821		692.032.450		768.271.591		797.393.286	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	48	48,30		48,60		48,90		50,20		50,50		Dinas Kelautan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				263.874.477		2.439.432.388		2.652.196.009		1.754.683.118		3.601.131.617	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-		-		-		-		-	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan													
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				31.307.141		1.643.589.198		2.053.581.236		948.258.313		2.791.978.573	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	49.999.700	1.900.000.000		1.900.000.000		2.470.000.000		2.970.000.000		3.485.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				187.842.848		233.562.675		99.769.129		194.514.526		200.285.407	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	210.000.000		270.000.000		120.000.000		240.000.000		250.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				-		-		-		-		-	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif													
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				44.724.488		562.280.515		498.845.644		611.910.279		608.867.637	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya (Produk)	2.856.330.000	50000000		650.000.000		600.000.000		755.000.000		760.000.000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				23.635.356.232		32.210.585.712		32.242.152.548		32.021.001.939		33.998.248.227	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.072.186.698		10.762.254.667		10.368.283.694		10.107.255.334		9.990.833.900	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan urusan Bidang Perencanaan (%)	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	95		96		97		98		100		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4.096.763.062		8.051.821.825		8.509.475.282		8.790.413.619		10.595.098.027	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan (Persentase)	0	20		20		25		25		25		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.405.120.669		9.861.404.045		9.926.473.937		9.711.759.010		9.983.383.187	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				264.079.315		250.863.614		232.794.634		235.038.385		232.331.072	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Dokumen)	1.20	1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				1.826.685.108		1.766.558.389		1.697.865.381		1.655.118.588		1.636.053.939	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan (%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	20.00	15.00		15.00		15.00		10.00		10.00		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				53.669.385		69.203.756		66.512.753		64.838.175		64.091.330	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	25.00	30.00		35.00		40.00		45.00		50.00		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				916.851.995		1.448.479.416		1.440.746.867		1.456.578.828		1.496.456.773	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	10.00	15.00		15.00		20.00		20.00		25.00		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	10.00	15.00		15.00		20.00		20.00		25.00		Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5.382.592.079		6.174.272.578		6.607.626.263		7.010.222.460		7.598.828.339	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2.540.350.894		3.261.226.987		3.649.887.297		3.991.600.164		4.462.759.438	
PERSENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	66.67	75.86		87.10		91.43		94.74		100		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				156.535.707		183.822.476		228.637.587		253.274.122		300.428.110	
PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	75	80		85		90		95		100		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				254.929.579		311.416.901		299.307.387		293.392.743		290.013.269	
NILAI EKSPOR BARANG	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	0	100000		125000		150000		175000		200000		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.491.561.661		1.466.254.574		1.432.102.704		1.418.335.084		1.424.029.243	
PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0.20	49.46		61.82		74.18		86.55		100		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				939.214.239		951.551.641		997.691.289		1.053.620.348		1.121.598.279	
PERSENTASE PROMOSI PRODUK LOKAL YANG DIFASILITASI/DILAKSANAKAN	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	0.79		0.82		1.19		1.55		1.91		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.065.863.623		3.269.877.456		3.548.871.054		3.827.073.294		4.220.614.381	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.864.603.429		3.075.241.893		3.309.840.850		3.594.061.102		3.940.214.811	
PERSENTASE REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0	10		20		30		40		50		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				89.448.975		86.504.695		108.083.223		105.362.035		128.182.660	
PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI YANG DITERBITKAN	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	50.64	61.58		73.42		85.27		94.74		100		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				111.811.219		108.130.868		130.946.982		127.650.158		152.216.909	
TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP, AKURAT DAN TERKINI	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UMKMU, Perdagangan dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				402.520.388		129.757.042		166.281.881		166.147.824		168.440.027	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				134.173.463		129.757.042		83.140.941		81.047.719		80.114.163	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				268.346.925		-		83.140.941		85.100.105		88.325.864	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	100	100				100		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				34.496.677.691		33.361.193.507		32.063.936.227		31.256.669.374		30.896.636.292	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.821.140.218		27.872.470.633		26.788.643.539		26.114.191.600		25.813.392.664	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	75		80		80		85		90		Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.731.850.785		4.576.098.345		4.398.155.764		4.287.424.338		4.238.039.211	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				943.686.688		912.624.528		877.136.925		855.053.436		845.204.417	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				32.000.108.534		31.573.094.797		31.384.053.054		31.211.449.640		31.790.940.384	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.581.131.451		21.893.219.470		21.530.978.600		21.070.677.983		21.237.381.550	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				9.418.977.083		9.679.875.327		9.853.074.454		10.140.771.656		10.553.558.834	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. PersentasePenetapan Ranperda Tahun N	1. 100 % 2. 100 %	1. 100 % 2. 100 %		1. 100 % 2. 100 %		1. 100 % 2. 100 %		1. 100 % 2. 100 %		1. 100 % 2. 100 %		Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan												Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN				4.778.929.315		4.704.048.403		4.637.251.413		4.601.548.046		4.778.071.730	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.105.338.990		3.204.489.522		3.054.663.606		3.107.433.345		3.086.461.183	
Peningkatan transparansi, akuntabilitas dsn kapasitas pelaksanaan urusan bidang perencanaan	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan (%)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelaksana Urusan Bidang Perencanaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan urusan Bidang Perencanaan (%)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				806.829.756		659.165.773		766.559.473		690.526.566		889.267.207	
Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi (%)	80	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	90	100		100		100		100		100		Badan Perencanan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				866.760.569		840.393.108		816.028.333		803.588.134		802.343.340	
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan APBD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Daerah
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan APBD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	98	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Daerah
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan APBD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Daerah
5.02 - KEUANGAN				129.983.221.658		139.248.907.894		141.495.914.416		149.994.884.728		163.585.354.465	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.511.050.441		15.265.046.066		15.290.450.005		16.739.990.449		18.921.954.623	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan administrasi keuangan (%)	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				114.478.822.005		119.676.344.602		121.419.416.250		126.769.822.135		135.223.166.458	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	1.3	0.40		0.35		0.31		0.28		0.26		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.138.238.209		3.176.884.910		4.092.612.807		5.772.623.790		7.949.327.802	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Manajemen Aset (Kategori)	80	92		95		97.5		99		100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				855.111.003		1.130.632.317		693.435.355		712.448.355		1.490.905.582	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	97	100		97		99		100		100		Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan													
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital													
5.03 - KEPEGAWAIAN				5.914.728.863		6.463.471.763		6.725.051.209		6.558.843.398		6.633.909.809	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.384.896.458		4.607.946.064		4.677.705.544		4.546.833.773		4.621.041.470	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1.529.832.405		1.855.525.699		2.047.345.665		2.012.009.626		2.012.868.340	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0.5		1.5		2		3		5		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	0	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				739.904.033		660.727.183		635.034.662		1.270.163.644		667.995.895	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				739.904.033		660.727.183		635.034.662		1.270.163.644		667.995.895	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	43.79	68		70		72		74		75		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi													
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	0	0		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	0	0		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				7.302.614.331		7.252.553.596		7.587.442.249		7.333.197.621		7.425.781.748	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.517.094.161		2.624.552.435		3.139.401.921		2.997.144.651		3.139.674.039	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemeritah daerah	100	100		100		100		100		100		Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				4.785.520.170		4.628.001.162		4.448.040.328		4.336.052.970		4.286.107.709	
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	100		100		100		100		100		Badan Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah													
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah													
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				17.931.626.506		18.258.343.248		18.471.228.034		18.776.135.214		19.120.659.556	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.807.831.041		8.569.817.451		8.286.462.796		8.158.884.017		8.305.247.581	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi (%)	100	100		100		100		100		100		Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				6.708.673.136		6.920.375.569		6.983.839.020		6.929.579.980		7.090.103.406	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2.415.122.329		2.768.150.228		3.200.926.217		3.687.671.217		3.725.308.569	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3.10	3.30		3.35		3.40		3.45		3.50		Inspektorat
7.01 - KECAMATAN				30.976.768.618		31.120.849.823		30.574.298.283		30.556.737.412		31.282.933.274	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.039.202.245		25.532.074.861		25.013.954.579		25.106.009.182		25.838.961.603	
Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	98	98		98		98		98		98		Kecamatan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan (%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				181.043.330		215.888.417		217.358.388		228.261.065		229.115.765	
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	98	98		98		98		98		98		Kecamatan
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Tinggat Keberadaan dn keutuan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbahasa dan bernegra untuk kepentinga negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesetjateraan rakyat (Nilai)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.431.563.861		5.046.089.109		5.004.464.671		4.884.555.902		4.839.032.293	
Cakupan Pemenuhan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	98	98		98		98		98		98		Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				156.982.504		180.405.108		179.851.730		185.825.513		186.215.235	
Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	98	98		98		98		98		98		Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				156.348.311		130.198.648		146.591.529		139.580.437		174.834.432	
Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	98	98		98		98		98		98		Kecamatan
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				11.628.367		16.193.679		12.077.386		12.505.313		14.773.946	
PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.941.310.569		3.903.517.065		28.513.464.044		32.865.788.113		3.915.861.055	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.979.819.973		1.862.792.109		2.410.116.308		2.579.908.075		1.945.573.931	
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Persentase cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				603.423.912		696.017.861		668.953.055		814.206.405		644.599.562	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				785.593.243		799.727.519		24.812.104.366		28.741.583.423		740.647.671	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				44.724.488		121.106.572		131.758.765		130.337.088		112.366.331	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				125.228.565		121.106.572		116.397.317		113.466.807		112.159.828	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				402.520.388		302.766.431		374.134.233		486.286.314		360.513.732	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN				**1.351.377.653.273,00**		**1.411.130.000.000,00**		**1.471.849.894.000,00**		**1.536.273.119.000,00**		**1.603.518.081.000,00**	

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Majene

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir 2030
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.61	5.78	5.94	6.11	6.28	6.36
Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3.81	3.89	3.96	4.02	4.08	4.12
Laju Inflasi	Persen	1.88	1.76	1.69	1.63	1.57	1.51
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.12	3.09	3.05	3.02	2.98	2.94
Persentase Kontribusi SDA Unggulan & Industri Pengolahan terhadap Total PDRB	%	46.37	47.07	47.77	48.47	49.17	49.87
Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	62.01	65.17	68.32	71.48	74.63	78.02
Indeks Konektivitas Daerah	Poin	61.26	68.95	75.34	81.43	86.34	91.25
Rasio Digitalisasi UMKM	Persen	53.34	54.55	55.75	56.96	58.16	59.33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	80.33	80.46	80.59	80.72	80.85	80.98
Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2e	30.314,79	29.251,07	14.935,64	13.147,06	13.386,87	11.784,89
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	29.00	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74.90	76.68	78.46	80.24	82.03	84.09
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.82	10.06	10.29	10.53	10.76	11.00
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.75	13.78	13.81	13.84	13.88	13.91
Angka Harapan Hidup	Tahun	70.73	71.08	71.43	71.78	72.13	72.48
Tingkat Prevalensi Stunting (SKI)	Persen	34.39	33.18	32.97	32.26	31.55	30.84
Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	35.67	37.00	38.27	39.51	40.70	41.85

Indikator	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir 2030
Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,89	12,14	11,39	10,63	9,88	9,13
Indeks Gini	Poin	0,340	0,333	0,325	0,318	0,310	0,302
Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Persen	76.27	77.04	77.81	78.58	79.35	80.27
Angka Kriminalitas	Kasus	179	175	171	167	163	161
Indeks Zakat	Poin	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	50.47	52.57	55.66	60.76	63.85	66.95
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75	76	77	78	79	80
Persentase Usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang di daftrakan	%	5.65 %	7.34 %	8.47 %	10.17	11.30 %	12.43 %
Persentase Benda, Situs Cagar Budaya yang di Lestarikan & Dikembangkan	%	8.2 %	8.47 %	9.03 %	10.16 %	10.72%	11.29 %
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Poin	3.23	3.30	3.36	3.41	3.45	3.50
Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	61.10	65.54	69.98	74.42	78.86	81.50
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	3.18	3.25	3.31	3.36	3.40	3.45
Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	77,16	80,60	84,04	87,48	90,92	94,36

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	61,78	59,97	58,16	56,35	54,54	52,72	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	Persen	5,59	4,87	4,16	3,44	2,73	2,01	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	80,33	80,46	80,59	80,72	80,85	80,98	
4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	13,69	4,99	-3,71	-12,41	-21,11	-29,81	
5	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	10,65	10,82	11,00	11,17	11,34	11,51	
6	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	71,25	71,29	71,32	71,35	71,38	71,41	
7	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	30.314,79	29.251,07	14.935,64	13.147,06	13.386,87	11.784,89	
8	Indeks Resiko Bencana	Angka	163,81	151,75	139,68	127,62	115,56	103,49	
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	jiwa	185.319	188.045	190.814	193.626	196.482	199.383	
10	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	200,29	203,91	207,53	211,16	214,78	218,40	
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,61	5,78	5,94	6,11	6,28	6,36	
2	Tingkat Kemiskinan	jiwa	509316	535072	560828	586584	612341	638097	
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,89	12,14	11,39	10,63	9,88	9,13	
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	1,85	1,76	1,68	1,59	1,51	1,42	
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,36	0,33	0,29	0,25	0,22	0,18	
6	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	Ribu Jiwa	0,847	0,704	0,561	0,418	0,274	0,131	
7	Tingkat Penduduk Miskin Ekstrem	Persen	1,13	0,94	0,75	0,56	0,37	0,17	
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta	6.773	7151	7530	7908	8287	8665	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,12	3,09	3,05	3,02	2,98	2,94	
10	Indeks Gini	Angka	0,34	0,333	0,325	0,318	0,31	0,302	
11	Indeks Modal Manusia /Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,9	76,68	78,46	80,24	82,03	84,09	
12	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,73	71,08	71,43	71,78	72,13	72,48	
13	Prevalensi Stunting	Persen	34,39	33,18	32,97	32,26	31,55	30,84	
14	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,82	10,06	10,29	10,53	10,76	11	
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,75	13,78	13,81	13,84	13,88	13,91	
16	Angka Literasi/Numerasi	Persen	96,93	97,68	98,06	98,43	98,80	99,18	
17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	67,25	70,72	74,19	77,66	81,13	84,60	
18	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	50,99	59,64	68,29	76,94	85,59	94,24	
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	30,75	35,67	40,60	45,52	50,45	55,37	
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persen	96,78	95,89	94,99	94,10	93,21	92,31	
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	75	76	77	78	79	80	
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	52,57	55,66	60,76	63,85	66,95	72,85	
23	Indeks Perlindungan Anak	Angka	59,38	61,20	63,02	64,84	66,66	68,48	
24	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	Persen	50,13	48,50	46,87	45,24	43,61	41,98	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	9,82	11,28	12,74	14,19	15,65	17,11	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
3	Rasio PDRB akomodasi Makan dan Minum	Persen	13,43	16,21	19,00	21,78	24,57	27,36	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	62,78	61,76	60,74	59,72	58,70	57,68	
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	27,14	22,36	17,58	12,81	8,03	3,25	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.	1972,33	2193,80	2415,27	2636,73	2858,20	3079,67	
7	Indeks Infrastruktur / Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	60,01	65,17	68,32	71,48	74,63	78,02	
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	70,12	70,29	70,47	70,65	70,83	71,01	
9	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	53,96	52,68	51,40	50,12	48,84	47,56	
10	Laju Inflasi	Persen	1,88	1,76	1,69	1,63	1,57	1,51	
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	120,18	152,36	184,54	216,72	248,90	281,08	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,10	3,18	3,26	3,34	3,41	3,49	
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	89,37	91,41	93,45	95,49	97,53	99,57	
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	65,97	67,86	69,76	71,66	73,56	75,46	
5	Presentase Penegakan Perda	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,81	3,89	3,96	4,02	4,08	4,12	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
A	PENDIDIKAN								
1	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Indeks Persentase	1. - 2. 100 %	1. - 2. 100 %	1. - 2. 100 %	1. - 2. 100 %	1. - 2. 100 %	1. - 2. 100 %	
4	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B	KESEHATAN								
1	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. ((%))	Persentase	0	25	24	22	20	20	
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	Persentase	0	60	70	80	90	100	
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	Orang	61	40	30	20	10	5	
4	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	Orang	26	20	18	15	12	10	
5	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	Persentase	8.57	7.7	7	6.5	5	5	
6	Tingkat Prevalensi Stunting (SKI)	Persentase	34,39	33,18	32,97	32,26	31,55	30,84	
7	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	Persentase	0	60	70	80	90	100	
8	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	Persentase	0	60	70	80	90	100	
9	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	Persentase	58.4	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
10	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	Persentase	0	46	55	61	70	70	
11	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	Persentase	0	10	15	20	25	25	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	Persentase	83.1	100	100	100	100	100	
13	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	Persentase	20	25	30	35	40	40	
14	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. (Kasus)	Kasus	329	252	231	211	190	65	
15	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	Persentase	0	98.7	98.8	98.9	99	99	
16	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	Persentase	0	70	80	90	100	100	
17	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (Satuan Orang)	Orang	0	70	75	80	85	85	
18	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	Persentase	0	60	70	80	90	100	
19	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	Persentase	0	78	79	80	80	80	
20	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	Persentase	0	100	100	100	100	100	
21	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	Persentase	0	68	71	75	80	85	

BAB V
P E N U T U P

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Majene tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Majene serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi, kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan Substansial

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene telah dirancang secara sistematis untuk mewujudkan visi "Majene Maju, Mandiri, dan Berbudaya". Visi ini menjadi landasan strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kemandirian ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Melalui pendekatan yang inklusif dan terintegrasi, RPJMD ini menekankan pada pencapaian target pembangunan yang realistis dan terukur, dengan memprioritaskan sektor-sektor unggulan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pelestarian budaya. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi RPJMD, sehingga mampu menghadirkan kemajuan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Majene. Pencapaian visi "Majene Maju, Mandiri, dan Berbudaya" diwujudkan melalui upaya pembangunan yang berkeadilan, merata, dan berpijak pada identitas budaya lokal. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kearifan lokal, RPJMD ini diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus menjaga keharmonisan sosial dan lingkungan.

Capaian-capaian substansial yang dirumuskan dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan jangka panjang, menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan kaya akan nilai-nilai budaya yang menjadi kebanggaan masyarakatnya.

5.2. Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2030–2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Majene serta RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yang berlaku.

5.3. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) akan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Majene serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah
b. Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 menjadi Pedoman penyusunan RKPD setiap tahun sebagai landasan penyusunan KUA/PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD
c. Bupati Kabupaten Majene mempublikasikan RPJMD Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya visi dan misi pembangunan jangka menengah

d. Bupati Majene berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
e. Bupati melalui Bapeda mempunyai kewajiban untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 dengan memanfaatkan segala potensi, sumber daya daerah yang ada serta para pihak yang memiliki kapasitas untuk membantu tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
f. DPRD Kabupaten Majene bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Majene dalam pencapaian target kinerja Pembangunan Daerah.
g. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene dan pemangku kepentingan berkewajiban melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
h. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 hingga tahun 2029. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja perangkat Daerah;
i. Dokumen RPJMD Kabupaten Majene tahun 2025-2029 harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam KUA-PPAS dan RAPBD;
j. Penanggung jawab Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majene tahun 2025-2029 adalah Bupati/Wakil Bupati. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bapeda Kabupaten Majene berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah;

5.4. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi penting untuk menjamin keberhasilan pencapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah dan penganggaran dengan pelaksanaannya serta memastikan agar keberhasilan pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025 – 2029 adalah untuk memastikan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD. Proses ini mencakup pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta evaluasi hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan target pembangunan tercapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, dan penyimpangan untuk tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

Pengendalian dan evaluasi RPJMD terdiri dari beberapa tahap, antara lain :

a. Pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD dan memperhatikan RTRW kabupaten/ kota lainnya.
b. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat daerah untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana.
c. Evaluasi hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk menilai pencapaian target pembangunan.
d. Mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta penyimpangan yang terjadi.
e. Melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara periodik dengan frekuensi evaluasi satu kali per tahun pada awal tahun untuk memastikan ketersediaan data indikator yang diperlukan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja dan keuangan selama periode berjalan. Proses ini memastikan bahwa pelaksanaan RPJMD yang berlaku selama lima tahun tetap selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi penyimpangan, serta mendukung tindakan perbaikan yang tepat waktu. Secara keseluruhan, pengendalian dan evaluasi tahunan ini menjadi langkah krusial untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, serta memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya pembangunan Kabupaten Majene.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kabupaten Majene dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Majene.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Majene yaitu: **“Maju, Mandiri dan Berbudaya”** dapat terwujud.

Bupati Majene

Dr. H.A. ACHMAD SYUKRI, SE.,MM